KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN 2024

PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 1/G, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 117);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 1/D);
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D);
35. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 16/G);
36. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 62/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 27/G);

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 4/S-HP/XVIII.SBY/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Juli 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen penting dan startegis Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan pembangunan pada Tahun 2024. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD, guna menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2024.

Perubahan kebijakan anggaran perlu di antisipasi oleh pemerintah daerah. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2024 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2024. Sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran 2024. Demikian pula dengan kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk Tahun yang berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu perlu penyesuaian terhadap perubahan dalam pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya serta dana penyesuaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka pada triwulan II dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Madiun. Jika terdapat perubahan dalam asumsi makro, kebijakan pemerintah, potensi pendapatan dan belanja daerah, maka penting untuk disusun dokumen Perubahan RKPD. Perubahan dalam dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan, pergeseran (penambahan atau pengurangan) pagu indikatif pada masing-masing SKPD/urusan/prioritas beserta hal-hal yang mendasari perubahan tersebut. Tujuannya, agar tercipta kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

Perubahan terhadap RKPD perlu di lakukan sesuai dengan perubahan dinamika pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebjakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, yang meliputi : perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2024, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah dalam bentuk perubahan RKPD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan regulasi tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan tersebut diantaranya adalah:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perubahan RKPD akan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, dokumen tersebut akan akan disepakati bersama antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Madiun Tahun 2024 dilandasi oleh:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rancana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tenatng Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

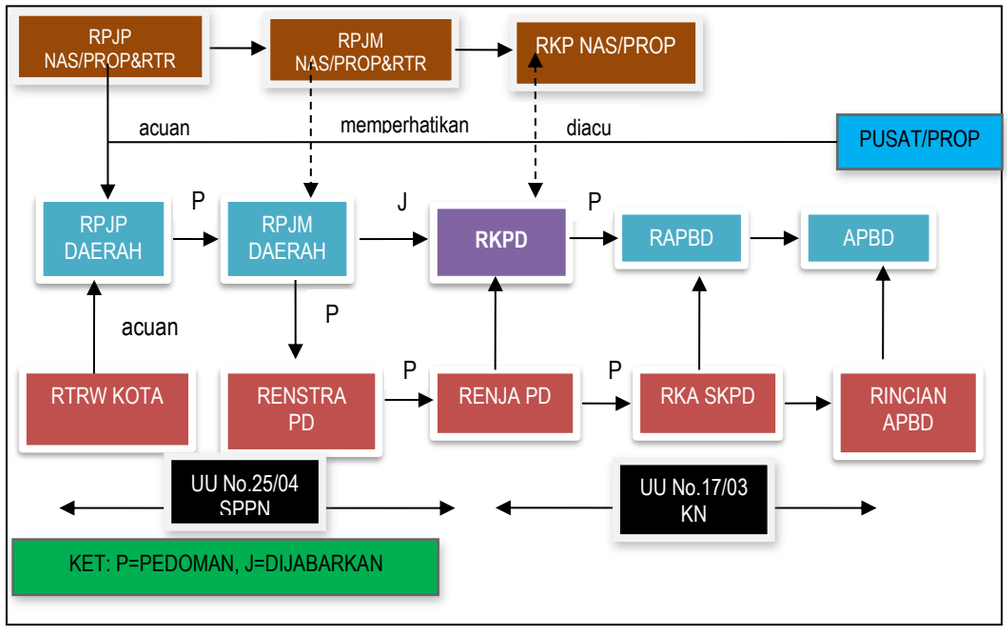
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian terintergrasi dalam sistem perencanaan pembangunan, Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain RPJPD, RPJMD, Renstra-PD, RKPD, dan Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kota Madiun yang terkait dengan dokumen ini antara lain:

1. RPJP Nasional dan Provinsi;
2. RPJM Nasional dan Provinsi; dan
3. RKP Nasional dan Provinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari RKPD Kota Madiun Tahun 2024 serta penjabaran dari arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Perubahan RKPD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Perubahan Renja perangkat daerah Tahun 2024 Kota Madiun. Keterkaitan antar dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, kondisi dan kapasitas fiskal, serta kebijakan pada Tahun berjalan. Disamping itu, perubahan RKPD juga dimaksudkan untuk mencapai efisensi alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selanjutnya, rincian tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Madiun dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD).
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi memuat/menjelaskan latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan perubahan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup perubahan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan daerah tersebut mencakup semua rencana Perubahan program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta efektivitas kinerja Pemerintah Daerah. Implementasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merujuk pada evaluasi dan pengukuran hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan APBD Kota Madiun Tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, sebagaimana capaian indikator kinerja tujuan berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	2022	2023		2024	2024 P
		Baseline	Target	Realisasi	Target	Target
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 69,26	(B) 69	(A-) 87,95	(BB) 70,01	(A-) 87,95
2	Livable City	90,33	88,60	91,93	89,01	91,93
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,01	82,15	83,71	82,35	83,71
4	Indeks Pembangunan Gender	94,57	94,49	95,18	94,51	95,18
5	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87*	6,42	6,87*	6,44	6,44
6	Indeks Ketentraman	81,25	77,15	82,88	77,20	82,88
7	Indeks Gini	0,398	0,36	0,416	0,35	0,39

Sumber: Perangkat Daerah dan BPS, 2023
*)angka sementara

Penjelasan terhadap tabel diatas adalah:

1. Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang relatif sangat tinggi dari Tahun 2022 sebesar B (69,26) menjadi A- (87,95) pada Tahun 2023. Peningkatan tersebut juga telah mencapai target yang ditetapkan dan mengindikasikan kualitas birokrasi pemerintahan Kota Madiun telah mengalami perbaikan yang pesat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Kota layak huni atau *livable city* merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun non-fisik. Kota layak huni Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 dan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun termasuk dalam daerah dengan kota yang relatif nyaman untuk beraktivitas.
3. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan dari Tahun 2022 (82,01) ke Tahun 2023 (83,71). Indeks tersebut juga telah melebih target (82,15) yang ditetapkan.
4. Seiring dengan peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami peningkatan meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil. IPG Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 94,57 meningkat menjadi 95,18 Tahun 2023. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,49.
5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun pada Tahun 2021 berada pada skor 6,87 dan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 6,38. Untuk Nilai IPEI Kota Madiun Tahun 2022 dan Tahun 2023 masih berada pada angka sementara sebesar 6,87 dikarenakan realisasi publikasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional belum rilis hingga saat ini.
6. Indeks ketentraman mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 indeks ketentraman sebesar 81,25 dan meningkat menjadi 82,88 pada Tahun 2023 dan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 77,15.
7. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan menurun dari 4,76 persen pada Tahun 2022 menjadi 4,74 persen pada Tahun 2023. Pencapaian tersebut salah satunya disebabkan oleh menurunnya tingkat pengangguran, disisi lain Tingkat Ketimpangan pendapatan/ Indeks Gini naik dari 0,398 pada Tahun 2022 menjadi 0,416 pada Tahun 2023 hal ini disebabkan penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi standar pengupahan yang mereka peroleh, pengangguran turun yang berdampak kemiskinan turun akan tetapi pendapatan mereka di bawah standar yang ditetapkan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. 2 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	82,01	83,71
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,52	5,80
3	Inflasi	Persen	5,80	2,35
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,39	5,85
5	Angka Kemiskinan	Persen	4,76	4,74

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. IPM Tahun 2023 tercatat sebesar 83,71 atau tumbuh 0,70 persen dibanding tahun sebelumnya pada Tahun 2022. intensitas Pandemi Covid-19 yang berangsur menurun serta kegiatan perekonomian masyarakat yang meningkat berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

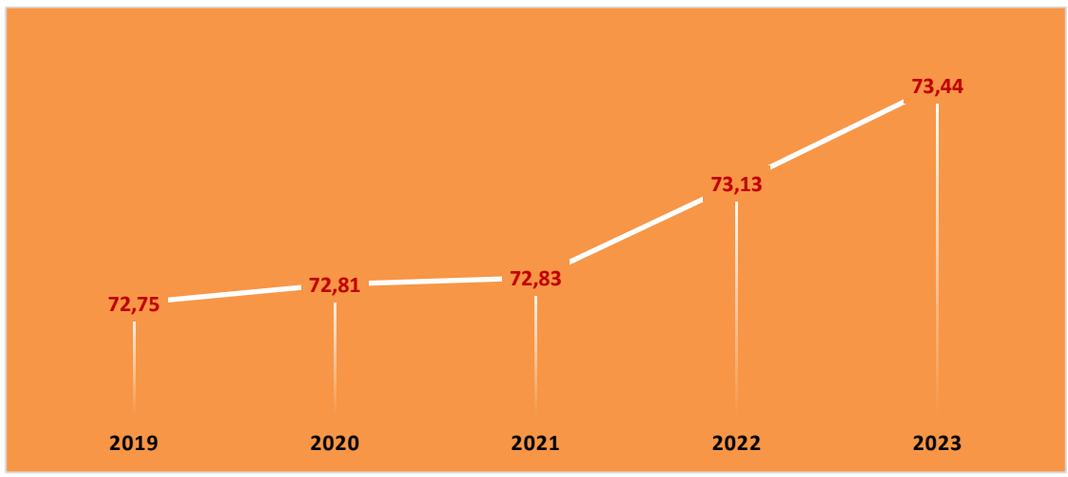
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 3 IPM Kota Madiun Menurut Komponen

Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503
2023	73,44	14,44	11,82	17.115

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Selama periode Tahun 2019 hingga 2023, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 Tahun (2019) menjadi 73,44 Tahun (2023) atau naik sebesar 0,69 Tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

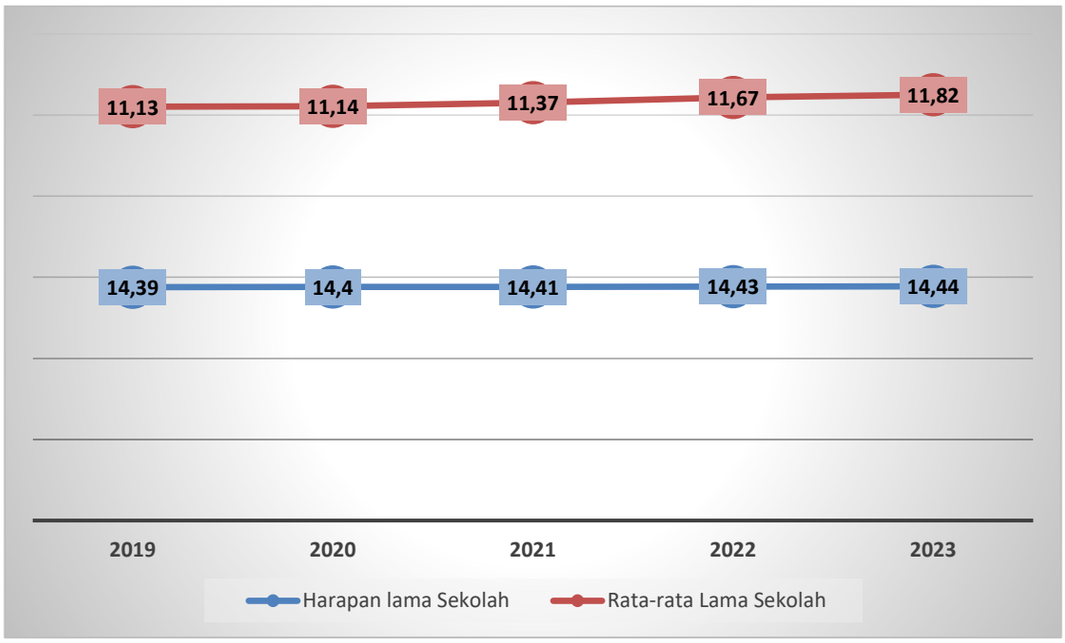


Gambar 2. 2 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2023, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 Tahun (2019) menjadi 14,44 Tahun (2023) atau naik sebesar 0,05 Tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di Tahun 2023, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,44 Tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,13 Tahun (2019) menjadi 11,82 Tahun (2023) atau naik 0,69 Tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.



Gambar 2. 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada Tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 17,115 juta per Tahun, naik 3,71 persen dibanding Tahun 2022 lalu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 4 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Madiun

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada Tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu Tahun tertentu sebagai Tahun dasar yakni Tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2023	17.256,22	11.764,40
2022	15.818,61	11.119,55
2021	14.435,43	10.537,70
2020	13.519,88	10.055,91
2019	14.107,34	10.623,07

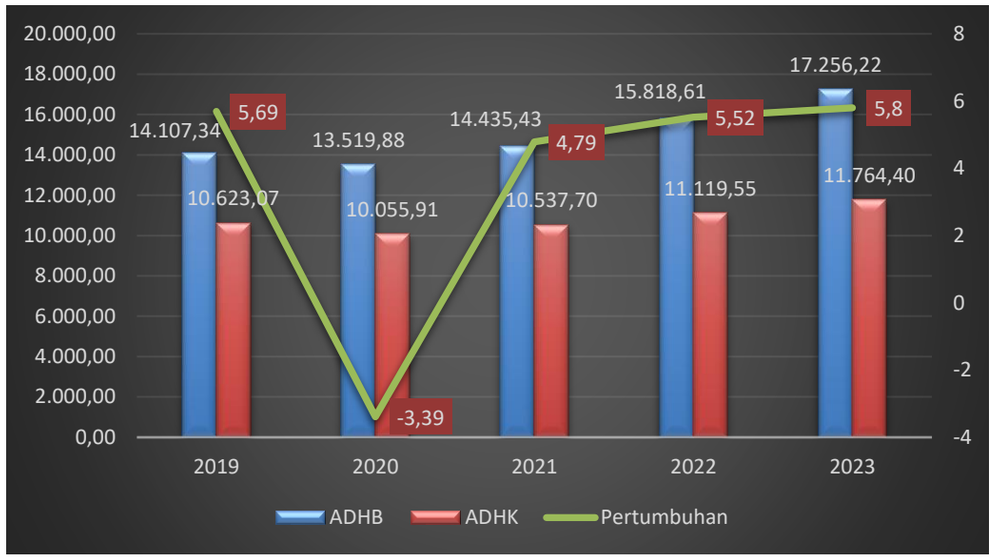
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

PDRB Kota Madiun selama periode Tahun 2020-2023 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada Tahun 2019 mencapai Rp 14,107 triliun. Namun, pada Tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,519 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 14,435 triliun, Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 15,818 triliun, dan Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 17,256 triliun.

Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada Tahun 2019 dari Rp. 10,623 triliun mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,055 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada periode Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 10,537 triliun, Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 11,119, dan Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 11,764 triliun. Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode Tahun 2020-2023 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata- rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 9,21%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada Tahun 2023 yang mencapai 5,80%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar -3,39%.

Pada Gambar di bawah, terlihat dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid–19 serta menurunnya daya beli masyarakat. Pada periode Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mulai membaik dan kembali positif naik dari sebesar 4,79, 5,52 menjadi sebesar 5,80.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 5 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%)

Kategori		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53
C	Industri Pengolahan	4,64	-23,84	7,10	2,17	7,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,50	4,21
F	Konstruksi	4,90	-4,71	-0,90	8,24	4,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,20	-11,18	10,16	7,98	5,60
H	Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,90	11,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93
J	Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2,82
L	Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4,35
M,N	Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,51
P	Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3,20
R,S,T, U	Jasa lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu Tahun 2019-2023 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2022 adalah Kabupaten Pacitan sebesar 5,54. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Madiun	5,69	-3,39	4,79	5,52	5,80
Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12
Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89	4,47
Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49
Pacitan	5,08	-1,84	2,49	5,54	4,46
Ponorogo	5,01	-0,90	3,19	3,24	5,14

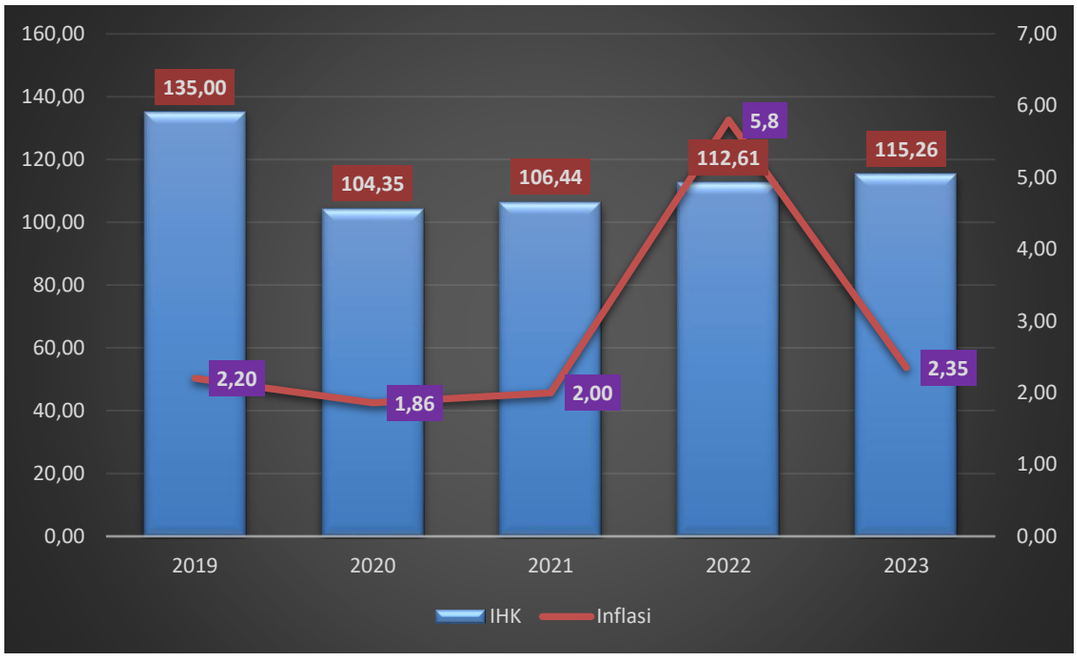
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat inflasi Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 2,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,26. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 5,80 persen dengan IHK 115,61 dan inflasi terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 1,86 persen dengan IHK 104,35.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 6 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan dan penurunan harga dibandingkan pada Desember Tahun lalu pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; kelompok perawatan pribadi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Ketenagakerjaaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 Tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebanyak 141.874 orang, naik sebanyak 16.605 orang dibanding Tahun 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 111.852 orang atau 15,53 persen, sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Tahun 2023 terdiri dari 105.313 orang penduduk yang bekerja dan 6.539 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebanyak 15.037 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatana sebanyak 14.686 orang dan pengangguran sedikit meningkat sebanyak 351 orang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

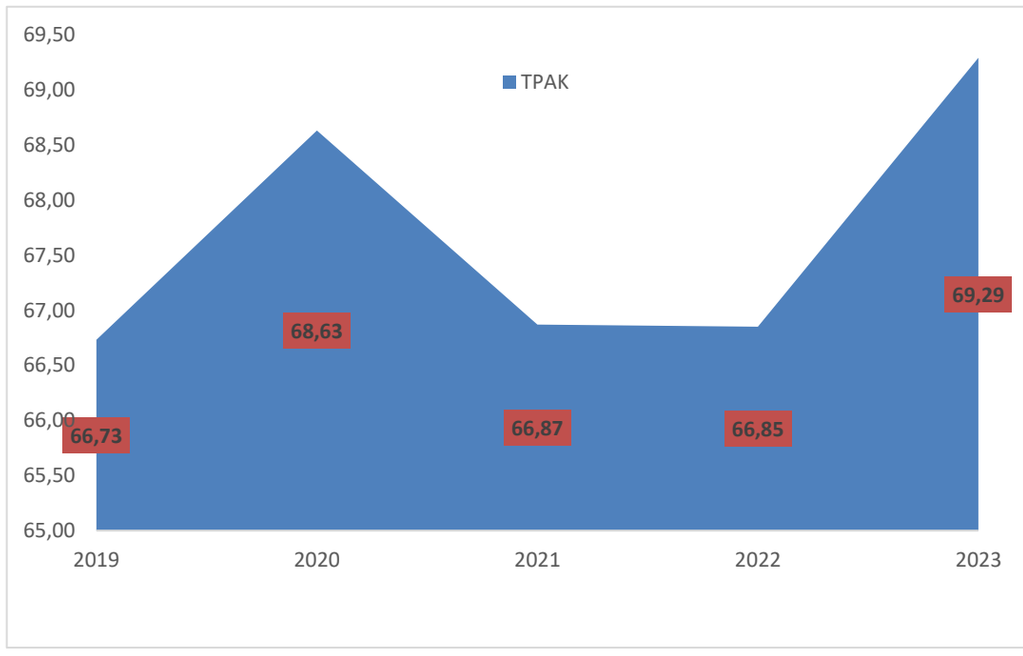
Tabel 2. 7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Tahun 2021-2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	2021	2022	2023	Perubahan Tahun (2022-2023)	
	Orang	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja	144.219	144.820	161.428	16.605	11,47
Angkatan Kerja	96.439	96.815	111.852	15.037	15,53
-Bekerja	88.580	90.627	105.313	14.686	16,20
-Pengangguran	7.859	6.188	6.539	351	5,67
Bukan Angkatan Kerja	47.780	48.005	49.576	1.571	3,27
	Persen	Persen	Persen	Persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,15	6,39	5,85	-0,54	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,87	66,85	69,29	2,44	

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Tahun 2023 sebesar 69,29 persen, naik 2,44 poin dibanding Tahun 2022. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 78,69 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 60,42 persen. Apabila dibandingkan Tahun 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,75 poin sedangkan TPAK perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 1,86 poin.



Gambar 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Tahun 2023 sebesar 5,85 persen mengalami penurunan sebesar 0,54 poin dibandingkan Tahun 2022.

Tabel 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021-2023

KEGIATAN	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	96.439	96.815	111.852
- Bekerja	88.580	90.627	105.313
- Pengangguran	7.859	6.188	6.539
Bukan Angkatan Kerja	47.780	48.005	49.576
Penduduk Usia Kerja	144.219	144.820	161.428
Tingkat Pengangguran Terbuka (Laki-laki)	9,82	9,85	6,07
Tingkat Pengangguran Terbuka (Perempuan)	6,22	2,30	5,57
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,15	6,39	5,85

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

TPT laki-laki sebesar 6,07 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,57 persen pada Tahun 2023. Dibandingkan Tahun 2022, TPT laki-laki turun 3,78 poin dan TPT perempuan naik 3,27 poin mendekati TPT laki-laki, hal ini mengindikasikan pengarusutamaan gender di Kota Madiun berjalan dengan baik.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret Tahun 2023 sebesar 4,74 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan pada periode Tahun 2022, maka terjadi penurunan sebesar 0,02 persen atau sekitar Rp 53.511,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2022 berada pada level Rp 551.620,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2023 mencapai Rp 605.131,00 perkapita perbulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

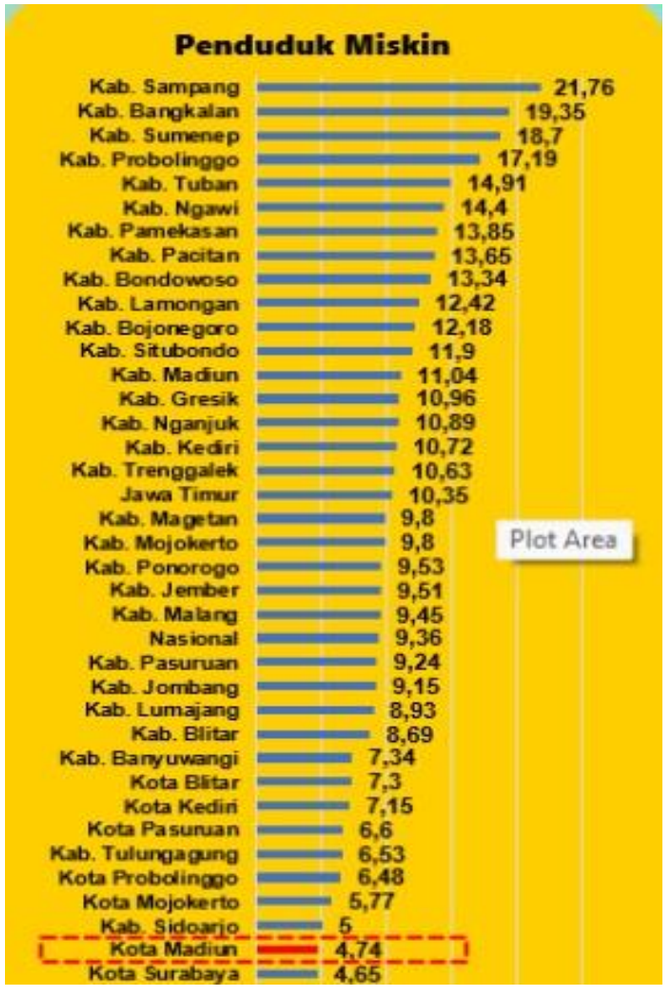
Tabel 2. 9 Profil Kemiskinan Tahun 2019-2023 Kota Madiun

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2019	478.304,00	7.690	4,35
2020	497.628,00	8.830	4,98
2021	514.409,00	9.060	5,09
2022	551.620,00	8.490	4,76
2023	605.131,00	8.460	4,74

Sumber : BPS Kota Madiun, data diolah, 2023

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kota Madiun yang mengalami penurunan.

Gambar 2. 8 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Prov Jatim, data diolah, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.2 Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2022

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan, Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Wali Kota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 2. 10 Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Madiun Tahun 2023

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi Awal 2022	Tahun 2023		% Capaian
						Target	Realisasi	
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)								
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	IT1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	(B) 69,26	(B) 69	(A) 87,95	127,46%
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (77,15)	BB (79)	A (80,08)	101,37%
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2,98 (sedang)	Tinggi	2,98 (sedang)	87,39%
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,86	2,87 (baik)	4,45 (Memuaskan)	155,05%
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,964 (baik)	85 (baik)	88,024 (baik)	103,56%
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,96	58,4	52,62	90,10%
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan								
T.2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	IT2.1	Indeks Kenyamanan Kota (*livable city*)	Indeks	90,33	88,60	91,93	103,76%
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	98,27	98,42	98,44	100,02%
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,13	57,85	60,24	104,13%
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun								
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	IT.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,01	82,15	83,71	101,90%
		IT.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,57	94,44	95,18	100,78%*
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,43	14,42	14,44	100,14%
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,67	11,16	11,82	105,92%
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,13	72,83	73,44	100,84%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Satuan	Kondisi Awal 2022	Tahun 2023		% Capaian
						Target	Realisasi	
S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	78,03	77,20	78,94	102,25%
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun								
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	IT4.1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87*	6,42	6,87**	107,01%*
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,39	6,15	5,85	105,13%
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	7,98	2,91	5,60	78,54%**
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	21,57	0,84	24,70	190,54%**
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	IT5.1	Indeks Ketentraman	Indeks	81,25	77,15	82,88	107,43%
		IT5.2	Indek Gini	Indeks	0,398	0,36	0,416	86,54%
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	4,76	4,65	4,74	106,11%
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 75,68 (Harmonis)	B skor 74,46 (Harmonis)	B skor 77,80 (Harmonis)	104,49%
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	82,18	76,27	83,31	109,23%

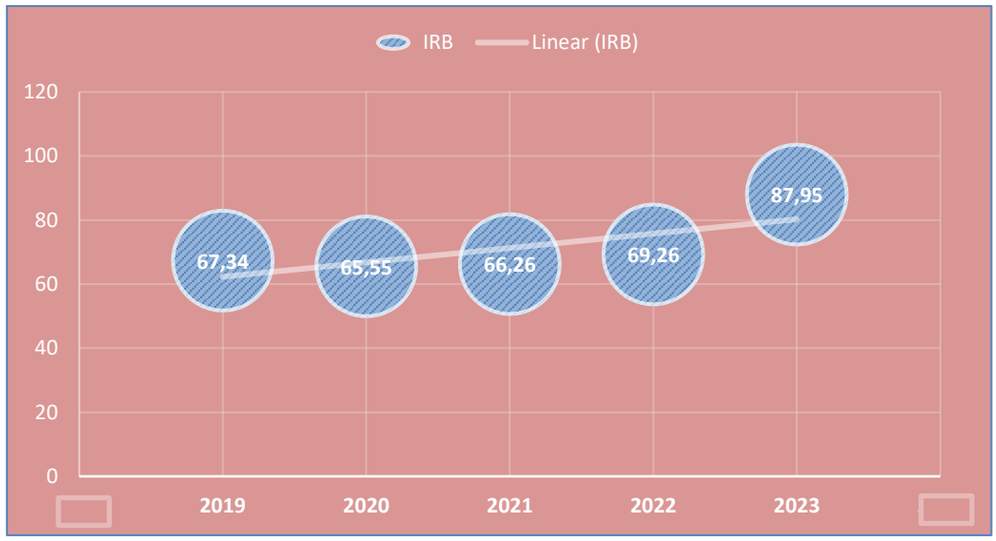
Sumber: Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah, 2024
Keterangan : IT : Indikator Tujuan IS : Indikator Sasaran

Tujuan 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*
IT 1.1 Indeks RB Kota Madiun

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari perdoman tersebut dari pedoman evaluasi Tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberika pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 9 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber : Inspektorat Kota Madiun, Kementerian PANRB, 2023

Berdasarkan Gambar diatas Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan, sedangkan di Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam komposisi penilaiannya, jika dulu hanya terdiri dari 2 komposisi yaitu Faktor Pengungkit (60%) dan Hasil (40%), tapi di Tahun 2020 terdapat perubahan di komposisi Faktor Pengungkit sebagai berikut:

- *Mandatory* (20%): poin-poin penilaian dalam *mandatory* adalah poin-poin penilaian dalam faktor pengungkit yang lama, bedanya jika dulu bobotnya 60% sekarang berubah menjadi 20%.
- Kewajiban K/L (10%): adalah penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang hasilnya antara lain Penilaian Arsip (oleh lembaga kearsipan), indeks kinerja penyerapan anggaran (oleh Kemenkeu), Indeks Pengelolaan Aset (oleh Kemenkeu), Indeks APIP (oleh BPKP), Indeks SPIP (oleh BPKP), dsb.
- *Reform* (30%): hasil perubahan yang sudah dicapai oleh perangkat daerah.

Sedangkan untuk Tahun 2023, terdapat perubahan kembali dalam metode dan komposisi pengukuran yang terbagi menjadi 2 (dua) penilaian yaitu RB General dan RB Tematik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 87,95 kategori “A-” dengan capaian kinerja sebesar 127,46%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No		Komponen Penilaian	Bobot	2023
A.	RB General			
	I. Strategi Pelaksanaan RB General		10	7,05
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,33
	2	Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	4,72
	II. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		40	25,88
	1	Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	2
	2	Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi	2	0,8
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2,6
	4	Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,5
	5	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	3,2
	6	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	0,5
	7	Digitalisasi Arsip	2,5	1,81
	8	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan	2,5	2,5
	9	Kualitas Kebijakan	2,5	1,25
	10	Reformasi Hukum	2,5	1,91
	11	Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	1,44
	12	Tata Kelola Pengadaan	2,5	1,84
	13	Sistem Merit	4	2,8
	14	Pelayanan Publik	1,5	1,33
	15	Kepatuhan Standart Pelayanan Publik	1,5	1,4
	III. Capaian Sasaran Strategis		50	41,41
	1	Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik (SPBE)	9	8,01
	2	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	2
	3	Capaian Indikator Kinerja Utama Non Makro	8	4,9
	4	Opini BPK	5	5
	5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	3,74
	6	Indeks Berakhlak	4	2,52
	7	Survei Penilaian Integritas	10	8,19
	8	Survei Kepuasan Masyarakat	8	7,05
	IV. Koefisien		10	0
	1	Koefisien	10	0
Total Komponen RB General				
B.	RB Tematik			
	I. Strategi Pelaksanaan RB Tematik		5	3,04
	1	Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan	0,4	0,32
	2	Rencana Aksi Realisasi Investasi	0,4	0,2
	3	Rencana Aksi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	0,4	0,23
	4	Rencana Aksi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,4	0,4
	5	Rencana Aksi Pengendalian Inflasi	0,4	0,17
	6	Capaian Output Pengentasan Kemiskinan	0,6	0,48
	7	Capaian Output Realisasi Investasi	0,6	0,3
	8	Capaian Output Digitalisasi Adminstrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	0,6	0,25
	9	Capaian Output Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,6	0,52
	10	Capaian Output Pengendalian Inflasi	0,6	0,17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Komponen Penilaian		Bobot	2023
	II. Capaian Indikator Dampak RB Tematik		15	10,57
	1	Capaian Dampak Pengentasan Kemiskinan	3	1,53
	2	Capaian Dampak Realisasi Investasi	3	1,53
	3	Capaian Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	3	2,56
	4	Capaian Dampak Penggunaan Produk Dalam Negeri	3	2,96
	5	Capaian Dampak Pengendalian Inflasi	3	1,99
Total Komponen RB Tematik			20	13,61
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)			130	87,95

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah;
2. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah;
3. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan;
4. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
5. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum dilaksanakan dengan optimal;
2. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan *role model (agent of change)* di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan;
3. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun masih rendah;
4. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
5. Sistem pola karir *(career path)* pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja;
6. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

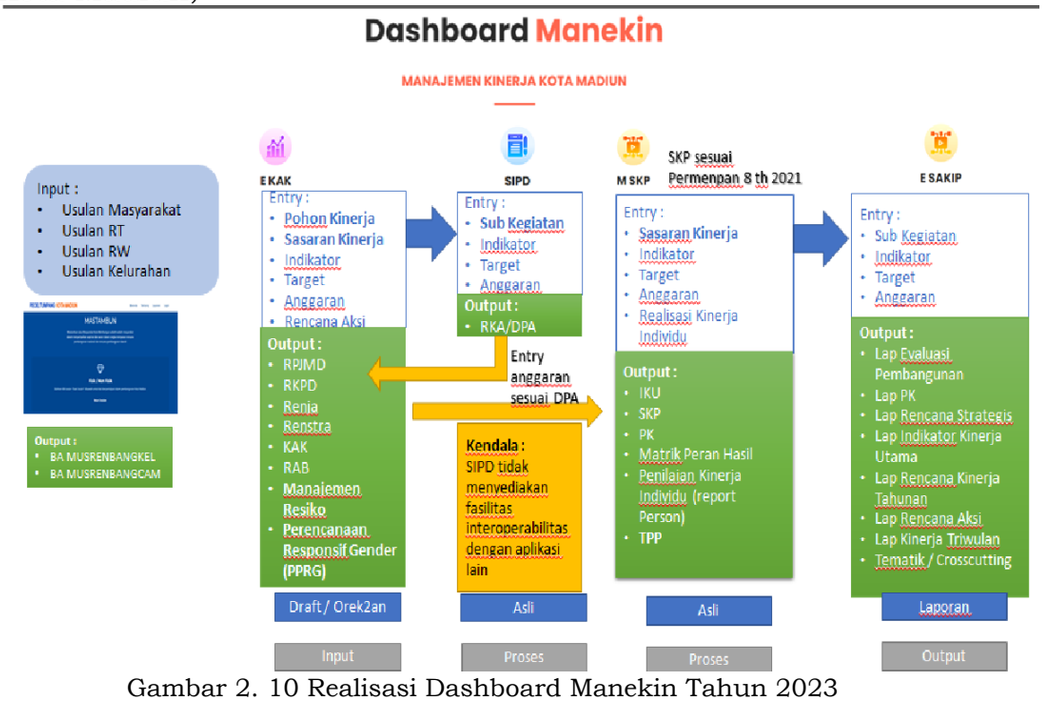
7. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan *(Service Level Agreement)* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas agen perubahan di Tahun 2022;
2. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah;
3. Melakukan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2021;
4. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sistem merit diantaranya assessment pegawai, penyusunan *Human Capital* Develomment Plan (HCDP) dan pememtaan talenta pegawai;
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat;
6. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
7. Pelaksnaan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Puskesmas Demangan dan Puskesmas Sukosari di Tahun 2022;
8. Melaksanakan *survey* Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara Mandiri dalam rangka pembangunan zona integritas pada unit pelayanan publik;
9. Melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap Tahun sekali yang hasilnya digunakan sebagai perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Menindaklanjuti Lapran Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebagai bentuk penguatan manajemen kinerja sektor publik;
11. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi. Untuk Tahun 2022 ini telah direalisasikan Dashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp dan e-sakip. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;



Gambar 2. 10 Realisasi Dashboard Manekin Tahun 2023

Sumber : Aplikasi Manajemen Kinerja, 2023

12. Melakukan Refreshment dan Pelatihan *Awareness* SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management *Quality System-Requirement* dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
13. Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
14. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IS 1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %; dan
4. Evaluasi Internal dengan bobot 25%.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor: 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 bahwa guna mengintregasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu Tahun anggaran terdapat beberapa penyesuaian target indikator salah satunya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun dimana dalam RPJMD target terlalu besar di angka 79 berubah di angka 71,25 karena melihat perkembangan capaian Tahun 2021 yang hanya mencapai target 97,22% dalam penyusunan RKPD Murni Tahun 2023, akan tetapi pada RKPD perubahan Tahun 2023 target Kembali di angka 79. Hal ini dilakukan dengan dasar berdasarkan kenaikan capaian atas nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2022 sebesar 6,18.

Selain itu telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya, Evaluasi Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

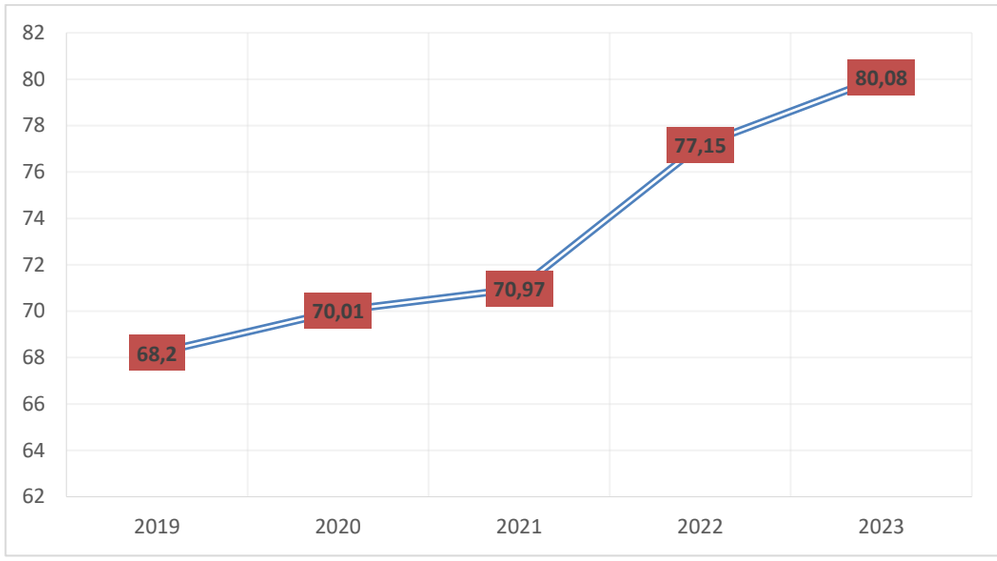
Tabel 2. 12 Hasil Penilaian Pemerintah Kota Madiun

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,67
2	Pengukuran Kinerja	30	23,89
3	Pelaporan Kinerja	15	12,44
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,08
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,08
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : Kemenpan RB, 2023

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/397/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 80,08 dengan Predikat A tercapai 101,37% dari target RPJMD sebesar 79. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari Tahun ke Tahun. ”Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun” selama kurun waktu 5 (lima) Tahun berturut-turut sejak Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Namun hasil evaluasi Tahun 2022 dan 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi Tahun – Tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 11 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2019-2023
Sumber : Kemenpan RB, 2023

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Memastikan kembali penetapan target kinerja pada setiap level kinerja yang dapat menggambarkan pencapian kinerja yang realistis;
2. Melakukan reviu atas pohon kinerja pada aplikasi E-KAK khususnya dalam perjanjian kinerja pada level taktikal dan operasional sehingga pencapaian kinerja strategis yang dipengaruhi dapat terkawal;
3. Memastikan pengidentifikasian *crosscutting* pada pohon kinerja pemerintah daerah untuk dapat membangun keterkaitan pada pola hubungan kinerja antar perangkat daerah sehingga sehingga gambaran sharing outcome yang ingin diwujudkan dapat logis;
4. Mengoptimalkan kembali pemanfaatan aplikasi *e-sakip.Madiunkota.go.id* sebagai sarana monitoring dan evaluasi yang efektif dengan cara memastikan keterisian realisasi pada pencapaian kinerja triwulanan yang ditetapkan pada rencana aksi dan rencana kerja setiap perangkat daerah, sehingga hasil monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan startegi dan aktivitas yang mempengaruhi capaian kinerja;
5. Melakukan reviu pada penetapan kinerja program dan kegiatan agar lebih berfokus menjaga pencapaian kinerja strategis sehingga pencapaian kinerja strategis lebih efektif dan efisien;
6. Memastikan kembali matriks peran hasil yang disusun merumuskan kinerja individu (SKP) benar-benar terkait dengan tugas dan fungsi yang dimiliki sekaligus menunjang kinerja organisasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kinerja dengan mengungkapkan analisis seluruh pencapaian realisasi kinerja yang diperkanjikan, khususnya dalam penyajian analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja setiap pencapaian kinerja dan juga analisis upaya perbaikan kedepan pada setiap pencapaian kinerja;
8. Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam penentuan stratgi serta aktivitas yang menunjang pencapaian kinerja kedepannya sekaligus dalam penetapan perbaikan target kinerja agar target kinerja tahunan berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya;
9. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar berisi temuan dan rekomendasi yang konkrit sesuai dengan permasalah utama yang dialami setiap perangkat daerah sehingga perbaikan implementasi SAKIP menjadi optimal;
10. Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas yang diberikan kepada perangkat daerah guna memastikan optimalisasi tindak lanjut yang dilakukan;
11. Terkait tema yang diangkat yaitu kemiskinan, diharapkan pemerintah kota Madiun terus melakukan penyempurnaan pohon kinerja kemiskinan dengan memperhatikan faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah kota Madiun, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja utama apa saja yang menjadi fokue utama dalam pengentasan kemiskinan;
12. Mendorong keterlibatan stakeholder diseluruh wilayah kota Madiun, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal, berdasarkan informasi *crosscutting* dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;
13. Mendorong pimpinan daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan, serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IS 1.2 Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Nilai EKPPD Tahun 2023 belum terdapat pengumuman hasil LPPD, hasil LPPD diumumkan terakhir kali pada Tahun 2022 dengan evaluasi Laporan kinerja pada Tahun 2021, maka pada Tahun 2022 dan 2023 data yang disajikan masih menggunakan data yang disajikan pada Tahun 2021 yaitu memperoleh Status Kinerja Sedang dengan Skor 2,9800. Sebelumnya, hasil laporan kinerja yang sudah keluar yakni pada Tahun 2018 dengan evaluasi laporan kinerja pada Tahun 2017 dan mendapatkan status kinerja Sangat Tinggi dengan Skor 3,3056 hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018, perubahan status dari Sangat Tinggi pada Tahun 2018 ke Sedang pada Tahun 2022 disebabkan perubahan metode penilaian dan rentang skor yang terbaru skor nilai 3,3056 mendapatkan kualifikasi kinerja Sedang yaitu di antara 2,610-3,400 dan untuk nilai tinggi berada diantara skor nilai 3,400-4,200 dan sekor sangat tinggi berada pada skor dengan nilai diatas 4,200. Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

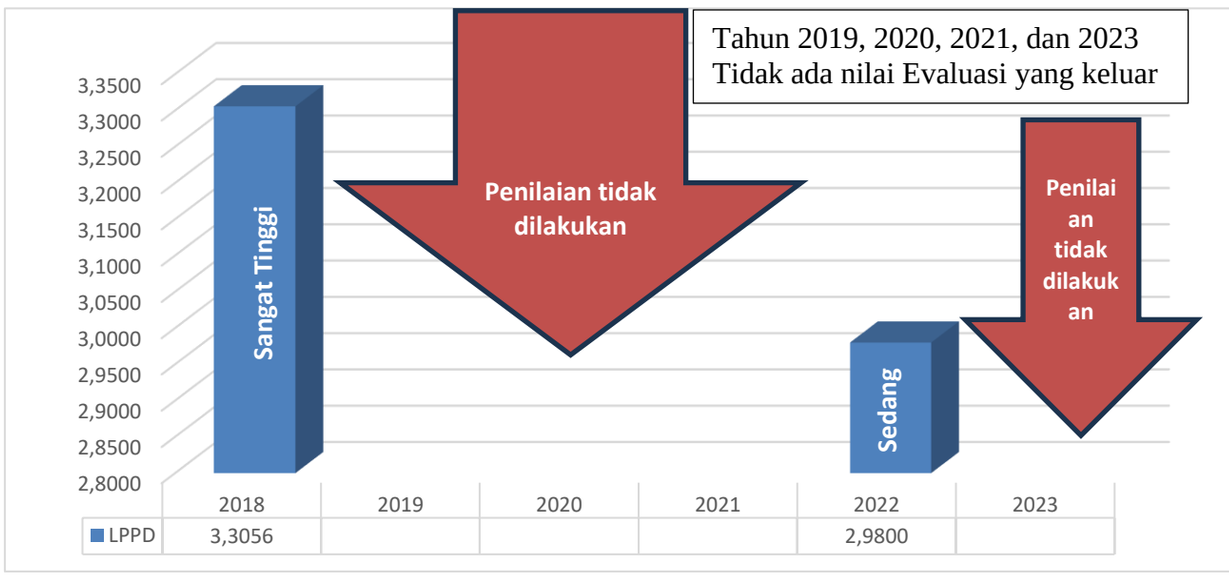
Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator, sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	BOBOT INDIKATOR
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 105 IKK *outcome*, 488 IKK *output* dan 18 IKK Fungsi Penunjang.

Gambar 2. 12 Penetapan Pringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun

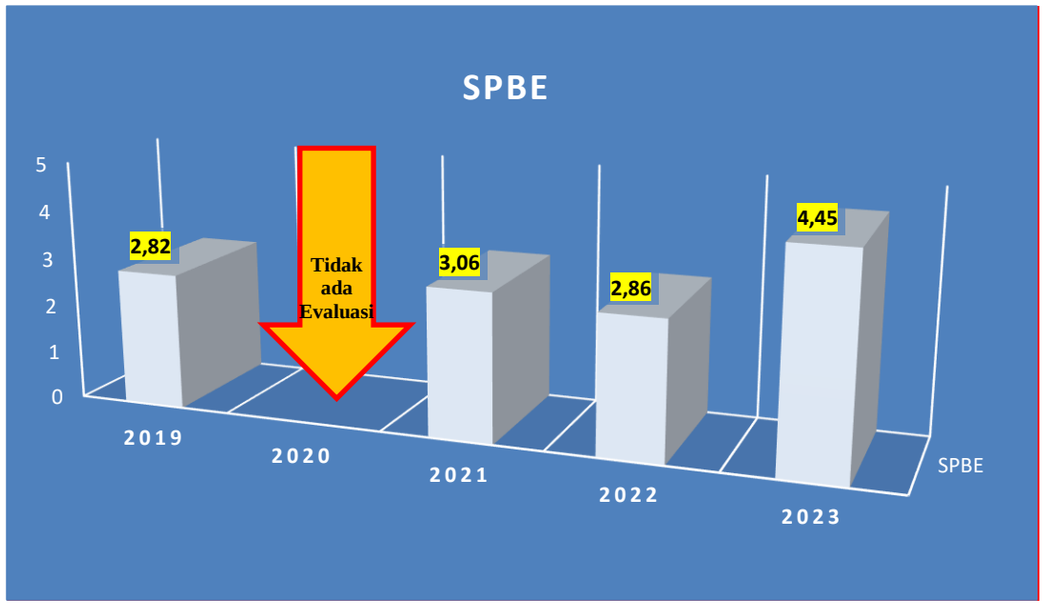


Sumber : Kemendagri, 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IS 1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.



Gambar 2. 13 Indeks SPBE Kota Madiun

Sumber : Kemenkominfo, 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 4,45 dengan predikat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUASKAN. Nilai ini naik signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang memperoleh nilai 2,86 dengan predikat BAIK. Sedangkan di Tahun 2019 memperoleh nilai 2,82 (baik) dan Tahun 2021 memperoleh nilai 3,06 (Baik). Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk Tahun 2020 ini Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;
2. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat, yang mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
3. Tersedianya anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas insfrastruktur jaringan internet Pemerintah Kota Madiun;
4. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun;
5. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi;
6. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya; dan
7. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai.

Faktor Penghambat :

1. Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal;
2. Belum otimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh);
3. Kompetensi SDM TIK belum mencukupi sesuai kebutuhan; dan
4. Dengan adanya pemerataan akses jaringan internet di wilayah Kota Madiun diperlukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan jaringan internet yang lebih optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur;
2. Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur TIK;
4. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE.

Ketersediaan akses internet yang merata tentunya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Dalam rangka pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun melakukan pemerataan penyediaan akses internet antara lain:

1. Menyediakan akses internet gratis pada Seluruh kantor pelayanan pemerintah Daerah Kota Madiun dan seluruh sekolah Negeri (SD-SMP) diwilayah Kota Madiun; dan
2. Menyediakan akses internet gratis bagi masyarakat, yang ditempatkan pada Poskamling, Ruang terbuka hijau, lapak UMKM, dan fasilitas umum (fasum) di lingkungan RT lainnya.

Rekomendasi yang diberikan dalam penilaian evaluasi SPBE untuk Tahun 2023 adalah :

1. Segera melakukan reviu dan evaluasi terhadap indikator perencaan strategis SPBE untuk melaksanakan tindaklanjut hasil reviu;
2. Tetap menjalankan tugas sesuai Peta Rencana;
3. Segera menindaklanjuti hasil reviu yang telah dilakukan dan melaksanakan kegiatan sesuai yang tertuang dalam peta rencana;
4. Meningkatkan kerjasama dengan BRIN dan menggunakan tenaga ahli/auditor dari BRIN sebagai auditor eksternal LAN untuk audit Infrastruktur dan audit aplikasi;
5. Segera melakukan reviu terhadap aplikasi dengan sekaligus menidaklanjuti hasil reviu; dan
6. Menjalankan optimalisasi hasil reviu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

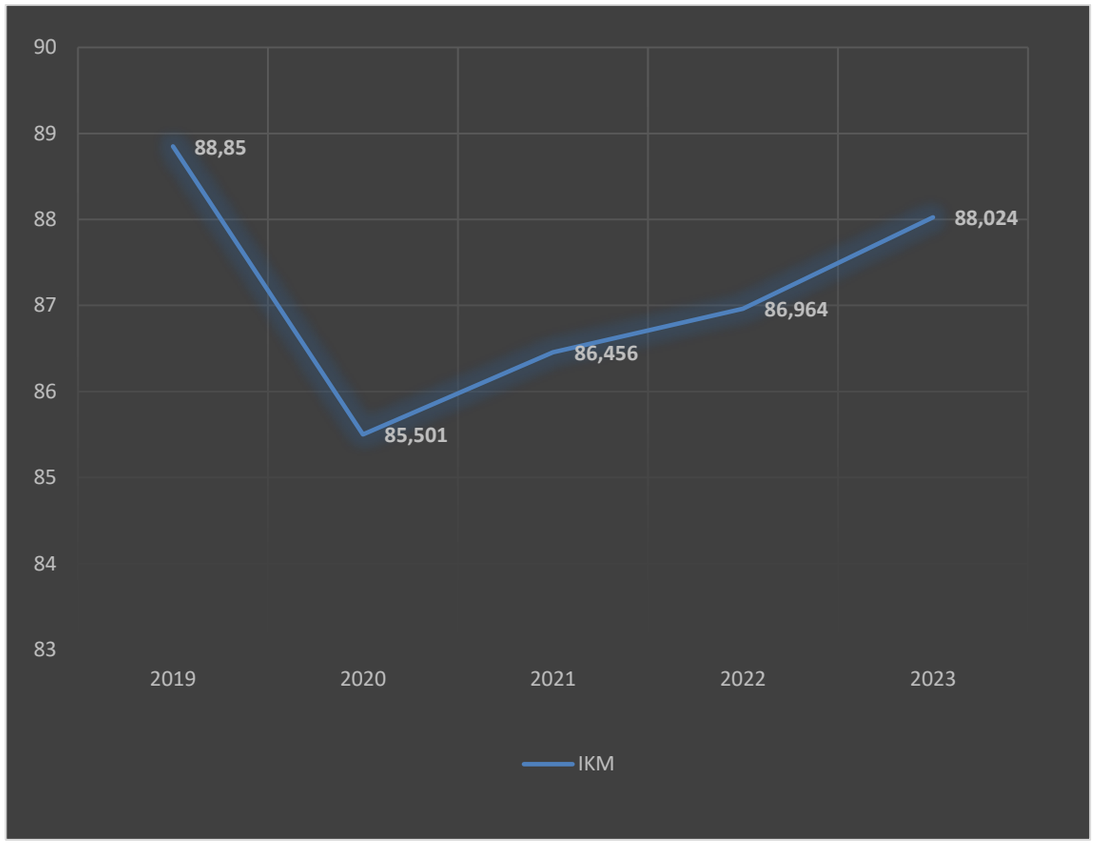
IS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing- masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada Tahun 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 85 disesuikan menjadi 86,964. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi capaian kinerja Tahun 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 14 Indeks Kepuasan Masyarakat
Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kota Madiun, 2023

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2019 ke Tahun 2020 terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan sistem pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara *online*. Sedangkan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan mendekati realisasi pada Tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi, hal ini dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal.

Namun Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi dan monitoring terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional;
4. Pemberian pengharagaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi;
5. Melaksanakan pendampingan dan penyegaran ISO bagi *Auditee* dan Auditor dengan menjalin kerjasama dengan BSN (Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional Nomor 80/6/401.011/2019 / 02/BSN/MoU/IV/2019 tentang Pembinaaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian);
6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat;
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat;
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (Tahun 2021 dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

IS 2.2 Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah. *Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari:

Tabel 2. 14 Indeks Inovasi Daerah

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0.01 – 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bapelitbangda khususnya Sub Koordinator Inovasi dan Bangda Bidang Litbang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah/ IID yang dilakukan melalui input data inovasi pada SIM IGA Kemendagri. Dalam RPJMD-P 2019-2024 IID Tahun 2023 ditargetkan dengan skor nilai 1.925, namun dengan adanya perubahan perhitungan indeks sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, maka target tersebut dikonversikan menjadi 58,4 dengan tingkat capian realisasi pada Tahun 2023 sebesar 90,10% .

Berdasarkan Pedoman Umum pelaksanaan IGA 2023 Kemendagri, IID dinilai berdasarkan laporan inovasi yang di-input dan dilengkapi data dukung pada SIM IGA Kemendagri. Adapun penilaian IID 2023 dihitung dengan melalui tahapan penilaian dengan rumus :

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \textbf{Skor Indikator Satuan Pemda ke} - \textbf{i}$$

Skor Jumlah Inovasi = Jumlah Inovasi x 0,38

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^{n} (\sum_{i=16}^{35} \textbf{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \textbf{Inovasi ke } j}{\boldsymbol{n}} + \textbf{Skor Jumlah Inovasi}$$

Skor Total = SPD + SID

Keterangan :

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah Nomor Indikator

j adalah Nomor Inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintah Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot sebesar 0,38. Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut;
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

Setelah didapatkan nilai Skor Total selanjutnya perhitungan Indeks Inovasi Daerah dirumuskan dengan :

$$\textbf{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\textbf{Skor Total}}{\textbf{Skor Total Maksimum}} \; \boldsymbol{x}\; \mathbf{100}$$

Keterangan :

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d 100.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan proporsi aspek sebagai berikut :

Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:

1. 3 Variabel;
2. 15 Indikator; dan
3. Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20% dari 250).

Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:

1. 5 Variabel;
2. 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maksimal senilai 76 atau 30,40%); dan
3. Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80% dari 250).

Tahun 2023, dalam pelaksanaan IGA 2023, Bidang Litbang Kota Madiun selaku koordinator IGA 2023 di Kota Madiun melakukan beberapa hal seperti berikut:

a. Inventarisasi dan Sosialisasi IGA 2023, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 sampai dengan 20 Juni 2023 dengan menghadirkan seluruh Perangkat Daerah beserta RSUD Kota Madiun, UPTD Puskesmas dan Sekolah SD serta SMP Negeri di Kota Madiun;
b. Review dan Pendampingan IGA 2023, dilaksanakan pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 dengan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)/ Balitbang Kemendagri;
c. Finalisasi Pendataan IGA 2023, dilaksanakan pada hari Senin dan Rabu tanggal 24 dan 26 Juli 2023 dengan peserta Perangkat Daerah yang telah mengisi SIM IGA 2023;
d. Input data dan pelaporan inovasi.

Pada SIM IGA Kemendagri dilakukan input data baik data profil Satuan Pemerintah Daerah (SPD) maupun Satuan Inovasi Daerah (SID) dengan hasil sebagaimana berikut :

Tabel 2. 15 Rekap Hasil Laporan IGA 2023

Uraian	Jumlah
jumlah inovasi yang dilaporkan	135
jumlah video	65
rata2 kematangan	107,09
perangkat daerah yang melaporkan	23
Bentuk Inovasi	
- tata kelola pemerintahan	6
- layanan publik	124
- inovasi lainnya	4
Tahap Inovasi	
- Inisiatif	2
- Uji Coba	11
- Penerapan	122

Sumber : https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Data diolah berdasarkan data yang termuat dalam *https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/* capaian IGA 2023 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun sebelumnya. Data tersaji sebagaimana berikut :

Tabel 2. 16 Capaian IGA Kota Madiun Tahun 2020-2023

PELAPORAN INOVASI	2020	2021	2022	2023
Inovasi Yang Dilaporkan	30	24	38	135
Jumlah Video	21	24	52	65
Rata-Rata Kematangan	63	112	106,39	107,09
Perangkat Daerah Yang Melaporkan	13	12	17	23
Total Inovasi	43	48	51	134
BENTUK INOVASI				
Tata Kelola Pemerintahan	3	1	5	6
Inovasi Layanan Publik	36	32	36	124
Inovasi Lainnya	4	15	10	4
HASIL INDEKS INOVASI DAERAH	1892	52,99	53,96	52,62

Sumber : https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Hasil Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin sehingga nilai yang didapat 53,96 poin, akan tetapi pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,34 poin sehingga berada pada nilai 52,62. Penurunan nilai tersebut disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Data dukung yang diajukan pada beberapa indikator belum menunjukan data dukung legal atau berupa regulasi;
2. Penilaian dari 135 usulan proposal hanya 65 laporan prosopas yang bisa dinilai, dikarenakan :
    a. Tidak adanya informasi kebaruan pada inovasi yang diterapkan sebelum 1 Januari 2021;
    b. Data dukung tidak sesuai dengan substansi/kandungan inovasi yang dilaporkan;
    c. Inovasi yang dilaporkan baru diterapkan pada Tahun 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuan 2

Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

IT 2.1 Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah. Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep *livable city* terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang *livable*. Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep *livable city* bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat *livability* di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan livable dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prinsip-prinsip dasar *livable city* :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah);
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut;
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya; dan
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Indikator Umum

I. Sarana Prasarana
   1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi;
   2. Kualitas Angkutan/ Transportasi;
   3. Kondisi Jalan;
   4. Pedestrian;
   5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan;
   6. Kualitas Fasilitas Kesehatan;
   7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan;
   8. Kualitas Fasilitas Pendidikan;
   9. Listrik;
   10. Ketersediaan Air Bersih;
   11. Kualitas Air Bersih; dan
   12. Telekomunikasi.

II. Ekonomi
   1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan; dan
   2. Biaya Hidup.

III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan
   1. Tata Kota;
   2. RTH;
   3. Kebersihan;
   4. Persampahan; dan
   5. Pencemaran/Polusi Udara dan Air.

IV. Kehidupan Sosial
   1. Kriminalitas;
   2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi;
   3. Kualitas Fasilitas Rekreasi;
   4. Akses Informasi Pelayanan Publik; dan
   5. Keamanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator Khusus

I. Sarana Prasarana
   1. Kantong Parkir;
   2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase,penerangan, ciri khas);
   3. Ketersediaan Fasilitas Diffabel dan Lansia;
   4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia,dan difabel; dan
   5. Jaringan Internet (WIFI).

II. Ekonomi

III. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah

IV. Kehidupan Sosial
   1. Interaksi Sosial bera toleransi/kerukunan antar penduduk/agama;
   2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial;
   3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial;
   4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia); dan
   5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif.

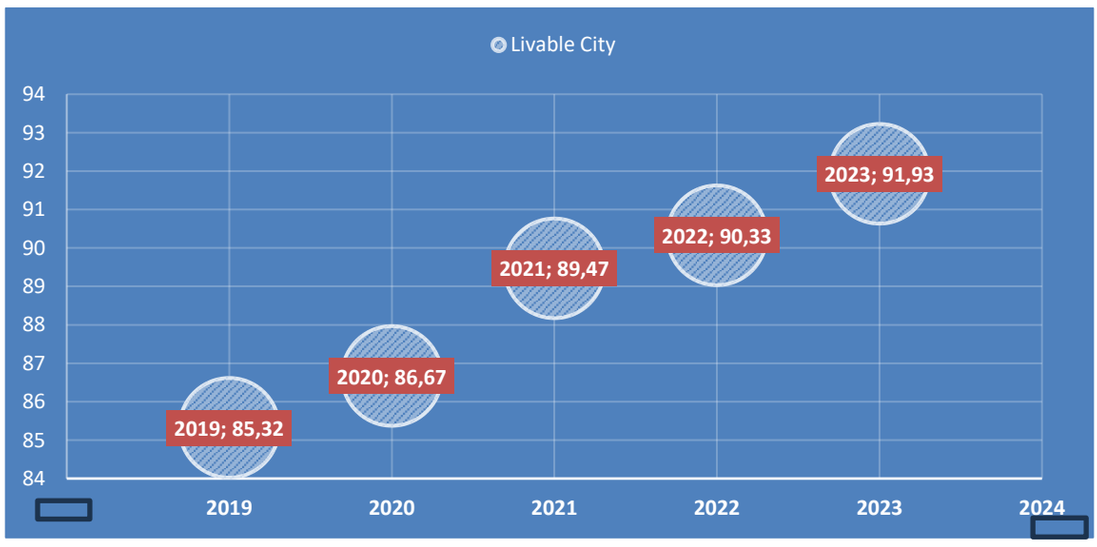
V. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum

VI. Pemanaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan

VII. Kondisi Politik

VIII. *Smart City*

IX. Kualitas Hidup Penduduk



Gambar 2. 15 Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*)
Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2023

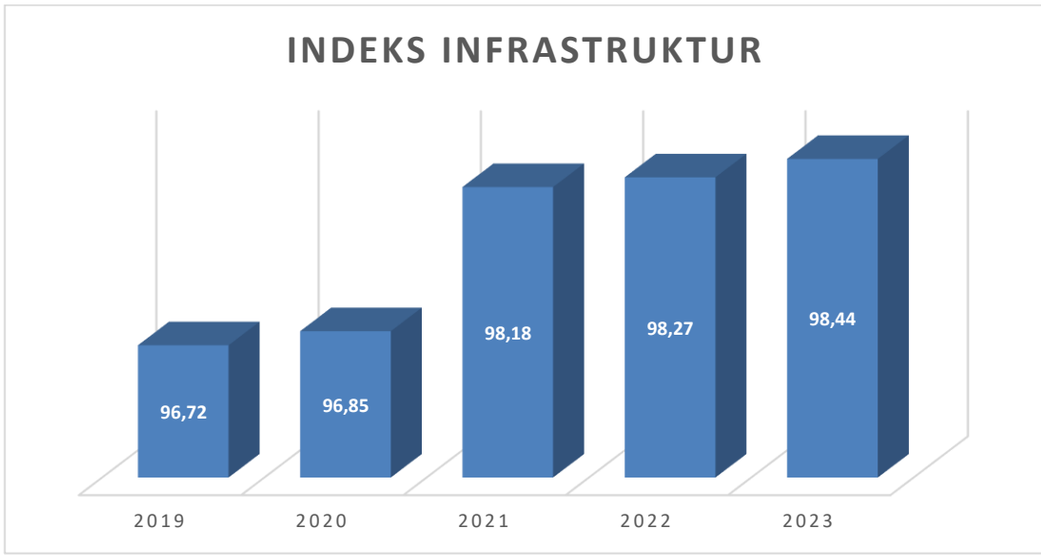
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Livable City Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2023 sebesar 91,93 dengan target 88,60. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,76%. Sedangkan di Tahun 2022 realisasinya sebesar 90,33 dengan capaian kinerja 102,43%. Hal ini menunjukan peningkatan capaian kinerja dari Tahun ke Tahun.

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota
IS 3.1 Indeks Infrastruktur

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kulitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrstruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses tehadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah.

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 98,27%, mengalami kenaikan sebesar 0,17 poin pada Tahun 2023 sehingga nilai indeks infratruktur pada tahun tersebut mencapai 98,44%.



Gambar 2. 16 Indeks Infrastruktur
Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Faktor pendorong peningkatan indeks Infrastruktur diantaranya:

1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif;
2) Adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani;
3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku;
5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.
7) Peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi sebagai penghasil limbah domestik; dan
8) Meningkatnya peran masyarakat pengurangan sampah dalam bentuk Bank Sampah dan *Zero Waste*.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur;
2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak;
3) Kesadaran pengusaha dalam pengolahan limbah domestik yang dihasilkan; dan
4) Belum adanya IPLT (Ijin Pengolahan Limbah Tinja).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan indeks Infrastruktur adalah:

1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas; dan
4) Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas kapasitas lingkungan hidup diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibat intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur. Terwujudnnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

IS 4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap Tahun hingga pada Tahun 2023 sebesar 60,24. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKA Tahun 2023 yaitu 51,43, IKU Tahun 2023 yaitu 87,94, sedangkan IKTL Tahun 2023 yaitu 24,16.
Perhitungan IKLH Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

IKLH = (0,376 xIKA) + (0.405 xIKU) + (0.219 xIKTL)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2023 yaitu 60,24 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2022 adalah 58,13. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2023 berada dalam posisi “sedang”. Diharapkan setiap Tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

a. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara; dan
b. Penambahan RTH yang menunjang peningkatan indeks kualitas lahan.

Faktor penghambatnya yaitu :

a. Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air;
b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara; dan
c. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam Upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup;
c. Optimalisasi penambahan RTH oleh OPD terkait;
d. Optimalisasi penanaman pohon lindung tepi jalan oleh OPD terkait;
e. Optimalisasi pengelolaan sampah dan B3;
f. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup; dan
g. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Tabel 2. 17 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,87	60,15	58,99	58,13	60,24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil pengukuran IKLH Kota Madiun pada Tahun 2019-2022 menunjukkan terjadi penurunan setiap Tahunnya, penurunan tersebut sebagai dampak kota Madiun menjadi pusat perkembangan perekonomian, selain itu terbitnya surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tentang perubahan metodelogi perhitungan yang menjelaskan perubahan metodologi lama dan metodologi baru, mengakibatkan semakin menurunkan nilai IKLH. Akan tetapi pada perhitungan IKLH Tahun 2023, IKLH Kota Madiun mengalami peningkatan melebihi nilai IKLH pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 sehingga dapat dikatakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk menaikkan Nilai IKLH dapat terealisasi dengan baik.

Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

IT 3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah Tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (Tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 18 IPM Kota Madiun

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PARITAS DAYA BELI
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503
2023	73,44	14,44	11,82	17.115

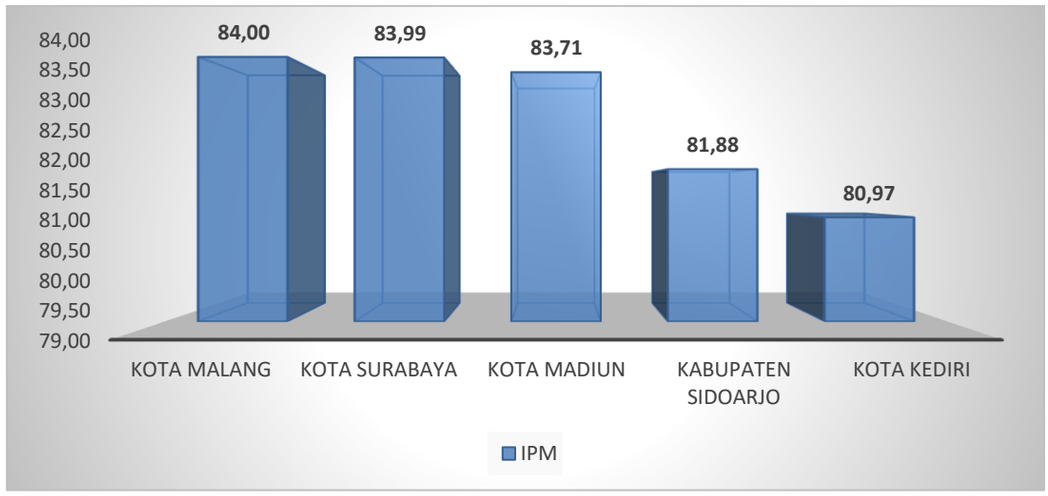
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Peningkatan pertumbuhan IPM Tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per Tahun yang disesuaikan. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada Tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 73,44 Tahun, lebih lama 0,31 Tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada Tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) Tahun 2023 tercatat sebesar 14,44, lebih tinggi 0,01 poin dibanding sebelumnya yaitu 14,43, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) Tahun 2023 mencapai 11,82, atau meningkat 0,15 poin dibanding Tahun lalu. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan pada Tahun 2022 mencapai Rp. 17.115.000 atau meningkat 6,35 persen dibanding Tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 16.503.000.

Selama 2019 hingga 2023, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di Tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/Tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2022 dan 2023.

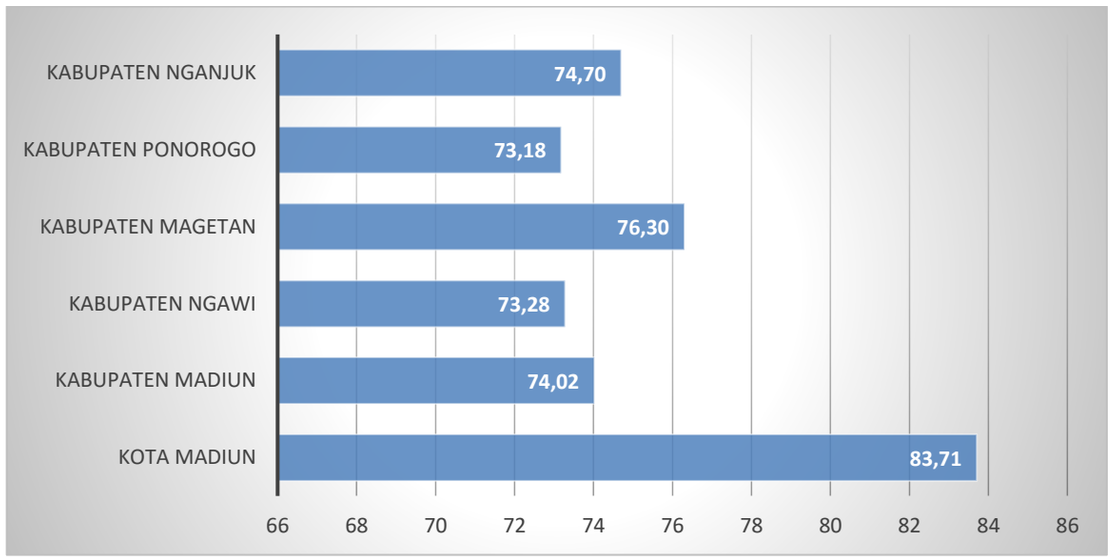
Pemulihan ekonomi sosial Pasca Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023 dibanding Tahun- Tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 83,71 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 1,70 poin) dibandingkan capaian Tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 17 Tingkat Kedudukan IPM Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada Tahun 2023 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 83,71. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 masih bertahan menjadi IPM berkategori "sangat tinggi". Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.



Gambar 2. 18 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

IT 3.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 19 IPG Kota Madiun Tahun 2019-2023

NO.	INSTANSI	TAHUN	INDEKS
1.	Kota Madiun	2019	94,05
2.	Kota Madiun	2020	94,38
3.	Kota Madiun	2021	94,42
4.	Kota Madiun	2022	94,57
5.	Kota Madiun	2023	95,18

Sumber : Dinsos PP, PA Kota Madiun, data diolah, 2023

Selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir IPG Kota Madiun menunjukkan tren meningkat, Indeks terendah ada pada Tahun 2019 sebesar 94,05 dan yang tertinggi berada pada Tahun 2023 sebesar 95,18. Pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022, IPG terus menunjukan peningkatan hingga sebesar masing -masing 94,38, 94,42, dan 94,57. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA; dan
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat

IS 5.1 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2023, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 Tahun (2019) menjadi 14,44 Tahun (2023) atau naik sebesar 0,05 Tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di Tahun 2023, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,44 Tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Tabel 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan lama Sekolah	14,39	14,4	14,41	14,43	14,44

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

IS 5.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (Tahun) penduduk usia 25 Tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator sasaran rata-rata lama sekolah di Tahun 2023 terjadi penyesuaian target sebagaimana tertuang dalam pada Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 yang mana pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 target rata-rata lama sekolah sebesar 11,16 dan pada RKPD Perubahan Tahun 2023 telah disesuaikan menjadi sebesar 11,67. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangan proyeksi rata- rata lama sekolah dengan memperhatikan realisasi rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022.

Tabel 2. 20 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalaui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan;
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pegembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan Pendidikan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru.

Sasaran 6 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat

IS 6.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup/Usia Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup menunjukkan rata-rata Tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu Tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula Tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap Tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Selama periode Tahun 2019 hingga 2023, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 Tahun (2019) menjadi 73,44 Tahun (2023) atau naik sebesar 0,54 Tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Tabel 2. 21 Angka Harapan Hidup di Kota Madiun

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	72,75	72,81	72,83	73,13	73,44

Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2019 ke Tahun 2023, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.
d. Cakupan vaksinasi Covid-19 di Kota Madiun yang tinggi pada Tahun 2022 menyebabkan penyebaran Covid-19 di Kota Madiun terkendali sehingga kematian akibat Covid-19 juga mengalami penurunan.

Faktor penghambat peningkatan AHH di Kota Madiun pada Tahun 2023 antara lain:

1. Terdapat 12 kematian bayi dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 5,1 per 1.000 kelahiran hidup; dan
2. Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum berjalan optimal sehingga kasus DBD juga meningkat.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH pada Tahun 2024 yaitu:

1. Menjaga agar Tidak ada Kematian Ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin;
2. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita;
3. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Salah satunya dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PSN untuk mencegah penularan penyakit DBD dan meningkatkan skrining faktor risiko PTM pada usia produktif dan lansia; dan
4. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat.

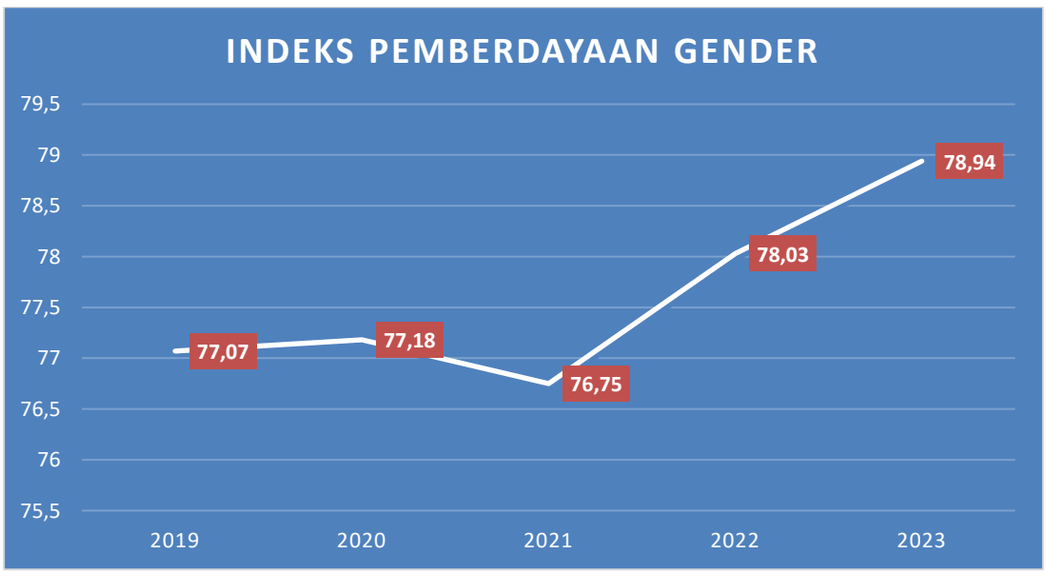
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran 7 Meningkatnya Pemberdayaan Gender

IS 7.1 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IPG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

IPG di Kota Madiun pada Tahun 2019 sebesar 77,07 pada Tahun 2020, IDG mengalami kenaikan menjadi 77,18 yang menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik dari Tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 76,75, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 dimana peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IPG Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan berada pada nilai 78,03 pada Tahun 2022, dan 78,94 pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi pasca terjadi pandemi Covid-19.



Gambar 2. 22 IPG di Kota Madiun
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mencapai IPG Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi:

a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan;
b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha;
d. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun; dan
e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan;
b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; dan
c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan .

Ketiga, mengingkatkan kapasitas kelembagaaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan;
d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah; dan
g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

IT 4.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar tersebut yaitu :

1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan mempeluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari- hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita;
- Share manufaktur terhadap PDRB; dan
- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator:

- Tingkat kesempatan kerja;
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh; dan
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas.

c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN;
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam; dan
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.

2) PILAR 1 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan. Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Dengan indikator :

- Rasio Pendapatan Gini;
- Sumbangan Pendapatan Perempuan; dan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indikator :

- Persentase penduduk miskin; dan
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

3) PILAR 1 : Perluasan Akses dan Kesempatan.

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

a. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator :

- Angka Harapan Lama Sekolah;
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan.

b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Dengan indikator :

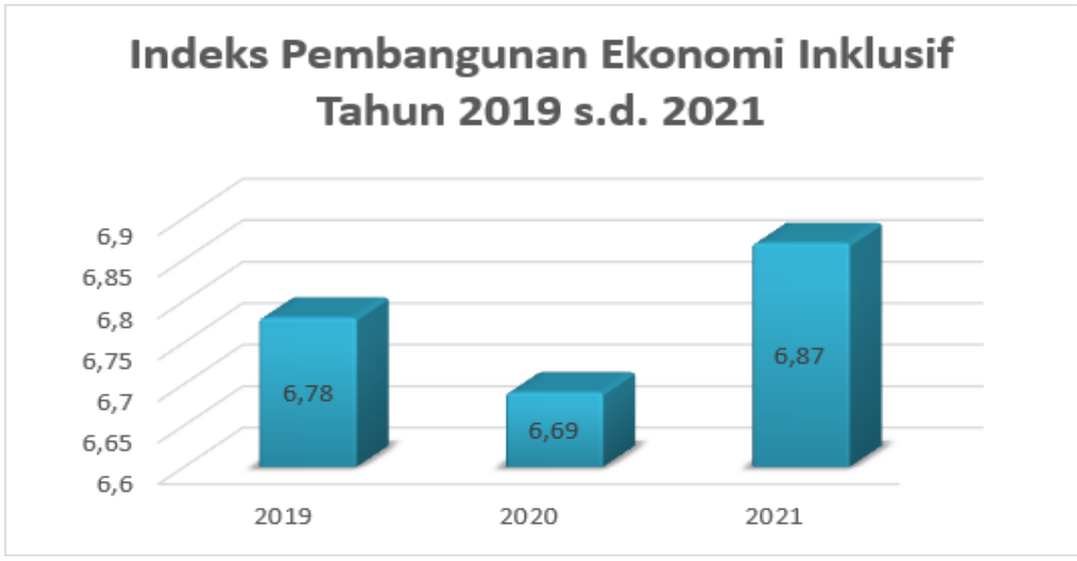
- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak; dan
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri.

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan Indikator :

- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif; dan
- Rasio kredit perbankan UMKM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tahun 2019-2021
Sumber : Dashbord Rilis Bappenas, 2021

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator baru di RPJMD Kota Madiun yang baru ditargetkan di Tahun 2022 sebesar 6,40, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada Tahun 2022 belum rilis dari Bappenas sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan. Untuk Tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga pilar yaitu:

1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri);
2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto); dan
3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar).

Sasaran 8 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

IS 8.1 Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari Tahun ke Tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengggangguran.



Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 ini diakibatkan oleh banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga menyebabkan jumlah pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Apabila di bandingkan dengan target TPT Tahun 2023 sebesar 6,15 %, realisasi TPT Tahun 2023 sebesar 5,85 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominan oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.

Faktor Pendorong Keberhasilan menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun yaitu :

1. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku usaha.
2. Terjalinnya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam peningkatan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta penempatan para pencari kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Faktor Penghambat yaitu :

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap Tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.
3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan skill yang tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan. Hal ini disebabkan karena jarangnya pelamar yang memiliki banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.
4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

Memperhatikan sejumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk lebih menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja;
2. Menyelenggarakan kegiatan *job fair*/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja;
3. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK);
5. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat;
6. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan;
7. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
8. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;
9. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan; dan
10. *Updating* data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun.

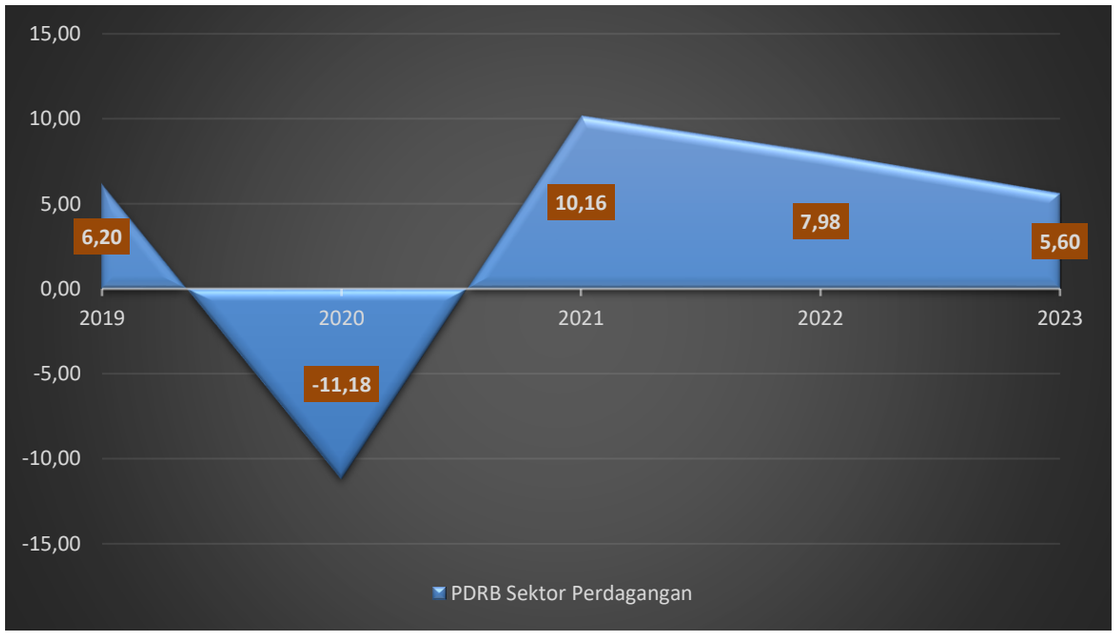
Sasaran 9 Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

IS 9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Data realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan Tahun 2023 adalah 5,60 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 7,98. Pertumbuhan PDRB Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,38 poin. Sedangkan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada Tahun 2019 sebesar 5.82. Untuk Tahun 2020 prosentase pertumbuhan sebesar (-11.18) atau mengalami penurunan sebesar 16,65 poin. Faktor Penghambat penurunan dari 2019-2020 karena adanya pandemi global Covid-19 dan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan. Di Tahun 2021 capaian pertumbuhan PDRB di Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 470,37% dibandingkan dengan target Tahun 2021.

Untuk target pada Tahun 2022 terjadi penyesuaian target dari RPJMD Perubahan dimana pada RPJMD perubahan target PDRB sektor jasa sebesar 2,44 disesuikan menjadi 10,16 dengan memperhitungkan realisasi capaian pada Tahun 2021. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan data pada dokumen LKPJ yang menggunakan data total *item*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 25 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Faktor Penghambat:

1. Penataan pedagang informal belum maksimal dengan semakin banyaknya masyarakat yang berjualan dan tempat berjualan yang terbatas;
2. Harga Bahan Pokok di pasaran yang terkadang kurang stabil dan mempengaruhi aktivitas perdagangan; dan
3. Promosi Produk perdagangan yang belum optimal.

Faktor Pendorong:

1. Program dan kegiatan yang tepat sasaran; dan
2. Infrastruktur dan Sarana prasarana pendukung yang memadai.

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul;
2. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat;
3. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang;
4. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakya evitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat; dan
5. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan melalui kerjasama dengan Pasar Induk (Pasar Tanah Abang Jakarta) dan bantuan ongkos kirim pada pedagang pasar rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah;
2. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah;
3. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah;
4. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku; dan
5. Pemenuhan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat yang merupakan salah satu sumber PAD dan dapat menggerakkan Belanja Barang/Jasa Daerah yang dapat menunjang pertumbuhan PDRB perdagangan barang/jasa.

IS 9.2 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Untuk data series pertumbuhan PDRB sektor jasa menurut BPS pada Tahun 2023 adalah sebesar 24,70 dengan capaian sebesar 114,51% jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar 21,57 yang disesuaikan dengan perhitungan realisasi pada Tahun 2022.

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara lain :

a) Pembangunan Infrastruktur kesehatan, pendidikan yang memadai;
b) Melakukan Promosi Produk Perdagangan;
c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan;
d) Melakunan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
e) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
f) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan;
g) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL;
h) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota;
i) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun;
j) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat;
k) Melakukan Promosi Pasar Rakyat;
l) Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM);
m) Pembagunan jalur sepeda wisata penghubung lapak; dan
n) Pembangunan dan pengembangan *Pahlawan Street Center* (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Faktor Penghambat:

1. Tenaga ahli bidang Kesehatan dan Pendidikan masih banyak dibutuhkan;
2. Tingginya suku bunga kredit dari lembaga keuangan; dan
3. Promosi daerah melalui event-event daerah masih perlu diperbanyak.

Faktor Pendorong:

1. Infrastruktur daerah yang memadai. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, jaringan telepon, dan sebagainya;
2. Tingkat Inflasi daerah yang terkendali; dan
3. Tingkat kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup meningkat Semakin tinggi usia harapan hidup masyrakat maka semakin panjang usia rata- rata hidup masayarakat, sehingga kesempatan masyarakat tersebut untuk melakukan kegiatan yang produktif dari segi ekonomi semakin panjang pula.

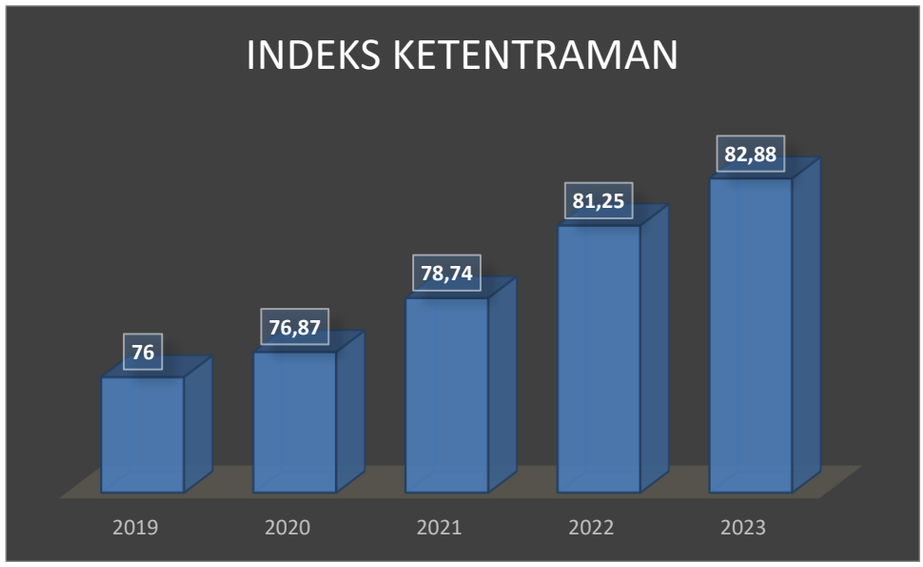
Tujuan 5 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat

IT 5.1 Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban.

Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 26 Capaian Indeks Ketentraman Tahun 2019-2023

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2023

Capaian indeks ketentraman Kota Madiun Tahun 2023 adalah 82,88%, peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA. Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman dan ketertiban :

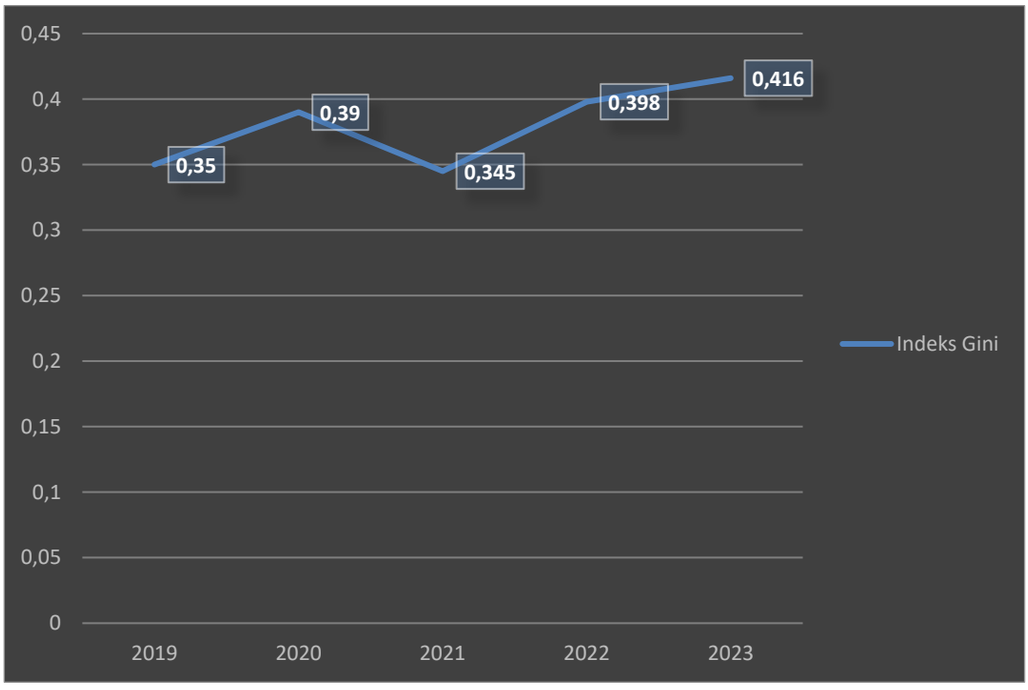
1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma- norma yang ada (Ketertiban Umum);
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang;
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan; dan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman.

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan kepada masyarakat (responden) bahwa penilaian persepsi pada setiap indikator disimpulkan rata-rata Nilai Persepsi Indeks Ketentraman Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2023 adalah NilaI Interval 3,32 atau Nilai Konversi 82,88 dengan peringkat “B” atau status/predikat “KONDUSIF” atau naik sebesar 1,63 poin jika dibandingkan Tahun 2022 yaitu sebesar 81,25. Capaian Tahun 2023 adalah sebesar 107,43% jika dibandingkan dengan target RPJMD, akan tetapi capaian berubah menjadi 102,01% jika dibandingkan dengan target penyesuaian RKPD 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IT 5.2 Indeks Gini

Indeks Gini (gini *ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.



Gambar 2. 27 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,39. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020 menjadi sebesar 0,345, penurunan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun sehingga imbas terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah menjadi lebih rendah, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks Gini pada Tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 0,398, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi, akan tetapi penekanan inflasi di Tahun 2023 belum dapat mengimbangi kenaikan indeks gini pada Tahun 2023 yang mecapai 0,416.

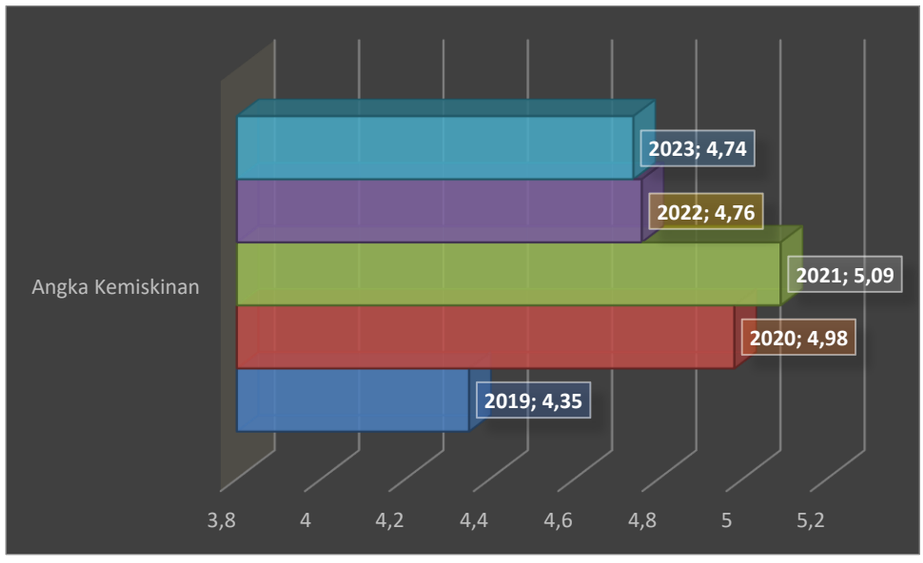
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah;
2. Bantuan Sosial Air Bersih;
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial;
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar;
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya);
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis;
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA; dan
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.

Sasaran 10 Pengurangan Kemiskinan
IS 10.1 Angka Kemiskinan

Selama periode Maret 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang sebanyak 0,03 ribu jiwa, dari 8,49 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 8,46 ribu jiwa pada Maret 2023 atau mengalami penurunan sebesar 0,35 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu Tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,02 persen, dari 4,76 persen pada Maret 2022 menjadi 4,74 persen pada Maret 2023.



Gambar 2. 28 Angka Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah;
2. Bantuan Sosial Air Bersih;
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial;
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar;
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian;
6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya);
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis;
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA; dan
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.

Sasaran 11 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

IS 11.1 Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2023 adalah 77,80 dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,46 dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,49%. Hal ini menunjukan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 75,68 dengan kenaikan sebesar 2,12 poin. Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

Tabel 2. 20 Indeks Kerukunan Kota Madiun Tahun 2019-2023

NO.	TAHUN	REALISASI KINERJA
1	2019	73,95 (Harmonis)
2	2020	74,0306 (Harmonis)
3	2021	74,36 (Harmonis)
4	2022	75,68 (Harmonis)
5	2023	77,80 (Harmonis)

Sumber : Bangkesbangpol Kota Madiun, 2023

a. Menghormati;
b. Menerima;
c. Jujur;
d. Teladan; dan
e. Kesetaraan.

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama;
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah;
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun;
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan; dan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rakor Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat;
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Sarasehan Bela Negara;
4. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
5. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan;
6. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini;
7. Menyusun Peta Rawan Konflik; dan
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat.

IS 11.2 Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa , harta dan kehormatan.

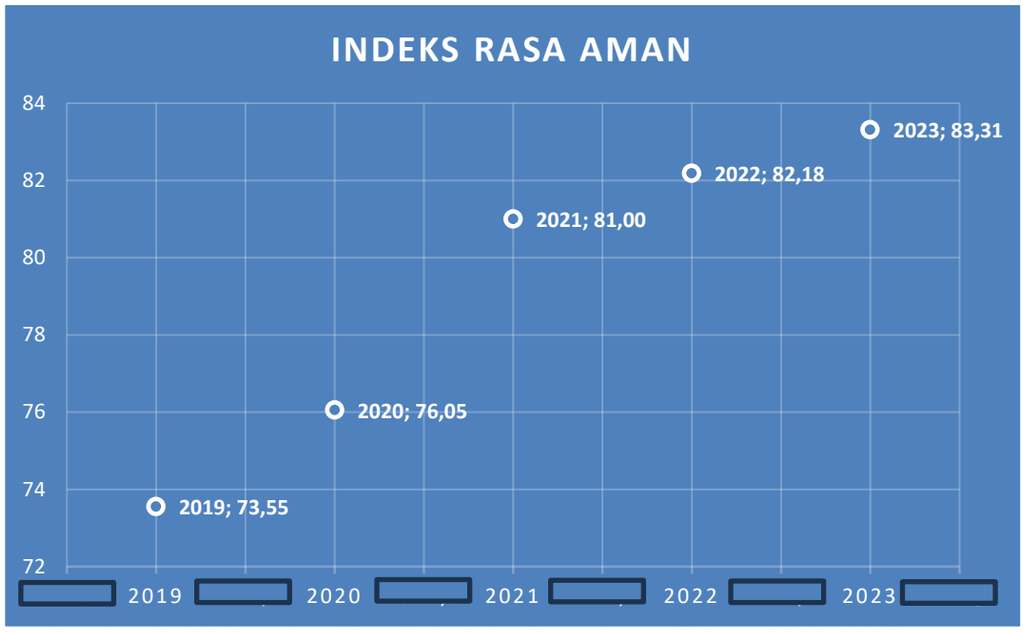
Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi.

Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

a. Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan);
b. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial);
c. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan); dan
d. Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan).

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman Tahun 2022 adalah sebesar 82,18 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,27. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 107,75%. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman Tahun 2023 adalah sebesar 83,31 dengan peringkat Aman Terkendali, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 82,18. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 101,38%, sehingga Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 naik sebesar 1,13 poin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 2. 29 Capaian Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2019-2023

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, 2023

Didalam Indeks Rasa Aman dan Indeks Kerukunan terdapat dimensi kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan yang sejalan dengan dimensi indeks kesalehan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam mendukung keselarasan dalam pencapaian indikator Indeks Kesalehan yang di jalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. 21 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	A	186.638.035.800	0	30.464.673.740	0	28.977.846.414		-		-	0	59.442.520.154	0%	32%	
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	8.461.200.000	0	-	0	1.248.500		-		-	0	1.248.500	0%	0%	
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	8.461.200.000	0	-	0	1.248.500					0	1.248.500	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	100	172.677.135.800	0	29.855.524.388	0	28.497.970.337		-		-	0	58.353.494.725	0%	34%	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1549	172.677.135.800	1549	29.855.524.388	1549	28.497.970.337					1549	58.353.494.725	100%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	4.396.850.000	0	537.375.040		426.680.889		-		-	0	964.055.929	0%	22%	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37	3.915.900.000	9	502.831.712	3	384.174.887					12	887.006.599	32%	23%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	148	480.950.000	37	34.543.328	18	42.506.002					55	77.049.330	37%	16%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	421.850.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	48	421.850.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	681.000.000	0	71.774.312	0	51.946.688		-		-	0	123.721.000	0%	18%	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	237	150.000.000	59	24.741.112	23	12.456.188					82	37.197.300	35%	25%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
						yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	382.000.000	0	24.613.200	0	17.250.500					0	41.863.700	0%	11%	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	220	149.000.000	55	22.420.000	55	22.240.000					110	44.660.000	50%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	23.381.626.992	0	84.836.220	0	208.309.510		-		-	100	293.145.730	100%	1%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	5.803.034.624	0	50.421.760	0	90.558.850		-		-	100	140.980.610	100%	2%	
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	985.000.000	0	9.881.160	0	967.500					0	10.848.660	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Kreatifitas Peserta Didik	14	1.173.457.250	0	-	2	35.906.000					2	35.906.000	14%	3%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	69	708.000.000	17	20.829.000	17	32.543.400					34	53.372.400	49%	8%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	Unit	12	2.936.577.374	4	19.711.600	4	21.141.950					8	40.853.550	67%	1%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	100	9.041.641.368	0	19.061.950	0	93.678.260		-		-	100	112.740.210	100%	1%	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	3.044.205.503	0	5.854.100	0	83.878.260					0	89.732.360	0%	3%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Siswa	5488	4.397.111.150	5488	13.207.850	0	-					5488	13.207.850	100%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Bidang Kreatifitas Peserta Didik	14	1.286.924.715	0	-	0	9.800.000					0	9.800.000	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	23	313.400.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	%	64	7.468.521.000	0	15.352.510	0	21.447.400		-		-	0	36.799.910	0%	0%	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Lembaga Peserta Didik	1	375.065.000	0	15.352.510	0	21.447.400					0	36.799.910	0%	10%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	987	5.940.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	160	1.053.796.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	154	99.660.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	%	100	1.068.430.000	0	-	0	2.625.000		-		-	0	2.625.000	0%	0%	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	7	340.000.000	0	-	0	2.625.000					0	2.625.000	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	6	728.430.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	%	100	5.225.228.500	0	35.797.900	0	101.480.300		-		-	100	137.278.200	100%	3%	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	3.823.812.500	0	11.638.000	0	3.790.300		-		-	0	15.428.300	0%	0%	
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1.222.636.500	0	9.729.000	0	3.790.300					0	13.519.300	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang	100	959.820.500	0	1.150.000	0	-					0	1.150.000	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.01	7	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1	1.641.355.500	0	759.000	0	500.000.000					0	500.759.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	%	100	1.401.416.000	0	24.159.900	0	97.690.000		-		-	0	121.849.900	0%	9%	
1	1	3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1	1.401.416.000	0	24.159.900	0	97.690.000					0	121.849.900	0%	9%	Dinas Pendidikan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	65	3.113.475.000	0	5.982.000	0	7.790.600		-		-	0	13.772.600	0%	0%	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	%	66	3.113.475.000	0	5.982.000	0	7.790.600		-		-	0	13.772.600	0%	0%	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1.370.000.000	0	-	0	7.790.600					0	7.790.600	0%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan	Laporan	1	1.743.475.000	0	5.982.000	0	-					0	5.982.000	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	428.190.000	0	13.600.000	0	16.952.000		-		-	100	30.552.000	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang memenuhi SNP	%	100	428.190.000	0	13.600.000	0	16.952.000		-		-	100	30.552.000	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000	0	13.600.000	0	16.952.000					0	30.552.000	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	317.790.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	174.150.000	0	19.200.000	0	23.786.000		-		-	0	42.986.000	0%	25%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	174.150.000	0	19.200.000	0	23.786.000		-		-	0	42.986.000	0%	25%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	129.600.000	0	19.200.000	0	23.786.000					0	42.986.000	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	44.550.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	430.320.000	0	20.215.000	0	18.432.500		-		-	100	38.647.500	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	430.320.000	0	20.215.000	0	18.432.500		-		-	100	38.647.500	100%	9%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	105.600.000	0	20.215.000	0	18.432.500					0	38.647.500	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	324.720.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	220.740.000	0	14.716.800	0	15.124.800		-		-	100	29.841.600	100%	14%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	220.740.000	0	14.716.800	0	15.124.800		-		-	100	29.841.600	100%	14%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000	0	14.716.800	0	15.124.800					0	29.841.600	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	124.740.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	441.900.000	0	17.197.500	0	19.869.000		-		-	100	37.066.500	100%	8%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	441.900.000	0	17.197.500	0	19.869.000		-		-	100	37.066.500	100%	8%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	115.200.000	0	17.197.500	0	19.869.000					0	37.066.500	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	326.700.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	151.200.000	0	9.194.400	0	3.200.000		-		-	100	12.394.400	100%	8%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	151.200.000	0	9.194.400	0	3.200.000		-		-	100	12.394.400	100%	8%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000	0	9.194.400	0	3.200.000					0	12.394.400	0%	17%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	79.200.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	263.524.500	0	13.728.500	0	11.236.000		-		-	100	24.964.500	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	263.524.500	0	13.728.500	0	11.236.000		-		-	100	24.964.500	100%	9%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	64.800.000	0	13.728.500	0	11.236.000					0	24.964.500	0%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	198.724.500	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	219.690.000	0	23.080.000	0	19.660.000		-		-	100	42.740.000	100%	19%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	219.690.000	0	23.080.000	0	19.660.000		-		-	100	42.740.000	100%	19%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	129.600.000	0	23.080.000	0	19.660.000					0	42.740.000	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.090.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	122.100.000	0	6.046.500	0	5.706.000		-		-	100	11.752.500	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	122.100.000	0	6.046.500	0	5.706.000		-		-	100	11.752.500	100%	10%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	6.046.500	0	5.706.000					0	11.752.500	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	69.300.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	233.220.000	0	12.935.000	0	13.730.000		-		-	100	26.665.000	100%	11%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	233.220.000	0	12.935.000	0	13.730.000		-		-	100	26.665.000	100%	11%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	76.800.000	0	12.935.000	0	13.730.000					0	26.665.000	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	156.420.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	251.430.000	0	11.600.000	0	11.600.000		-		-	100	23.200.000	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	251.430.000	0	11.600.000	0	11.600.000		-		-	100	23.200.000	100%	9%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000	0	11.600.000	0	11.600.000					0	23.200.000	0%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	155.430.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	99.720.000	0	16.172.000	0	13.233.000		-		-	100	29.405.000	100%	29%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	99.720.000	0	16.172.000	0	13.233.000		-		-	100	29.405.000	100%	29%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000	0	16.172.000	0	13.233.000					0	29.405.000	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	27.720.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	333.990.000	0	17.600.000	0	17.600.000		-		-	100	35.200.000	100%	11%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	333.990.000	0	17.600.000	0	17.600.000		-		-	100	35.200.000	100%	11%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	115.200.000	0	17.600.000	0	17.600.000					0	35.200.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	218.790.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	212.190.000	0	11.238.000	0	8.710.000		-		-	100	19.948.000	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	212.190.000	0	11.238.000	0	8.710.000		-		-	100	19.948.000	100%	9%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	11.238.000	0	8.710.000					0	19.948.000	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	159.390.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	119.730.000	0	7.108.500	0	4.415.000		-		-	100	11.523.500	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	119.730.000	0	7.108.500	0	4.415.000		-		-	100	11.523.500	100%	10%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	33.600.000	0	7.108.500	0	4.415.000					0	11.523.500	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	86.130.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	269.100.000	0	17.263.600	0	15.600.000		-		-	100	32.863.600	100%	12%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	269.100.000	0	17.263.600	0	15.600.000		-		-	100	32.863.600	100%	12%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000	0	17.263.600	0	15.600.000					0	32.863.600	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	168.300.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	385.860.000	0	17.600.000	0	17.600.000		-		-	100	35.200.000	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	385.860.000	0	17.600.000	0	17.600.000		-		-	100	35.200.000	100%	9%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	134.400.000	0	17.600.000	0	17.600.000					0	35.200.000	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	251.460.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	448.620.000	0	23.383.000	0	27.035.680		-		-	100	50.418.680	100%	11%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	448.620.000	0	23.383.000	0	27.035.680		-		-	100	50.418.680	100%	11%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000	0	23.383.000	0	27.035.680					0	50.418.680	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	295.020.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	231.480.000	0	22.200.000	0	14.400.000		-		-	100	36.600.000	100%	16%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	231.480.000	0	22.200.000	0	14.400.000		-		-	100	36.600.000	100%	16%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000	0	22.200.000	0	14.400.000					0	36.600.000	0%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	130.680.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	163.080.000	0	14.400.000	0	11.508.000		-		-	100	25.908.000	100%	16%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	163.080.000	0	14.400.000	0	11.508.000		-		-	100	25.908.000	100%	16%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000	0	14.400.000	0	11.508.000					0	25.908.000	0%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	91.080.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	144.870.000	0	14.437.345	0	7.700.000		-		-	100	22.137.345	100%	15%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	144.870.000	0	14.437.345	0	7.700.000		-		-	100	22.137.345	100%	15%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	14.437.345	0	7.700.000					0	22.137.345	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	92.070.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	728.520.000	0	33.888.500	0	36.159.000		-		-	100	70.047.500	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	728.520.000	0	33.888.500	0	36.159.000		-		-	100	70.047.500	100%	10%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	225.600.000	0	33.888.500	0	36.159.000					0	70.047.500	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	502.920.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	374.940.000	0	14.220.000	0	12.040.000		-		-	100	26.260.000	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	374.940.000	0	14.220.000	0	12.040.000		-		-	100	26.260.000	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000	0	14.220.000	0	12.040.000					0	26.260.000	0%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	302.940.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	690.630.000	0	49.920.000	0	29.600.000		-		-	100	79.520.000	100%	12%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	690.630.000	0	49.920.000	0	29.600.000		-		-	100	79.520.000	100%	12%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.400.000	0	49.920.000	0	29.600.000					0	79.520.000	0%	36%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	472.230.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	194.010.000	0	17.195.000	0	16.166.500		-		-	100	33.361.500	100%	17%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	194.010.000	0	17.195.000	0	16.166.500		-		-	100	33.361.500	100%	17%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000	0	17.195.000	0	16.166.500					0	33.361.500	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	98.010.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	166.650.000	0	12.910.000	0	6.400.000		-			0	19.310.000	0%	12%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	166.650.000	0	12.910.000	0	6.400.000		-			0	19.310.000	0%	12%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	12.910.000	0	6.400.000					0	19.310.000	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	113.850.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	452.580.000	0	30.568.000	0	25.259.500		-		-	100	55.827.500	100%	12%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	452.580.000	0	30.568.000	0	25.259.500		-		-	100	55.827.500	100%	12%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000	0	30.568.000	0	25.259.500					0	55.827.500	0%	36%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	298.980.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	459.510.000	0	23.324.000	0	10.400.000		-		-	100	33.724.000	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	459.510.000	0	23.324.000	0	10.400.000		-		-	100	33.724.000	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	153.600.000	0	23.324.000	0	10.400.000					0	33.724.000	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	305.910.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	108.240.000	0	9.717.000	0	6.517.000		-		-	100	16.234.000	100%	15%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	108.240.000	0	9.717.000	0	6.517.000		-		-	100	16.234.000	100%	15%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	9.717.000	0	6.517.000					0	16.234.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	55.440.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	219.120.000	0	7.800.000	0	7.862.500		-		-	100	15.662.500	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	219.120.000	0	7.800.000	0	7.862.500		-		-	100	15.662.500	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	7.800.000	0	7.862.500					0	15.662.500	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	166.320.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	355.920.000	0	22.368.700	0	13.970.700		-		-	100	36.339.400	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	355.920.000	0	22.368.700	0	13.970.700		-		-	100	36.339.400	100%	10%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000	0	22.368.700	0	13.970.700					0	36.339.400	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	245.520.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	492.630.000	0	39.458.000	0	24.884.000		-		-	0	64.342.000	0%	13%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	492.630.000	0	39.458.000	0	24.884.000		-		-	0	64.342.000	0%	13%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	218.400.000	0	39.458.000	0	24.884.000					0	64.342.000	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	274.230.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	222.090.000	0	8.622.500	0	8.750.000		-		-	100	17.372.500	100%	8%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	222.090.000	0	8.622.500	0	8.750.000		-		-	100	17.372.500	100%	8%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	8.622.500	0	8.750.000					0	17.372.500	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	169.290.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	655.290.000	0	30.600.000	0	33.522.000		-		-	100	64.122.000	100%	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	655.290.000	0	30.600.000	0	33.522.000		-		-	100	64.122.000	100%	10%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	208.800.000	0	30.600.000	0	33.522.000					0	64.122.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	446.490.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	147.240.000	0	11.750.000	0	7.200.000		-		-	100	18.950.000	100%	13%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	147.240.000	0	11.750.000	0	7.200.000		-		-	100	18.950.000	100%	13%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000	0	11.750.000	0	7.200.000					0	18.950.000	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	75.240.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	186.090.000	0	14.800.000	0	14.400.000		-		-	100	29.200.000	100%	16%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	186.090.000	0	14.800.000	0	14.400.000		-		-	100	29.200.000	100%	16%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000	0	14.800.000	0	14.400.000					0	29.200.000	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	90.090.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	442.740.000	0	18.400.000	0	18.450.000		-		-	100	36.850.000	100%	8%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	442.740.000	0	18.400.000	0	18.450.000		-		-	100	36.850.000	100%	8%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	120.000.000	0	18.400.000	0	18.450.000					0	36.850.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	322.740.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	421.410.000	0	14.418.000	0	15.298.000		-		-	100	29.716.000	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	421.410.000	0	14.418.000	0	15.298.000		-		-	100	29.716.000	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	105.600.000	0	14.418.000	0	15.298.000					0	29.716.000	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	315.810.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	533.250.000	0	19.990.916	0	16.088.862		-		-	100	36.079.778	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	533.250.000	0	19.990.916	0	16.088.862		-		-	100	36.079.778	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	122.400.000	0	19.990.916	0	16.088.862					0	36.079.778	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	410.850.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	206.430.000	0	9.600.000	0	11.762.000		-		-	100	21.362.000	100%	10%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	206.430.000	0	9.600.000	0	11.762.000		-		-	100	21.362.000	100%	10%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	110.400.000	0	9.600.000	0	11.762.000					0	21.362.000	0%	19%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	96.030.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	628.110.000	0	15.996.000	0	15.933.500		-		-	100	31.929.500	100%	5%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	628.110.000	0	15.996.000	0	15.933.500		-		-	100	31.929.500	100%	5%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	144.000.000	0	15.996.000	0	15.933.500					0	31.929.500	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	484.110.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	414.930.000	0	91.200.000	0	11.663.000		-		-	100	102.863.000	100%	25%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	414.930.000	0	91.200.000	0	11.663.000		-		-	100	102.863.000	100%	25%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	91.200.000	0	91.200.000	0	11.663.000					0	102.863.000	0%	113%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	323.730.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	391.320.000	0	13.414.900	0	12.404.000		-		-	100	25.818.900	100%	7%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	391.320.000	0	13.414.900	0	12.404.000		-		-	100	25.818.900	100%	7%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	86.400.000	0	13.414.900	0	12.404.000					0	25.818.900	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	304.920.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	211.200.000	0	7.629.000	0	8.698.000		-		-	100	16.327.000	100%	8%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	211.200.000	0	7.629.000	0	8.698.000		-		-	100	16.327.000	100%	8%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	7.629.000	0	8.698.000					0	16.327.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	158.400.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	280.560.000	0	16.804.500	0	17.636.500		-		-	100	34.441.000	100%	12%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	280.560.000	0	16.804.500	0	17.636.500		-		-	100	34.441.000	100%	12%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	98.400.000	0	16.804.500	0	17.636.500					0	34.441.000	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	182.160.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	221.730.000	0	14.097.000	0	15.270.000		-		-	100	29.367.000	100%	13%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	221.730.000	0	14.097.000	0	15.270.000		-		-	100	29.367.000	100%	13%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	96.000.000	0	14.097.000	0	15.270.000					0	29.367.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	125.730.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	202.290.000	0	9.232.852	0	8.146.646		-		-	100	17.379.498	100%	9%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	202.290.000	0	9.232.852	0	8.146.646		-		-	100	17.379.498	100%	9%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	52.800.000	0	9.232.852	0	8.146.646					0	17.379.498	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	149.490.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	264.150.000	0	15.620.000	0	13.720.000		-		-	100	29.340.000	100%	11%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	264.150.000	0	15.620.000	0	13.720.000		-		-	100	29.340.000	100%	11%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000	0	15.620.000	0	13.720.000					0	29.340.000	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	163.350.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	206.850.000	0	4.884.000	0	2.918.000		-		-	100	7.802.000	100%	4%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	206.850.000	0	4.884.000	0	2.918.000		-		-	100	7.802.000	100%	4%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	33.600.000	0	4.884.000	0	2.918.000					0	7.802.000	0%	23%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	173.250.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	143.280.000	0	11.476.350	0	10.717.090		-		-	100	22.193.440	100%	15%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	143.280.000	0	11.476.350	0	10.717.090		-		-	100	22.193.440	100%	15%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	72.000.000	0	11.476.350	0	10.717.090					0	22.193.440	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	71.280.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	222.840.000	0	16.906.748	0	14.600.000		-		-	100	31.506.748	100%	14%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	222.840.000	0	16.906.748	0	14.600.000		-		-	100	31.506.748	100%	14%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	93.600.000	0	16.906.748	0	14.600.000					0	31.506.748	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	129.240.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	178.020.000	0	16.433.000	0	17.407.000		-		-	100	33.840.000	100%	19%	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	178.020.000	0	16.433.000	0	17.407.000		-		-	100	33.840.000	100%	19%	
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	100.800.000	0	16.433.000	0	17.407.000					0	33.840.000	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	77.220.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.127.210.000	0	29.897.000	0	27.860.000		-		-	100	57.757.000	100%	5%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.127.210.000	0	29.897.000	0	27.860.000		-		-	100	57.757.000	100%	5%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	761	206.400.000	0	29.897.000	0	27.860.000					0	57.757.000	0%	28%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	920.810.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.229.060.000	0	39.982.500	0	39.835.600		-		-	100	79.818.100	100%	6%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.229.060.000	0	39.982.500	0	39.835.600		-		-	100	79.818.100	100%	6%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	749	326.400.000	0	39.982.500	0	39.835.600					0	79.818.100	0%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	902.660.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	849.200.000	0	30.741.000	0	28.463.000		-		-	100	59.204.000	100%	7%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	849.200.000	0	30.741.000	0	28.463.000		-		-	100	59.204.000	100%	7%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	556	171.600.000	0	30.741.000	0	28.463.000					0	59.204.000	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	677.600.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.174.170.000	0	30.821.000	0	35.166.500		-		-	100	65.987.500	100%	6%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.174.170.000	0	30.821.000	0	35.166.500		-		-	100	65.987.500	100%	6%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	860	161.400.000	0	30.821.000	0	35.166.500					0	65.987.500	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	1.012.770.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	658.730.000	0	33.034.653	0	29.003.320		-		-	100	62.037.973	100%	9%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	658.730.000	0	33.034.653	0	29.003.320		-		-	100	62.037.973	100%	9%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	422	159.000.000	0	33.034.653	0	29.003.320					0	62.037.973	0%	39%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	499.730.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	922.220.000	0	31.100.000	0	30.100.000		-		-	100	61.200.000	100%	7%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	922.220.000	0	31.100.000	0	30.100.000		-		-	100	61.200.000	100%	7%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	615	193.800.000	0	31.100.000	0	30.100.000					0	61.200.000	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	728.420.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	1.156.660.000	0	54.915.980	0	40.520.000		-		-	100	95.435.980	100%	8%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	1.156.660.000	0	54.915.980	0	40.520.000		-		-	100	95.435.980	100%	8%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	722	302.400.000	0	54.915.980	0	40.520.000					0	95.435.980	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	854.260.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	668.570.000	0	11.880.000	0	7.633.000		-		-	100	19.513.000	100%	3%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	668.570.000	0	11.880.000	0	7.633.000		-		-	100	19.513.000	100%	3%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	526	67.200.000	0	11.880.000	0	7.633.000					0	19.513.000	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	601.370.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	668.370.000	0	23.088.500	0	22.794.000		-		-	100	45.882.500	100%	7%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	668.370.000	0	23.088.500	0	22.794.000		-		-	100	45.882.500	100%	7%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	435	163.800.000	0	23.088.500	0	22.794.000					0	45.882.500	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	504.570.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	841.780.000	0	41.129.800	0	44.571.000		-		-	100	85.700.800	100%	10%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	841.780.000	0	41.129.800	0	44.571.000		-		-	100	85.700.800	100%	10%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	517	263.400.000	0	41.129.800	0	44.571.000					0	85.700.800	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	578.380.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	987.360.000	0	37.837.100	0	31.688.000		-		-	100	69.525.100	100%	7%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	987.360.000	0	37.837.100	0	31.688.000		-		-	100	69.525.100	100%	7%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	650	217.800.000	0	37.837.100	0	31.688.000					0	69.525.100	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	769.560.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	816.610.000	0	23.935.720	0	15.864.000		-		-	100	39.799.720	100%	5%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	816.610.000	0	23.935.720	0	15.864.000		-		-	100	39.799.720	100%	5%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	581	162.000.000	0	23.935.720	0	15.864.000					0	39.799.720	0%	25%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	654.610.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	976.960.000	0	46.310.406	0	18.932.491		-		-	100	65.242.897	100%	7%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	976.960.000	0	46.310.406	0	18.932.491		-		-	100	65.242.897	100%	7%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	692	159.000.000	0	46.310.406	0	18.932.491					0	65.242.897	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	817.960.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	%	100	395.560.000	0	17.577.000	0	14.727.000		-		-	100	32.304.000	100%	8%	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100	395.560.000	0	17.577.000	0	14.727.000		-		-	100	32.304.000	100%	8%	
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	324	85.800.000	0	17.577.000	0	14.727.000					0	32.304.000	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1	309.760.000	0		0						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
Rata - Rata Capaian Kinerja																				35%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					11%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				97.679.733.644													
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	84,5	62.486.290.876	0	9.591.317.206	0	9.318.541.023		-		-	0	18.909.858.229	0%	30%	
1	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	%	100	381.431.000	68,06	76.790.000	0	30.684.000		-		-	68,06	107.474.000	68%	28%	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	185.864.600	3	48.900.000	0	7.547.000					3	56.447.000	38%	30%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	131.618.400	2	27.890.000	0	23.137.000					2	51.027.000	67%	39%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	63.948.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	57.143.207.296	100	9.295.904.669	0	8.997.080.882	0	-	0	-	100	18.292.985.551	100%	32%	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	532	57.143.207.296	423	9.295.904.669	423	8.997.080.882					423	18.292.985.551	80%	32%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.983.807.300	60,34	124.461.712	0	159.215.991	0	-	0	-	60,34	283.677.703	60%	10%	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.037.547.300	0	108.291.012	0	111.121.544					0	219.412.556	0%	11%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	145	946.260.000	30	16.170.700	45	48.094.447					75	64.265.147	52%	7%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.319.052.680	42,45	62.825.000	0	76.950.000		-		-	42,45	139.775.000	42%	11%	
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	130.469.150	12	42.000.000	7	32.950.000					12	74.950.000	80%	57%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	143	1.188.583.530	7	20.825.000	16	44.000.000					23	64.825.000	16%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	658.792.600	36,49	31.335.825	0	54.610.150	0	-	0	-	36	85.945.975	36%	13%	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	80	402.488.650	1	4.997.200		46.594.350					1	51.591.550	1%	13%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.165.850	1	10.000.000		1.500.000					1	11.500.000	100%	71%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	280	240.138.100	23	16.338.625		6.515.800					23	22.854.425	8%	10%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	49.038.053.377	0	7.713.901.000	0	5.723.510.927	0	-	0	-	0	13.437.411.927	0%	27%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	90,22	8.159.893.777	90,32	-	0	3.566.000	0	-	0	-	90,32	3.566.000	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas						-	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	668.847.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	180	2.451.544.450	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	420	132.697.200	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	162	219.940.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	20	4.686.865.127	0	-	0	3.566.000					0	3.566.000	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							0	3.566.000					0	3.566.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	83,33	40.878.159.600	0	7.713.901.000	0	5.719.944.927	0	-	0	-	0	13.433.845.927	0%	33%	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2450	338.602.000	618	-		-					618	-	25%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2338	105.463.300	586	-		-					586	-	25%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2227	99.706.200	582	-		-					582	-	26%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9081	511.395.700	2470	-		-					2470	-	27%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31855	175.581.300	0	-		-					31167	-	98%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	114664	167.311.500	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30573	22.522.000	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	68973	22.640.000	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8143	12.370.000	3436	-		-					3436	-	42%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	339	144.155.900	106	2.400.000		3.600.000					374	6.000.000	110%	4%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5044	313.403.800	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5780	307.413.000	1260	10.200.000		15.300.000					6664	25.500.000	115%	8%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	5.348.943.400	0	-		46.145.000					0	46.145.000	0%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	343.884.000	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	168.989.100	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	53.468.400	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	0	-							374	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	100	78.681.900	60	-		2.400.000					60	2.400.000	60%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	416.911.100	0	31.491.000		25.247.500					0	56.738.500	0%	14%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	36	28.862.596.000	9	7.660.810.000		5.061.863.600					9	12.722.673.600	25%	44%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	9	1.132.434.800	1	6.600.000		17.480.000					1	24.080.000	11%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	7	2.031.618.000	0	-		544.308.827					0	544.308.827	0%	27%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	6	145.602.000	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	380	31.896.200	504	2.400.000		3.600.000					504	6.000.000	133%	19%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	10	42.570.000	0								0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	%	92														
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	0	-	0	-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-		-									
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Teregistrasi	%	92	240.694.600	89,4	-	0	-		-	0	-	89,4	-	97%	0%	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	200	240.694.600	14	-		-					14	-	7%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	91	135.964.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	89	32.464.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	32.464.000	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	%	89	103.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	3	103.500.000	0	-							0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	80,67	4.758.151.173	66,56	719.456.500	0	887.685.000	0	-	0	-	67	1.607.141.500	83%	34%	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	%	100	706.415.350	72,73	-	0	4.400.000	0	-	0	-	72,73	4.400.000	73%	1%	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	706.415.350	0			4.400.000					0	4.400.000	0%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	77,78	4.051.735.823	92,59	719.456.500	0	883.285.000	0	-	0	-	92,59	1.602.741.500	119%	40%	
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri		71,15		63,04								63,04		89%		
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri		81,48		100								100		123%		
						Persentase Poskestren berstrata puri		54,55		73,33								73,33		134%		
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata pur		40		62,5								62,5		156%		
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri		86,67		100								100		115%		
						Persentase Posyandu Lansia berstrata pur		97,1		100								100		103%		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	4.051.735.823	1	719.456.500		883.285.000					1	1.602.741.500	100%	40%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.272.406.072													
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	11	363.357.000	13	55.362.853	0	26.434.400	0	-	0	-	13	81.797.253	118%	23%	
						Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7		7		0		0		0		7		100%		
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	7	41.429.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	7	41.429.000	0	-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	%	100	321.928.000	65	55.362.853	0	26.434.400	0	-	0	-	64,71	81.797.253	65%	25%	
2	14	2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	0	-		-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	246.238.000	27	46.375.000		15.575.000					27	61.950.000	100%	25%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	24	75.690.000	6	8.987.853		10.859.400					6	19.847.253	25%	26%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	%	6,74	4.586.488.098	5,86	115.335.900	0	144.231.300	0	-	0	-	5,86	259.567.200	87%	6%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	%	100	990.945.000	66,67	63.760.000	0	71.297.800	0	-	0	-	66,67	135.057.800	67%	14%	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	0		0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	85.952.000	0	-							0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	9	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	4	49.688.000	0	-							0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	152.724.000	3	62.800.000		47.998.300					3	110.798.300	25%	73%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	12	105.900.000	0	-		4.969.500					0	4.969.500	0%	5%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	100.298.000	0	-		18.330.000					0	18.330.000	0%	18%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	2	20.248.000	0	-							0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	27	476.135.000	27	960.000		-					27	960.000	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kader yang Melakukan Updating Data	%	100	167.749.000	100	16.300.000	0	2.400.000	0	-	0	-	100	18.700.000	100%	11%	
2	14	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0	-	0								0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	3	90.882.000	3								3	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	150	76.867.000	150	16.300.000		2.400.000					150	18.700.000	100%	24%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Drop Out	%	17,5	2.920.202.098	18	30.996.500	0	60.924.500	0	-	0	-	17,5	91.921.000	100%	3%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	27	55.200.000	27	-		2.400.000					27	2.400.000	100%	4%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	661	510.058.300	661	27.751.500		54.029.500					661	81.781.000	100%	16%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	2	2.343.003.798	2	-							2	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	11.940.000	4	3.245.000		4.495.000					4	7.740.000	100%	65%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	7	507.592.000	0	4.279.400	0	9.609.000	0	-	0	-	0	13.888.400	0%	3%	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	0	-	0								0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	0	-	0								0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	3	2.04	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	7	507.592.000	7	4.279.400		9.609.000					7	13.888.400	100%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	86,16	2.058.422.000	86	9.530.000	0	9.540.000	0	-	0	-	87,51	19.070.000	102%	1%	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	%	32	2.058.422.000	32	9.530.000	0	9.540.000	0	-	0	-	32	19.070.000	100%	1%	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	12	517.777.000	3	9.530.000		9.540.000					3	19.070.000	25%	4%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					-	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	230	204.657.000	0	-							0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	225	1.335.988.000	125	-							125	-	56%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	14	4	2.02	5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					-	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02	6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					-	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				144.980.339.134													
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	88,7	112.699.577.726	0	31.255.577.618	0	18.145.651.248	0	-	0	-	A	49.401.228.866	#VALUE!	44%	
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	40.257.177.726	25	6.036.291.268	0	3.326.657.933	0	-	0	-	25	9.362.949.201	25%	23%	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	423	40.257.177.726	423	6.036.291.268	423	3.326.657.933					423	9.362.949.201	100%	23%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	%	100	442.400.000	25	108.800.000	0	54.400.000	0	-	0	-	25	163.200.000	25%	37%	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	14	442.400.000	4	108.800.000	6	54.400.000					10	163.200.000	71%	37%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	%	100	72.000.000.000	0	25.110.486.350	0	14.764.593.315	0	-	0	-	0	39.875.079.665	0%	55%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	72.000.000.000	1	25.110.486.350	1	14.764.593.315					1	39.875.079.665	100%	55%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	%	83,33	30.887.271.500	0	-	0	1.062.421.250	0	-	0	-	0	1.062.421.250	0%	3%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator SPM kesehatan rujukan mencapai target	%	90,22	30.887.271.500	0	-	0	1.062.421.250	0	-	0	-	0	1.062.421.250	0%	3%	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Unit	1	362.532.000	0	0		0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	0	-	0	0		0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	0	-	0	0							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	4	10.263.483.000	0	0		0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin (RSUD)	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket	0	-	0	0		0					6	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	13.135.456.500	0	0		0					7	-	700%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	5	7.125.800.000			5	1.062.421.250					8	1.062.421.250	160%	15%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.439.665.000													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	2.439.665.000	0	9.000.000	0	4.500.000	0	-	0	-	0	13.500.000	0%	1%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	83,33	3.025.786.500	0	9.000.000	0	4.500.000	0	-	0	-	0	13.500.000	0%	0%	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					3591	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					4862	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					63	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					395	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					524	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	413.168.000		-		-					3	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	783.268.500									0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.829.350.000		9.000.000		4.500.000					4	13.500.000	100%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-		-					5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegras													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	63	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						Persentase Poskestren berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-				-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.018.616.600													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	2.625.295.500	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0										0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	83,33	2.625.295.500	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					298	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Ngegong)						-		-					299	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					1064	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					7724	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					3226	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					45	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					254	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Ngegong)						-		-					255	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	391.692.000		-		-					3	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-		-		-					1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-		-		-					1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-		-		-					3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-		-		-					2	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	778.386.500		-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.455.217.000		18.000.000		9.000.000					4	27.000.000	100%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas Ngegong)				-		-		-					5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-		-		-					21	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													22		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Ngegong)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Puskesmas Ngegong)													0		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan (Puskesmas Ngegong) Ibu dan Anak													0		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Puskesmas Ngegong)																	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Poskestren berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Ngegong)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.313.990.000													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	2.931.912.622	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	2.931.912.622	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					507	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	559.736.000		-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	832.176.622		-		-					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.540.000.000		18.000.000		9.000.000					0	27.000.000	0%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Sukosari)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						-	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						-		-									

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		#DIV/0!		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0				
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0				
						Persentase Poskestren berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0				
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0				
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0				
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Sukosari)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-		-		-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.991.095.000													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	2.762.152.150	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	92	-	92	27.000.000	110%	1%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	2.762.152.150	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-		-		-					298	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						-		-									
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									1041	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									2048	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									3335	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-									41	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-									113	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-									389	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	431.520.000									3	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-									1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-									3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-									39	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	866.392.150									0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.464.240.000		18.000.000		9.000.000					4	27.000.000	100%	2%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-									13	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
				46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	0	-	0	-	0	-	47	-	63	-	63		#DIV/0!		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
						Persentase Poskestren berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.982.959.000													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	3.287.477.000	0	36.000.000	0	18.000.000	0	-	0	-	0	54.000.000	0%	2%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	3.287.477.000	0	36.000.000	0	18.000.000	0	-	0	-	0	54.000.000	0%	2%	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									523	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													524	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									27508	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									8267	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-									81	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	672.959.000									3	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-									3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-									2	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	886.518.000									0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-									1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.728.000.000		36.000.000		18.000.000					4	54.000.000	100%	3%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-									1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		#DIV/0!		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	0		0		0		0		0		0		#DIV/0!		
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
						Persentase Poskestren berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	0		0		0		0		0						
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.662.500.000													
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	83,33	3.246.163.000	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	%	0	-		-		-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0										0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	%	75	3.246.163.000	0	18.000.000	0	9.000.000	0	-	0	-	0	27.000.000	0%	1%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Demangan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									487	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													488	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Demangan)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									2110	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Demangan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									7754	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Demangan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-									7549	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-									80	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-									563	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Demangan)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-									509	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	579.328.000									3	-	100%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-									3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	816.835.000									0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional (Puskesmas Demangan)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	1.850.000.000		18.000.000		9.000.000					4	27.000.000	100%	1%	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				34	Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya													5	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-									6	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	-									7	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													8	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria (Puskesmas Demangan)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%		-		-		-		-		-					
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%		-		-		-		-		-					
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%															
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%															
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%															
						Persentase Poskestren berstrata puri	%															
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%															
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%															
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Puskesmas Demangan)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL																						
Rata - Rata Capaian Kinerja																			45%			
Rata - Rata Capaian Keuangan																				12%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Skor	24,3	13.128.150.000	0	2.187.550.399	0	2.043.175.164		-		-	0	4.230.725.563	0%	32%	
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100.000.000	25	44.160.340	25	3.703.400		-		-	50	47.863.740	50%	48%	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	8	100.000.000	1	44.160.340	0	3.703.400					1	47.863.740	13%	48%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	7.000.000.000	25	1.226.798.139	25	1.202.228.388		-		-	50	2.429.026.527	50%	35%	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	50	7.000.000.000	50	1.226.798.139	50	1.202.228.388					50	2.429.026.527	100%	35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	300.000.000	25	66.355.490	25	46.410.406		-		-	50	112.765.896	50%	38%	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	300.000.000	20	66.355.490	10	46.410.406					30	112.765.896	50%	38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	%	100	664.550.000	25	255.820.000	25	55.440.000		-		-	50	311.260.000	50%	47%	
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	552.050.000	1	255.820.000	0	0					1	255.820.000	50%	46%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	112.500.000	0	-	1	55.440.000					1	55.440.000	20%	49%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	%	100	4.210.800.000	25	544.426.220	25	684.929.619		-		-	50	1.229.355.839	50%	29%	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	4.210.800.000	2	544.426.220	3	684.929.619					5	1.229.355.839	50%	29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	%	100	852.800.000	25	49.990.210	25	50.463.351		-		-	50	100.453.561	50%	12%	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	59	380.900.000	23	41.152.119	18	43.105.448					41	84.257.567	69%	22%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	471.900.000	0	8.838.091	0	7.357.903					0	16.195.994	0%	3%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir/Genangan	%	17,3	13.464.112.400	0	309.322.000	0	303.043.800		-		-	0	612.365.800	0%	5%	
						Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	0		0		0						0		#DIV/0!		
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rawan Genangan	%	17,3	13.464.112.400	0	309.322.000	0	303.043.800		-		-	0	612.365.800	0%	5%	
1	3	2	2.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	1	235.100.000	0	984.500	0	223.243.800					0	224.228.300	0%	95%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1.080.880.000	0	147.405.000	0	79.800.000					0	227.205.000	0%	21%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1,5	9.022.332.400	0	160.932.500	0	0					0	160.932.500	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2.01	98	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit	2	3.125.800.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	123.019.490	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	123.019.490	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	3	3	2.01	5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	1	123.019.490	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,1	19.399.879.400	0	259.910.977	0	697.416.213		-		-	0	957.327.190	0%	5%	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,1	19.399.879.400	0	259.910.977	0	697.416.213		-		-	0	957.327.190	0%	5%	
1	3	6	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	18	16.210.400.000	0	66.172.000	12	856.668.350					12	922.840.350	67%	6%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	8	934.750.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	12	2.254.729.400	0	193.738.977	0	697.416.213					0	891.155.190	0%	40%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	20.055.958.000	0	238.263.540	0	-		-		-	0	238.263.540	0%	1%	
1	3	8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	%	100	20.055.958.000	25	238.263.540	0	-		-		-	25	238.263.540	25%	1%	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	8	200.000.000	0	0	0	98.789.000					0	98.789.000	0%	49%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	8	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	8	19.613.058.000	0	237.911.640	0	266.777.600					0	504.689.240	0%	3%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50	242.900.000	0	351.900	0	-					0	351.900	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	%	100	21.846.810.878	0	394.744.000	0	-		-		-	0	394.744.000	0%	2%	
1	3	9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	%	100	21.846.810.878	0	394.744.000	0	0		-		-	0	394.744.000	0%	2%	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0	0	0	0	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	0	0	0	0	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	2.01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	27	21.846.810.878	3	394.744.000	5	736.129.090					8	1.130.873.090	30%	5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	96	69.379.016.832	0	1.239.010.000	0	7.724.507.175		-		-	0	8.963.517.175	0%	13%	
1	3	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	96	69.379.016.832	0	1.239.010.000	0	7.724.507.175		-		-	0	8.963.517.175	0%	13%	
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M²	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	10	270.566.832	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2	13.489.550.000	0	47.520.000	0	0					0	47.520.000	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	17	18.511.100.000	0	408.240.000	0	7.365.854.187					0	7.774.094.187	0%	42%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jembatan	120	226.750.000	2	98.900.000	0	1.278.912					2	100.178.912	2%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	2	31.784.750.000	0	-	0	92.200.000					0	92.200.000	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	41	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	KM	2	872.000.000	0	130.800.000	0	1.274.076					0	132.074.076	0%	15%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	15	408.600.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	17	3.815.700.000	0	553.550.000	7	263.900.000					7	817.450.000	41%	21%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95	453.469.000	0	40.006.500	0	-		-		-	0	40.006.500	0%	9%	
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi Standart Kompetensi	%	95	207.669.000	0	40.006.500	0	-		-		-	0	40.006.500	0%	19%	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	80	207.669.000	0	40.006.500	0	0					0	40.006.500	0%	19%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	0	-	0	-	0	-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang	0	-	0	-	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95	245.800.000	0	-	0	204.830.900		-		-	0	204.830.900	0%	83%	
1	3	11	2.04	7	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	100	245.800.000	0	-	100	204.830.900					100	204.830.900	100%	83%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	1.396.480.000	0	63.076.482	0	38.775.515		-		-	0	101.851.997	0%	7%	
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Dokumen	1	200.000.000	0	-	0	4.788.260		-		-	0	4.788.260	0%	2%	
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000	0	0	0	4.788.260					0	4.788.260	0%	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.000.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	300	150.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	796.480.000	0	32.925.766	0	18.923.468		-		-	0	51.849.234	0%	7%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	400.000.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	3	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			1	396.480.000	0	32.925.766	0	18.923.468					0	51.849.234	0%	13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	400.000.000	0	30.150.716	0	15.063.787		-		-	0	45.214.503	0%	11%	
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	0	0	0	0						0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	8	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	120	400.000.000	0	30.150.716	0	15.063.787					0	45.214.503	0%	11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rata - Rata Capaian Kinerja																				15%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					9%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				39.744.104.195													
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	80,3	10.771.061.750	0	1.854.029.267	0	1.642.632.473		-		-	0	3.496.661.740	0%	32%	
1	4	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	105.700.000	25	4.600.000	25	2.200.000		-		-	50	6.800.000	50%	6%	
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	20	105.700.000	2	4.600.000	6	2.200.000					8	6.800.000	40%	6%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.706.000.000	25	909.744.979	25	927.958.194		-		-	50	1.837.703.173	50%	32%	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	36	5.645.000.000	36	902.936.479	36	913.522.194					34	1.816.458.673	94%	32%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	13	61.000.000	2	6.808.500	3	14.436.000					5	21.244.500	38%	35%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	152.000.000	25	1.288.250	25	120.875.000		-		-	50	122.163.250	50%	80%	
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	142.000.000	0	-	1	120.075.000					1	120.075.000	100%	85%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	orang	36	10.000.000	0	1.288.250	36	800.000					36	2.088.250	100%	21%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	233.880.000	25	26.832.094	25	22.781.186		-		-	50	49.613.280	50%	21%	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Laporan	20	233.880.000	2	26.832.094	8	22.781.186					10	49.613.280	50%	21%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	340.500.000	25	117.887.200	25	77.875.000		-		-	50	195.762.200	50%	57%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	4	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	142.500.000	0	-	0						0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	26	198.000.000	17	117.887.200	9	77.875.000					26	195.762.200	100%	99%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	2.205.500.000	25	408.480.011	25	297.509.425		-		-	50	705.989.436	50%	32%	
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.205.500.000	2	408.480.011	3	297.509.425					5	705.989.436	42%	32%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	2.179.481.750	25	386.484.983	25	314.308.668		-		-	50	700.793.651	50%	32%	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	65	1.690.986.550	15	312.774.583	20	242.137.518					35	554.912.101	54%	33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	1	100.000.000	0	17.262.000	1	19.678.000					1	36.940.000	100%	37%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	unit	106	388.495.200	12	56.448.400	12	52.493.150					24	108.941.550	23%	28%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	%	100	2.422.750.000	0	143.136.000	0	248.430.100		-		-	0	391.566.100	0%	16%	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	Dokumen	1	118.950.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	118.950.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	lokasi	3	2.157.900.000	3	143.136.000	3	241.335.200		-		-	3	384.471.200	100%	18%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah	3	2.157.900.000	0	143.136.000	3	241.335.200					3	384.471.200	100%	18%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	%	100	145.900.000	0	-	0	7.094.900		-		-	0	7.094.900	0%	5%	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	Laporan	1	145.900.000	0	-	0	7.094.900					0	7.094.900	0%	5%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	6.441.590.000	0	170.013.750	0	2.819.122.600		-		-	0	2.989.136.350	0%	46%	
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	220.000.000	0	1.955.000	0	4.410.000		-		-	0	6.365.000	0%	3%	
1	4	3	2.02	14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	220.000.000	0	1.955.000	0	4.410.000					0	6.365.000	0%	3%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	0,5	6.221.590.000	0	168.058.750	0	2.814.712.600		-		-	0	2.982.771.350	0%	48%	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	190	2.686.200.000	0	18.356.500	192	2.478.420.000					192	2.496.776.500	101%	93%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	ha	0		0		0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	9	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	16,41	3.535.390.000	0	149.702.250	0	336.292.600					0	485.994.850	0%	14%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	25.286.189.900	0	1.827.603.955	0	3.982.137.314		-		-	0	5.809.741.269	0%	23%	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	%	100	25.286.189.900	0	1.827.603.955	100	3.982.137.314		-		-	100	5.809.741.269	100%	23%	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	3	25.286.189.900	0	1.827.603.955	3	3.982.137.314					3	5.809.741.269	100%	23%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				131.200.000													
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100	32.413.750	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	%	100	32.413.750	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	%	100	32.413.750	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	36.200.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	32.413.750	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	32.413.750	0	-							0	-	0%	0%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	%	100	173.378.500	0	88.390.550	100	86.802.410		-		-	100	175.192.960	100%	101%	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	%	100	173.378.500	0	88.390.550	100	86.802.410		-		-	100	175.192.960	100%	101%	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	173.378.500	5	88.390.550	2	86.802.410					7	175.192.960	70%	101%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rata - Rata Capaian Kinerja																				41%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					31%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Indeks	A	16.427.406.300	0	1.814.401.218	0	1.812.155.461		-		-	0	3.626.556.679	0%	22%	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	196.067.000	25	18.310.000	25	95.000.000		-		-	50	113.310.000	50%	58%	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	196.067.000	4	18.310.000	2	95.000.000					6	113.310.000	50%	58%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	7.635.025.000	25	1.134.253.897	25	1.187.006.321		-		-	54	2.321.260.218	54%	30%	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	54	7.635.025.000	45	1.134.253.897	45	1.187.006.321					45	2.321.260.218	83%	30%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	%	100	770.525.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	770.525.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	341.400.000	25	19.550.380	25	54.411.730		-		-	50	73.962.110	50%	22%	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	341.400.000	17	19.550.380	0	54.411.730					17	73.962.110	85%	22%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%	100	3.011.319.000	25	-	25	-		-		-	50	-	50%	0%	
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2.445.130.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	300.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	266.189.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.282.000.000	25	582.646.450	25	399.317.150		-		-	50	981.963.600	50%	30%	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	3.282.000.000	2	582.646.450	2	399.317.150					4	981.963.600	67%	30%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.191.070.300	25	59.640.491	25	76.420.260		-		-	50	136.060.751	50%	11%	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	851.000.000	10	54.165.491	2	76.420.260					12	130.585.751	60%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	240.070.300	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	68	100.000.000	11	5.475.000	0	0					11	5.475.000	16%	5%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	%	97	9.965.497.300	98	694.945.000	0	854.196.400		-		-	98	1.549.141.400	101%	16%	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	97	6.631.666.000	98	691.545.000	0	484.108.300		-		-	98	1.175.653.300	101%	18%	
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus	40	466.019.000	3	51.760.000	0	0					3	51.760.000	8%	11%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	8	152.772.000	1	1.650.000	0	21.785.000					1	23.435.000	13%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	6	4.200.000.000	2	531.419.200	1	393.339.100					3	924.758.300	50%	22%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	78	712.875.000	45	106.715.800	0	68.984.200					45	175.700.000	58%	25%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							0	62.638.000					0	62.638.000	#####	#DIV/0!	
1	5	2	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	1.100.000.000	3	64.622.000	4	188.810.000					7	253.432.000	58%	23%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	3.010.519.300	4	3.400.000	8	362.226.100		-		-	12	365.626.100	12%	12%	
1	5	2	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4	2.288.638.100	0	-	0	341.368.100					0	341.368.100	0%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	721.881.200	4	3.400.000	3	20.858.000					7	24.258.000	58%	3%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	%	80	323.312.000	0	-	0	7.862.000		-		-	0	7.862.000	0%	2%	
1	5	2	2.03	6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	12	323.312.000	0	-	0	7.862.000					0	7.862.000	0%	2%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	1.974.373.000	0	134.072.100	0	194.627.250		-		-	100	328.699.350	100%	17%	
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penangangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	1.774.373.000	25	134.072.100	25	194.627.250		-		-	50	328.699.350	50%	19%	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	6	1.434.995.000	0	116.390.950	0	162.806.750					0	279.197.700	0%	19%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6	339.378.000	9	17.681.150	0	31.820.500					9	49.501.650	150%	15%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	%	90	200.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	6	200.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rata - Rata Capaian Kinerja																				38%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					21%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	82	2.719.029.000	0	540.203.936	0	428.322.879		-		-	0	968.526.815	0%	36%	
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	3.525.000	25	480.000	25	-		-		-	50	480.000	50%	14%	
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	3.525.000	2	480.000	1	0					3	480.000	50%	14%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	1.856.427.000	25	317.736.096	25	328.910.689		-		-	50	646.646.785	50%	35%	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1.856.427.000	12	317.736.096	12	328.910.689					12	646.646.785	100%	35%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	200.000.000	25	23.784.805	25	15.584.280		-		-	50	39.369.085	50%	20%	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	200.000.000	3	23.784.805	3	15.584.280					6	39.369.085	25%	20%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	17.600.000	100	16.300.000	0	-		-		-	100	16.300.000	100%	93%	
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	17.600.000	3	16.300.000	0	0					3	16.300.000	100%	93%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	485.599.000	25	143.821.035	25	41.126.600		-		-	50	184.947.635	50%	38%	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	485.599.000	3	143.821.035	3	41.126.600					6	184.947.635	50%	38%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	155.878.000	25	38.082.000	25	42.701.310		-		-	50	80.783.310	50%	52%	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	321.347.000	2	36.340.500	2	39.739.810					4	76.080.310	50%	24%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	30.400.000	3	1.741.500	2	2.961.500					5	4.703.000	100%	15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	1.846.098.000	0	290.027.500	0	218.847.402		-		-	0	508.874.902	0%	28%	
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	73.985.000	0	25.687.500	0	550.000		-		-	0	26.237.500	0%	35%	
1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	300	73.985.000	100	25.687.500	0	550.000					100	26.237.500	33%	35%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	1.494.715.000	25	205.542.000	25	203.327.402		-		-	50	408.869.402	50%	27%	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	9	54.441.000	0	0		27.474.000					0	27.474.000	0%	50%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	37	1.066.200.000	37	148.000.000	37	148.000.000					37	296.000.000	100%	28%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	1	48.000.000	0	0					1	48.000.000	100%	48%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	300	58.854.000	0	0	100	11.838.000					100	11.838.000	33%	20%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	5	54.045.000	1	9.542.000	0	0					1	9.542.000	20%	18%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	5	3	2.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	200	161.175.000	0	0	0	16.015.402					0	16.015.402	0%	10%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	155.075.000	0	22.140.000	0	14.970.000		-		-	0	37.110.000	0%	24%	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	12	116.550.000	36	14.970.000	47	14.970.000					47	29.940.000	392%	26%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	12	38.525.000	0	7.170.000	0	0					0	7.170.000	0%	19%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	122.323.000	50	36.658.000	0	-		-		-	50	36.658.000	50%	30%	
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	122.323.000	0		0	0					0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					0	36.658.000	0	0					0	36.658.000	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rata - Rata Capaian Kinerja																				52%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					28%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				25.473.007.331													
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	nilai	A	8.625.032.816	0	1.387.954.013	0	1.312.615.623		-		-	0	2.700.569.636	0%	31%	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	266.283.950	25	73.649.324	25	13.543.000		-		-	50	87.192.324	50%	33%	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	129.757.550	1	65.287.640	1	13.543.000					2	78.830.640	50%	61%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	24.684.200	1	3.987.478	1	0					2	3.987.478	50%	16%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	111.842.200	2	4.374.206	0	0					2	4.374.206	100%	4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	%	100	5.979.126.761	25	986.094.377	25	1.060.897.059		-		-	50	2.046.991.436	50%	34%	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	5.833.748.161	32	971.301.777	32	1.050.337.606					32	2.021.639.383	91%	35%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	145.378.600	3	14.792.600	5	10.559.453					8	25.352.053	62%	17%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	%	100	98.278.000	25	13.331.000	25	8.437.000		-		-	50	21.768.000	50%	22%	
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	59	54.376.000	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	58	43.902.000	0	13.331.000	0	8.437.000					0	21.768.000	0%	50%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	475.630.000	25	29.494.734	25	37.830.000		-		-	50	67.324.734	50%	14%	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	60	475.630.000	13	29.494.734	11	37.830.000					24	67.324.734	40%	14%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	%	100	100.095.070	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	110	100.095.070	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.198.648.740	25	218.311.652	25	145.680.909		-		-	50	363.992.561	50%	30%	
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	883.348.740	3	126.601.652	3	76.535.909					6	203.137.561	50%	23%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	315.300.000	3	91.710.000	3	69.145.000					6	160.855.000	50%	51%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	506.970.295	25	67.072.926	25	46.227.655		-		-	50	113.300.581	50%	22%	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	233.514.500	0	16.867.620	6	20.545.410					6	37.413.030	100%	16%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	2	182.421.075	1	35.301.306	1	20.556.645					2	55.857.951	100%	31%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	110	91.034.720	10	14.904.000	10	5.125.600					20	20.029.600	18%	22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	58	4.351.382.713	0	151.521.487	0	292.143.000		-		-	0	443.664.487	0%	10%	
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	%	58	4.351.382.713	0	151.521.487	0	292.143.000		-		-	0	443.664.487	0%	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	214	682.439.273	208	46.795.000	1	113.020.000					209	159.815.000	98%	23%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten /Kota	Orang	3	53.291.776	3	6.751.182	0	7.159.400					3	13.910.582	100%	26%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	370.112.196	1	8.645.805	3	7.597.000					4	16.242.805	80%	4%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	14	3.245.539.468	14	89.329.500	0	164.366.600					14	253.696.100	100%	8%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	4.534.633.481	0	271.585.482	0	674.417.540		-			0	946.003.022	0%	21%	
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	3.944.103.151	0	172.707.732	0	581.503.300		-			0	754.211.032	0%	19%	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	170.896.000	9	27.103.500	9	27.640.200					18	54.743.700	11%	32%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	63	15.332.431	0	58.548.232	31	40.127.100					31	98.675.332	49%	644%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	26.308.000	3	9.677.000	0	13.200.000					3	22.877.000	38%	87%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	22.560.000	3	3.240.000	2	3.500.000					5	6.740.000	63%	30%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	9.500.000	90	4.500.000	0	1.900.000					90	6.400.000	53%	67%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	3.627.186.820	0	38.393.000	54	441.130.000					54	479.523.000	19%	13%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	72.319.900	8	31.246.000	0	54.006.000					8	85.252.000	67%	118%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	590.530.330	0	98.877.750	0	92.914.240		-		-	0	191.791.990	0%	32%	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	209.180.500	9	31.755.000	4	36.960.000					13	68.715.000	37%	33%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	86.366.000	126	13.650.400	0	15.597.400					126	29.247.800	79%	34%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	105	42.790.000	10	3.784.800	0	3.500.000					10	7.284.800	10%	17%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	20.242.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	25.311.830	10	15.854.550	32	1.033.840					42	16.888.390	49%	67%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	73.800.000	115	12.300.000	0	13.550.000					115	25.850.000	72%	35%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	121.560.000	75	21.533.000	0	21.533.000					75	43.066.000	100%	35%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	11.280.000	10	0	0	740.000					10	740.000	67%	7%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	91	13.234.529.873	0	877.340.773	0	2.526.271.570		-		-	0	3.403.612.343	0%	26%	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	95	7.714.520	0	400.000	0	-		-		-	0	400.000	0%	5%	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	3.524.400	3	350.000	0	0					3	350.000	38%	10%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	3.994.320	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	195.800	1	50.000	0	0					1	50.000	25%	26%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	13.226.815.353	0	876.940.773	0	2.526.271.570		-		-	0	3.403.212.343	0%	26%	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	24685	1.052.819.092	25410	85.602.100	0	227.403.000					25410	313.005.100	103%	30%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	4000	574.054.895	3600	232.521.000	0	1.350.000					3600	233.871.000	90%	41%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Keluarga	4000	11.294.425.192	508	521.539.873	327	2.245.955.110					835	2.767.494.983	21%	25%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	305.516.174	0	37.277.800	17	51.563.460					17	88.841.260	43%	29%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	841.306.615	0	51.479.500	0	53.335.200		-		-	0	104.814.700	0%	12%	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	%	100	71.085.159	0	3.053.500	0	5.500.200		-		-	0	8.553.700	0%	12%	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	34.971.362	5	3.053.500	0	5.500.200					5	8.553.700	29%	24%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	13.507.797	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	22.606.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	%	100	770.221.456	0	48.426.000	0	47.835.000		-		-	0	96.261.000	0%	12%	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	160.900.608	1	9.091.000	0	0					1	9.091.000	100%	6%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	609.320.848	26	39.335.000	0	47.835.000					30	87.170.000	115%	14%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	182.250.680	0	15.065.500	0	19.419.000		-		-	0	34.484.500	0%	19%	
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100	182.250.680	0	15.065.500	0	19.419.000		-		-	0	34.484.500	0%	19%	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	966	162.203.105	966	15.065.500	0	19.419.000					966	34.484.500	100%	21%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.823.191.100													
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	100	1.636.275.500	0	122.159.710	0	159.997.700		-		-	0	282.157.410	0%	17%	
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	%	100	121.013.500	0	42.891.910	0	7.835.300		-		-	0	50.727.210	0%	42%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	34	55.940.500	12	29.500.900	0	0					12	29.500.900	35%	53%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	34	46.525.000	10	13.391.010	0	7.835.300					10	21.226.310	29%	46%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	9.635.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	34	8.913.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	%	32,5	91.476.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	34.946.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	30	56.530.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	%	55	1.423.786.000	0	79.267.800	0	152.162.400		-		-	0	231.430.200	0%	16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	580	1.266.944.900	40	79.267.800	144	151.342.400					184	230.610.200	32%	18%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	156.841.100	0	0	0	820.000					0	820.000	0%	1%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	402.159.225	0	63.113.503	0	46.660.500		-		-	0	109.774.003	0%	27%	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	%	100	205.868.335	0	27.704.600	0	21.060.500		-		-	0	48.765.100	0%	24%	
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	56.777.490	0	-	0	21.060.500					0	21.060.500	0%	37%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	27	149.090.845	27	27.704.600	0	0					27	27.704.600	100%	19%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	%	95	174.426.250	0	31.068.919	0	25.600.000		-		-	0	56.668.919	0%	32%	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	20	174.426.250	20	31.068.919	0	25.600.000					20	56.668.919	100%	32%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	%	100	21.864.640	0	4.339.984	0	-		-		-	0	4.339.984	0%	20%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	3	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	12	12.421.995	0	4.339.984	6	0					6	4.339.984	50%	35%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	9.442.645	0	6.666.200	0	0					0	6.666.200	0%	71%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	30	370.890.700	0	74.753.750	0	23.732.577		-		-	0	98.486.327	0%	27%	
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	%	100	242.621.200	0	55.454.150	0	20.432.577		-		-	0	75.886.727	0%	31%	
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	3	101.415.200	1	36.263.150	0	20.432.577					1	56.695.727	33%	56%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	141.206.000	0	19.191.000	0	0					0	19.191.000	0%	14%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	%	100	128.269.500	0	19.299.600	0	3.300.000		-		-	0	22.599.600	0%	18%	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	128.269.500	30	19.299.600	0	3.300.000					30	22.599.600	20%	18%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dokumen	1	172.929.700	0	6.780.000	0	20.769.768		-		-	0	27.549.768	0%	16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	%	100	172.929.700	0	6.780.000	0	20.769.768		-		-	0	27.549.768	0%	16%	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	96.059.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	76.870.700	0	6.780.000	0	20.769.768					0	27.549.768	0%	36%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,2	438.450.000	0	61.627.269	0	25.814.000		-		-	0	87.441.269	0%	20%	
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	%	38	64.200.000	0	31.629.069	0	9.409.200		-		-	0	41.038.269	0%	64%	
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	64.200.000	0	31.629.069	0	9.409.200					0	41.038.269	0%	64%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	27	374.250.000	0	29.998.200	0	16.404.800		-		-	0	46.403.000	0%	12%	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	24.250.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130.000.000	0	16.250.500	0	11.994.800					0	28.245.300	0%	22%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	175.000.000	0	13.747.700	0	4.410.000					0	18.157.700	0%	10%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	8	6	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	45.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,04	92.735.678	0	2.510.000	0	-		-		-	0	2.510.000	0%	3%	
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	%	69,5	28.235.700	0	1.200.000	0	-		-		-	0	1.200.000	0%	4%	
2	8	7	2.01	3	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	1	28.235.700	0	1.200.000	0	1.800.000					0	3.000.000	0%	11%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	%	100	41.749.118	0	900.000	0	-		-		-	0	900.000	0%	2%	
2	8	7	2.02	5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	12	10.350.000	0	900.000	0	0					0	900.000	0%	9%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.02	6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	12	31.399.118	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	%	100	22.750.860	0	410.000	0	-		-		-	0	410.000	0%	2%	
2	8	7	2.03	5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1	22.750.860	0	410.000	0	0					0	410.000	0%	2%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																			Rata - Rata Capaian Kinerja	9%		
																			Rata - Rata Capaian Keuangan		19%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9.055.368.662													
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	%	80,04	7.987.563.636	0	1.229.725.425	0	1.079.190.992		-		-	0	2.308.916.417	0%	29%	
2	7	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	71.280.000	25	4.764.000	25	27.234.600		-		-	50	31.998.600	50%	45%	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	71.280.000	1	4.764.000	2	27.234.600					3	31.998.600	50%	45%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.448.963.296	25	865.705.913	25	912.765.262		-		-	50	1.778.471.175	50%	33%	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	5.448.963.296	36	865.705.913	36	912.765.262					36	1.778.471.175	100%	33%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100	200.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	200.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1.074.045.340	25	133.683.687	25	92.286.030		-		-	50	225.969.717	50%	21%	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	708.302.480	1	110.763.766	2	66.265.639					3	177.029.405	33%	25%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	365.742.860	5	22.919.921	7	26.020.391					12	48.940.312	16%	13%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	%	100	630.000.000	25	185.306.100	0	11.700.000		-		-	25	197.006.100	25%	31%	
2	7	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	35.000.000	0	-	0	11.700.000					0	11.700.000	0%	33%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	395.000.000	0	185.306.100	0	0					0	185.306.100	0%	47%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	563.275.000	25	40.265.725	25	35.205.100		-		-	50	75.470.825	50%	13%	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	70.000.000	5	9.270.175	7	12.135.000					12	21.405.175	63%	31%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	460.000.000	1	22.745.550	0	21.045.100					1	43.790.650	33%	10%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	47	33.275.000	0	8.250.000	11	2.025.000					11	10.275.000	23%	31%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	50	2.381.874.990	0	140.930.800	0	633.378.200		-		-	0	774.309.000	0%	33%	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang	112	2.329.738.860	0	140.930.800	0	632.653.700		-		-	0	773.584.500	0%	33%	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	112	2.329.738.860	12	140.930.800	23	632.653.700					35	773.584.500	31%	33%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	%	50	22.700.000	0	-	0	724.500		-		-	0	724.500	0%	3%	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	40	22.700.000	0	-	0	724.500					0	724.500	0%	3%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	perusahaan	30	29.436.130	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	29.436.130	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	15	568.926.682	0	29.104.920	0	42.287.194		-		-	0	71.392.114	0%	13%	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Orang	235	568.926.682	0	29.104.920	0	42.287.194		-		-	0	71.392.114	0%	13%	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	107.530.900	0	24.704.920	0	16.126.200					0	40.831.120	0%	38%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	150	95.725.782	0	4.400.000	8	26.160.994					8	30.560.994	5%	32%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	50	365.670.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	%	16	3.913.263.007	0	619.958.790	0	408.381.655		-		-	0	1.028.340.445	0%	26%	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	Perusahaan	50	338.178.707	0	9.999.000	0	18.921.800		-		-	0	28.920.800	0%	9%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20	112.744.100	0	9.999.000	0	6.586.800					0	16.585.800	0%	15%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	225.434.607	0	-	0	12.335.000					0	12.335.000	0%	5%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	%	75	3.575.084.300	0	609.959.790	0	389.459.855		-		-	0	999.419.645	0%	28%	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	15	75.931.500	0	4.400.000	0	5.300.000					0	9.700.000	0%	13%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10000	3.499.152.800	971	605.559.790	351	384.159.855					1322	989.719.645	13%	28%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				704.690.406													
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	75	551.862.500	0	-	0	127.147.900		-		-	0	127.147.900	0%	23%	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	koperasi	40	551.862.500	0	-	0	127.147.900		-		-	56	127.147.900	140%	23%	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	90	551.862.500	0	-	29	127.147.900					29	127.147.900	32%	23%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,5	135.918.800	0	-	0	900.000		-		-	0	900.000	0%	1%	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	koperasi	5	135.918.800	0	-	0	900.000		-		-	0	900.000	0%	1%	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	unit usaha	0	-	0	-							0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	60	135.918.800	0	-	0	900.000					0	900.000	0%	1%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	8	521.484.659	0	17.538.134	0	20.756.200		-		-	0	38.294.334	0%	7%	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	orang	12	521.484.659	0	17.538.134	0	20.756.200		-		-	0	38.294.334	0%	7%	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150	521.484.659	0		0	20.756.200					0	20.756.200	0%	4%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				300.288.388													
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	5	2.680.533.860	0	54.837.050	0	57.870.000		-		-	0	112.707.050	0%	4%	
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	IKM	15	2.680.533.860	0	54.837.050	0	57.870.000		-		-	0	112.707.050	0%	4%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	284.880.000	0	-	0	52.070.000					0	52.070.000	0%	18%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	50.000.000	0	25.336.000	0	1.400.000					0	26.736.000	0%	53%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	2.345.653.860	0	29.501.050	0	4.400.000					0	33.901.050	0%	1%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	10	532.473.704	0	19.279.500	0	16.000.000		-		-	0	35.279.500	0%	7%	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	IKM	20	532.473.704	0	19.279.500	0	16.000.000		-		-	0	35.279.500	0%	7%	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	2	532.473.704	0	19.279.500	0	16.000.000					0	35.279.500	0%	7%	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Rata - Rata Capaian Kinerja																				14%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2024) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV						
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				6.722.846.900													
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	A	7.756.434.000	0	990.562.503	0	1.010.311.071		-		-	0	2.000.873.574	#VALUE!	26%	
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	%	100	129.747.100	37,5	27.342.500	20	10.445.000		-		-	57,5	37.787.500	58%	29%	
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	8	129.747.100	3	27.342.500	2	10.445.000					5	37.787.500	63%	29%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.160.362.271	16,6	770.374.717	25	816.132.221		-		-	41,6	1.586.506.938	42%	31%	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	27	5.160.362.271	26	770.374.717	0	816.132.221					26	1.586.506.938	96%	31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	42.785.860	0	6.240.000	40	4.000.000		-		-	40	10.240.000	40%	24%	
2	9	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	42.785.860	0	6.240.000	1	4.000.000					1	10.240.000	33%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	1.081.953.000	25	144.062.004	20	126.927.800		-		-	45	270.989.804	45%	25%	
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	19	726.000.000	4	109.067.200	5	103.742.800					9	212.810.000	47%	29%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	55.953.000	3	13.184.500	2	7.944.000					5	21.128.500	42%	38%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	300.000.000	3	21.810.304	2	15.241.000					5	37.051.304	42%	12%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	680.976.503	0	-	0	4.944.840		-		-	0	4.944.840	0%	1%	
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	347.451.000	0	-	1	-					1	-	100%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	117.150.000	0	-	0	4.944.840					0	4.944.840	0%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	216.375.503	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	660.609.266	25	42.543.282	20	47.861.210		-		-	45	90.404.492	45%	14%	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35	110.548.000	6	21.691.067	4	17.717.577					10	39.408.644	29%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	36.022.500	4	1.680.890	3	5.738.633					7	7.419.523	47%	21%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit/tahun	3	475.267.766	1	14.489.825	1	22.655.000					2	37.144.825	67%	8%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	75	38.771.000	8	4.681.500	25	1.750.000					33	6.431.500	44%	17%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	%	100	289.962.000	0	69.706.250	0	33.864.000		-		-	0	103.570.250	0%	36%	
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	%	100	224.125.000	0	30.682.200	0	28.241.500		-		-	0	58.923.700	0%	26%	
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	1	173.500.000	0	26.907.700	0	18.463.000					0	45.370.700	0%	26%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Dokumen	0	-	0		0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	2	17.200.000	0	574.500	0	5.078.500					0	5.653.000	0%	33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	4	33.425.000	0	3.200.000	0	4.700.000					0	7.900.000	0%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	kkal/kapita	2000	165.000.000	0	39.024.050	0	5.622.500		-		-	0	44.646.550	0%	27%	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	43.700.000	0	-	0	1.622.500					0	1.622.500	0%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	121.300.000	0	39.024.050	0	4.000.000					0	43.024.050	0%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	%	22	58.200.000	0	8.000.000	0	13.167.600		-		-	0	21.167.600	0%	36%	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Dokumen	1	58.200.000	0	8.000.000	0	13.167.600		-		-	0	21.167.600	0%	36%	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	58.200.000	0	8.000.000	0	13.167.600					0	21.167.600	0%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar aman yang teruji	%	80	87.656.000	0	8.669.800	0	-		-		-	0	8.669.800	0%	10%	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	lokasi	8	87.656.000	0	8.669.800	0	-		-		-	0	8.669.800	0%	10%	
				7	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	60.656.000	0	856.500	0	49.112.500					0	49.969.000	0%	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				9	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	27.000.000	0	7.813.300	0	1.594.650					0	9.407.950	0%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				408.932.000													
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Ton	290	415.805.000	91,8	54.301.501	56,5	40.083.490		-		-	148	94.384.991	51%	23%	
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	RTP	260	415.805.000	60	54.301.501	50	40.083.490		-		-	110	94.384.991	42%	23%	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	1	209.955.000	0	-	0	20.036.000					0	20.036.000	0%	10%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	150.000.000	1	21.475.501	1	15.934.990					2	37.410.491	50%	25%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	120	55.850.000	50	32.826.000	0	4.112.500					50	36.938.500	42%	66%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Ton	89	71.250.000	25,1	4.000.000	17,5	27.426.200		-		-	42,6	31.426.200	48%	44%	
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	435	71.250.000	100	4.000.000	100	27.426.200		-		-	200	31.426.200	46%	44%	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	71.250.000	0	4.000.000	0	27.426.200					0	31.426.200	0%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Makan Ikan	Kg/Kapita/tahun	16,5	291.700.000	0	7.943.752	0	59.024.529		-		-	0	66.968.281	0%	23%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	orang	50	75.000.000	12	4.000.000	8	4.000.000		-		-	20	8.000.000	40%	11%	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	75.000.000	12	4.000.000	8	4.000.000					20	8.000.000	67%	11%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	ton	26	216.700.000	9	3.943.752	6	55.024.529		-		-	15	58.968.281	58%	27%	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	14	216.700.000	0	3.943.752	0	55.024.529					0	58.968.281	0%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.876.652.000													
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	%	65	2.000.624.000	20	35.873.000	15	1.718.455.300		-		-	35	1.754.328.300	54%	88%	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	80	1.988.175.000	15	19.598.000	15	1.705.955.300		-		-	30	1.725.553.300	38%	87%	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	21.000.000	0	10.850.000	0	12.350.000					0	23.200.000	0%	110%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1.967.175.000	0	8.748.000	0	1.693.605.300					0	1.702.353.300	0%	87%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	71.400.000	20	16.275.000	20	12.500.000		-		-	40	28.775.000	53%	40%	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	71.400.000	3	16.275.000	3	12.500.000					6	28.775.000	50%	40%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	%	100	233.727.000	0	87.535.000	0	122.812.925		-		-	0	210.347.925	0%	90%	
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	%	100	204.833.120	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	Laporan	1	9.613.280	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.01	16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	195.219.840	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun /rehabilitasi /dipelihara	%	25	4.583.995.300	0	87.535.000	0	122.812.925		-		-	0	210.347.925	0%	5%	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	2.461.188.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	1.161.940.000	0	77.075.000	0	117.452.925					0	194.527.925	0%	17%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	2	211.867.300	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1	749.000.000	0	10.460.000	0	5.360.000					0	15.820.000	0%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10	260.856.000	0	49.172.800	0	85.256.875		-		-	0	134.429.675	0%	52%	
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	259.000.000	10	25.000.000	20	74.771.475		-		-	30	99.771.475	38%	39%	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	4	259.000.000	1	25.000.000	1	74.771.475					2	99.771.475	50%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)	jenis	1	15.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	Laporan	1	23.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	90.059.000	10	24.172.800	20	10.485.400		-		-	30	34.658.200	38%	38%	
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	10	85.000.000	3	24.172.800	3	10.485.400					6	34.658.200	60%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan aman bencana pertanian	%	76	112.370.000	0	-	40	42.275.280		-		-	40	42.275.280	53%	38%	
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahun	2000	112.370.000	0	-	2452	42.275.280		-		-	2452	42.275.280	123%	38%	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	121.200.000	0	-	30,9	42.275.280					30,9	42.275.280	62%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	%	15	33.600.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	jenis	2	33.600.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	33.600.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	%	40	235.475.000	0	134.008.700	45	278.978.000		-		-	45	412.986.700	113%	175%	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	orang	400	235.475.000	0	134.008.700	517	278.978.000		-		-	517	412.986.700	129%	175%	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	38	2.496.192.336	0	134.008.700	38	278.978.000					38	412.986.700	100%	17%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
																				Rata - Rata Capaian Kinerja	29%	
																				Rata - Rata Capaian Keuangan	49%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				24.949.715.626													
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Skor	A	18.464.499.567	0	3.139.411.128	0	3.037.340.046		-		-	0	6.176.751.174	0%	33%	
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100.000.000	25	9.302.000	25	70.158.000		-		-	50	79.460.000	50%	79%	
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	100.000.000	0	9.302.000	3	70.158.000					3	79.460.000	50%	79%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	8.921.941.242	25	1.569.726.828	35,71	1.507.451.596		-		-	60,71	3.077.178.424	61%	34%	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	75	8.921.941.242	75	1.569.726.828	66	1.507.451.596					66	3.077.178.424	88%	34%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	300.000.000	25	77.795.250	75	61.815.600		-		-	100	139.610.850	100%	47%	
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	150.000.000	1	74.445.250	2	45.800.600					3	120.245.850	100%	80%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	250	150.000.000	0	3.350.000	250	16.015.000					250	19.365.000	100%	13%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	325.000.000	25	15.150.100	41,66	33.093.100		-		-	66,66	48.243.200	67%	15%	
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	325.000.000	0	15.150.100	4	33.093.100					4	48.243.200	33%	15%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	247.070.000	25	21.247.550	50	11.733.000		-		-	75	32.980.550	75%	13%	
2	11	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	8	178.750.000	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	68.320.000	0	21.247.550	2	11.733.000					2	32.980.550	100%	48%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.881.317.825	25	1.020.181.150	25	1.134.708.800		-		-	50	2.154.889.950	50%	31%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	721.441.825	1	155.380.350	1	106.250.600					4	261.630.950	100%	36%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	6.159.876.000	2	864.800.800	2	1.028.458.200					4	1.893.259.000	33%	31%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	1.689.170.500	25	426.008.250	12,5	218.379.950		-		-	0	644.388.200	0%	38%	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	1.369.726.500	4	302.863.400	2	204.213.150					6	507.076.550	38%	37%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	15	169.444.000	5	23.481.850	1	14.166.800					6	37.648.650	40%	22%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	150.000.000	1	99.663.000	2	0					3	99.663.000	100%	66%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	%	79,5	337.000.000	0	3.960.000	0	6.820.000		-		-	0	10.780.000	0%	3%	
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	dokumen	1	148.000.000	0	3.960.000	0	4.470.000		-		-	0	8.430.000	0%	6%	
2	11	2	2.01	6	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	dokumen	1	148.000.000	0	3.960.000	0	4.470.000					0	8.430.000	0%	6%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	dokumen	1	189.000.000	0	-	0	2.350.000		-		-	0	2.350.000	0%	1%	
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1	189.000.000	0	0	0	2.350.000					0	2.350.000	0%	1%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	50,1	1.721.003.971	0	341.088.050	12,39	120.157.450		-		-	12,39	461.245.500	25%	27%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	kegaitan/ usaha	79	1.168.183.375	0	311.811.100	34	91.613.850		-		-	34	403.424.950	43%	35%	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	1	399.863.375	0	68.361.100	0	52.647.850					0	121.008.950	0%	30%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	768.320.000	0	243.450.000	0	38.966.000					0	282.416.000	0%	37%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah usaha / kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	usaha/ kegaitan	18	552.820.596	0	29.276.950	9	28.543.600		-		-	9	57.820.550	50%	10%	
2	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	laporan	2	283.587.796	0	14.957.950	1	7.065.100					1	22.023.050	50%	8%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	2	269.232.800	0	14.319.000	1	21.478.500					1	35.797.500	50%	13%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	100	50.000.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	11	4	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	spesies	342	50.000.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	78	59.000.000	0	0	30	-		-		-	30	-	38%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	5	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	lokasi	17	59.000.000	0	0	10	-		-		-	10	-	59%	0%	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	dokumen	5	59.000.000	0	0	3	0					3	-	60%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	88,2	350.150.000	0	10.040.000	80	36.869.500		-		-	80	46.909.500	91%	13%	
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	perusahaan	18	350.150.000	0	10.040.000	7	36.869.500		-		-	7	46.909.500	39%	13%	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	4	220.150.000	0	10.040.000	2	23.086.500					2	33.126.500	50%	15%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah	laporan	0	0	0	0	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	5	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	10	130.000.000	0	0	4	13.783.000					4	13.783.000	40%	11%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	%	100	756.416.000	0	41.800.700	30	24.057.500		-		-	30	65.858.200	30%	9%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	kegiatan	15	756.416.000	0	41.800.700	3	24.057.500		-		-	3	65.858.200	20%	9%	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	4	756.416.000	0	41.800.700	1	24.057.500					1	65.858.200	25%	9%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	309.000.000	0	38.233.250	40	50.135.000		-		-	40	88.368.250	40%	29%	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	kasus	5	309.000.000	0	38.233.250	2	50.135.000		-		-	2	88.368.250	40%	29%	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	0	0	0	0	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	4	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	5	159.000.000	0	14.386.500	2	19.955.000					2	34.341.500	40%	22%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	5	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	5	150.000.000	1	23.846.750	2	30.180.000					3	54.026.750	60%	36%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	persen	71	7.844.373.425	0	471.996.750	71,04	225.764.650		-		-	71,04	697.761.400	100%	9%	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	ton	43780	7.639.373.425	0	468.946.750	16932,68	225.764.650		-		-	16932,68	694.711.400	39%	9%	
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	lokasi	2	0	0	0	0	0					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	32280	0	0	0	0	0					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	41	199.000.000	0	95.432.650	2	0					2	95.432.650	5%	48%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	3	2.423.973.425	0	55.500.050	2	0					2	55.500.050	67%	2%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	5	750.000.000	0	20.590.000	1,5	11.637.000					1,5	32.227.000	30%	4%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	Ton	32.280	4.266.400.000	0	297.424.050	12029,5	214.127.650					12029,5	511.551.700	37%	12%	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	kelompok	45	205.000.000	0	3.050.000	20	-		-		-	20	3.050.000	44%	1%	
2	11	11	2.03	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	unit	3	205.000.000	0	3.050.000	0	0					0	3.050.000	0%	1%	Dinas Lingkungan Hidup
Rata - Rata Capaian Kinerja																				40%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					14%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.256.376.777													
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	81,6	8.703.524.960	84,4	1.418.297.926	0	1.819.214.539		-		-	84,4	3.237.512.465	103%	37%	
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	233.638.000	25	0	17	69.300		-		-	42	69.300	42%	0%	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	3.996.000	3	0	2	69.300					5	69.300	42%	2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	229.642.000	3	0	3	0					6	-	50%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100	5.030.281.080	25	788.476.174	17	866.444.709		-		-	42	1.654.920.883	42%	33%	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	4.951.601.080	29	788.476.174	28	847.274.709					28	1.635.750.883	97%	33%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	78.680.000	3	0	2	19.170.000					5	19.170.000	42%	24%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	200.000.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	orang	148	200.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	orang	47	21.312.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	916.134.800	25	246.786.152	17	239.075.580		-		-	42	485.861.732	42%	53%	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	484.334.800	3	144.969.588	2	223.199.080					5	368.168.668	42%	76%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	76.800.000	3	24.740.000	2	1.817.500					5	26.557.500	42%	35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	65.000.000	3	2.975.000	2	5.630.000					5	8.605.000	42%	13%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	290.000.000	3	74.101.564	2	8.429.000					5	82.530.564	42%	28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.084.000.000	25	200.390.000	17	416.625.000		-		-	42	617.015.000	42%	57%	
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	9	1.084.000.000	6	200.390.000	21	416.625.000					27	617.015.000	300%	57%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	674.584.000	25	96.496.400	17	102.770.450		-		-	63	199.266.850	63%	30%	
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	674.584.000	3	96.496.400	2	102.770.450					5	199.266.850	42%	30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	564.887.080	25	86.149.200	25	194.229.500		-		-	50	280.378.700	50%	50%	
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	21	76.000.000	5	8.806.500	1	4.043.300					6	12.849.800	29%	17%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	45.000.000	1	6.489.500	4	800.000					5	7.289.500	167%	16%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	2	28.000.000	1	0	1	595.000					2	595.000	100%	2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	312.887.080	1	41.336.300	1	170.940.000					2	212.276.300	200%	68%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	90	103.000.000	10	29.516.900	25	17.851.200					35	47.368.100	39%	46%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	85	218.712.325	92,3	12.855.000	100	9.000.000		-		-	192	21.855.000	226%	10%	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	%	100	183.900.000	25	12.855.000	100	9.000.000		-		-	125	21.855.000	125%	12%	
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	laporan	12	106.900.000	3	11.100.000	2	9.000.000					5	20.100.000	42%	19%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	12	77.000.000	3	1.755.000	2	0					5	1.755.000	42%	2%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	laporan	12	34.812.325	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	12	2	2.03	3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	laporan	12	34.812.325	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94,75	310.296.000	91,3	4.428.900	0	-		-			91,3	4.428.900	96%	1%	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	%	100	184.296.000	25	4.428.900	0	-		-			0	4.428.900	0%	2%	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	dokumen	12	110.126.000	3	0	0	0					3	-	25%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	layanan	4	74.170.000	1	4.428.900	0	-					1	4.428.900	25%	6%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	laporan	12	126.000.000	0		0						0	-	0%	0%	
2	12	3	2.02	3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	laporan	12	126.000.000	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	%	99,2	304.200.000	0	23.520.000	100	10.600.000		-		-	100	34.120.000	101%	11%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	%	100	175.820.000	25	23.520.000	25	10.600.000		-		-	50	34.120.000	50%	19%	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	dokumen	2	102.200.000	0	20.000.000	0	9.000.000					0	29.000.000	0%	28%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	dokumen	17	73.620.000	0	3.520.000	34	1.600.000					17	5.120.000	100%	7%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	128.380.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	laporan	12	128.380.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rata - Rata Capaian Kinerja																				58%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					15%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				18.539.553.696													
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	81	11.280.000.000	0	2.149.403.023	0	1.848.547.445		-		-	0	3.997.950.468	0%	35%	
2	15	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	55.000.000	25	10.100.510	25	9.381.000		-		-	50	19.481.510	50%	35%	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	55.000.000	2	10.100.510	2	9.381.000					4	19.481.510	67%	35%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	6.750.000.000	25	1.142.491.093	25	1.138.499.838		-		-	50	2.280.990.931	50%	34%	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	125	6.750.000.000	125	1.142.491.093	125	1.138.499.838					125	2.280.990.931	100%	34%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	200.000.000	100	94.482.000	0	670.000		-		-	100	95.152.000	100%	48%	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	200.000.000	1	94.482.000	0	670.000					1	95.152.000	100%	48%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	%	100	400.000.000	15	23.844.094	25	52.775.500		-		-	40	76.619.594	40%	19%	
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	400.000.000	10	23.844.094	20	52.775.500					30	76.619.594	50%	19%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	%	100	225.000.000	25	170.951.800	25	-		-		-	50	170.951.800	50%	76%	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	25.000.000	1	25.034.000	0	0					1	25.034.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200.000.000	10	145.917.800	0	0					10	145.917.800	100%	73%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	%	100	2.300.000.000	25	465.238.811	25	308.532.875		-		-	50	773.771.686	50%	34%	
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	23	2.300.000.000	23	465.238.811	0	308.532.875					2	773.771.686	9%	34%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	1.350.000.000	25	242.294.715	25	338.688.232		-		-	50	580.982.947	50%	43%	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	59	900.000.000	59	164.430.165	0	87.761.968					59	252.192.133	100%	28%	Dinas Perhubungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	0	40.321.150	2	239.560.974					2	279.882.124	100%	93%	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150.000.000	20	37.543.400	0	11.365.290					10	48.908.690	100%	33%	Dinas Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	100	8.880.210.971	0	930.135.515	80	2.838.238.598		-		-	80	3.768.374.113	80%	42%	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentasi perlengkapan jalan yang berfugsi baik	%	100	3.785.000.000	10	321.655.115	25	1.791.981.530		-		-	35	2.113.636.645	35%	56%	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	2	350.000.000	0	14.190.240	1	121.091.260					1	135.281.500	50%	39%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	1.500.000.000	0	55.642.080	200	849.969.420					200	905.611.500	100%	60%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5	1.935.000.000	2	251.822.795	3	820.920.850					5	1.072.743.645	100%	55%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	%	100	200.000.000	10	21.415.000	90	-		-		-	100	21.415.000	100%	11%	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	-	0		0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	200.000.000	0	21.415.000	0	-					0	21.415.000	0%	11%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase fasilitas terselanggaranya pelayanan parkir	%	100	1.200.000.000	20	112.612.700	30	172.815.800		-		-	50	285.428.500	50%	24%	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1.200.000.000	0	112.612.700	1	172.815.800					1	285.428.500	100%	24%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	%	100	540.000.000	30	94.064.195	50	295.060.145		-		-	80	389.124.340	80%	72%	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2	200.000.000	1	19.931.715	1	86.100.000					2	106.031.715	100%	53%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	12	340.000.000	12	74.132.480	0	208.960.145					12	283.092.625	100%	83%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	568.210.971	25	58.092.780	25	34.224.180		-		-	50	92.316.960	50%	16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	laporan	6	568.210.971	2	58.092.780	2	34.224.180					4	92.316.960	67%	16%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi analalin	%	0	-	0	-	0	-		-		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	-	0	-	0	0					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kebijakan	%	100	987.000.000	25	93.591.900	25	263.104.893		-		-	50	356.696.793	50%	36%	
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	4		0		0						0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1		0		0						1	-	100%	#DIV/0!	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	4	987.000.000	1	93.591.900	1	263.104.893					2	356.696.793	50%	36%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	%	70	1.600.000.000	70	228.703.825	0	281.052.050		-		-	70	509.755.875	100%	32%	
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	33	1.600.000.000	33	228.703.825	0	281.052.050					33	509.755.875	100%	32%	Dinas Perhubungan
																				Rata - Rata Capaian Kinerja		
																				Rata - Rata Capaian Keuangan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				18.921.627.070													
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Skor	A	8.780.709.137	0	1.745.846.610	0	1.665.846.301		-		-	0	3.411.692.911	0%	39%	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	200.000.000	25	28.566.000	25	23.350.000		-		-	50	51.916.000	50%	26%	
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	200.000.000	3	28.566.000	3	23.350.000					6	51.916.000	60%	26%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.380.709.137	25	865.591.714	25	943.791.393		-		-	50	1.809.383.107	50%	34%	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	32	5.380.709.137	32	865.591.714	32	943.791.393					32	1.809.383.107	100%	34%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	400.000.000	25	76.536.912	25	41.549.414		-		-	50	118.086.326	50%	30%	
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	400.000.000	6	76.536.912	23	41.549.414					23	118.086.326	92%	30%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	100.000.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	100.000.000	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	1.100.000.000	25	217.699.881	25	234.825.294		-		-	50	452.525.175	50%	41%	
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.100.000.000	0	217.699.881	1	234.825.294					1	452.525.175	100%	41%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	1.000.000.000	25	333.301.258	25	222.530.200		-		-	50	555.831.458	50%	56%	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	200.000.000	5	61.748.113	4	17.700.700					9	79.448.813	30%	40%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	600.000.000	3	224.150.845	3	199.800.000					3	423.950.845	100%	71%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	50	200.000.000	20	47.402.300	6	5.029.500					26	52.431.800	52%	26%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	%	82	3.830.562.323	82	567.589.164	0	730.911.250		-		-	82	1.298.500.414	100%	34%	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	%	100	3.830.562.323	100	567.589.164	100	730.911.250		-		-	100	1.298.500.414	100%	34%	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	1.555.562.323	3	321.803.400	3	354.752.750					6	676.556.150	50%	43%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	1.200.000.000	3	165.794.934	3	280.587.010					6	446.381.944	50%	37%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						-	0	0									
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	275.000.000	3	30.430.830	3	52.565.490					6	82.996.320	50%	30%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	250.000.000	3	18.190.000	3	9.150.000					6	27.340.000	50%	11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	75	250.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	300.000.000	3	31.370.000	3	33.856.000					6	65.226.000	50%	22%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	19.700.000.000	100	2.470.779.100	100	2.470.850.551		-		-	100	4.941.629.651	100%	25%	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	%	100	15.050.000.000	100	2.133.005.810	100	2.172.246.496		-		-	100	4.305.252.306	100%	29%	
2	16	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150.000.000	0	43.457.909	1	7.617.498					1	51.075.407	100%	34%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	3200	14.900.000.000	3200	2.089.547.901	3200	2.164.628.998					3200	4.254.176.899	100%	29%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	%	100	4.650.000.000	100	337.773.290	100	298.604.055		-		-	100	636.377.345	100%	14%	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2.000.000.000	0	172.840.000	0	50.000.000					0	222.840.000	0%	11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	500.000.000	0	34.809.080	0	73.598.465					0	108.407.545	0%	22%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	750.000.000	3	34.084.830	0	58.298.190					3	92.383.020	100%	12%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	2	250.000.000	2	24.700.000	0	37.050.000					2	61.750.000	100%	25%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	65.000.000	0	18.656.000	1	3.482.300					1	22.138.300	100%	34%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	335.000.000	0	47.770.000	1	54.106.000					1	101.876.000	100%	30%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	750.000.000	0	4.913.380	1	22.069.100					1	26.982.480	100%	4%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				125.000.000													
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	500.000.000	0	24.985.000	1	8.953.900		-		-	1	33.938.900	100%	7%	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey	1	500.000.000	1	24.985.000	1	8.953.900		-		-	1	33.938.900	100%	7%	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1	500.000.000	0	24.985.000	1	8.953.900					1	33.938.900	100%	7%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				292.872.000													
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	331.248.000	100	37.912.000	0	110.356.999		-		-	100	148.268.999	100%	45%	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	JKS	2	331.248.000	2	37.912.000	0	110.356.999		-		-	2	148.268.999	100%	45%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	149.668.000	0	4.185.000	0	0					0	4.185.000	0%	3%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	34	181.580.000	34	33.727.000	34	110.356.999					34	144.083.999	100%	79%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Rata - Rata Capaian Kinerja																				67%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					30%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.177.911.047													
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	80,04	5.905.883.300	0	912.802.778	0	996.898.592		-		-	0	1.909.701.370	0%	32%	
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	45.646.300	14	6.329.600	78	550.000		-		-	92	6.879.600	92%	15%	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	45.646.300	1	6.329.600	3	550.000					4	6.879.600	67%	15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	4.009.723.000	18	704.133.373	19	770.488.690		-		-	37	1.474.622.063	37%	37%	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	4.009.723.000	37	704.133.373	0	770.488.690					26	1.474.622.063	70%	37%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	274.234.000	14	28.970.000	37	76.152.834		-		-	51	105.122.834	51%	38%	
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	274.234.000	15	28.970.000	15	76.152.834					30	105.122.834	60%	38%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	200.000.000	97	19.365.000	0	-		-		-	97	19.365.000	97%	10%	
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	1	19.365.000	0	0					1	19.365.000	100%	10%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	%	100	845.526.000	18	133.859.005	15	117.503.726		-		-	33	251.362.731	33%	30%	
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	38	845.526.000	5	133.859.005	5	117.503.726					10	251.362.731	26%	30%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	%	100	530.754.000	97	20.145.800	0	32.203.342		-		-	97	52.349.142	97%	10%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	97.558.500	2	7.204.800	2	6.512.842					4	13.717.642	20%	14%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	379.280.000	0	3.945.000	1	23.117.500					1	27.062.500	100%	7%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	53.915.500	1	8.996.000	2	2.573.000					3	11.569.000	60%	21%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	persen	100	109.550.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	buah	1	109.550.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
				4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	109.550.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	40	499.328.700	16,4	16.423.000	16,4	89.752.506		-		-	32,8	106.175.506	82%	21%	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor baru	investor	40	499.328.700	12	16.423.000	12	89.752.506		-		-	24	106.175.506	60%	21%	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	499.328.700	0	16.423.000	0	89.752.506					0	106.175.506	0%	21%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	42.577.100	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	90	599.495.000	99,3	57.636.525	99,5	56.688.640		-		-	99,5	114.325.165	111%	19%	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	izin	1700	599.495.000	1716	57.636.525	3126	56.688.640		-		-	4842	114.325.165	285%	19%	
				6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3000	218.534.000	1705	26.496.635	3109	26.166.640					3109	52.663.275	104%	24%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
				7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	25	177.000.000	6	11.787.150	4	8.273.500					10	20.060.650	40%	11%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	180	203.961.000	154	19.352.740	196	22.248.500					196	41.601.240	109%	20%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	perusahaan	120	454.884.000	73	53.469.000	0	64.357.900		-		-	73	117.826.900	61%	26%	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	perusahaan	370	454.884.000	66	53.469.000	0	64.357.900		-		-	427	117.826.900	115%	26%	
2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	7	16.123.500	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	370	396.359.000	66	47.458.000	125	58.067.900					191	105.525.900	52%	27%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	20	42.401.500	11	6.011.000	5	6.290.000					16	12.301.000	80%	29%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100	233.272.400	0	76.586.500	0	12.922.500		-		-	0	89.509.000	0%	38%	
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	jenis izin	52	233.272.400	0	76.586.500	0	12.922.500		-		-	0	89.509.000	0%	38%	
2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	16	233.272.400	4	76.586.500	2	12.922.500					6	89.509.000	38%	38%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				39.101.000													
						Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	%	20	-	0	-	0	-		-		-	0		0%		
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	0rang	40	-	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	#DIV/0!	
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																			Rata - Rata Capaian Kinerja	58%		
																			Rata - Rata Capaian Keuangan		24%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	15	200.000.000	0	-	0	29.960.000		-	-	-	0	29.960.000	0%	15%	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Orang	31	200.000.000	0	-	0	29.960.000		-	-	-	0	29.960.000	0%	15%	
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	100	200.000.000	0	-	0	29.960.000					0	29.960.000	0%	15%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	30	7.685.585.000	0	492.628.000	0	1.505.986.500		-	-	-	0	1.998.614.500	0%	26%	
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	%	100	4.900.585.000	0	434.048.000	0	465.171.500		-	-	-	0	899.219.500	0%	18%	
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	sarana prasarana	3	4.900.585.000	0	434.048.000	1	465.171.500					1	899.219.500	33%	18%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	3	1.460.000.000	0	-	0	-		-	-	-	0	-	0%	0%	
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	3	1.460.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang Olahraga	10	1.000.000.000	0	-	10	1.000.000.000		-	-	-	10	1.000.000.000	100%	100%	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	Organisasi	1	1.000.000.000	0	-	1	1.000.000.000					1	1.000.000.000	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	3	325.000.000	0	58.580.000	1	40.815.000		-	-	-	1	99.395.000	33%	31%	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	3	325.000.000	0	58.580.000	1	40.815.000					1	99.395.000	33%	31%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	skor	A	7.120.980.000	0	1.268.360.812	0	1.263.816.447		-	-	-	A	2.532.177.259	0%	36%	
2	22	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	30.000.000	25	3.600.000	25	6.806.100		-	-	-	50	10.406.100	50%	35%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	22	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	30.000.000	1	3.600.000	1	6.806.100					2	10.406.100	33%	35%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.400.235.000	25	776.490.054	25	797.994.191		-		-	50	1.574.484.245	50%	36%	
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	4.400.235.000	25	776.490.054	25	797.994.191					25	1.574.484.245	100%	36%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	60.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	22	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	60.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	250.000.000	25	36.002.958	25	56.394.700		-		-	50	92.397.658	50%	37%	
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	12	250.000.000	1	36.002.958	2	56.394.700					3	92.397.658	25%	37%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	100.000.000	0	-	0	-		-			0	-	0%	0%	
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	2.025.745.000	25	430.805.000	25	338.082.100		-			50	768.887.100	50%	38%	
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	2.025.745.000	0	430.805.000	0	338.082.100					0	768.887.100	0%	38%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	255.000.000	25	21.462.800	25	64.539.356		-		-	50	86.002.156	50%	34%	
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	75.000.000	5	10.432.800	5	8.602.356					10	19.035.156	33%	25%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	100.000.000	0	-	0	48.360.000					0	48.360.000	0%	48%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	1	80.000.000	0	11.030.000	0	7.577.000					0	18.607.000	0%	23%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	1.856.000.000	0	-	0	450.370.750		-		-	0	450.370.750	0%	24%	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang	44	1.856.000.000	0	-	0	450.370.750		-		-	0	450.370.750	0%	24%	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan budaya yang dimanfaatkan	Budaya	10	1.586.000.000	0	-	3	335.534.000					3	335.534.000	30%	21%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Orang/Group	20	270.000.000	0	-	10	114.836.750					10	114.836.750	50%	43%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100	100.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	Jenis	3	100.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Orang/Group	45	100.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	Obyek	2	300.000.000	0	-	0	30.921.000		-		-	0	30.921.000	0%	10%	
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	Obyek	20	300.000.000	0	-	0	30.921.000		-		-	0	30.921.000	0%	10%	
2	22	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Obyek	20	300.000.000	0	-	5	30.921.000					5	30.921.000	25%	10%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	%	100	317.670.000	0	2.400.000	0	121.378.020		-		-	0	123.778.020	0%	39%	
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	Destinasi	2	317.670.000	0	2.400.000	0	121.378.020		-		-	0	123.778.020	0%	39%	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	12	50.000.000	0	-	12	49.930.020					12	49.930.020	100%	100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	12	267.670.000	0	2.400.000	2	71.448.000					2	73.848.000	17%	28%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	%	20	900.000.000	0	-	0	44.164.364		-		-	0	44.164.364	0%	5%	
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Lokasi	25	900.000.000	0	-	0	44.164.364		-		-	0	44.164.364	0%	5%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Event	0	-	0	-	0						0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Neger	Kegiatan	4	900.000.000	0	-	1	44.164.364					1	44.164.364	25%	5%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	20	278.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	20	278.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Orang	24	278.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
Rata - Rata Capaian Kinerja																				21%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					17%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.078.962.578													
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	82	5.171.985.181	0	831.058.443	0	839.837.028		-		-	0	1.670.895.471	0%	32%	
2	23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100.000.000	41	-	0	-		-		-	41	-	41%	0%	
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Laporan	12	100.000.000	5	-	0	0					5	-	42%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	3.838.593.181	100	660.342.149	100	736.344.878		-		-	100	1.396.687.027	100%	36%	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	3.838.593.181	25	660.342.149	25	736.344.878					50	1.396.687.027	185%	36%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	238.292.000	26	9.753.094	33	8.120.000		-		-	59	17.873.094	59%	8%	
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	238.292.000	8	9.753.094	10	8.120.000					18	17.873.094	60%	8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	20.100.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	20.100.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	705.000.000	25	126.625.900	25	79.548.800		-		-	50	206.174.700	50%	29%	
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	705.000.000	3	126.625.900	3	79.548.800					6	206.174.700	50%	29%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	270.000.000	0	34.337.300	0	15.823.350		-		-	0	50.160.650	0%	19%	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	80.000.000	4	15.624.000	4	9.373.350					8	24.997.350	36%	31%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	120.000.000	2	8.768.300	2	0					4	8.768.300	100%	7%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	78	70.000.000	22	9.945.000	20	6.450.000					42	16.395.000	54%	23%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	5,95	1.285.000.000	0	223.434.450	0	122.720.099		-		-	0	346.154.549	0%	27%	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,6	300.000.000	0	104.805.000	0	59.760.099		-		-	0	164.565.099	0%	55%	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	74	300.000.000	74	104.805.000	74	59.760.099					74	164.565.099	100%	55%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	650	70.000.000	0	900.000	0	0					0	900.000	0%	1%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	kali	20	985.000.000	0	118.629.450	7	62.960.000		-		-	7	181.589.450	35%	18%	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	218	650.000.000	212	96.559.450	212	37.910.000					212	134.469.450	97%	21%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	5	110.000.000	5	22.070.000	5	25.050.000					10	47.120.000	200%	43%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	37	230.000.000	0	-	0	9.900.000		-		-	0	9.900.000	0%	4%	
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	Eksemplar	178	230.000.000	0	-	0	9.900.000		-		-	0	9.900.000	0%	4%	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	orang	2	120.000.000	0	-	0	9.900.000					0	9.900.000	0%	8%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisisi naskah kuno	Eksemplar	2	110.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				818.942.100													
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	skor	90	826.680.000	0	154.130.500	0	95.622.260		-		-	0	249.752.760	0%	30%	
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	475.000.000	12,07	74.988.500	0	64.098.760		-		-	12,07	139.087.260	12%	29%	
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	600000	475.000.000	7242	74.988.500	0	64.098.760					7242	139.087.260	1%	29%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	%	100	351.680.000	20	79.142.000	44	31.523.500		-		-	64	110.665.500	64%	31%	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	270	351.680.000	54	79.142.000	120	31.523.500					174	110.665.500	64%	31%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	skor	8,8	170.000.000	0	29.547.700	0	49.950.000		-		-	0	79.497.700	0%	47%	
2	24	3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	100	170.000.000	0	29.547.700	92	49.950.000		-		-	92	79.497.700	92%	47%	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	1000	85.000.000	293	29.547.700	1015	49.950.000					1308	79.497.700	131%	94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	berkas	1100	85.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rata - Rata Capaian Kinerja																				45%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					26%	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.339.577.408												
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	A	11.940.358.400	0	1.884.461.031	0	1.728.901.494		-		-	0,00	3.613.362.525	0%	30%	
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	190.036.000	25	250.000	0	-		-		-	25	250.000	25%	0%	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	190.036.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	250.000	0	0								
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	8.941.595.764	25	1.598.188.267	25	1.547.369.784		-		-	50	3.145.558.051	50%	35%	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	68	8.941.595.764	68	1.598.188.267	68	1.547.369.784					68	3.145.558.051	100%	35%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	159.382.400	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	1	159.382.400	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	398.929.600	25	35.419.013	17	29.274.250		-		-	42	64.693.263	42%	16%	
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	30	398.929.600	3	35.419.013	2	29.274.250					5	64.693.263	17%	16%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan Pemerintahan	%	100	885.880.930	25	53.550.000	0	-		-		-	25	53.550.000	25%	6%	
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	807.838.600	1	35.750.000	0	-					1	35.750.000	100%	4%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	78.042.330	3	17.800.000	0	0					3	17.800.000	100%	23%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	812.889.300	25	155.737.700	17	112.192.550		-		-	42	267.930.250	42%	33%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	812.889.300	3	155.737.700	2	112.192.550					5	267.930.250	42%	33%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	551.644.406	30	41.316.051	12	40.064.910		-		-	42	81.380.961	42%	15%	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	44	261.208.606	5	26.435.051	10	32.639.910					15	59.074.961	34%	23%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	205.916.500	2	7.656.000	0	0					2	7.656.000	67%	4%	Dinas Perdagangan
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	122	84.519.300	15	7.225.000	15	7.425.000					30	14.650.000	25%	17%	Dinas Perdagangan
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	100	138.312.400	20	19.197.000	33	13.556.000		-		-	53	32.753.000	53%	24%	
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	100	138.312.400	20	19.197.000	33	13.556.000		-		-	53	32.753.000	53%	24%	
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	dokumen	75	138.312.400	15	19.197.000	25	13.556.000					40	32.753.000	53%	24%	Dinas Perdagangan
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	6.953.329.800	25	878.584.700	25	1.108.317.604		-		-	50	1.986.902.304	50%	29%	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	pasar	17	1.847.532.600	17	201.240.700	17	391.008.604		-		-	17	592.249.304	100%	32%	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	3	1.012.146.000	0	5.855.200	1	290.368.404					1	296.223.604	33%	29%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	17	835.386.600	17	195.385.500	17	100.640.200					17	296.025.700	100%	35%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	5.105.797.200	50	677.344.000	0	717.309.000		-		-	50	1.394.653.000	50%	27%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	2	605.000.000	1	33.510.000	0	50.979.000					1	84.489.000	50%	14%	Dinas Perdagangan
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	2	4.500.797.200	1	643.834.000	0	666.330.000					1	1.310.164.000	50%	29%	Dinas Perdagangan
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100	413.111.000	37,5	38.359.000	13	89.823.450		-		-	50	128.182.450	50%	31%	
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	%	100	393.118.000	25	35.465.500	25	87.080.450		-		-	50	122.545.950	50%	31%	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	162.307.000	0	14.140.000	1	20.466.500					1	34.606.500	33%	21%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	230.811.000	1	21.325.500	0	66.613.950					1	87.939.450	50%	38%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	%	100	19.993.000	50	2.893.500	0	2.743.000		-		-	50	5.636.500	50%	28%	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	2	19.993.000	1	2.893.500	0	2.743.000					1	5.636.500	50%	28%	Dinas Perdagangan
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100	241.426.095	25	36.862.900	17	31.060.000		-		-	42	67.922.900	42%	28%	
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	bulan	12	241.426.095	3	36.862.900	2	31.060.000		-		-	5	67.922.900	42%	28%	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	8186	234.094.095	484	36.262.900	####	31.060.000					1946	67.322.900	24%	29%	Dinas Perdagangan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	150	7.332.000	0	600.000	0	0					0	600.000	0%	8%	Dinas Perdagangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	550.000.000	25	6.434.420	25	55.450.500		-		-	50	61.884.920	50%	11%	
3	30	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	kali	4	550.000.000	1	6.434.420	1	55.450.500		-		-	2	61.884.920	50%	11%	
3	30	7	2.01	5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	8	550.000.000	2	6.434.420	2	55.450.500					4	61.884.920	50%	11%	Dinas Perdagangan
Rata - Rata Capaian Kinerja																			45%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																				25%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				3.048.644.600													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi Sakip Setda	skor	83	1.718.860.000	0	137.599.321	0	234.423.698		-		-	A	372.023.019	0%	22%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	10.000.000	25	3.735.000	0	-		-		-	25	3.735.000	25%	37%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	10.000.000	1	3.735.000	0	0					1	3.735.000	17%	37%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	946.860.000	25	70.560.621	25	168.229.978		-		-	50	238.790.599	50%	25%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	946.860.000	12	70.560.621	12	168.229.978					12	238.790.599	100%	25%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	200.000.000	25	19.919.000	25	19.916.420		-		-	50	39.835.420	50%	20%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	200.000.000	2	19.919.000	2	19.916.420					4	39.835.420	17%	20%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	75.000.000	0	-	0						0	-	0%	0%	
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	25.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	50.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Pemda	%	100	300.000.000	25	37.541.700	25	43.408.800		-		-	50	80.950.500	50%	27%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	300.000.000	2	37.541.700	2	43.408.800					4	80.950.500	33%	27%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	262.000.000	25	5.843.000	25	2.868.500		-		-	50	8.711.500	50%	3%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	30.000.000	0	3.500.000	0	2.473.500					0	5.973.500	0%	20%	Bagian Pemerintahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	220.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	12.000.000	2	2.343.000	0	395.000					2	2.738.000	12%	23%	Bagian Pemerintahan
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	%	100	2.118.000.000	0	277.539.000	0	686.457.200		-		-	0	963.996.200	0%	46%	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	1.650.000.000	0	79.314.000	0	647.425.200		-		-	0	726.739.200	0%	44%	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	10	1.200.000.000	0	11.480.000	3	539.967.050					3	551.447.050	30%	46%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	6	450.000.000	0	67.834.000	2	107.458.150					2	175.292.150	33%	39%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	%	100	468.000.000	0	198.225.000	0	39.032.000		-		-	0	237.257.000	0%	51%	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	5	468.000.000	0	198.225.000	1	39.032.000					1	237.257.000	20%	51%	Bagian Pemerintahan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				2.566.413.284													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP SETDA	Skor	83	3.186.980.500	0	458.574.246	0	410.157.479		-		-	0	868.731.725	0%	27%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	15.000.000	25	1.224.000	25	4.218.750		-		-	50	5.442.750	50%	36%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	15.000.000	2	1.224.000	3	4.218.750					5	5.442.750	83%	36%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	815.535.000	25	96.358.740	25	162.933.582		-		-	50	259.292.322	50%	32%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	9	815.535.000	9	96.358.740	9	162.933.582					9	259.292.322	100%	32%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Indeks	83,2	185.000.000	0	25.212.924	0	16.134.370		-		-	0	41.347.294	0%	22%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	185.000.000	3	25.212.924	3	16.134.370					6	41.347.294	50%	22%	Bagian Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	14.868.000	0	-	100	100.000.000		-		-	100	100.000.000	100%	673%	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	14.868.000	0	-	1	100.000.000					1	100.000.000	100%	673%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	185.000.000	25	28.411.100	25	30.769.000		-		-	50	59.180.100	50%	32%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	185.000.000	3	28.411.100	3	30.769.000					6	59.180.100	50%	32%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	51.372.000	25	2.587.680	25	8.291.198		-		-	50	10.878.878	50%	21%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	27.315.000	3	2.287.680	0	6.049.198					3	8.336.878	50%	31%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	0		0	0					0	-	0%	0%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	19.057.000	1	300.000	3	2.242.000					4	2.542.000	19%	13%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	skor	28,4	1.920.205.500	0	304.779.802	0	87.810.579		-		-	0	392.590.381	0%	20%	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	500.000.000	0	66.727.440	0	4.200.000					0	70.927.440	0%	14%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	855.367.500	0	158.300.562	0	83.610.579					0	241.911.141	0%	28%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	564.838.000	0	79.751.800	1	-					1	79.751.800	50%	14%	Bagian Organisasi
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				2.509.504.644													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	83	2.009.005.470	0	188.055.418	0	243.760.323		-		-	0	431.815.741	0%	21%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	1.000.000	25	-	25	-		-		-	100	-	100%	0%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	1.000.000	1	-	1	0					2	-	33%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	945.125.000	25	86.475.553	25	166.027.963		-		-	50	252.503.516	50%	27%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	10	945.125.000	10	86.475.553	10	166.027.963					10	252.503.516	100%	27%	Bagian Hukum
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Indeks	83,2	347.330.470	25	21.748.486	25	20.453.000		-		-	50	42.201.486	60%	12%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	347.330.470	9	21.748.486	12	20.453.000					21	42.201.486	58%	12%	Bagian Hukum
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	141.500.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	19	125.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Bagian Hukum
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	32	16.500.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	492.300.000	25	68.718.879	25	47.853.925		-		-	50	116.572.804	50%	24%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	250	492.300.000	3	68.718.879	38	47.853.925					41	116.572.804	16%	24%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	%	100	81.750.000	25	11.112.500	25	9.425.435		-		-	50	20.537.935	50%	25%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	43.000.000	1	5.812.000	0	6.481.435					1	12.293.435	25%	29%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.500.000	1	2.421.500	0	0					1	2.421.500	100%	97%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	36.250.000	1	2.879.000	0	2.944.000					1	5.823.000	5%	16%	Bagian Hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	2.278.141.000	0	307.896.920	25	83.133.500		-		-	25	391.030.420	25%	17%	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Produk Hukum yang disusun	%	100	2.278.141.000	25	307.896.920	25	83.133.500		-		-	50	391.030.420	50%	17%	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	24	1.101.378.000	3	22.319.000	4	73.894.500					7	96.213.500	29%	9%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	25	647.431.000	0	108.320.400	0	6.893.000					0	115.213.400	0%	18%	Bagian Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	400	529.332.000	95	177.257.520	71	2.346.000					166	179.603.520	42%	34%	Bagian Hukum
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				3.102.597.567													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	83	2.602.000.000		205.043.858	0	394.734.304		-		-	0	599.778.162	0%	23%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	15.000.000	25	1.133.000	25	198.000		-		-	50	1.331.000	50%	9%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	15.000.000	3	1.133.000	3	198.000					6	1.331.000	50%	9%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	1.750.000.000	25	128.087.945	25	333.456.121		-		-	50	461.544.066	50%	26%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	1.750.000.000	15	128.087.945	15	333.456.121					8	461.544.066	47%	26%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	200.000.000	25	23.143.982	25	21.428.500		-		-	50	44.572.482	50%	22%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	3	23.143.982	3	21.428.500					6	44.572.482	50%	22%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	100.000.000	0	0	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	100.000.000	0	0	0	-					0		0%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	100.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	350.000.000	25	47.272.331	25	35.865.183		-		-	50	83.137.514	50%	24%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350.000.000	3	47.272.331	3	35.865.183					6	83.137.514	50%	24%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	187.000.000	25	5.406.600	25	3.786.500		-		-	50	9.193.100	50%	5%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	30.000.000	2	3.903.000	2	2.645.000					4	6.548.000	57%	22%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	137.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	20.000.000	10	1.503.600	10	1.141.500					20	2.645.100	50%	13%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	648.365.000	25	82.342.585	25	33.390.000		-		-	50	115.732.585	50%	18%	
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	%	100	151.421.000	25	13.800.000	25	9.250.000		-		-	50	23.050.000	50%	15%	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	31.421.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	120.000.000	3	13.800.000	3	9.250.000					6	23.050.000	50%	19%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	%	100	496.944.000	25	68.542.585	25	24.140.000		-		-	50	92.682.585	50%	19%	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	200.899.000	3	45.047.585	3	9.600.000					6	54.647.585	50%	27%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	296.045.000	3	23.495.000	3	14.540.000					6	38.035.000	50%	13%	Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				11.132.933.734													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Skor	83	2.308.318.046	0	171.846.673		272.683.960		-		-	0	444.530.633	0%	19%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	22.000.000	25	900.000	25	722.000		-		-	50	1.622.000	50%	7%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	22.000.000	2	900.000	1	722.000					3	1.622.000	50%	7%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	1.081.294.810	25	81.215.873	25	196.443.360		-		-	50	277.659.233	50%	26%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	1.081.294.810	13	81.215.873	13	196.443.360					13	277.659.233	100%	26%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100	250.000.000	25	27.036.500	25	11.910.200		-		-	50	38.946.700	50%	16%	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	250.000.000	6	27.036.500	6	11.910.200					12	38.946.700	48%	16%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	100.000.000	25	20.850.000	25	10.821.000		-		-	50	31.671.000	50%	32%	
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	120.000.000	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	100.000.000	2	20.850.000	2	10.821.000					4	31.671.000	40%	32%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	613.219.636	25	41.344.300	25	33.315.000		-		-	50	74.659.300	50%	12%	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	613.219.636	3	41.344.300	3	33.315.000					6	74.659.300	50%	12%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100	241.803.600	25	500.000	25	19.472.400		-		-	50	19.972.400	50%	8%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	25.000.000	0	0	3	3.972.400					3	3.972.400	33%	16%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200.000.000	0	0	0	14.500.000					0	14.500.000	0%	7%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	16.803.600	0	500.000	3	1.000.000					3	1.500.000	30%	9%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	9.607.846.707	0	189.867.000	25	591.618.300		-		-	25	781.485.300	25%	8%	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	%	80,08	9.607.846.707	25	189.867.000	25	591.618.300		-		-	50	781.485.300	62%	8%	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	15	9.607.846.707	4	189.867.000	4	591.618.300					8	781.485.300	53%	8%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100	1.017.189.960	0	113.226.200	25	126.389.500		-		-	25	239.615.700	25%	24%	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks	80,98	617.189.960	25	76.199.700	25	76.196.000		-		-	50	152.395.700	62%	25%	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	335.984.960	1	43.302.000	0,5	49.396.000					1,5	92.698.000	75%	28%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	3	281.205.000	1	32.897.700	1	26.800.000					2	59.697.700	67%	21%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	400.000.000	25	37.026.500	25	50.193.500		-		-	50	87.220.000	50%	22%	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	3	400.000.000	1	37.026.500	1	50.193.500					2	87.220.000	67%	22%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				35.463.703.320													
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	83	34.512.750.000	0	4.697.385.619	0	4.280.055.001		-		-	0	8.977.440.620	0%	26%	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	5.000.000	25	802.500	25	918.000		-		-	50	1.720.500	50%	34%	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	5.000.000	2	802.500	2	918.000					4	1.720.500	67%	34%	Bagian Umum
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	13.273.500.000	25	2.137.383.147	25	1.818.630.570		-		-	50	3.956.013.717	50%	30%	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	125	13.273.500.000	125	2.137.383.147	125	1.818.630.570					125	3.956.013.717	100%	30%	Bagian Umum
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	%	100	6.210.000.000	25	53.850.000	25	179.536.500		-		-	50	233.386.500	50%	4%	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	6.210.000.000	1	53.850.000	0	179.536.500					1	233.386.500	25%	4%	Bagian Umum
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	%	100	1.750.000.000	25	308.046.508	25	323.815.308		-		-	50	631.861.816	50%	36%	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	0	9.578.190	0	10.099.391					0	19.677.581	0%	39%	Bagian Umum
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	324	1.700.000.000	81	298.468.318	101	313.715.917					182	612.184.235	56%	36%	Bagian Umum
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	789.250.000	80	504.715.000	0	192.792.000		-		-	80	697.507.000	80%	88%	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	39.250.000	1	34.315.000	0	0					1	34.315.000	100%	87%	Bagian Umum
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	500.000.000	3	470.400.000	0	1.410.000					3	471.810.000	100%	94%	Bagian Umum
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	250.000.000	0	-	1	191.382.000					1	191.382.000	100%	77%	Bagian Umum
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	4.935.000.000	25	802.696.008	25	780.282.595		-		-	50	1.582.978.603	50%	32%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.935.000.000	2	802.696.008	4	780.282.595					6	1.582.978.603	50%	32%	Bagian Umum
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	1.875.000.000	25	252.762.300	25	508.787.204		-		-	50	761.549.504	50%	41%	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	110	1.100.000.000	20	192.335.000	0	147.778.025					20	340.113.025	18%	31%	Bagian Umum
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	500.000.000	0	48.320.000	1	347.184.619					1	395.504.619	100%	79%	Bagian Umum
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	129	275.000.000	32	12.107.300	0	13.824.560					32	25.931.860	25%	9%	Bagian Umum
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	1.000.000.000	25	188.194.172	25	85.872.236		-		-	50	274.066.408	50%	27%	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	400.000.000	2	55.759.172	2	14.627.236					2	70.386.408	100%	18%	Bagian Umum
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	600.000.000	2	132.435.000	2	71.245.000					2	203.680.000	100%	34%	Bagian Umum
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	%	100	2.325.000.000	25	417.890.984	50	292.857.588		-		-	75	710.748.572	75%	31%	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	paket	20	1.125.000.000	5	277.643.712	10	163.594.414					15	441.238.126	75%	39%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	paket	16	600.000.000	4	119.796.788	8	87.935.754					12	207.732.542	75%	35%	Bagian Umum
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	paket	15	600.000.000	3	20.450.484	5	41.327.420					8	61.777.904	53%	10%	Bagian Umum
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	%	100	2.350.000.000	0	31.045.000	50	96.563.000		-		-	50	127.608.000	50%	5%	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	500	2.350.000.000	125	31.045.000	250	96.563.000					375	127.608.000	75%	5%	Bagian Umum
Rata - Rata Capaian Kinerja																				42%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					23%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	2				SEKRETARIAT DPRD				38.653.217.556													
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Skor	86	29.609.047.298	0	8.047.605.334	0	6.550.589.186		-		-	0	14.598.194.520	0%	49%	
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	75.329.977	25	6.684.200	25	9.793.700		-		-	50	16.477.900	50%	22%	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	75.329.977	0	6.684.200	2	9.793.700					2	16.477.900	33%	22%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	3.366.682.326	25	520.825.762	25	527.776.133		-		-	50	1.048.601.895	50%	31%	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	3.366.682.326	19	520.825.762	19	527.776.133					19	1.048.601.895	100%	31%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	%	100	291.087.294	25	25.000.000	25	16.000.000		-		-	50	41.000.000	50%	14%	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	64.818.894	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	19	226.268.400	0	25.000.000	2	16.000.000					2	41.000.000	11%	18%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	%	100	1.037.733.258	25	396.559.704	25	351.737.619		-		-	50	748.297.323	50%	72%	
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	1.037.733.258	11	396.559.704	11	351.737.619					22	748.297.323	50%	72%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	%	100	6.105.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.105.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	%	100	2.602.797.882	25	431.990.014	25	374.929.951		-		-	50	806.919.965	50%	31%	
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2.602.797.882	5	431.990.014	2	374.929.951					7	806.919.965	29%	31%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	%	100	1.021.153.590	25	76.100.685	25	48.245.468		-		-	50	124.346.153	50%	12%	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26	308.841.290	4	38.925.225	6	37.139.950					10	76.065.175	38%	25%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	179	238.673.550	0	12.889.100	32	4.160.000					32	17.049.100	18%	7%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	473.638.750	0	24.286.360	1	6.945.518					1	31.231.878	17%	7%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	%	100	15.980.942.237	25	3.616.573.625	25	2.700.556.030		-		-	50	6.317.129.655	50%	40%	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	30	15.621.963.217	6	3.616.573.625	9	2.675.289.830					15	6.291.863.455	50%	40%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	2	253.979.020	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	105.000.000	0	-	5	25.266.200					5	25.266.200	17%	24%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	%	100	5.227.215.734	25	2.973.871.344	25	2.521.550.285		-		-	50	5.495.421.629	50%	105%	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	8	37.957.150	0	480.000	0	1.848.000					0	2.328.000	0%	6%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	5.189.258.584	5	2.973.391.344	5	2.519.702.285					10	5.493.093.629	83%	106%	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Skor	85	14.181.109.506	0	2.359.636.950	0	1.517.848.760		-		-	0	3.877.485.710	0%	27%	
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	%	100	6.133.494.696	0	1.446.150.250	0	89.979.000		-		-	0	1.536.129.250	0%	25%	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	12	3.697.366.740	2	722.708.000	1	63.379.000					3	786.087.000	25%	21%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	Dokumen	15	2.436.127.956	5	723.442.250	0	26.600.000					5	750.042.250	33%	31%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	%	10	1.637.690.360	0	35.534.800	0	223.357.800		-		-	0	258.892.600	0%	16%	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	1.637.690.360	0	35.534.800	1	223.357.800					1	258.892.600	20%	16%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	%	100	640.644.170	25	230.490.000	25	362.443.960		-		-	50	592.933.960	50%	93%	
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	338.765.050	0	4.700.000	0	197.399.600					0	202.099.600	0%	60%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	301.879.120	0	225.790.000	0	165.044.360					0	390.834.360	0%	129%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	%	100	4.956.857.280	25	311.015.400	25	829.724.000		-		-	50	1.140.739.400	50%	23%	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	2.704.590.000	1	76.384.000	1	142.360.000					2	218.744.000	33%	8%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	0	-	0	-	0	-					0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	892.910.480	0	47.535.400	0	556.144.000					0	603.679.400	0%	68%	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	120	1.359.356.800	11	187.096.000	17	131.220.000					28	318.316.000	23%	23%	
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	%	100	812.423.000	0	336.446.500	0	12.344.000		-		-	95	348.790.500	95%	43%	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	90	812.423.000	38	336.446.500	0	12.344.000					38	348.790.500	42%	43%	Sekretariat DPRD
																			Rata - Rata Capaian Kinerja		30%		
																			Rata - Rata Capaian Keuangan		38%		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	1				PERENCANAAN																	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	skor	81	7.888.742.167	0	1.104.348.567	0	1.160.860.970		-		-	0	2.265.209.537	0%	29%	
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	193.215.400	25	10.466.540	0	13.190.600		-		-	25	23.657.140	25%	12%	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	161.979.200	1	7.570.540	1	8.128.400					2	15.698.940	29%	10%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	11.050.600	2	-	5	2.141.700					7	2.141.700	58%	19%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	20.185.600	0	2.896.000	0	2.920.500					0	5.816.500	0%	29%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keungan	%	100	5.659.950.000	25	787.557.086	25	885.954.397		-		-	50	1.673.511.483	50%	30%	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	27	5.550.950.000	27	782.379.086	27	878.812.397					27	1.661.191.483	100%	30%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	12	109.000.000	0	5.178.000	5	7.142.000					5	12.320.000	42%	11%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	%	100	337.138.312	25	10.612.480	25	49.469.100		-		-	50	60.081.580	50%	18%	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	31	154.098.312	27	8.416.000	31	47.313.000					27	55.729.000	87%	36%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang/keg	67	183.040.000	0	2.196.480	67	2.156.100					67	4.352.580	100%	2%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Dokumen	1	455.934.000	0	55.094.177	1	64.739.293		-		-	1	119.833.470	100%	26%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	455.934.000	0	55.094.177	0	64.739.293					0	119.833.470	0%	26%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	225.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	225.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	791.861.325	25	214.449.656	0	120.136.780		-		-	25	334.586.436	25%	42%	
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	791.861.325	0	214.449.656	0	120.136.780					0	334.586.436	0%	42%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	225.643.130	25	26.168.628	0	27.370.800		-		-	25	53.539.428	25%	24%	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33	75.000.000	9	15.773.728	0	12.852.700					9	28.626.428	27%	38%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.321.565	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.321.565	0	10.394.900	1	14.518.100					1	24.913.000	100%	33%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100	2.618.124.481	0	636.099.080	0	340.821.150		-		-	0	976.920.230	0%	37%	
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	Dokumen	3	2.369.124.481	0	564.252.930	0	316.063.650		-		-	0	880.316.580	0%	37%	
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	252.104.370	0	144.556.000	0	4.525.000					0	149.081.000	0%	59%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat	Berita Acara	1	155.206.485	1	152.369.350	0	0					1	152.369.350	100%	98%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	671.102.586	0	189.064.700	0	151.111.260					0	340.175.960	0%	51%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	1.290.711.040	0	78.262.880	0	160.427.390					0	238.690.270	0%	18%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Dokumen	2	249.000.000	0	71.846.150	0	24.757.500		-		-	0	96.603.650	0%	39%	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen	2	99.000.000	0	17.287.500	1	17.257.500					1	34.545.000	50%	35%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	4	150.000.000	1	54.558.650	1	7.500.000					2	62.058.650	50%	41%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	92	2.383.000.000	0	181.689.650	0	489.274.400		-		-	0	670.964.050	0%	28%	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	1	728.000.000	0	59.046.100	0	136.994.400		-		-	0	196.040.500	0%	27%	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	115.000.000	0	11.234.500	0	9.478.700					0	20.713.200	0%	18%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	120.000.000	0	7.753.000	1	97.673.700					1	105.426.700	100%	88%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	486.581.500	0	38.111.600	0	29.842.000					0	67.953.600	0%	14%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	OPD	26	6.418.500	6	1.947.000	0	0					6	1.947.000	23%	30%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	1	590.000.000	0	81.979.350	0	15.670.000		-		-	0	97.649.350	0%	17%	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	405.000.000	0	11.972.100	0	9.770.000					0	21.742.100	0%	5%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	perangkat daerah	1	185.000.000	0	70.007.250	0	5.900.000					0	75.907.250	0%	41%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Dokumen	1	1.065.000.000	0	40.664.200	0	336.610.000		-		-	0	377.274.200	0%	35%	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	840.000.000	0	13.073.100	1	301.308.000					1	314.381.100	25%	37%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktu	Laporan	1	95.000.000	0	1.510.000	0	24.015.800					0	25.525.800	0%	27%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	100.000.000	0	20.235.500	0	3.771.000					0	24.006.500	0%	24%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Dokumen	6	30.000.000	0	5.845.600	0	7.515.200					0	13.360.800	0%	45%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.377.973.164													
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	1.425.448.000	0	109.067.960	0	491.757.800		-		-	0	600.825.760	0%	42%	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	Dokumen	2	1.148.463.000	0	44.175.300	0	479.292.300		-		-	0	523.467.600	0%	46%	
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	981.883.000	0	34.148.800	0	462.495.300					0	496.644.100	0%	51%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	166.580.000	0	10.026.500	0	16.797.000					0	26.823.500	0%	16%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Dokumen	1	276.985.000	0	64.892.660	0	12.465.500		-		-	0	77.358.160	0%	28%	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	276.985.000	0	64.892.660	0	12.465.500					0	77.358.160	0%	28%	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Rata - Rata Capaian Kinerja																				23%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					34%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	2				KEUANGAN				57.989.854.202													
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	skor	A	62.642.467.000	0	8.481.886.210	0	5.528.852.083		-		-	0	14.010.738.293	0%	22%	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	2.000.000	38	-	12	-		-		-	50	-	50%	0%	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	2.000.000	3	-	1	0					4	-	50%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	47.914.908.000	25	3.356.278.874	25	2.069.705.207		-		-	50	5.425.984.081	50%	11%	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2875	47.914.908.000	2875	3.356.278.874	2875	2.069.705.207					2875	5.425.984.081	100%	11%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	450.000.000	25	52.235.085	34	211.981.621		-		-	59	264.216.706	59%	59%	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	450.000.000	10	52.235.085	24	211.981.621					34	264.216.706	49%	59%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	%	100	214.000.000	25	143.925.000	0	-		-		-	25	143.925.000	25%	67%	
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	214.000.000	1	143.925.000	0	0					1	143.925.000	14%	67%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	%	100	13.768.559.000	25	4.887.773.251	25	3.204.515.755		-		-	50	8.092.289.006	50%	59%	
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	13.768.559.000	4	4.887.773.251	3	3.204.515.755					7	8.092.289.006	58%	59%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	293.000.000	25	41.674.000	25	42.649.500		-		-	50	84.323.500	50%	29%	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	37	110.000.000	12	29.944.000	9	12.547.800					21	42.491.800	57%	39%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	75.000.000	0	1.800.000	1	12.953.700					1	14.753.700	100%	20%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	108.000.000	0	9.930.000	2	17.148.000					2	27.078.000	25%	25%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	%	100	4.344.623.000	0	330.591.216	25	195.596.110		-		-	25	526.187.326	25%	12%	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	%	100	1.126.814.000	0	57.763.504	0	33.016.110		-		-	0	90.779.614	0%	8%	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	83.421.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	56.819.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	28	16.876.000	28	16.561.844	0	0					28	16.561.844	100%	98%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	28	23.640.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	154.679.000	0	-	0	18.016.110					0	18.016.110	0%	12%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	154.679.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	636.700.000	0	41.201.660	4	15.000.000					4	56.201.660	100%	9%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	%	100	55.050.000	25	10.145.000	25	7.190.000		-		-	50	17.335.000	50%	31%	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	47	49.950.000	0	7.680.000	8	7.190.000					8	14.870.000	17%	30%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	3	5.100.000	0	2.465.000	3	0					3	2.465.000	100%	48%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	%	100	1.162.759.000	0	238.670.000	25	148.390.000		-		-	25	387.060.000	25%	33%	
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2	140.000.000	0	12.800.000	0	4.550.000					0	17.350.000	0%	12%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	66.000.000	0	9.870.000	2	9.270.000					2	19.140.000	100%	29%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	90.000.000	0	49.500.000	0	0					0	49.500.000	0%	55%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggunjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	600	866.759.000	150	166.500.000	110	134.570.000					260	301.070.000	43%	35%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100	2.000.000.000	25	24.012.712	25	7.000.000		-		-	50	31.012.712	50%	2%	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	2.000.000.000	3	24.012.712	3	7.000.000					6	31.012.712	50%	2%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	%	100	1.965.948.000	14	1.462.888.072	18	10.972.000		-		-	32	1.473.860.072	32%	75%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	22	1.965.948.000	3	1.462.888.072	4	10.972.000		-		-	7	1.473.860.072	32%	75%	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	123.142.000	1	-	0	0					1	-	50%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	1.803.206.000	2	1.456.708.072	0	4.852.000					2	1.461.560.072	100%	81%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	18	39.600.000	3	6.180.000	3	6.120.000					6	12.300.000	33%	31%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rata - Rata Capaian Kinerja																				42%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					36%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	2				KEUANGAN				10.376.982.780													
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	A	9.654.959.835	0	960.272.735	0	989.895.793		-		-	0	1.950.168.528	0%	20%	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	5.000.000	25	-	25	-		-		-	50	-	50%	0%	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	5.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya admisnitrasi keuangan perangkat daerah	%	100	8.294.415.000	25	813.022.367	25	885.379.093		-		-	50	1.698.401.460	50%	20%	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	33	8.294.415.000	28	813.022.367	28	885.379.093					56	1.698.401.460	170%	20%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100	150.000.000	25	21.432.788	25	9.727.500		-		-	50	31.160.288	50%	21%	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	30	150.000.000	5	21.432.788	2	9.727.500					7	31.160.288	23%	21%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedumg Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	250.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	4	100.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	13	150.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	655.544.835	15	106.470.830	0	81.701.600		-		-	15	188.172.430	15%	29%	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	100	655.544.835	15	106.470.830	4	81.701.600					19	188.172.430	19%	29%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	%	100	300.000.000	25	19.346.750	25	13.087.600		-		-	50	32.434.350	50%	11%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
						urusan Pemerintah Daerah																
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	30	75.000.000	6	8.803.000	5	9.266.600					11	18.069.600	37%	24%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	1	558.750	0	119.000					1	677.750	100%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	100	75.000.000	5	9.985.000	3	3.702.000					8	13.687.000	8%	18%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	10	1.987.637.504	5	5.298.000	0	508.980.050		-		-	5	514.278.050	50%	26%	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	%	100	1.987.637.504	5	5.298.000	25	508.980.050		-		-	30	514.278.050	30%	26%	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	75.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	560.941.600	0	-	2	394.749.200					2	394.749.200	50%	70%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	Laporan	1	12.000.000	1	5.298.000	0	0					1	5.298.000	100%	44%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	1	150.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	4651	7.500.000	0	-	4651	99.460.850					4651	99.460.850	100%	1326%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	58615	40.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Layanan	18923	15.000.000	0	-	13892	12.450.000					13892	12.450.000	73%	83%	Badan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen	4	646.550.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	dokumen	3	465.645.904	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	1	15.000.000	0	-	0	2.320.000					0	2.320.000	0%	15%	Badan Pendapatan Daerah
Rata - Rata Capaian Kinerja																				35%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					23%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	3				KEPEGAWAIAN				9.534.760.099													
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja	skor	A	7.339.400.000	0	1.275.488.631	0	1.198.345.922		-		-	0	2.473.834.553	0%	34%	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	%	100	19.400.000	50	-	10	705.000		-		-	60	705.000	60%	4%	
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	19.400.000	3	-	2	705.000					5	705.000	83%	4%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	5.950.000.000	25	1.052.063.067	25	1.042.468.900		-		-	50	2.094.531.967	50%	35%	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	5.950.000.000	45	1.052.063.067	45	1.042.468.900					45	2.094.531.967	100%	35%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	400.000.000	19	46.521.939	20	47.272.967		-		-	39	93.794.906	39%	23%	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	400.000.000	12	46.521.939	18	47.272.967					30	93.794.906	38%	23%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	150.000.000	25	28.937.258	0	-		-		-	25	28.937.258	25%	19%	
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	150.000.000	6	28.937.258	0	0					6	28.937.258	50%	19%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	%	100	495.000.000	21	92.847.687	16	66.656.320		-		-	37	159.504.007	37%	32%	
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	495.000.000	3	92.847.687	2	66.656.320					5	159.504.007	42%	32%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	%	100	325.000.000	36	55.118.680	27	41.242.735		-		-	63	96.361.415	63%	30%	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	25.000.000	1	4.254.180	3	1.422.465					4	5.676.645	22%	23%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	250.000.000	1	44.946.500	1	35.658.970					2	80.605.470	100%	32%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	50.000.000	11	5.918.000	12	4.161.300					12	10.079.300	150%	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	87,7	2.220.402.999	0	97.761.800	21	266.796.500		-		-	21	364.558.300	24%	16%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	%	100	1.202.560.000	8,33	54.514.800	10	72.182.500		-		-	18,3	126.697.300	18%	11%	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	2	1.003.200.000	1	32.380.800	1	36.947.500					2	69.328.300	100%	7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	160	89.360.000	60	1.400.000	30	30.995.000					90	32.395.000	56%	36%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1000	110.000.000	638	20.734.000	1000	4.240.000					1638	24.974.000	164%	23%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	%	100	470.064.200	31,13	30.236.000	7,83	19.200.000		-		-	39	49.436.000	39%	11%	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	702	375.626.200	190	28.986.000	159	2.000.000					349	30.986.000	50%	8%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	455	94.438.000	11	1.250.000	209	17.200.000					220	18.450.000	48%	20%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	%	100	390.000.000	4,19	-	0	-		-		-	4,19	-	4%	0%	
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	110	390.000.000	9	-	0	0					9	-	8%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	100	157.778.799	4,5	13.011.000	60,95	175.414.000		-		-	65,5	188.425.000	65%	119%	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	28.806.799	0	2.899.000	1	3.730.000					1	6.629.000	100%	23%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	1429	51.850.000	891	-	121	0					1012	-	71%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	60	77.122.000	137	10.112.000	49	171.684.000					186	181.796.000	310%	236%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	13	2.634.264.000	12,37	221.710.500	10	177.213.900		-		-	12,4	398.924.400	95%	15%	
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	85	1.620.000.000	22,74	214.119.500	8,07	75.947.800		-		-	30,8	290.067.300	36%	18%	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	277	1.620.000.000	386	214.119.500	74	75.947.800					460	290.067.300	166%	18%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					dan Urusan Pemerintahan Umum																	
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	%	80	1.014.264.000	1,13	7.591.000	20	101.266.100		-		-	21,1	108.857.100	26%	11%	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	177	1.014.264.000	10	7.591.000	15	101.266.100					25	108.857.100	14%	11%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rata - Rata Capaian Kinerja																				66%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					22%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	1				INSPEKTORAT DAERAH				10.940.924.464													
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	84	10.043.000.000	0	1.591.088.671	0	1.630.657.657		-		-	A	3.221.746.328	0%	32%	
6	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentse Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	%	100	3.000.000	60	1.000.000	0	-		-		-	60	1.000.000	60%	33%	
6	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	3.000.000	6	1.000.000	0	-					6	1.000.000	60%	33%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	%	100	7.500.000.000	0	1.281.539.157	0	1.414.568.515		-		-	0	2.696.107.672	0%	36%	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	7.500.000.000	43	1.281.539.157	43	1.414.568.515					43	2.696.107.672	96%	36%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	Nilai	89	1.600.000.000	0	242.953.709	0	158.790.151		-		-	0	401.743.860	0%	25%	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	650.000.000	3	97.190.300	1	83.974.400					4	181.164.700	400%	28%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	950.000.000	14	145.763.409	18	74.815.751					32	220.579.160	49%	23%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	100	355.000.000	0	31.378.450	0	171.642.000					0	203.020.450	0%	57%	
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	355.000.000	0	31.378.450	3	171.642.000					3	203.020.450	100%	57%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah	%	100	940.000.000	0	34.217.355	0	216.089.142		-		-	0	250.306.497	0%	27%	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	40.000.000	12	17.217.155	1	2.789.884					13	20.007.039	46%	50%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	875.000.000	0	11.122.200	1	211.299.258					1	222.421.458	100%	25%	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	25.000.000	5	5.878.000	4	2.000.000					9	7.878.000	36%	32%	Inspektorat Daerah
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	%	45	1.159.000.000	0	226.503.870	0	23.276.000		-		-	0	249.779.870	0%	22%	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	Dokumen	29	1.100.000.000	0	225.447.870	0	15.034.500		-		-	0	240.482.370	0%	22%	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	65.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	15	840.000.000	4	194.718.000	4	13.514.500					8	208.232.500	53%	25%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	25.000.000		6.845.000	1	1.290.000					1	8.135.000	25%	33%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3	150.000.000	0	23.884.870	0	230.000					0	24.114.870	0%	16%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	20.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	59.000.000	0	1.056.000	0	8.241.500		-			0	9.297.500	0%	16%	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	4.000.000	1	1.056.000	0	1.520.000					1	2.576.000	50%	64%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	55.000.000	0	0	0	6.721.500					0	6.721.500	0%	12%	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	%	100	458.000.000	0	81.380.000	0	182.572.100		-		-	0	263.952.100	0%	58%	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	Dokumen	2	8.000.000	1	1.000.000	0	-		-		-	1	1.000.000	50%	13%	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	8.000.000	1	1.000.000	0	0					1	1.000.000	50%	13%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Dokumen	6	450.000.000	6	80.380.000	0	182.572.100		-		-	6	262.952.100	100%	58%	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	4	450.000.000	5	3.830.000	0	26.361.500					5	30.191.500	125%	7%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	860.000.000	1	76.550.000	0	156.210.600					1	232.760.600	50%	27%	Inspektorat Daerah
																	Rata - Rata Capaian Kinerja			48%		
																	Rata - Rata Capaian Keuangan				37%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Skor	80,9	14.236.609.154	0	2.209.376.203	0	2.369.375.802		-		-	0	4.578.752.005	0%	32%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	1.530.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	1.530.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	12.359.960.603	25	1.995.776.114	25	2.127.169.753		-		-	50	4.122.945.867	50%	33%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	75	12.359.960.603	75	1.995.776.114	75	2.127.169.753					75	4.122.945.867	100%	33%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	141.306.000	25	10.484.000	25	10.700.000		-		-	50	21.184.000	50%	15%	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	141.306.000	25	10.484.000	25	10.700.000					50	21.184.000	50%	15%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100	108.000.000	25	9.064.919	25	10.186.500		-		-	50	19.251.419	50%	18%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	10	108.000.000	1	9.064.919	1	10.186.500					2	19.251.419	20%	18%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	%	100	333.812.551	25	-	25	101.300.000		-		-	50	101.300.000	50%	30%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	90.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangungan lainnya yang disediakan	Unit	4	243.812.551	0	-	1	101.300.000					1	101.300.000	25%	42%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	901.000.000	25	159.656.935	25	115.046.599		-		-	50	274.703.534	50%	30%	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	901.000.000	3	159.656.935	3	115.046.599					6	274.703.534	50%	30%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	391.000.000	25	34.394.235	25	4.972.950		-		-	50	39.367.185	50%	10%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	53.000.000	1	14.504.235	0	4.224.950					1	18.729.185	6%	35%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	0	10.000.000	0	550.000					0	10.550.000	0%	4%	Kecamatan Taman
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	6	38.000.000	1	9.890.000	0	198.000					1	10.088.000	17%	27%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,8	18.766.000	0	3.496.000	0	3.650.000		-		-	0	7.146.000	0%	38%	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	18.766.000	25	3.496.000	25	3.650.000		-		-	50	7.146.000	50%	38%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	18.766.000	1	3.496.000	1	3.650.000					2	7.146.000	50%	38%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	205.891.275	0	70.528.125	0	73.728.350		-		-	0	144.256.475	0%	70%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	79.843.925	100	70.528.125	0	-		-		-	100	70.528.125	100%	88%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	79.843.925	7	70.528.125	0	0					7	70.528.125	100%	88%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	126.047.350	0	-	0	73.728.350		-		-	0	73.728.350	0%	58%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	3	126.047.350	0	-	0	73.728.350					0	73.728.350	0%	58%	Kecamatan Taman
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	100	791.784.400	0	158.785.300	0	60.072.800		-		-	0	218.858.100	0%	28%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	%	100	687.916.400	25	15.787.000	25	16.708.900		-		-	50	32.495.900	50%	5%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	687.916.400	2	15.787.000	2	16.708.900					4	32.495.900	100%	5%	Kecamatan Taman
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	103.868.000	25	142.998.300	25	43.363.900		-		-	50	186.362.200	50%	179%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	7	103.868.000	3	142.998.300	3	43.363.900					6	186.362.200	86%	179%	Kecamatan Taman
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100	119.067.700	25	36.344.000	25	8.640.000		-		-	50	44.984.000	50%	38%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	%	100	119.067.700	25	36.344.000	25	8.640.000		-		-	50	44.984.000	50%	38%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Orang	120	36.448.000	60	18.015.800	0	0					60	18.015.800	50%	49%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
					dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	61.652.000	1	14.213.000	1	7.285.000					2	21.498.000	50%	35%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	20.967.700	1	4.115.200	0	1.355.000					1	5.470.200	33%	26%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				665.756.765													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,4	595.231.200	0	119.603.405	0	80.082.441		-		-	0	199.685.846	0%	34%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	595.231.200	25	119.603.405	25	80.082.441		-		-	50	199.685.846	50%	34%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mojorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	595.231.200	3	119.603.405	3	80.082.441					6	199.685.846	50%	34%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	599.750.000	20	331.686.945	20	593.934.058		-		-	40	925.621.003	40%	154%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	599.750.000	20	331.686.945	20	593.934.058		-		-	40	925.621.003	40%	154%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	529.750.000	1	331.686.945	1	164.242.058					2	495.929.003	100%	94%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mojorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	70.000.000	0	-	2	429.692.000					2	429.692.000	100%	614%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				635.476.272													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,4	566.471.600	0	112.539.325	0	82.223.234		-		-	0	194.762.559	0%	34%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	566.471.600	25	112.539.325	25	82.223.234		-		-	50	194.762.559	50%	34%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pandean)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	566.471.600	3	112.539.325	3	82.223.234					6	194.762.559	50%	34%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	569.000.000	20	313.892.000	20	376.784.224		-		-	40	690.676.224	40%	121%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	569.000.000	20	313.892.000	20	376.784.224		-		-	40	690.676.224	40%	121%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pandean)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	493.000.000	1	313.892.000	0	66.984.224					1	380.876.224	50%	77%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pandean)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	76.000.000	0	-	2	309.800.000					2	309.800.000	100%	408%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				667.240.721													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,4	683.416.200	0	202.959.254	0	72.624.460		-		-	0	275.583.714	0%	40%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	683.416.200	25	202.959.254	25	72.624.460		-		-	50	275.583.714	50%	40%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjarejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	683.416.200	3	202.959.254	3	72.624.460					6	275.583.714	50%	40%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	415.250.000	20	1.590.600.000	20	538.660.000		-		-	40	2.129.260.000	40%	513%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	415.250.000	20	1.590.600.000	20	538.660.000		-		-	40	2.129.260.000	40%	513%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	365.250.000	1	1.362.800.000	1	310.860.000					2	1.673.660.000	100%	458%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	2	50.000.000	1	227.800.000	1	227.800.000					2	455.600.000	100%	911%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				442.941.932													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,4	360.528.170	0	75.086.203	0	49.983.851		-		-	0	125.070.054	0%	35%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	360.528.170	25	75.086.203	25	49.983.851		-		-	50	125.070.054	50%	35%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kuncen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	360.528.170	3	75.086.203	3	49.983.851					6	125.070.054	50%	35%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	255.350.000	20	200.345.150	20	69.018.000		-		-	40	269.363.150	40%	105%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	255.350.000	20	200.345.150	20	69.018.000		-		-	40	269.363.150	40%	105%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	205.350.000	1	187.145.150	1	6.410.000					2	193.555.150	100%	94%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kuncen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	50.000.000	0	13.200.000	1	62.608.000					1	75.808.000	50%	152%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				716.116.804													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,4	753.523.600	0	179.083.460	0	122.781.354		-		-	0	301.864.814	0%	40%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	753.523.600	25	179.083.460	25	122.781.354		-		-	50	301.864.814	50%	40%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manisrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	753.523.600	3	179.083.460	3	122.781.354					6	301.864.814	50%	40%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	569.000.000	20	977.459.104	20	1.610.091.400		-		-	40	2.587.550.504	40%	455%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	569.000.000	20	977.459.104	20	1.610.091.400		-		-	40	2.587.550.504	40%	455%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	496.000.000	1	977.459.104	1	1.186.536.000					2	2.163.995.104	100%	436%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manisrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	73.000.000	0	-	2	423.555.400					2	423.555.400	100%	580%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				606.316.226													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,4	647.522.704	0	126.072.577	0	80.483.642		-		-	0	206.556.219	0%	32%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	647.522.704	25	126.072.577	25	80.483.642		-		-	50	206.556.219	50%	32%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kejuron)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	647.522.704	3	126.072.577	3	80.483.642					6	206.556.219	50%	32%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	507.500.000	20	1.095.978.050	20	331.700.000		-		-	40	1.427.678.050	40%	281%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	507.500.000	20	1.095.978.050	20	331.700.000		-		-	40	1.427.678.050	40%	281%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	454.500.000	1	1.095.978.050	1	2.500.000					2	1.098.478.050	100%	242%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kejuron)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	53.000.000	0	-	2	329.200.000					2	329.200.000	100%	621%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				753.233.297													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,8	759.178.800	0	145.499.860	0	69.375.598		-		-	0	214.875.458	0%	28%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	759.178.800	25	145.499.860	25	69.375.598		-		-	50	214.875.458	50%	28%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Josenan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	759.178.800	3	145.499.860	3	69.375.598					6	214.875.458	50%	28%	Kecamatan Taman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	390.650.000	20	323.823.500	20	240.793.000		-		-	40	564.616.500	40%	145%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	390.650.000	20	323.823.500	20	240.793.000		-		-	40	564.616.500	40%	145%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Josenan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	340.650.000	1	322.423.500	1	5.071.900					2	327.495.400	100%	96%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Josenan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	50.000.000	0	1.400.000	1	235.721.100					1	237.121.100	50%	474%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				603.734.296													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,8	630.324.000	0	137.068.295	0	61.372.650		-		-	0	198.440.945	0%	31%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	630.324.000	25	137.068.295	25	61.372.650		-		-	50	198.440.945	50%	31%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Demangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	630.324.000	3	137.068.295	3	61.372.650					6	198.440.945	50%	31%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	421.400.000	20	512.064.271	20	1.130.880.000		-		-	40	1.642.944.271	40%	390%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	421.400.000	20	512.064.271	20	1.130.880.000		-		-	40	1.642.944.271	40%	390%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Demangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	346.400.000	1	512.064.271	1	862.970.000					2	1.375.034.271	100%	397%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Demangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	2	75.000.000	0	-	0	267.910.000					0	267.910.000	0%	357%	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				842.017.097													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,8	591.746.800	0	121.720.178	0	77.112.610		-		-	0	198.832.788	0%	34%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	%	100	591.746.800	25	121.720.178	25	77.112.610		-		-	50	198.832.788	50%	34%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Taman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	591.746.800	3	121.720.178	3	77.112.610					6	198.832.788	50%	34%	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	513.650.000	20	363.843.000	20	348.190.000		-		-	40	712.033.000	40%	139%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	513.650.000	20	363.843.000	20	348.190.000		-		-	40	712.033.000	40%	139%	

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Taman)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	463.650.000	1	363.843.000	1	6.590.000					2	370.433.000	50%	80%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Taman)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	3	50.000.000	0	-	0	341.600.000					0	341.600.000	0%	683%	Kecamatan Taman
Rata - Rata Capaian Kinerja																				45%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					74%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				14.442.923.487													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	80,2	13.429.000.000	0	2.132.613.931	0	2.214.580.896		-		-	0	4.347.194.827	0%	32%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	4.000.000	25	-	25	-		-		-	50	-	50%	0%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	4.000.000	1	-	3						4	-	33%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	11.502.000.000	25	1.887.546.362	25	2.030.088.889		-		-	50	3.917.635.251	50%	34%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	11.500.000.000	70	1.886.946.662	0	2.030.088.889					70	3.917.035.551	100%	34%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	13	2.000.000	2	599.700	3	0					5	599.700	38%	30%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	%	100	150.000.000	25	2.902.500	25	9.715.000		-		-	50	12.617.500	50%	8%	
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	70	150.000.000	10	2.902.500	25	9.715.000					35	12.617.500	50%	8%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	indeks	87,8	230.000.000	0	18.523.168	10	8.560.068		-		-	10	27.083.236	11%	12%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	230.000.000	1	18.523.168	1	8.560.068					2	27.083.236	17%	12%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	343.000.000	0	-	10	1.912.500		-		-	10	1.912.500	10%	1%	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	200.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	12	143.000.000	0	-	1	1.912.500					1	1.912.500	8%	1%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	%	100	1.030.000.000	25	203.100.401	25	152.094.439		-		-	50	355.194.840	50%	34%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.030.000.000	4	203.100.401	4	152.094.439					8	355.194.840	67%	34%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	%	100	170.000.000	25	20.541.500	0	12.210.000		-		-	25	32.751.500	25%	19%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	15	60.000.000	5	12.841.500	1	7.060.000					6	19.901.500	40%	33%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	20.000.000	0	2.700.000	0	2.400.000					0	5.100.000	0%	26%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	55.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	60	35.000.000	0	5.000.000	5	2.750.000					5	7.750.000	8%	22%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,8	40.000.000	0	27.697.500	0	18.584.000		-		-	0	46.281.500	0%	116%	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	%	100	40.000.000	0	27.697.500	25	18.584.000		-		-	25	46.281.500	25%	116%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	3	40.000.000	0	27.697.500	1	18.584.000					1	46.281.500	33%	116%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	153.382.200	0	76.458.100	20	10.444.000		-		-	20	86.902.100	20%	57%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	55	69.647.400	0	68.442.000	0	2.519.000		-		-	0	70.961.000	0%	102%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	69.647.400	7	68.442.000	0	2.519.000					7	70.961.000	100%	102%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Lembaga / Forum	1	83.734.800	0	8.016.100	0	7.925.000		-		-	0	15.941.100	0%	19%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	12	83.734.800	1	8.016.100	1	7.925.000					2	15.941.100	17%	19%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	902.806.200	0	158.045.000	0	17.738.500		-		-	0	175.783.500	0%	19%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	619.200.000	0	17.622.500	25	17.738.500		-		-	25	35.361.000	25%	6%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	16	619.200.000	2	17.622.500	4	17.738.500					6	35.361.000	38%	6%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	283.606.200	40	140.422.500	0	-		-		-	40	140.422.500	40%	50%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	Laporan	6	283.606.200	2	140.422.500	0	0					2	140.422.500	33%	50%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	155.548.000	0	20.325.000	0	39.946.500		-		-	0	60.271.500	0%	39%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	100	155.548.000	0	20.325.000	30	39.946.500		-		-	30	60.271.500	30%	39%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	125	66.120.000	0	-	50	20.741.500					50	20.741.500	40%	31%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	76.400.000	1	16.805.000	0	19.205.000					1	36.010.000	25%	47%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	13.028.000	0	3.520.000	0	0					0	3.520.000	0%	27%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				578.769.494													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	619.721.600	0	123.120.210	0	83.133.960		-		-	0	206.254.170	0%	33%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	619.721.600	25	123.120.210	25	83.133.960		-		-	50	206.254.170	50%	33%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	619.721.600	3	123.120.210	3	83.133.960					6	206.254.170	50%	33%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	458.000.000	30	228.043.800	50	444.295.800		-		-	80	672.339.600	80%	147%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	458.000.000	30	228.043.800	50	444.295.800		-		-	80	672.339.600	80%	147%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	383.000.000	1	164.443.800	1	229.295.800					2	393.739.600	100%	103%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Oro - Oro Ombo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	63.600.000	2	215.000.000					3	278.600.000	60%	371%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				490.293.731													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	521.022.800	0	91.877.721	0	70.043.714		-		-	0	161.921.435	0%	31%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	521.022.800	25	91.877.721	25	70.043.714		-		-	50	161.921.435	50%	31%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	521.022.800	3	91.877.721	3	70.043.714					6	161.921.435	50%	31%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	308.000.000	20	156.165.482	70	644.688.065		-		-	90	800.853.547	90%	260%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	308.000.000	20	156.165.482	70	644.688.065		-		-	90	800.853.547	90%	260%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	233.000.000	0	126.165.482	2	464.688.065					2	590.853.547	100%	254%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukosari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	2	30.000.000	2	180.000.000					4	210.000.000	80%	280%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				906.421.989													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	641.579.200	0	103.094.962	0	99.103.917		-		-	0	202.198.879	0%	32%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	641.579.200	25	103.094.962	25	99.103.917		-		-	50	202.198.879	50%	32%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Klegen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	641.579.200	3	103.094.962	3	99.103.917					6	202.198.879	50%	32%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	488.000.000	20	487.898.700	60	872.820.730		-		-	80	1.360.719.430	80%	279%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	488.000.000	20	487.898.700	60	872.820.730		-		-	80	1.360.719.430	80%	279%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Klegen)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	413.000.000	1	417.098.700	1	512.820.730					2	929.919.430	100%	225%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Klegen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	70.800.000	3	360.000.000					4	430.800.000	80%	574%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				544.932.143													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	590.762.800	0	115.039.786	0	90.841.930		-		-	0	205.881.716	0%	35%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	590.762.800	25	115.039.786	25	90.841.930		-		-	50	205.881.716	50%	35%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Rejomulyo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	590.762.800	3	115.039.786	3	90.841.930					6	205.881.716	50%	35%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	428.000.000	0	287.627.100	65	889.702.630		-		-	65	1.177.329.730	65%	275%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	55	428.000.000	0	287.627.100	65	889.702.630		-		-	65	1.177.329.730	118%	275%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	353.000.000	1	227.627.100	1	697.702.630					2	925.329.730	100%	262%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Rejomulyo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	60.000.000	2	192.000.000					3	252.000.000	60%	336%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				513.840.109													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	546.951.600	25	93.707.202	25	61.714.385		-		-	50	155.421.587	57%	28%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	546.951.600	25	93.707.202	25	61.714.385		-		-	50	155.421.587	50%	28%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pilangbango)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	546.951.600	3	93.707.202	3	61.714.385					6	155.421.587	50%	28%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	332.000.000	20	231.974.914	60	485.520.300		-		-	80	717.495.214	80%	216%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	332.000.000	20	231.974.914	60	485.520.300		-		-	80	717.495.214	80%	216%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	257.000.000	1	198.374.914	1	400.620.300					2	598.995.214	100%	233%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pilangbango)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	33.600.000	1	84.900.000					2	118.500.000	40%	158%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				461.308.950													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	484.880.400	25	124.265.702	25	59.523.650		-		-	50	183.789.352	57%	38%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	484.880.400	25	124.265.702	25	59.523.650		-		-	50	183.789.352	50%	38%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tawangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	484.880.400	3	124.265.702	3	59.523.650					6	183.789.352	50%	38%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	344.000.000	20	252.111.030	60	794.958.000		-		-	80	1.047.069.030	80%	304%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	55	344.000.000	20	252.111.030	60	794.958.000		-		-	80	1.047.069.030	145%	304%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	269.000.000	1	214.911.030	1	669.064.000					2	883.975.030	100%	329%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	37.200.000	2	125.894.000					3	163.094.000	60%	217%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				561.327.180													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	613.636.800	0	119.981.101	0	80.904.294		-		-	0	200.885.395	0%	33%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	613.636.800	25	119.981.101	25	80.904.294		-		-	50	200.885.395	50%	33%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kanigoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	613.636.800	3	119.981.101	3	80.904.294					6	200.885.395	50%	33%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	512.000.000	25	286.600.600	55	1.028.537.000		-		-	80	1.315.137.600	80%	257%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	512.000.000	25	286.600.600	55	1.028.537.000		-		-	80	1.315.137.600	80%	257%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	437.000.000	1	208.600.600	1	808.537.000					2	1.017.137.600	100%	233%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kanigoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	78.000.000	2	220.000.000					3	298.000.000	60%	397%	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				506.217.055													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	548.143.600	0	99.817.113	0	66.843.472		-		-	0	166.660.585	0%	30%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	548.143.600	25	99.817.113	25	66.843.472		-		-	50	166.660.585	50%	30%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kartoharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	548.143.600	3	99.817.113	3	66.843.472					6	166.660.585	50%	30%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	428.000.000	0	328.807.300	60	670.052.030		-		-	60	998.859.330	60%	233%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	55	428.000.000	0	328.807.300	60	670.052.030		-		-	60	998.859.330	109%	233%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	353.000.000	1	271.207.300	1	443.058.030					2	714.265.330	100%	202%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	57.600.000	2	226.994.000					3	284.594.000	60%	379%	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				727.043.630													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	87,9	525.499.600	25	94.206.460	25	62.934.021		-		-	50	157.140.481	57%	30%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	525.499.600	25	94.206.460	25	62.934.021		-		-	50	157.140.481	50%	30%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	525.499.600	3	94.206.460	3	62.934.021					6	157.140.481	50%	30%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	356.000.000	20	154.640.830	70	698.597.800		-		-	90	853.238.630	90%	240%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	55	356.000.000	20	154.640.830	70	698.597.800		-		-	90	853.238.630	164%	240%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelun)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	281.000.000	1	115.040.830	1	532.853.800					2	647.894.630	100%	231%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelun)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	5	75.000.000	1	39.600.000	2	165.744.000					3	205.344.000	60%	274%	Kecamatan Kartoharjo
Rata - Rata Capaian Kinerja																				52%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					40%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				13.828.303.562													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	skor	80	14.190.112.556	0	2.120.572.106	0	2.320.106.444		-		-	0	4.440.678.550	0%	31%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	23.882.926	25	7.215.000	0	-		-		-	25	7.215.000	25%	30%	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	23.882.926	2	7.215.000	0	0					2	7.215.000	10%	30%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	11.854.586.130	25	1.844.723.171	0	1.972.832.205		-		-	25	3.817.555.376	25%	32%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	11.852.586.130	70	1.844.723.171	70	1.972.349.205					70	3.817.072.376	100%	32%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26	2.000.000	0	-	4	483.000					4	483.000	15%	24%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	%	100	56.828.000	25	7.990.000	25	6.490.000		-		-	50	14.480.000	50%	25%	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	70	19.876.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	36.952.000	25	7.990.000	25	6.490.000					50	14.480.000	50%	39%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	127.835.000	25	7.198.624	25	10.082.143		-		-	50	17.280.767	50%	14%	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	127.835.000	1	7.198.624	2	10.082.143					3	17.280.767	25%	14%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	%	100	624.851.629	25	6.918.000	25	158.845.000		-		-	50	165.763.000	50%	27%	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	101.250.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	122.999.800	0	6.918.000	0	0					0	6.918.000	0%	6%	
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	400.601.829	0	-	2	158.845.000					2	158.845.000	11%	40%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	%	100	949.240.178	25	182.348.866	25	146.691.546		-		-	50	329.040.412	50%	35%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	949.240.178	2	182.348.866	2	146.691.546					4	329.040.412	33%	35%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	%	100	552.888.693	25	64.178.445	25	25.165.550		-		-	50	89.343.995	50%	16%	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	69.573.208	5	19.350.695	5	7.433.050					10	26.783.745	63%	38%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	422.482.257	1	35.547.750	1	5.407.500					2	40.955.250	33%	10%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	60.833.228	10	9.280.000	10	12.325.000					20	21.605.000	33%	36%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	37.010.800	0	23.816.500	90	21.012.800		-		-	90,03	44.829.300	100%	121%	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	%	100	37.010.800	25	23.816.500	25	21.012.800		-		-	50	44.829.300	50%	121%	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	37.010.800	0	23.816.500	1	21.012.800					1	44.829.300	100%	121%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	127.352.450	0	92.761.457	25	10.196.800		-		-	25	102.958.257	25%	81%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	65.715.050	0	58.917.807	25	854.300		-		-	25	59.772.107	25%	91%	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	7	65.715.050	7	58.917.807	7	854.300					14	59.772.107	200%	91%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	Forum	2	61.637.400	0,5	33.843.650	0,5	9.342.500		-		-	1	43.186.150	50%	70%	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	61.637.400	0	33.843.650	0	9.342.500					0	43.186.150	0%	70%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	774.931.500	25	172.628.400	25	63.302.600		-		-	50	235.931.000	50%	30%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	651.977.500	25	10.732.000	25	31.739.000		-		-	50	42.471.000	50%	7%	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	651.977.500	0	10.732.000	1	31.739.000					1	42.471.000	100%	7%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	100	122.954.000	25	161.896.400	25	31.563.600		-		-	50	193.460.000	50%	157%	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	122.954.000	1	161.896.400	0	31.563.600					1	193.460.000	100%	157%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	%	100	159.330.000	25	47.468.000	25	18.473.400		-		-	50	65.941.400	50%	41%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	%	100	107.070.000	25	23.734.000	25	17.473.400		-		-	50	41.207.400	50%	38%	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	350	38.660.000	0	-	350	16.473.400					350	16.473.400	100%	43%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan	1	52.260.000	0,25	23.734.000	0,25	1.000.000					0,5	24.734.000	50%	47%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	2	16.150.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				826.683.680													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	877.936.811	0	129.462.358	0	82.995.951		-		-	0	212.458.309	0%	24%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	877.936.811	25	129.462.358	25	82.995.951		-		-	50	212.458.309	50%	24%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Manguharjo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	877.936.811	3	129.462.358	2	82.995.951					5	212.458.309	42%	24%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	303.750.000	25	1.506.679.500	25	195.787.500		-		-	50	1.702.467.000	50%	560%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	303.750.000	25	1.506.679.500	25	195.787.500		-		-	50	1.702.467.000	50%	560%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	233.750.000	1	1.506.679.500	0	141.787.500					1	1.648.467.000	50%	705%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manguharjo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	0	54.000.000					0	54.000.000	0%	77%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				527.330.775													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	750.194.333	0	106.348.140	0	96.317.830		-		-	0	202.665.970	0%	27%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	750.194.333	25	106.348.140	25	96.317.830		-		-	50	202.665.970	50%	27%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sogaten)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	750.194.333	3	106.348.140	3	96.317.830					6	202.665.970	50%	27%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	260.700.000	25	538.825.501	25	204.317.500		-		-	50	743.143.001	50%	285%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	260.700.000	25	538.825.501	25	204.317.500		-		-	50	743.143.001	50%	285%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	190.700.000	0,5	538.825.501	0,5	7.440.700					1	546.266.201	50%	286%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sogaten)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	196.876.800					2	196.876.800	40%	281%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				549.980.000													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	651.714.774	0	112.284.910	0	69.758.627		-		-	0	182.043.537	0%	28%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	651.714.774	25	112.284.910	25	69.758.627		-		-	50	182.043.537	50%	28%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patihan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	651.714.774	3	112.284.910	3	69.758.627					6	182.043.537	50%	28%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	217.650.000	25	241.771.500	25	155.021.000		-		-	50	396.792.500	50%	182%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	217.650.000	25	241.771.500	25	155.021.000		-		-	50	396.792.500	50%	182%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patihan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	147.650.000	0,5	241.771.500	0,5	10.221.000					1	251.992.500	50%	171%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patihan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	144.800.000					2	144.800.000	40%	207%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				553.101.600													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	615.204.280	0	103.175.101	0	80.198.065		-		-	0	183.373.166	0%	30%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	615.204.280	25	103.175.101	25	80.198.065		-		-	50	183.373.166	50%	30%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngegong)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	615.204.280	3	103.175.101	3	80.198.065					6	183.373.166	50%	30%	Kecamatan Manguharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	186.900.000	25	644.246.100	25	780.686.000		-		-	50	1.424.932.100	50%	762%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	186.900.000	25	644.246.100	25	780.686.000		-		-	50	1.424.932.100	50%	762%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	2	116.900.000	0,5	644.246.100	0,5	668.086.000					1	1.312.332.100	50%	1123%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngegong)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	112.600.000					2	112.600.000	40%	161%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				948.028.212													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	770.309.443	0	94.784.446	0	106.487.301		-		-	0	201.271.747	0%	26%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	770.309.443	25	94.784.446	25	106.487.301		-		-	50	201.271.747	50%	26%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Winongo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	770.309.443	3	94.784.446	2	106.487.301					5	201.271.747	42%	26%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	309.900.000	25	1.190.290.000	25	256.521.500		-		-	50	1.446.811.500	50%	467%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	309.900.000	25	1.190.290.000	25	256.521.500		-		-	50	1.446.811.500	50%	467%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Winongo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	239.900.000	0,5	1.190.290.000	0,5	12.721.500					1	1.203.011.500	50%	501%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Winongo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	243.800.000					2	243.800.000	40%	348%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				665.881.444													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	839.684.776	0	107.424.219	0	108.796.513		-		-	0	216.220.732	0%	26%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	839.684.776	25	107.424.219	25	108.796.513		-		-	50	216.220.732	50%	26%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Madiun Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	839.684.776	3	107.424.219	2	108.796.513					5	216.220.732	42%	26%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	334.500.000	25	467.645.538	25	271.647.000		-		-	50	739.292.538	50%	221%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	334.500.000	25	467.645.538	25	271.647.000		-		-	50	739.292.538	50%	221%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	264.500.000	0,5	467.645.538	0,5	4.447.000					1	472.092.538	50%	178%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Madiun Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	267.200.000					2	267.200.000	40%	382%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				596.804.394													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	655.918.826	0	129.059.982	0	61.714.385		-		-	0	190.774.367	0%	29%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	655.918.826	25	129.059.982	25	61.714.385		-		-	50	190.774.367	50%	29%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pangongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	655.918.826	3	129.059.982	2	61.714.385					5	190.774.367	42%	29%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	242.250.000	25	113.961.500	25	485.520.300		-		-	50	599.481.800	50%	247%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	242.250.000	25	113.961.500	25	485.520.300		-		-	50	599.481.800	50%	247%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	172.250.000	0,5	113.961.500	0,5	400.620.300					1	514.581.800	50%	299%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pangongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	84.900.000					2	84.900.000	40%	121%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				831.758.000													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90	1.227.147.957	0	201.067.743	0	106.914.257		-		-	0	307.982.000	0%	25%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	1.227.147.957	25	201.067.743	25	106.914.257		-		-	50	307.982.000	50%	25%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Lor)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.227.147.957	3	201.067.743	2	106.914.257					5	307.982.000	42%	25%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	519.000.000	25	356.348.000	25	779.599.998		-		-	50	1.135.947.998	50%	219%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	519.000.000	25	356.348.000	25	779.599.998		-		-	50	1.135.947.998	50%	219%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	449.000.000	0,5	356.348.000	0,5	307.571.998					1	663.919.998	50%	148%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Lor)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	472.028.000					2	472.028.000	40%	674%	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN				1.004.781.931													
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Skor	90,1	815.909.663	0	145.782.544	0	92.120.335		-		-	0	237.902.879	0%	29%	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	%	100	815.909.663	25	145.782.544	25	92.120.335		-		-	50	237.902.879	50%	29%	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nambangan Kidul)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	815.909.663	3	145.782.544	2	92.120.335					5	237.902.879	42%	29%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	%	100	365.250.000	25	465.114.500	25	451.622.800		-		-	50	916.737.300	50%	251%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	365.250.000	25	465.114.500	25	451.622.800		-		-	50	916.737.300	50%	251%	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	295.250.000	0,5	465.114.500	0,5	212.222.800					1	677.337.300	50%	229%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nambangan Kidul)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	5	70.000.000	0	-	2	239.400.000					2	239.400.000	40%	342%	Kecamatan Manguharjo
																				Rata - Rata Capaian Kinerja		
																				Rata - Rata Capaian Keuangan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,1	5.816.175.149	0	764.587.110	0	829.983.926		-		-	0	1.594.571.036	0%	27%	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	59.904.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.304.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	45.600.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	%	100	4.366.271.149	25	645.618.730	25	710.503.220		-		-	50	1.356.121.950	50%	31%	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	4.366.271.149	21	645.618.730	21	710.503.220					42	1.356.121.950	200%	31%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	%	100	95.000.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Orang	28	95.000.000	0	-	0	-					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	%	100	983.500.000	25	106.523.380	25	104.721.706		-		-	50	211.245.086	50%	21%	
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	683.500.000	0	83.005.500	0	77.875.706					0	160.881.206	0%	24%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	laporan	80	300.000.000	10	23.517.880	10	26.846.000					20	50.363.880	25%	17%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	%	100	191.500.000	0	-	0	-		-		-	0	-	0%	0%	
8	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	91.500.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakann	%	100	120.000.000	25	12.445.000	25	14.759.000		-		-	50	27.204.000	50%	23%	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	55.000.000	0	3.960.000	0	5.959.000					0	9.919.000	0%	18%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	0	485.000	0	1.000.000					0	1.485.000	0%	10%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	14	50.000.000	4	8.000.000	0	7.800.000					4	15.800.000	29%	32%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	1.014.049.297	0	43.659.750	0	130.794.100		-		-	0	174.453.850	0%	17%	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	jenis	7	1.014.049.297	0	43.659.750	1	130.794.100		-		-	1	174.453.850	14%	17%	
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	125	290.049.297	0	2.214.750	45	100.000.000					45	102.214.750	36%	35%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	2	724.000.000	0	41.445.000	0	30.794.100					0	72.239.100	0%	10%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	%	100	18.800.062.030	0	13.484.934.492	0	650.208.800		-		-	0	14.135.143.292	0%	75%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	%	80	18.800.062.030	0	13.484.934.492	0	650.208.800		-		-	0	14.135.143.292	0%	75%	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintah, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	33	980.581.030	0	-	12	633.708.800					12	633.708.800	36%	65%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etikan Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Orang	125	34.353.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	laporan	1	17.785.128.000	1	13.484.934.492	0	16.500.000					1	13.501.434.492	100%	76%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	68	585.337.000	0	-	0	9.970.600		-		-	0	9.970.600	0%	2%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	%	75	585.337.000	0	-	0	9.970.600		-		-	0	9.970.600	0%	2%	
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Orang	75	585.337.000	0	-	0	9.970.600					0	9.970.600	0%	2%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	1.121.581.250	0	59.868.000	0	1.911.552.500		-		-	0	1.971.420.500	0%	176%	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	kali	4	1.121.581.250	0	59.868.000	0	1.911.552.500		-		-	0	1.971.420.500	0%	176%	
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Orang	100	60.000.000	0	-	0	6.149.500					0	6.149.500	0%	10%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	400	1.061.581.250	30	59.868.000	230	1.905.403.000					260	1.965.271.000	65%	185%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100	2.183.537.393	0	176.718.925	0	5.201.700.000		-		-	0	5.378.418.925	0%	246%	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	konflik	0	2.183.537.393	0	176.718.925	0	5.201.700.000		-		-	0	5.378.418.925	100%	246%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1					2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9		11=10/5 x 100%		12
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Orang	100	1.683.537.393	10	77.200.880	100	5.115.190.000					110	5.192.390.880	110%	308%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	Dokumen	12	500.000.000	2	99.518.045	2	86.510.000					4	186.028.045	33%	37%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata - Rata Capaian Kinerja																				24%		
Rata - Rata Capaian Keuangan																					59%	

Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Hasil evaluasi pencapaian target kinerja Kota Madiun Pada Triwulan II Kota Madiun 40%, rata-rata realisasi anggaran Per Urusan 29%. Tingkat capaian ini masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak indikator Program dan Sebagian indikator kegiatan dan sub kegiatan yang penghitungan capaiannya baru bisa dihitung pada akhir Tahun 2024.

Faktor Penghambat :

1. Banyak indikator program yang capaiannya baru bisa dihitung pada akhir Tahun menjadikan capaian Programnya banyak yang terisi nol;
2. Adanya permasalahan terhadap aplikasi pusat akibat *bug* maupun karena *hack* PDN;
3. Adanya sub kegiatan baru yang berbeda dengan Sub kegiatan RKPD 2023 akibat *update* SIPD-RI;

Faktor Pendukung :

1. Arahan Wali Kota Madiun bahwa Triwulan 1 OPD semua sudah harus berprogres dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

Tindaklanjut Triwulan Berikutnya :

1. Perbaikan Matrik Evaluasi disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang *update;*
2. Menggunakan aplikasi kedua untuk mem*backup* data yang tidak bisa diakses karena *error* aplikasi pusat; dan
3. Terpaksa menggunakan manual terlebih dahulu sambil menunggu aplikasi pusat stabil.

Tindaklanjut RKPD Tahun Berikutnya :

Lebih mencermati pemilihan sub kegiatan OPD agar sesuai dengan dokumen yang terkait seperti dokumen RENSTRA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan panduan atau strategi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang ditargetkan. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun pada Perubahan RKPD 2024 menyesuaikan dengan asumsi makro dasar APBN 2024 dan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan tingkat pusat dan Provinsi Jawa Timur. Asumsi makro dalam APBN 2024 optimis dengan tidak menggunakan rentang nilai, pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,2% dan inflasi pada level 2,8%. Nilai tukar rupiah berada pada angka Rp15.000 per dolar AS. Lalu asumsi harga minyak atau *Indonesia Crude Price* (ICP) sebesar 82 dolar AS per barel. Produksi minyak siap jual atau lifting minyak sebesar 635 ribu barel minyak per hari. Lalu *lifting* gas di asumsikan sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia 2024

Indikator	2024
Pertumbuhan Ekonomi (*%, yoy*)	5,2
Inflasi *(%, yoy)*	2,8
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	6,7
Nilai Tukar (Rp/ US$)	15.000
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	635
Lifting Gas (BOE/hari)	1.033

Sumber: Nota Keuangan APBN, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain itu arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun memperhatikan berbagai regulasi pemerintah pusat dan Provinsi sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Selain berbagai hal diatas, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan pembangunan nasional dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Setidaknya terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.1 Tujuh Agenda Pembangunan Nasional
Sumber: Bappenas, 2020 (RPJMN 2020 – 2024)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tujuh agenda pembangunan nasional, mengacu pada 5 (lima) arahan presiden yang meliputi pembungan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Tujuh agenda pembangunan nasional di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
   1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
   2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
   4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

   1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
   2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
   3) Moderasi beragama; dan
   4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

   1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
   5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, Pemerintah provinsi juga telah merumuskan agenda/strategi pembangunan daerah melalui 7 agenda utama sebegai berikut:



Gambar 3.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2024. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1) Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4) Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5) Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumberdaya Energi;
6) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.



Gambar 3. 3 Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur

Percepatan pembangunan Kawasan di Jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Perpres ini mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi Kawasan gerbang Kertasusila dan sekitarnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan seingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selain itu, pembangunan Kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbangkertasusila.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Terna yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan prodtiktivitas pertanian hortikultura, petkebunan dan nilai tarn.bah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan Iainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.



Gambar 3. 4 Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Di Jawa Timur, penetapan klaster dirumuskan atas dasar RPJMD Tahun 2019–2024 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung.Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 yaitu Wilis Utara.

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah:

a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani.

   Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk.

   Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegungungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan

c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

Kondisi ekonomi global pada Tahun 2024 diprediksi masih mengalami ketidakpastian dengan proyeksi masih di bawah tren jangka panjang. Perkiraan dasar pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 perekonomian dunia akan tumbuh sebesar 3,2 persen pada negara-negara berkembang dan 1,8 persen pada negara-negara maju. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa harga komoditas bahan bakar dan non bahan bakar akan turun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

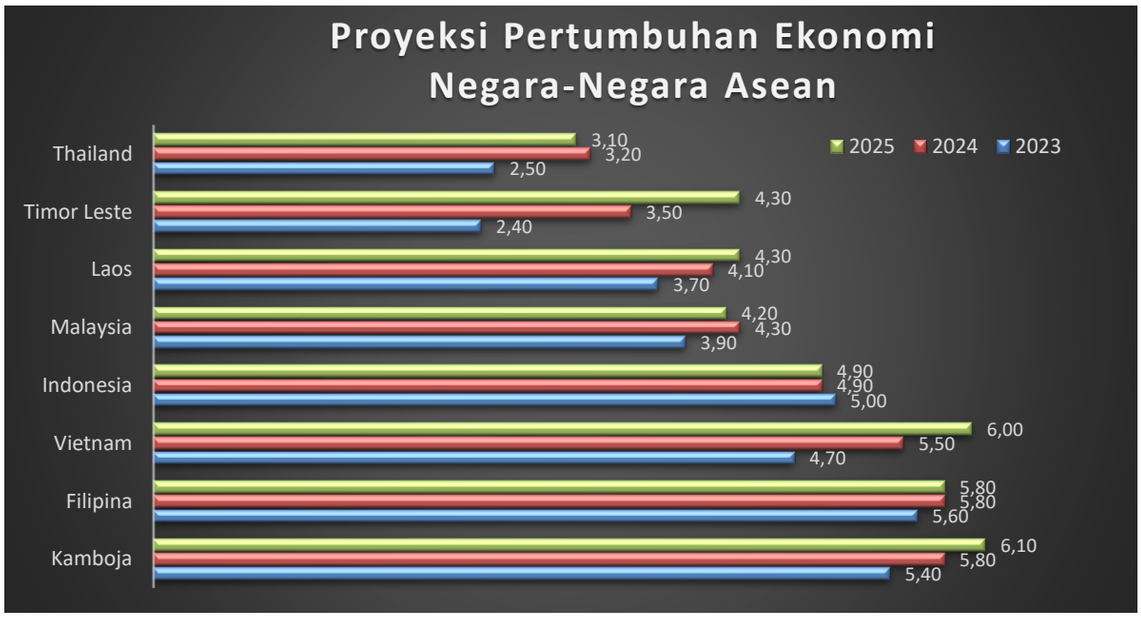
pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta tingkat suku bunga di negara-negara maju juga akan menurun, akan tetapi optimisme pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 akan terganggu dengan adanya konflik di jalur gaza dan laut merah serta cuaca ekstrim yang dapat mengganggu ketahan pangan dan juga memburuknya kondisi sektor properti disejumlah negara seperti di china.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Ekonomi Global

1. Ketidakpastian Geopolitik. Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi. Dikutip dalam Times Indonesia, Jakarta, mengatakan, "Tahun 2024 diperkirakan akan menyaksikan ekonomi Indonesia semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik seiring dengan penurunan permintaan global yang diantisipasi. Di sisi lain, peningkatan signifikan dalam pengeluaran fiskal, terutama selama masa pemilihan umum, diharapkan dapat memacu pertumbuhan GDP sebesar 5% *year-on-year* (YoY)."
2. Perubahan Nilai Mata Uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional. Menurut *bisnis.com*, "Pada Tahun 2024, proyeksi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia hanya sekitar 9% dan 9,4%, masing-masing, yang mengindikasikan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022. Penurunan pertumbuhan ekspor dan impor ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi dunia yang diharapkan terjadi pada Tahun mendatang."
3. Fluktuasi Harga Komoditas. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu. "Sementara itu, dengan pelemahan ekonomi negara mitra utama Indonesia, pertumbuhan positif di negara-negara lain, terutama di Amerika Utara (2,2%), Amerika Selatan (3,3%), dan Asia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

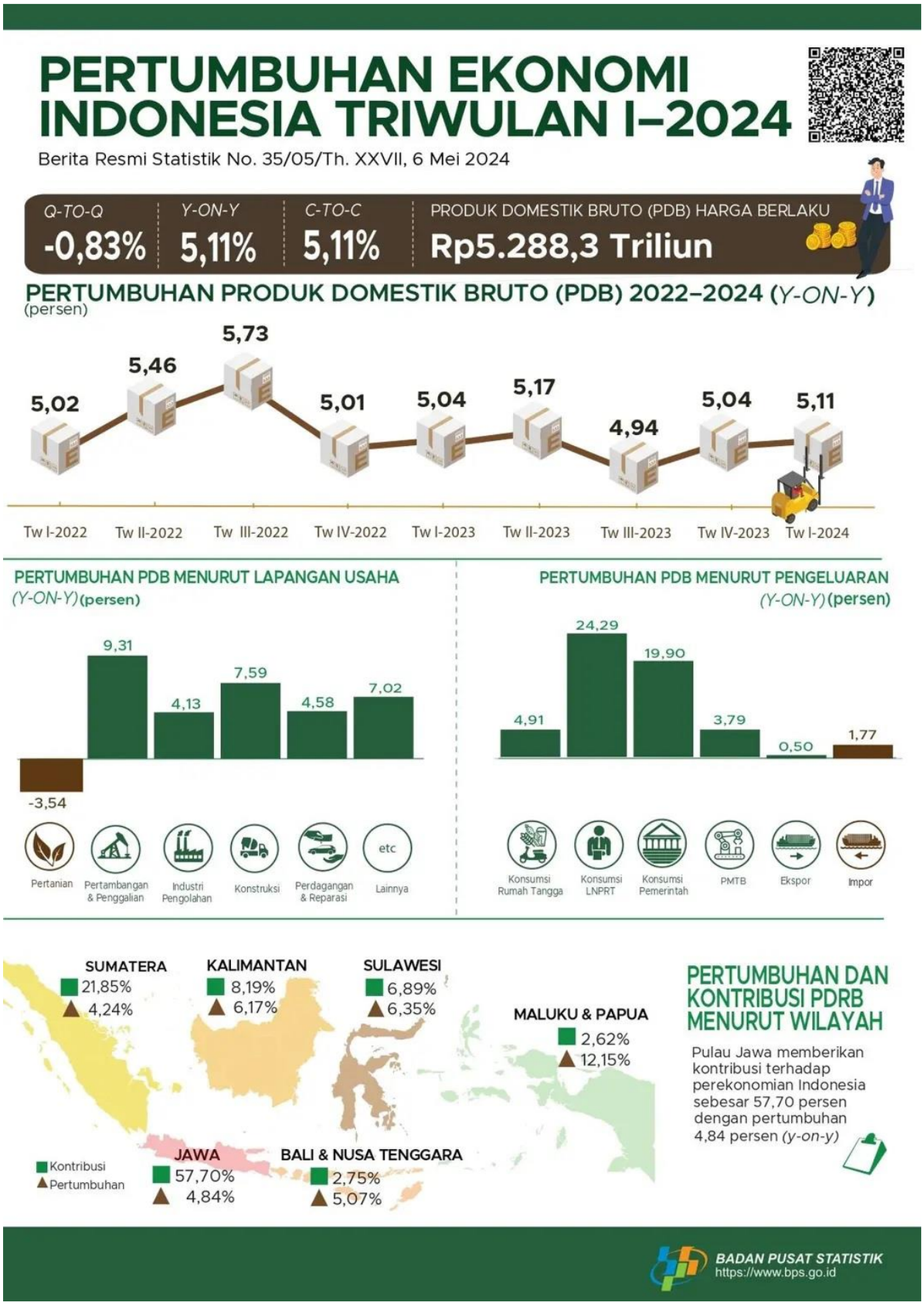
(5,8%), dianggap sebagai peluang yang perlu dioptimalkan oleh Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya. Meskipun harga beberapa komoditas, termasuk batubara, diperkirakan stagnan pada Tahun depan, kecuali untuk minyak mentah yang memproyeksikan kenaikan, memberikan dimensi tambahan dalam strategi ekspor Indonesia," *bisnis.com* dengan judul Ekonom Wanti-Wanti Perdagangan RI Melemah pada 2024.



Gambar 3. 5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Asean Tahun 2023-2025
Sumber: IMF (2021)

Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global Tahun 2021, pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global di prediksikan tumbuh sebesar 4,4 persen. Pada Tahun 2022, negara berkembang di proyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen dan jauh lebih tinggi dari Negara maju yang di proyeksikan hanya sebesar 3,9 persen. Begitupula pada Tahun 2023, negara berkembangan di proyeksikan tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian maju namun dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih rendah dari Tahun 2022 yaitu dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 6 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai Triwulan I Tahun 2024

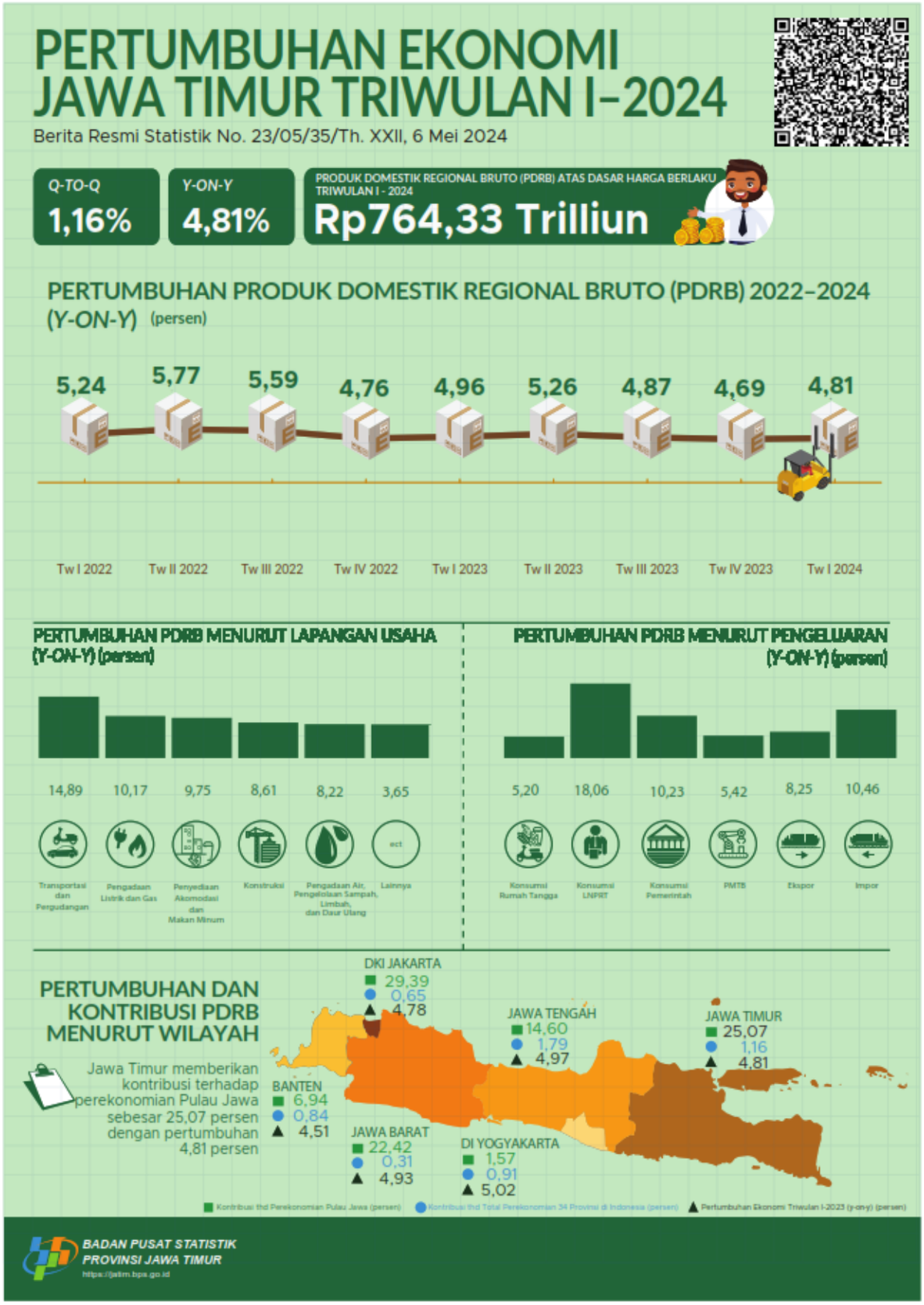
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen (y-on-y). Struktur PDB Indonesia menurut Lapangan Usaha Pertumbuhan yang tumbuh signifikan adalah pertambangan dan penggalian sebesar 9,31 persen, diikuti konstruksi sebesar 7,59 persen, Jasa Lainnya sebesar 7,02 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan dan Reparasi yang memiliki peran dominan tumbuh sebesar 4,13 persen dan 5,58 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh semua komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 24,29 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 19,90 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,91 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,79 persen dan Ekspor sebesar 0,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 1,77 persen.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2024 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,70 persen dengan pertumbuhan 4,84 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan peranan sebesar 21,85 persen dengan pertumbuhan 4,24 persen, Pulau Kalimantan dengan peranan sebesar 8,19 persen dengan pertumbuhan 6,17 persen, Pulau Sulawesi dengan peranan sebesar 6,89 persen dengan pertumbuhan 6,35 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan peranan sebesar 2,75 persen dengan pertumbuhan 5,07 persen, serta Pulau Maluku dan Papua dengan peranan sebesar 2,62 persen dengan pertumbuhan 12,15 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



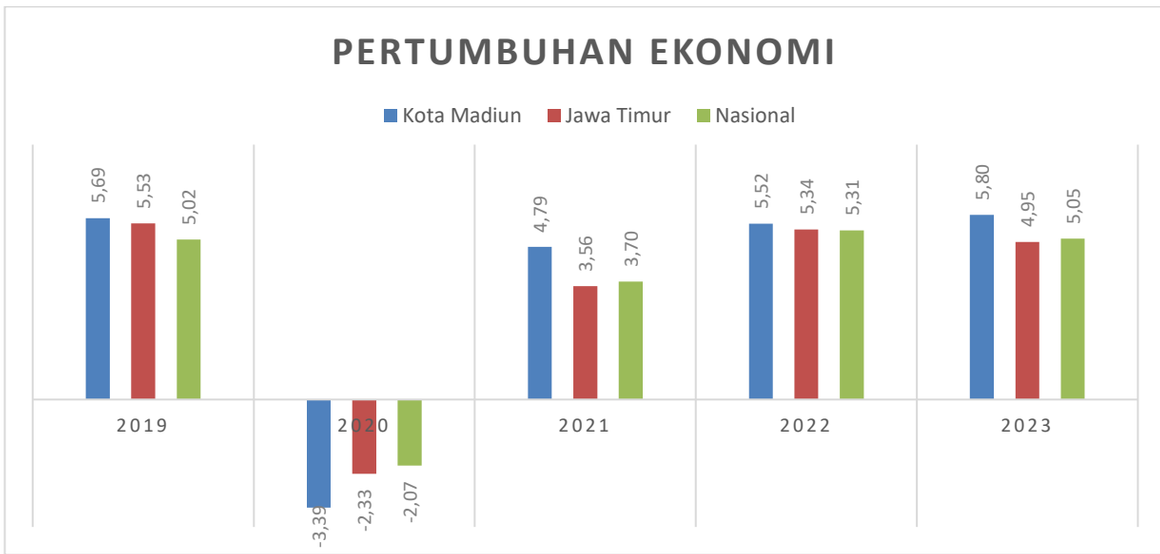
Gambar 3. 7 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur sampai Triwulan I Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,89 persen, diikuti lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 10,17 persen, serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,75 persen.

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2024 dibanding triwulan IV-2023 (*q-to-q)* mengalami pertumbuhan sebesar 0,12 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh semua komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 18,06 persen, diikuti Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 10,46 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,23 persen, Komponen ekspor sebesar 8,25 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,42 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,20 persen.

Jawa Timur penyumbang terbesar kedua perekonomian di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,07 persen setelah DKI Jakarta yang berkontribusi sebesar 29,39 persen, disusul penyumbang terbesar ketiga dan seterusnya adalah Jawa Barat dengan kontribusi sebesar 22,42 persen, Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 14,60 persen, Banten dengan kontribusi sebesar 6,96 persen dan yang terakhir DI Yogyakarta dengan kontribusi sebesar 1,57 persen



Gambar 3. 8 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

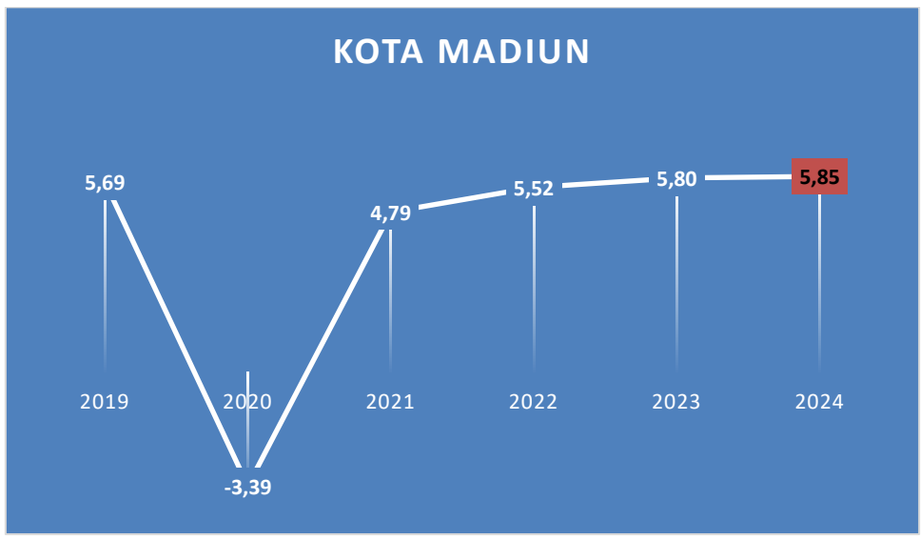
Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sebelum dan sesudah terjadinya Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2023 sebesar 5,80% jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang hanya sebesar 4,93% dan 5,05%. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan hingga 5,69% namun masih diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Sebagai dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang dalam yaitu sebesar -3,39% di bandingkan Jawa Timur dan Nasional dengan nilai pertumbuhan masing-masing sebesar -2,39% dan -2,07%. Penurunan yang sangat drastis pada pertumbuhan ekonomi sebagai dampak COVID-19, mengindikasikan bahwa kondisi fundamental makro ekonomi Kota Madiun masih rentan terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal. Pada Tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan Tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,73% dan 5,52%. Nilai tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur dan melebihi Provinsi Jawa Timur dan nasional.

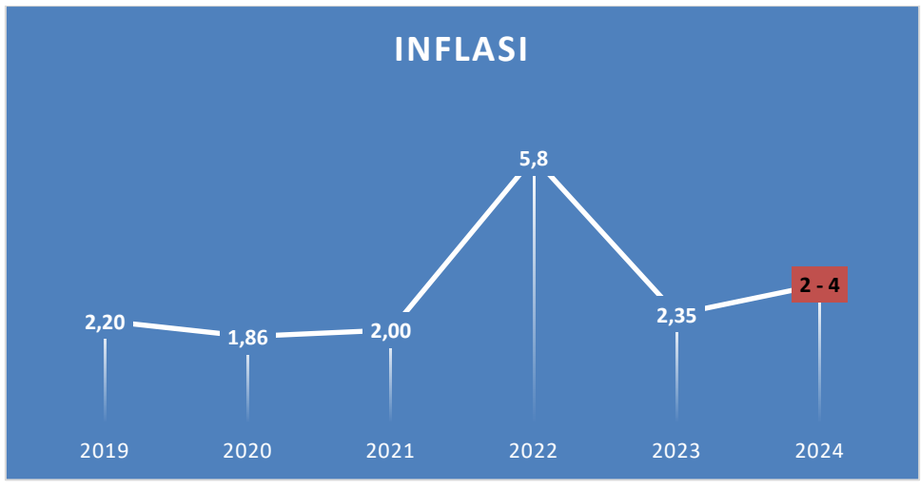
Pada Tahun 2024, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah ketidakpastian ekonomi global, Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun menunjukkan proyeksi kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada Tahun 2024.



Gambar 3. 9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

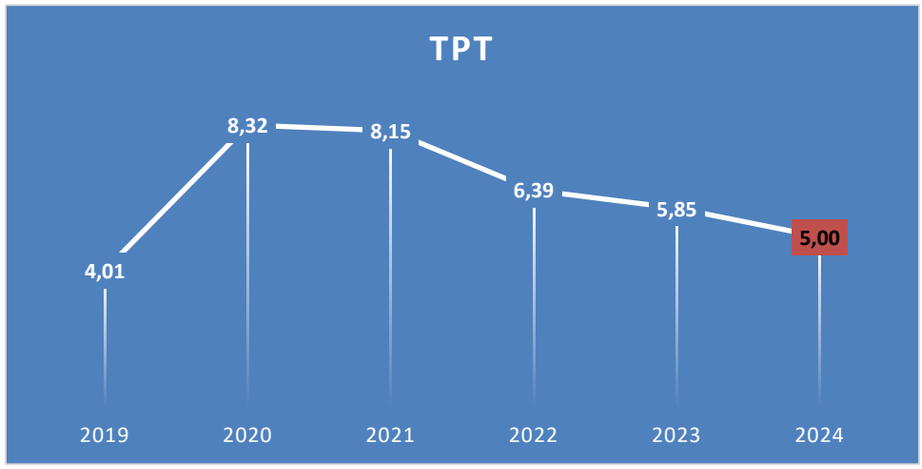
Dalam lima Tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami perlambatan dengan kenaikan hanya sebesar 0,11 poin dikarenakan adanya pandemi covid 19. Pada Tahun 2019 ke Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga minus 3,39%. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,79% dan semakin meningkat hingga 5,52% Tahun 2022 dan 5,80% pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024, dengan asumsi terjadi ketidakpastian perekonomian dunia, stabilitas ekonomi nasional dan regional, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pesimis di angka 5,85%.



Gambar 3. 10 Proyeksi Inflasi Kota Madiun Tahun 2024

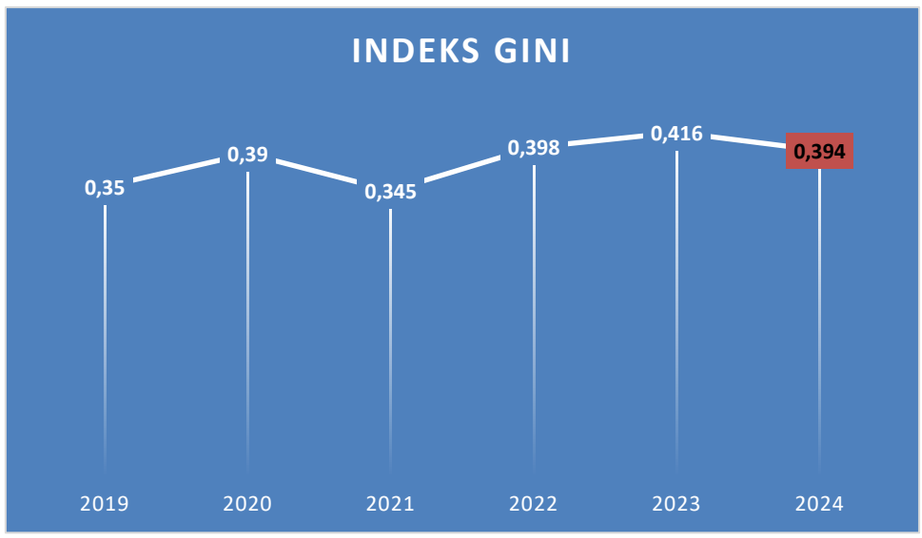
Inflasi Kota Madiun dalam lima Tahun terakhir mengalami nilai yang cenderung meningkat 0,15 poin. Pada Tahun 2019, inflasi sebasar 2,20% dan mengalami penurunan di Tahun 2020 hingga sebesar 1,86% hal ini di akibatkan dampak luas COVID-19 yang menyebabkan kondisi daya beli masyarakat yang menurun. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilai inflasi cenderung naik di angka 2,00% hingga 5,8% dan setelahnya mengalami penurunan hingga berada di angka 2,35% pada Tahun 2023. Di Tahun 2024 inflasi Kota Madiun diproyeksikan berada pada range 2%-4%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 11 Proyeksi TPT Kota Madiun Tahun 2024

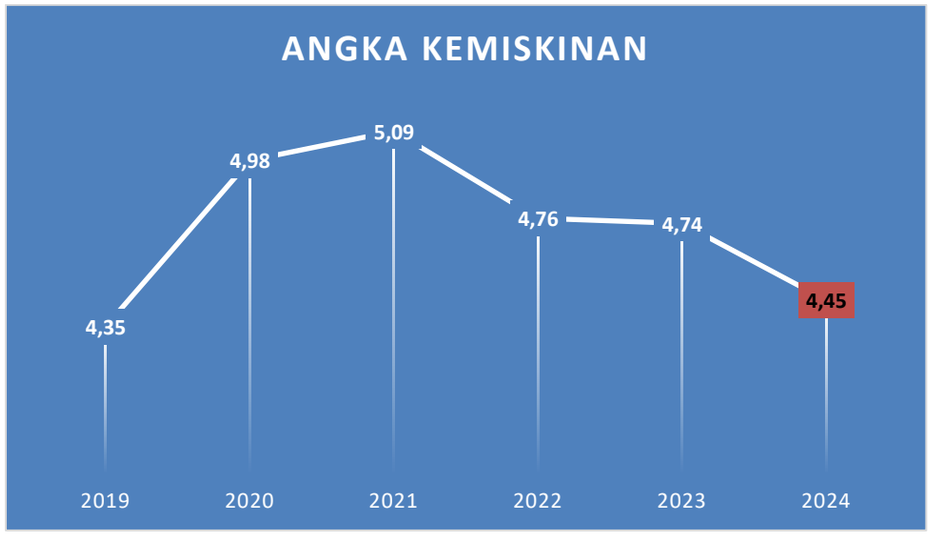
Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun Tahun 2020, TPT juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01%. Kemudian, pada Tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32%. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021, TPT masih tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15%. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, TPT kota Madiun mengalami penurunan hingga 6,39% dan 5,85%. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesimis, TPT di proyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 5% Tahun 2024 dengan skema moderat.



Gambar 3. 12 Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun Tahun 2024

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan TPT yang sangat kecil, ketimpangan pendapatan Tahun 2023 juga mengalami peningkatan hingga 0,416. Indek gini di proyeksikan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,394 pada Tahun 2024 dengan skema pesimis. Nilai indek diatas 0,30 mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berkategori sedang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 13 Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun Tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun pada periode Tahun 2019-2021 terus mengalami kenaikan sebagai dampak pandemic covid 19 yaitu mencapai 5,09% pada Tahun 2021. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, kemiskinan mengalami penurunan dari 4,76 hingga 4,74%. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada Tahun 2024 di proyeksikan mengalami penurunan dengan target nilai sebesar 4,45%.



Gambar 3. 14 Arah Kebijakan Ekonomi Dalam RPJMD Kota Madiun

Sumber: Bapppeda Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Arah kebijakan ekonomi kota Madiun dapat dilihat dari misi empat dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun dengan tujuan utamanaya adalah terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif. Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah Kota Madiun meliputi

1. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat;
2. Peningkatan jaringan tenaga kerja;
3. Penyediaan kebijakan ramah investasi;
4. Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi;
5. Peningkatan konstribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB;
6. Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan;
7. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata;
8. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif;
9. Pengembangan ekonomi kreatif;
10. Pengembangan ekonomi digital masyarakat;
11. Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro;
12. Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro;
13. Peningkatan kelembagaan koperasi;
14. Peningkatan ketersediaan pangan;
15. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
16. Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
17. Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW;
18. Peningkatan jejaring sosial; dan
19. Penguatan program pengentasan kemiskinan.

Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun Tahun 2024 mengikuti kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Jawa Timur dan RPJMD Kota Madiun. Tahun 2024, kebijakan ekonomi diarahkan pada stabilisasi kondisi sosial dan ekonomi meliputi tata kelola pemerintahan, penanganan kesehatan, penanganan sosial dan peningkatan infrastruktur untuk stabilisasi kondisi ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, perekonomian Kota Madun diharapkan mengalami peningkatan minimal seperti sebelum pandemi Covid-19.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 3. 15 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pasca Covid-19 Kota Madiun

Sebagaimana data yang termuat pada Gambar 3.15 diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

Arah kebijakan ekonomi di fokuskan pada penguatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital ekonomi Kota Madiun. Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah Covid-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:

1. Stabilisasi perekonomian dan sosial Kota Madiun

   Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak Covid-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan recovery perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,52% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Pada Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sebesar 5,80%. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 2–4%, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur

   Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah

3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif

   Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak Covid-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif secara terencana dan berkelanjutan.

4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan

   Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengemabngan keluarahn untuk menstimulus perekonomian

5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah sesuai UU HKPD

   Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan pusat dan daerah memberikan berbagai peluang bagi kota Madiun untuk mengakselerasi fiskal daerah. Disisi lain, adanya Undang-Undang tersebut memberikan tantangan bagi kemandirian fiskal daerah dan pengelolaan belanja daerah secara efisien dan efektif.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu Tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2024, terdapat beberapa perubahan arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah, sehingga membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Optimaliasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajakdan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
    a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
    b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
        1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
        2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
        3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
      Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
   b. Meningkatkan kualitas SDM (aparat daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
   c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
   d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor : S.54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024

3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:
   a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
   b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi output maupun outcomenya. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2024 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (performance based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kota Madiun pada Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi mandatory spending atau belanja-belanja yang sudah di-earmark, seperti pendidikan 20% dan inspektorat 1%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
    a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar lebih dari 46,69 persen dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
    b. Belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
    c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2024, belanja subsidi hanya di alokasikan sebesar Rp. 50.000.000,-.
    d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksudu ntuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat force major, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2024 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah.

3.2.4 Kerangka Pendanaan 2024

Kerangka pendanaan memiliki hubungan yang sejalan dengan kondisi indikator ekonomi makro. Proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun mengalami perubahan di hampir seluruh komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan. PAD dan pendapatan transfer di proyeksikan mengalami peningkatan.

Secara umum, Pendapatan Daerah Kota Madiun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami perubahan dari Rp1.097.967.032.000,00 menjadi Rp1.130.191.258.933,00 atau meningkat sebesar Rp32.224.226.933,00 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari APBD 2024. PAD diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp5.499.917.533,00 atau dari sebesar Rp254.141.714.400.00 pada APBD 2024 menjadi sebesar Rp259.641.631.933,00 Peningkatan tersebut disebabkan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah diproyeksikan naik karena ada penambahan pendapatan pajak yang ditetapkan oleh perangkat daerah penghasil PAD.

Sedangkan retribusi daerah mengalami kenaikan karena adanya pergeseran dari BLUD yang awalnya berada pada komponen lain-lain PAD yang sah bergeser menjadi pendapatan retribusi daerah. Sedangkan komponen PAD lainnya mengalami penurunan yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan karena laba Aneka Usaha dan Bank Pasar ditiadakan serta adanya hasil audit dari PDAM. Pendapatan Transfer yang diterima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mengalami peningkatan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TDF) sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S.54/PK/PK.2/2024 dengan nilai sebesar Rp18.468.416.000,00 sedangkan untuk pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada APBD 2024 sebesar Rp29.607.909.000,00 namun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota Tahun Anggaran 2024 untuk Kota Madiun mendapatkan alokasi anggaran sebesar R 26.402.123.000,00 sehingga terjadi penurunan alokasi dana DBH-CHT sebesar Rp 3.205.786.000,00 Namun secara total untuk pendapatan transfer pemerintah pusat masih tetap mengalami kenaikan sebesar Rp15.262.630.000,00 Serta adanya proyeksi kenaikan dari komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp11.461.679.40000 karena adanya peningkatan dari dana bagi hasil provinsi. Sehingga jumlah kenaikan Pendapatan Transfer ditaksir mencapai Rp26.724.309.400,00

Sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah Tahun 2024, belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp1.232.967.032.000,00 menjadi Rp1.244.144.864.085,00 dengan perubahan peningkatan sebesar Rp11.177.832.085,00 Belanja operasi mengalami peningatan sebesar Rp17.317.304.568,00 dengan komponen belanja barang dan jasa naik sebesar Rp27.087.063.848,00 belanja hibah yang mengalami peningkatan hingga Rp10.173.705.904,00 dan belanja bantuan sosial naik sebesar Rp5.055.326.528,00 Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp7.046.610.716,00 Penurunan belanja modal secara signifikan ada pada komponen Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.000.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun mencapai Rp5.984.414.449,00 serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi turun hingga mencapai Rp10.100.989.199,00 Kenaikan komponen belanja modal ada pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.860.507.532,00 Sedangkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp3.285.400,00 dan Rp175.000.000,00 Proyeksi perubahan Kerangka Pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 3. 2 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Madiun 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.141.714.400	259.641.631.933	5.499.917.533
1.1.1	Pajak Daerah	102.506.770.000	108.611.500.000	6.104.730.000
1.1.2	Retribusi Daerah	18.012.701.000	134.663.488.000	116.650.787.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.029.310.600	14.127.425.900	(1.901.884.700)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	117.592.932.800	2.239.218.033	(115.353.714.767)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	843.825.317.600	870.549.627.000	26.724.309.400
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.542.927.000	762.805.557.000	15.262.630.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	714.945.228.000	730.207.858.000	15.262.630.000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	80.604.119.000	95.866.749.000	15.262.630.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	510.653.158.000	510.653.158.000	0
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.637.942.000	34.637.942.000	0
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.050.009.000	89.050.009.000	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	32.597.699.000	32.597.699.000	0
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600	107.744.070.000	11.461.679.400
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	95.663.488.000	107.074.020.000	11.410.532.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	618.902.600	670.050.000	51.147.400
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.097.967.032.000	1.130.191.258.933	32.224.226.933
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI	1.057.523.335.128	1.074.840.639.696	17.317.304.568
2.1.1	Belanja Pegawai	498.361.265.622	473.362.473.910	(24.998.791.712)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989	523.337.815.837	27.087.063.848
2.1.4	Belanja Subsidi	50.000.000	50.000.000	0
2.1.5	Belanja Hibah	34.955.559.517	45.129.265.421	10.173.705.904
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000	32.961.084.528	5.055.326.528
2.2	BELANJA MODAL	173.443.696.872	166.397.086.156	(7.046.610.716)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.214.640	24.170.722.172	10.860.507.532
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.725.560.446	45.741.145.997	(5.984.414.449)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.508.030.586	93.407.041.387	(10.100.989.199)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.626.200	2.213.911.600	3.285.400
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	689.265.000	864.265.000	175.000.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.907.138.233	907.138.233
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.907.138.233	907.138.233
	Jumlah Belanja	1.232.967.032.000	1.244.144.864.085	11.177.832.085
	Total Surplus / (defisit)	(135.000.000.000)	(113.953.605.152)	15.465.190.243
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.000.000.000	113.953.605.152	(21.046.394.848)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.000.000.000	113.953.605.152	(21.046.394.848)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	135.000.000.000	113.953.605.152	(21.046.394.848)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	135.000.000.000	113.953.605.152	(21.046.394.848)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.232.967.032.000	1.244.144.864.085	11.177.832.085

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah merupakan panduan atau arahan yang ditetapkan untuk mengarahkan upaya pembangunan suatu daerah. Tujuan dan sasaran ini membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengukur kemajuan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2024. Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah: "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera". Terdapat dua pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Pilar pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Kota Madiun Bersih dan berwibawa. Kota Madiun berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih berwibawa, profesional dan melayani masyarakat. Dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, proses dan jalannya pembangunan diharapkan akan lebih cepat dan terlaksana serta mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pilar selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang dicirikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang Maha Esa.



Gambar 4. 1 Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019–2024. Keempat misi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dalam rangka pencapaian misi ditas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Perubahan RPJMD 2019-2024

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1		2		3		4		5		6
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)										
T.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis *smart cities*	S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	1	program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						2	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government	2	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	
								3	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sekretariat Daerah
								4	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								5	Program Perlindungan dan Penyelamatan arsip	
								6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
								7	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
						3	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	8	program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
								9	program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	
								10	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
						4	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	11	program pengelolaan barang milik daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
								12	program pengelolaan keuangan daerah	
				2	Peningkatan kapasitas fiskal daerah	5	Optimalisasi potensi PAD	13	program pengelolaan pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah
						6	Peningkatan kemandirian fiskal daerah	14	program perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah
						7	peningkatan DID melalui Rencana aksi yang jelas dan terukur didukung oleh perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas			
		S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	8	Peningkatan Profesionalisme ASN	15	program kepegawaian daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								16	program pengembangan sumber daya manusia	
						9	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu	17	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
								18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						10	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional dan melayani	19	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								20	Program Pencatatan Sipil	
								21	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
								22	Program Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
								23	Program Pelayananan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
								24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
								25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
								26	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
								27	program penelitian dan pengembangan daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan										
T2	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	4	Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana kota dan Permukiman	11	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	28	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Dinas Perhubungan
						12	Manajemen dan rekayasa tranportasi			
						13	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	29	program penyelenggaraan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								30	program penataan bangunan gedung	
								31	program pengembangan jasa kontruksi	
								32	program penataan bangunan dan lingkungan	
								33	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
								34	program pengelolaan sumber daya air (sda)	
						14	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	35	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
						15	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	36	program pengembangan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
								37	program kawasan permukiman	
		S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5	Peningkatan kualitas penataan ruang	16	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	38	program pengelolaan izin lokasi	
								39	program penatagunaan tanah	
								40	program penyelesaian sengketa tanah garapan	
								41	program penyelenggaraan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						17	Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang			
						18	optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	42	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	19	Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	43	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
						20	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	44	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
								45	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
								46	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
								47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan	
								48	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
								49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
								50	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun										
T.3	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	21	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	51	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
						22	Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini			
						23	Pengembangan layanan pendidikan inkulisif			
						24	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	52	Program Pengembangan Kurikulum	
						25	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	53	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
								54	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								55	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
		S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	8	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	26	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	56	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						27	Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	57	program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
						28	Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan	58	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
						29	Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	59	program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
						30	Peningkatan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana dan Penguatan Sistem Informasi Keluarga serta Penguatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	60	program pengendalian penduduk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						31	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif	61	program pembinaan keluarga berencana (kb)	
						32	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	62	program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	
		S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	33	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	63	program peningkatan kualitas keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								64	program pengelolaan sistem data gender dan anak	
								65	program perlindungan perempuan	
								66	program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	
								67	program perlindungan khusus anak	
								68	program pemenuhan hak anak (pha)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun										
T.4	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	10	Perluasan kesempatan kerja	34	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat	69	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						35	Peningkatan jaringan tenaga kerja	70	program hubungan industrial	
								71	program penempatan tenaga kerja	
								72	program pembangunan kawasan transmigrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				11	Peningkatan kondusifitas iklim berinvestasi	36	Penyediaan kebijakan ramah investasi	73	program pengembangan iklim penanaman modal	
						37	Penyederhanaan prosedur pendukung perijinan dan investasi	74	program promosi penanaman modal	
								75	program pelayanan penanaman modal	
								76	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	
								77	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	
		S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	12	Peningkatan kualitas hidup bermasyarakat yang berbudaya	38	Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	78	program pengembangan kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
								79	program pengembangan kesenian tradisional	
								80	program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
						39	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	81	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
								82	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
				13	Peningkatan konstribusi sector unggulan dalam perekonomian	40	Peningkatan konstribusi sector perdagangan dan jasa terhadap PDRB	83	program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dinas Perdagangan
						41	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	84	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	
								85	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
								86	program standardisasi dan perlindungan konsumen	
								87	program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
						42	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	88	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
								89	program pemasaran pariwisata	
						43	Pengembangan ekonomi kreatif	90	program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
						44	Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	91	program pengelolaan sistem informasi industri nasional	
								92	program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						45	Pengembangan ekonomi digital masyarakat	93	program pengembangan umkm	
				14	Peningkatan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	46	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro			
						47	Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro			
						48	Peningkatan kelembagaan koperasi	94	program pendidikan dan latihan perkoperasian	
								95	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
T.5	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	S.10	Pengurangan Kemiskinan	15	Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	49	Peningkatan ketersediaan pangan	96	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian
								97	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
								98	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
						50	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	99	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
						51	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
								101	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
								102	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
								103	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
								104	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
								105	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
								106	Program Perizinan usaha Pertanian	
								107	Program Penyuluhan Pertanian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
				16	Penurunan tingkat kemiskinan	52	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW			
						53	Peningkatan jejaring sosial	108	program pemberdayaan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								109	program program perlindungan dan jaminan sosial	
						54	Penguatan program pengentasan kemiskinan			
				17	Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial			110	program penanganan bencana	
								111	program pengelolaan taman makam pahlawan	
						55	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	112	program rehabilitasi sosial	
						56	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial			
		S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	18	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban	57	Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan			Satuan Polisi Pamong Praja
						58	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	113	program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	
						59	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan	114	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	
								115	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1		2		3		4		5		6
								116	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	
								117	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	
								118	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social	
				19	Peningkatan mitigasi resiko dan ketangguhan bencana	60	Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana	119	program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
								120	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Gini, Indeks Reformasi Birokrasi, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi terkini. Adapun rincian mengenai indikator dan target Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kota Madiun pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target		
				Target RPJMD	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	T1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(A-) 87,95	(BB) 70,01	(BB) 70,01	(A-) 87,95
2	T2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	*Livable City*	91,93	89,01	89,01	91,93
3	T3. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,71	82,35	82,35	83,71
		Indeks Pembangunan Gender	95,18	94,51	94,51	95,18
4	T4. Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87*	6,44	6,44	6,87
5	T5. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88	77,20	77,20	82,88
		Indeks Gini	0,416	0,35	0,35	0,394

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana arah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019–2024. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 4. 3 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) ● Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ● Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian ● Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ● Program Hubungan Industrial ● Program Pengembangan Umkm ● Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa tranportasi	● Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	● Program Pengelolaan Pendidikan ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan) ● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb) ● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan • Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat) • Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	• Program Kepegawaian Daerah • Pendidikan Dan Pelatihan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi • Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Telaah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan.

Selain itu terdapat berbagai usulan dari anggota dewan berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut

Tabel 4. 4 Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat 2024

No	JENIS USULAN	DAERAH PEMILIHAN				Jumlah Jenis Usulan
		Dapil I Kartoharjo	Dapil II Taman 1	Dapil III Taman 2	Dapil VI Manguharjo	
1	Bansos Individu	1	1	1	1	4
2	asuransi kecelakan kerja sektor informal		1			1
3	pengajuan beasiswa pendidikan	1				1
4	pelatihan ketrampilan pencaker			1	1	2
5	jambanisasi				4	4
6	perbaikan rumah tidak layak huni				4	4
7	pavingisasi	7	5		4	16
8	penyediaan/ perbaikan lampu jalan	2	1	2	9	14
9	bantuan sarpras keagamaan	2	1	2	4	9
10	penambahan titik wifi gratis	1	3			4
11	bantuan Bibit ikan	2		1		3
12	bantuan bibit sayuran			3		3
13	bantuan bibit tanaman hias	1		1	1	3
14	bantuan hewan ternak	1				1
15	bantuan peralatan pertanian			1	2	3
16	sarana dan prasarana posyandu				1	1
17	pelatihan pengembangan UMKM	1		1	3	5
18	pelatihan pengembangan usaha perikanan				1	1
19	pengadaan sarpras olahraga			3		3
20	pengajuan alat kesenian	1				1
21	perbaikan saluran air/ gorong-gorong	8	12	4	6	30
22	pembangunan saluran air/ gorong-gorong	2	4	6	4	16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	JENIS USULAN	DAERAH PEMILIHAN				Jumlah Jenis Usulan
		Dapil I Kartoharjo	Dapil II Taman 1	Dapil III Taman 2	Dapil VI Manguharjo	
23	normalisasi sungai/ saluran	5		1	3	9
24	pembangunan/ perbaikan pagar makam				1	1
25	penambahan peralatan persampahan				2	2
26	pelatihan kesenian tradisional		1	1	1	3
27	pelatihan Penanggulangan dan Pencegahan Bencana		1			1
28	pembangunan/ perbaikan trotoar	1	1			2
29	perbaikan jalan	3	3	8	6	20
30	pembangunan jalan	1	2		3	6
31	perbaikan jembatan	1				1
32	pembangunan jembatan				1	1
33	pembangunan RTH	1		2		3
34	pemeliharaan RTH/ taman	1			2	3
35	pembangunan/ rehabilitasi gedung			1		1
36	pembangunan/ perbaikan JUT	1				1
Jumlah Usulan Tiap Daerah Pemilihan		44	36	39	64	183

Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahaan permasalahan pembangunan dan perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi;
2. Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif;
3. sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 2 Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2024

Secara detail, isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Isu Strategis 1: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal
	Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana
	Evaluasi internal belum berjalan optimal
	Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah
	Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan
	Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat
	Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP
	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan
	Akses Internet yang kurang memadai
	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan
	SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
	Pelaksanaan pemilu 2024 harus bisa di antisipasi secara baik
Isu Strategis 2: Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif	Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tertinggi di Jawa Timur Tahun 2021, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangnya mutu produk indutri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
	Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry
	Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi
	Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS
	Masih rendahnya konstribusi BUMD
	Masih terbatasnya kontribusi PAD
	Infrastruktur pendukung investasi belum memadai
	Kurangnya cakupan data perdagangan di Kota Madiun
	Masih terbtasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun
	Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun
	Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal
	Produksi, pengolahan, budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal
Isu Strategis 3: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khusunya gedung dan bangunan)
	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)
	Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi
	Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)
	Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki komptensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietesien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
	Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut
	Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
	Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal
	Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi
	Skor Pola Pangan Harapan belum tercapai
	Masih terdapatnya Stunting
	Masih terdapatnya kemiskinan ekstrim
	Menurunnya pengangguran terbuka akan tetapi target masih di atas yang ditetapkan provinsi
	Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan
	Masih terdapatnya perkawinan anak
Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsutasi evaluasi dan penetapan RTRW kota
	Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang
	Kurang optimalnya koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah
	Lemahnya koordinasi dan singkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang
	banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan
	Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar dibeberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus
	Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai
	Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kepenghunian dan backlog kepemilikan.
	Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman
	Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun
	Mash terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana
	Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah
	Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun
	Belum adanya SOP Penanganan Bencana
	Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
	Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran
	Belum adanya menajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran
	Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

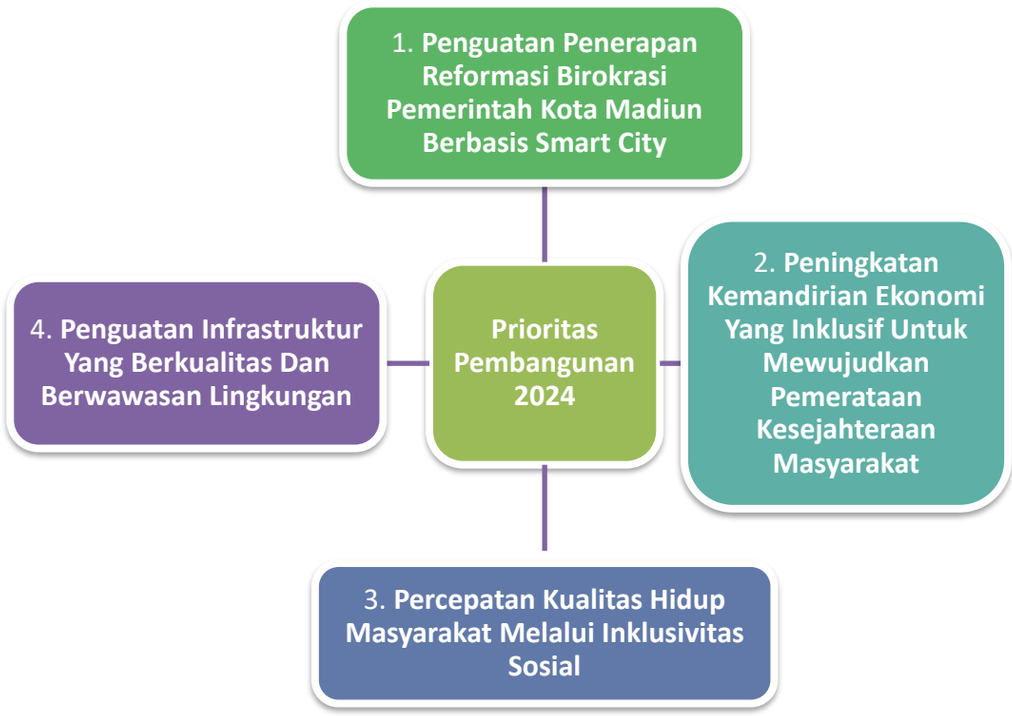
Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024
Isu Strategis 1: Peningkatan pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
Isu Strategis 2: Pembangunan sosial dan ekonomi inklusif	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Isu Strategis 3: sumberdaya manusia berkualitas dan berdayasaing	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Isi Strategis 4: Peningkatan pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan berwawasan lingkungan	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa tranportasi	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:



Gambar 4. 3 Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2024

Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang sudah berjalan serta prognosis terhadap kondisi yang akan datang, tema dan prioritas pembangunan di dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2024 dipandang masih relevan dengan kondisi global, nasional, dan regional. Sehingga tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan yaitu: “Pemantapan Pembangunan Ekonomi Dan Sosial Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan” dan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, dan provinsi adalahah sebagaimana berikut:

Tabel 4. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2024

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyaraka
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya	Prioritas Pembangunan 4:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Kesenjangan dan menjamain pemerataan	Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 4: Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 3: Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastrukur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan dan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas Pembangunan 2: Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyaraka
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan 3: Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 1: Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Nilai pendanaan tiap-tiap prioritas setelah perubahan ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Pendanaan Per Prioritas Pembangungan

No	BELANJA PRIORITAS	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	Bertambah / Berkurang
Prioritas 1	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	419.263.641.574	425.937.230.634	6.673.589.060
Prioritas 2	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	63.904.958.738	65.025.988.181	1.121.029.443

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	BELANJA PRIORITAS	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	Bertambah / Berkurang
Priotitas 3	Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial	577.543.495.918	587.214.106.985	9.670.611.067
Prioritas 4	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	172.254.935.770	165.967.538.285	-6.287.397.485
TOTAL		1.232.967.032.000	1.244.144.864.085	11.177.832.085

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Total Belanja prioritas diproyeksikan ada penambahan pada 3 Prioritas Pembangunan, pada prioritas 1 sebesar 1,59% atau 6.673.589.060, kemudian prioritas 2 sebesar 1,75% atau 1.121.029.443, selanjutnya pada prioritas 3 sebesar 1,67% atau 9.670.611.067, dan untuk prioritas 4 mengalami penurunan sebesar -3,48% atau -6.287.397.485.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan, didalamnya terdapat pagu anggaran pendukung SPM sesuai Bidang Urusan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terkait kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diampu Perangkat Daerah serta pagu pendukung sub kegiatannya sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 9 Anggaran Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2024

NO	KATEGORI	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2024		OPD PELAKSANA
							LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			Dinas Pendidikan
		Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Bertasipasi Dalam Pendidikan (APS)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi	100	%			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1	lembaga	Kota Madiun	131.489.050	
		Jumlah warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		satuan pendidikan	Kota Madiun		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik(SD)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	52	satuan pendidikan	Kota Madiun	5.253.600.000	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		satuan pendidikan	Kota Madiun		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik(SMP)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14	satuan pendidikan	Kota Madiun	2.640.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100	%			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	unit		200.000.000	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100	%			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit			200.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100	%			
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	paket		3.255.000.000	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100	%			
			Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5488	siswa		4.397.111.150	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Lembaga Non Formal Yang Terakreditasi	100	%			
			Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Mengelola Dana BOP	6	satuan pendidikan	Kota Madiun	728.430.000	
	Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
		Iklim Keamanan SMP	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100,00	%			
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	23,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	53.278.000	
		Iklim Kebhinekaan SD	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100	%			
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	69,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	283.200.000	
		Iklim Kebhinekaan SMP	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100,00	%			
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	23,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	53.278.000	
		Iklim Inklusivitas SD	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100	%			
			Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	69,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	283.200.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Iklim Inklusivitas SMP	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100,00	%			
			Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan	23,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	53.278.000	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	67	%			
		Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	67	%			
			Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,00	dokumen	Kota Madiun	232.900.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	laporan	Kota Madiun	328.805.561	
		Rata-Rata Kemampuan Numeral SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,00	dokumen	Kota Madiun	232.900.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	laporan	Kota Madiun	328.805.561	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rata-Rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,00	dokumen	Kota Madiun	232.900.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	laporan	Kota Madiun	328.805.561	
		Rata-Rata Kompetensi Numeransi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesataraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,00	dokumen	Kota Madiun	232.900.000	
			Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	laporan	Kota Madiun	328.805.561	
	Pendidikan Anak Usia Dini		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100	%			
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD yang terakreditasi	100,00	%			
			Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160,00	satuan pendidikan	Kota Madiun	179.145.320	
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi	100	%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	987,00	orang	Kota Madiun	3.564.000.000	
2		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,33	%			Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan mencapai Target	90	%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2450	Orang	Kota Madiun	581.198.200	
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2338	Orang	Kota Madiun	13.936.800	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2227	Orang	Kota Madiun	72.198.800	
		Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9081	Orang	Kota Madiun	80.491.000	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31855	Orang	Kota Madiun	-	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114664	Orang	Kota Madiun	-	
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30573	Orang	Kota Madiun	-	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68973	Orang	Kota Madiun	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8143	Orang	Kota Madiun	246.288.000	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	339	Orang	Kota Madiun	36.348.000	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5044	Orang	Kota Madiun	-	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5780	Orang	Kota Madiun	25.200.000	
3		Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100	%	Kota Madiun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100	%			
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	dokumen		123.019.490	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		100	SR		-	
4		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	100	%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0,5	Ha			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	190	UNIT RUMAH	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	2.686.200.000	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	16,41	Ha	Berlokasi tersebar di 3 Kecamatan se-Kota Madiun (Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman)	3.355.390.000	
		Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	100	%			
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dihasilkan	1	dokumen			
			Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1	dokumen	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.950.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1	lokasi			
			Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3	unit rumah	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.657.900.000	
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100	%			
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	1	laporan	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.900.000	
5		Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97	%	Kota Madiun		Satuan Polisi Pamong Praja
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97	%			
			Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	laporan	Kota Madiun	480.019.000	
			Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	laporan	Kota Madiun	645.107.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8	dokumen	Kota Madiun	152.772.000	
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	dokumen	Kota Madiun	3.671.784.500	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78	orang	Kota Madiun	370.989.100	
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	%			
			Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	laporan	Kota Madiun	1.967.199.900	
			Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12	Laporan	Kota Madiun	848.996.800	
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (KEBENCANAAN)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	Kota Madiun		
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6	dokumen	Kota Madiun	1.084.995.000	
			Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6	Laporan	Kota Madiun	300.228.000	
			Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
			Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6	dokumen	Kota Madiun	1.368.000	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (DAMKAR)	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%			
			Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12	orang	Kota Madiun	-	
			Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12	orang	Kota Madiun	-	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100	%			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) Tahun	300	orang	Kota Madiun	29.216.000	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%			
			Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200	orang	Kota Madiun	119.148.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5	unit	Kota Madiun	9.542.000	
			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9	kawasan	Kota Madiun	29.217.000	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37	orang	Kota Madiun	977.400.000	
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	dokumen	Kota Madiun	50.000.000	
			Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300	orang	Kota Madiun	26.551.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100	%	Kota Madiun		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti							
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti							
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti							
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	%	Kota Madiun		
			Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	170	orang	Kota Madiun	167.939.600	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	63	orang	Kota Madiun	15.332.431	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	orang	Kota Madiun	26.269.000	
			Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8	orang	Kota Madiun	22.560.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	orang	Kota Madiun	9.500.000	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280	orang	Kota Madiun	2.139.847.800	
			Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	orang	Kota Madiun	118.107.000	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100	%			
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100	%			
			Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	17	orang	Kota Madiun	27.943.665	
			Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17	orang	Kota Madiun	15.177.300	
			Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	17	orang	Kota Madiun	9.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan, serta Pagu Indikatif Prioritas Kota Madiun pada Perubahan RKPD Tahun 2024, terangkum dalam Prioritas pendukung sasaran tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 4. 10
Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan, serta Pagu Indikatif Prioritas Kota Madiun
Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	PRIORITAS KOTA MADIUN	SASARAN	INDIKATOR CAPAIAN	REALISASI 2023	TARGET RPJMD 2024	TARGET 2024	TARGET PERUBAHAN 2024	URUSAN	PENJABARAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	A (80,08)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	Perencanaan	11.424.253.010	11.567.342.492	143.089.482	Badan Perencanaan, Penelitain dan Pengembangan Daerah
								Keuangan	64.181.123.385	62.902.275.040	-1.278.848.345	Badan Keuangan dan Aset Daerah
									10.759.222.567	10.667.015.218	-92.207.349	Badan Pendapatan Daerah
								Pengawasan	10.819.626.146	10.811.257.781	-8.368.365	Inspektorat
			Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah	Sedang (2,980*)	Sangat tinggi	Tinggi (3,41)	Sedang (3,01)	RUTIN	120.340.687.452	119.856.683.629	-484.003.823	semua opd terkecuali
								Penunjang Urusan Pemerintahan	48.130.884.266	50.172.470.155	2.041.585.889	Sekretariat Daerah
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45	2,9	2,9	2,9	Komunikasi dan Informatika	26.991.513.379	28.119.906.935	1.128.393.556	Dinas Komunikasi dan Informatika
				(memuaskan)	(baik)	(baik)	(baik)	Persandian	241.752.000	241.752.000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,024 (Baik)	86 (baik)	86,964	86,964 (Baik)	Statistik	100.000.000	100.000.000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
								Kearsipan	763.100.000	773.386.636	10.286.636	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								Pendidikan dan Pelatihan	1.791.446.378	1.729.384.178	-62.062.200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Kepegawaian	8.851.659.993	9.678.105.476	826.445.483	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
								Penunjang Urusan Pemerintahan	47.261.594.608	52.180.286.068	4.918.691.460	Sekretariat DPRD
								Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.252.012.424	8.167.567.787	-84.444.637	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Unsur Kewilayahan	18.976.703.341	19.046.063.392	69.360.051	Kecamatan Taman
									20.404.595.389	19.965.077.280	-439.518.109	Kecamatan Manguharjo
									18.350.360.236	18.276.790.567	-73.569.669	Kecamatan Kartoharjo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Indeks Inovasi Daerah	52,62	1950 (sebelum conversi)	53,96	53,96	Penelitian dan Pengembangan	1.623.107.000	1.681.866.000	58.759.000	Badan Perencanaan, Penelitain dan Pengembangan Daerah
									419.263.641.574	425.937.230.634	6.673.589.060	
2	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85	5	5	5	Tenaga Kerja	6.046.155.990	6.516.417.130	470.261.140	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								Penanaman Modal	1.565.380.400	1.565.380.400	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5,6	3,16	7,98	7,98	Perdagangan	6.575.830.971	6.591.666.784	15.835.813	Dinas Perdagangan
								Pertanian	6.774.233.000	8.007.892.367	1.233.659.367	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								Kealutan dan Perikanan	826.881.000	972.681.000	145.800.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
								Perindustrian	2.877.630.860	1.772.787.748	-1.104.843.112	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								Unsur Kewilayahan	12.955.179.698	12.773.897.323	-181.282.375	Kecamatan Taman
									11.357.452.367	11.380.513.367	23.061.000	Kecamatan Manguharjo
									10.791.801.670	10.770.551.670	-21.250.000	Kecamatan Kartoharjo
			Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	24,7	1,02	21,57	21,57	Pariwisata	941.500.000	1.131.500.000	190.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
								Kebudayaan	2.337.465.000	2.687.252.610	349.787.610	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
								Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	855.447.782	855.447.782	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									63.904.958.738	65.025.988.181	1.121.029.443	
3	Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,74	4,55	4,45	4,45	Sosial	20.158.315.975	21.484.479.888	1.326.163.913	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Pangan	534.065.000	535.065.000	1.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,44	72,83	73,13	73,13	Kesehatan	256.304.426.840	263.901.265.131	7.596.838.291	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
								Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.265.102.884	2.923.247.000	-1.341.855.884	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,44	14,43	14,43	14,43	Perpustakaan	5.836.014.603	5.793.531.519	-42.483.084	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								Kepemudaan dan Olah Raga	5.616.085.000	5.865.938.521	249.853.521	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
			Rata-rata Lama Sekolah	11,82	11,16	11,67	11,67	Pendidikan	241.992.845.691	245.272.392.151	3.279.546.460	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	78,94	77,22	77,22	77,22	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.828.226.128	1.667.896.715	-160.329.413	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	77,80 (Harmonis) B	75 (Harmonis) B	75,68 (Harmonis) B	77,8 (Harmonis) B	Pemerintahan Umum	30.669.204.885	30.847.079.635	177.874.750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks rasa aman	83,31	76,35	82,18	83,31	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.935.194.912	7.547.946.425	-1.387.248.487	Satuan Polisi Pamong Praja
									1.404.014.000	1.375.265.000	-28.749.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									577.543.495.918	587.214.106.985	9.670.611.067	
4	Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	98,44	98,59	98,59	98,59	pekerjaan umum dan penataan ruang	119.798.671.672	113.870.485.932	-5.928.185.740	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								perumahan rakyat dan kawasan permukiman	36.415.901.527	36.103.005.527	-312.896.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
								perhubungan	6.749.689.691	6.817.887.490	68.197.799	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,24	57,93	57,93	57,93	Lingkungan Hidup	8.484.880.630	8.370.367.086	-114.513.544	Dinas Lingkungan Hidup
								pertanahan	805.792.250	805.792.250	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									172.254.935.770	165.967.538.285	-6.287.397.485	
PAGU ANGGARAN									1.232.967.032.000	1.244.144.864.085	11.177.832.085	

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Madiun. Melalui program prioritas yang direncanakan dan dijalankan pada Tahun 2024, diharapkan target indikator kinerja pembangunan dapat terpenuhi. Selain itu, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan swasta serta lembaga yang ada di Kota Madiun dapat mendukung pelaksanaan program tersebut. Program prioritas Kota Madiun Tahun 2024 dilaksanakan oleh 25 Organisasi Perangkat Daerah dan 3 Kecamatan. Program-program tersebut disertai dengan indikator kinerja sasaran dan target serta indikator kinerja program dan target. Rincian perubahan anggaran dan perubahan pagu per urusan dalam APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Pagu Anggaran Perubahan per Urusan Pemerintahan 2024

No.	URUSAN	PAGU			Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidang Pendidikan	241.992.845.691	245.272.392.151	3.279.546.460		Dinas Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	256.304.426.840	263.901.265.131	7.596.838.291		Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133.956.663.404	128.699.519.939	-5.257.143.465		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kaewasan Permukiman	46.677.291.868	46.310.729.638	-366.562.230		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Bidang Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.042.002.712	21.571.918.987	-1.470.083.725		Satuan Polisi Pamong Praja
		4.203.552.115	4.195.936.806	-7.615.309		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
6	Bidang Sosial	28.144.523.249	29.602.711.425	1.458.188.176		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Bidang Tenaga Kerja	12.699.549.164	13.005.755.397	306.206.233		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.828.226.128	1.667.896.715	-160.329.413		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Bidang Pangan	8.159.672.000	8.065.687.937	-93.984.063		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Bidang Pertanahan	805.792.250	805.792.250	0		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Bidang Lingkungan Hidup	27.404.456.389	26.915.380.276	-489.076.113		Dinas Lingkungan Hidup
12	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.252.012.424	8.167.567.787	-84.444.637		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.265.102.884	2.923.247.000	-1.341.855.884		Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Bidang Perhubungan	16.978.291.586	16.866.562.545	-111.729.041		Dinas Perhubungan
15	Bidang Komunikasi dan Informatika	26.991.513.379	28.119.906.935	1.128.393.556		Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	855.447.782	855.447.782	0		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
17	Bidang Penanaman Modal	6.681.817.646	6.652.704.575	-29.113.071		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.678.857.010	12.794.710.531	115.853.521		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga
19	Bidang Statistik	100.000.000	100.000.000	0		Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Bidang Persandian	241.752.000	241.752.000	0		Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Bidang Kebudayaan	2.337.465.000	2.687.252.610	349.787.610		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga
22	Bidang Perpustakaan	5.836.014.603	5.793.531.519	-42.483.084		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Bidang Kearsipan	763.100.000	773.386.636	10.286.636		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Bidang Kelautan dan Perikanan	826.881.000	972.681.000	145.800.000		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
25	Bidang Pariwisata	941.500.000	1.131.500.000	190.000.000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga
26	Bidang Pertanian	6.774.233.000	8.007.892.367	1.233.659.367		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
27	Bidang Perdagangan	17.050.663.681	16.855.913.628	-194.750.053		Dinas Perdagangan
28	Bidang Perindustrian	2.877.630.860	1.772.787.748	-1.104.843.112		Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
29	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	48.130.884.266	50.172.470.155	2.041.585.889		Sekretariat Daerah
		47.261.594.608	52.180.286.068	4.918.691.460		Sekretariat DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7
30	Unsur Penunjang Perencanaan	11.424.253.010	11.567.342.492	143.089.482		Badan Perencanaan, Penelitain dan Pengembangan Daerah
31	Unsur Penunjang Keuangan	64.181.123.385	62.902.275.040	-1.278.848.345		Badan Keuangan dan Aset Daerah
		10.759.222.567	10.667.015.218	-92.207.349		Badan Pendapatan Daerah
32	Unsur Penunjang Kepegawaian	8.851.659.993	9.678.105.476	826.445.483		Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia
33	Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	1.791.446.378	1.729.384.178	-62.062.200		Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia
34	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1.623.107.000	1.681.866.000	58.759.000		Badan Perencanaan, Penelitain dan Pengembangan Daerah
35	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.819.626.146	10.811.257.781	-8.368.365		Inspektorat Daerah
36	Unsur Kewilayahan	31.931.883.039	31.819.960.715	-111.922.324		Kecamatan Taman
		31.762.047.756	31.345.590.647	-416.457.109		Kecamatan Manguharjo
		29.142.161.906	29.047.342.237	-94.819.669		Kecamatan Kartoharjo
37	Unsur Pemerintahan Umum	35.616.737.281	35.810.136.763	193.399.482		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		1.232.967.032.000	1.244.144.864.085	11.177.832.085		

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Adapun rekapitulasi perubahan pagu anggaran per Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2
Pagu Anggaran Perubahan per Perangkat Daerah 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		+/-
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	PAGU SEBELUM	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	4	4	13	13	160	163	241.992.845.691	245.272.392.151	3.279.546.460
2	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	21	24	92	193	260.569.529.724	266.824.512.131	6.254.982.407
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	9	17	17	36	36	133.956.663.404	128.699.519.939	-5.257.143.465
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6	15	15	21	21	47.483.084.118	47.116.521.888	-366.562.230
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	12	12	22	22	23.042.002.712	21.571.918.987	-1.470.083.725
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	10	10	18	18	4.203.552.115	4.195.936.806	-7.615.309

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	12	29	29	73	75	29.972.749.377	31.270.608.140	1.297.858.763
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	9	17	17	28	28	16.432.627.806	15.633.990.927	-798.636.879
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13	13	24	24	42	42	15.760.786.000	17.046.261.304	1.285.475.304
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	9	18	18	30	30	27.404.456.389	26.915.380.276	-489.076.113
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	13	13	26	26	8.252.012.424	8.167.567.787	-84.444.637
12	Dinas Perhubungan	2	2	14	14	20	20	16.978.291.586	16.866.562.545	-111.729.041
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	12	12	26	27	27.333.265.379	28.461.658.935	1.128.393.556
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	11	11	18	18	6.681.817.646	6.652.704.575	-29.113.071
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudanaan dan Olahraga	9	9	18	18	22	22	15.957.822.010	16.613.463.141	655.641.131
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	12	12	17	17	6.599.114.603	6.566.918.155	-32.196.448
17	Dinas Perdagangan	6	6	14	14	21	21	17.050.663.681	16.855.913.628	-194.750.053
18	Sekretariat Daerah	11	11	49	49	79	80	48.130.884.266	50.172.470.155	2.041.585.889
19	Sekretariat DPRD	2	2	14	14	24	24	47.261.594.608	52.180.286.068	4.918.691.460
20	Badan Perencanaan, Penelitain dan Pengembangan Daerah	4	4	14	14	32	32	13.047.360.010	13.249.208.492	201.848.482
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	11	11	25	25	64.181.123.385	62.902.275.040	-1.278.848.345
22	Badan Pendapatan Daerah	2	2	7	7	19	19	10.759.222.567	10.667.015.218	-92.207.349
23	Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia	3	3	11	11	19	19	10.643.106.371	11.407.489.654	764.383.283
24	Inspektorat Daerah	3	3	9	9	20	20	10.819.626.146	10.811.257.781	-8.368.365
25	Kecamatan Taman	5	5	14	14	45	45	31.931.883.039	31.819.960.715	-111.922.324
26	Kecamatan Manguharjo	5	5	14	14	48	48	31.762.047.756	31.345.590.647	-416.457.109
27	Kecamatan Kartoharjo	5	5	14	14	47	47	29.142.161.906	29.047.342.237	-94.819.669
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	11	11	21	21	35.616.737.281	35.810.136.763	193.399.482
		161	161	438	441	1051	1159	1.232.967.032.000	1.244.144.864.085	11.177.832.085

Sumber: Bapppeda Kota Madiun, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Rincian anggaran per program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5.3
Perubahan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2024

Prioritas 1 Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD-P 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024		Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evalusi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	24.31 SKOR	13.128.150.000	14.157.991.732	14.829.034.007	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
	1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000	209.889.784	310.589.784	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100.000.000	209.889.784	310.589.784	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	7.000.000.000	7.380.379.630	7.270.225.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7.000.000.000	7.380.379.630	7.270.225.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	300.000.000	400.000.000	433.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	300.000.000	400.000.000	433.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	664.550.000	1.012.922.318	1.026.925.198	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	552.050.000	828.657.838	830.307.838	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	112.500.000	184.264.480	196.617.360	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah daerah	100 %	4.210.800.000	4.302.000.000	4.563.459.395	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	4.210.800.000	4.302.000.000	4.563.459.395	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100 %	852.800.000	852.800.000	1.224.284.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	380.900.000	380.900.000	512.624.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	471.900.000	471.900.000	711.660.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.30 skor	10.923.061.750	10.261.390.341	10.207.724.111				
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	105.700.000	18.673.400	22.673.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	105.700.000	18.673.400	22.673.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.706.000.000	5.293.426.191	5.243.232.695		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.02		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.645.000.000	5.232.426.191	5.175.232.695	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	61.000.000	61.000.000	68.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100%	152.000.000	132.429.000	132.429.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.05		0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	142.000.000	122.429.000	122.429.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05		0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	233.880.000	233.880.000	233.880.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.06		0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	233.880.000	233.880.000	233.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	340.500.000	198.000.000	216.738.171		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	142.500.000	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	33 Unit	198.000.000	198.000.000	216.738.171	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daearh	100%	2.205.500.000	2.205.500.000	2.179.289.095		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.205.500.000	2.205.500.000	2.179.289.095	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	2.179.481.750	2.179.481.750	2.179.481.750		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 Unit	1.690.986.550	1.690.986.550	1.690.986.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	106 Unit	388.495.200	388.495.200	388.495.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	16.427.406.300	14.106.807.800	14.023.972.562				
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	196.067.000	196.067.000	186.567.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	196.067.000	196.067.000	186.567.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	7.635.025.000	7.411.992.000	7.091.974.275		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	7.635.025.000	7.411.992.000	7.091.974.275	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	770.525.000	709.701.500	675.200.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	770.525.000	709.701.500	675.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	341.400.000	250.000.000	312.576.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	341.400.000	250.000.000	312.576.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100% %	3.011.319.000	1.681.831.000	1.563.856.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.445.130.000	1.266.130.000	1.090.212.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	185.600.000	205.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	266.189.000	230.101.000	268.044.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% %	3.282.000.000	2.848.986.000	2.947.854.590		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3.282.000.000	2.848.986.000	2.947.854.590	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.191.070.300	1.008.230.300	1.245.944.297		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	851.000.000	718.160.000	895.418.387	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	240.070.300	190.070.300	230.662.410	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	100.000.000	100.000.000	119.863.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	3.114.898.000	2.799.538.115	2.820.671.806				
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	3.525.000	1.381.000	1.381.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.525.000	1.381.000	1.381.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	1.856.427.000	1.756.211.115	1.710.324.806		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.856.427.000	1.756.211.115	1.710.324.806	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	200.000.000	200.000.000	200.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	17.600.000	16.500.000	75.945.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	17.600.000	16.500.000	75.945.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	485.599.000	411.078.000	413.773.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485.599.000	411.078.000	413.773.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	551.747.000	414.368.000	419.248.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	321.347.000	249.868.000	249.868.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	150.000.000	152.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 Unit	30.400.000	14.500.000	16.530.000	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	BADAN PENANGGULANGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	N BENCANA DAERAH
1	1 06 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	8.625.032.816	7.986.207.274	8.118.231.537				
	1 06 01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	266.283.950	163.643.640	159.401.840		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1 06 01	2.01		0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	129.757.550	128.197.400	127.979.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01	2.01		0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.684.200	22.082.310	22.082.310	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01	2.01		0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	111.842.200	13.363.930	9.340.130	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1 06 01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 %	5.979.126.761	5.911.793.714	5.773.528.377		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1 06 01	2.02		0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.833.748.161	5.833.748.161	5.670.118.024	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	145.378.600	78.045.553	103.410.353	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	98.278.000	47.889.000	292.817.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	54.376.000	0,00	244.928.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	43.902.000	47.889.000	47.889.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	475.630.000	311.237.000	311.237.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	475.630.000	311.237.000	311.237.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 %	100.095.070	0,00	18.380.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	110 Unit	100.095.070	0,00	18.380.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	1.198.648.740	1.079.524.800	1.090.748.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	883.348.740	580.304.800	591.528.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.300.000	499.220.000	499.220.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	506.970.295	472.119.120	472.119.120		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	233.514.500	200.187.000	200.187.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	182.421.075	181.014.120	181.014.120	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	110 Unit	91.034.720	90.918.000	90.918.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,04 skor	7.987.563.636	6.653.393.174	6.489.338.267				
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	71.280.000	71.280.000	71.280.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	71.280.000	71.280.000	71.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.448.963.296	5.395.889.903	5.067.780.088		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.448.963.296	5.395.889.903	5.067.780.088	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	100 %	200.000.000	0,00	0,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	200.000.000	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.074.045.340	817.948.271	924.261.297		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	708.302.480	534.400.000	584.953.026	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	365.742.860	283.548.271	339.308.271	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	630.000.000	215.000.000	210.429.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	20.000.000	13.209.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	395.000.000	195.000.000	197.220.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	563.275.000	153.275.000	215.587.882		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	70.000.000	70.000.000	89.388.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	460.000.000	50.000.000	75.124.482	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	47 Unit	33.275.000	33.275.000	51.075.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.756.434.000	7.625.607.000	7.530.622.937				
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	129.747.100	129.747.000	121.747.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	129.747.100	129.747.000	121.747.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.160.362.271	4.995.931.000	4.759.106.937		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.160.362.271	4.995.931.000	4.759.106.937	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	42.785.860	77.785.800	74.985.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	42.785.860	77.785.800	74.985.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.081.953.000	1.080.647.500	1.119.177.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	726.000.000	728.626.500	767.156.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.953.000	55.953.000	55.953.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	296.068.000	296.068.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	680.976.503	680.886.500	733.081.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	347.451.000	347.451.000	275.785.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	117.150.000	117.060.000	117.060.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	216.375.503	216.375.500	340.236.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	660.609.266	660.609.200	722.524.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	110.548.000	110.548.000	147.411.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	36.022.500	36.022.500	36.022.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	475.267.766	475.267.700	490.329.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	38.771.000	38.771.000	48.761.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	18.464.499.567	18.919.575.759	18.545.013.190				
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.921.941.242	10.212.279.759	9.232.643.666		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	8.921.941.242	10.212.279.759	9.232.643.666	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	300.000.000	180.000.000	199.009.240		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	150.000.000	125.000.000	144.009.240	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 orang	150.000.000	55.000.000	55.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	325.000.000	300.000.000	300.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	325.000.000	300.000.000	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan barang milik	100 %	247.070.000	133.000.000	256.976.920		Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	daerah penunjang urusan pemerintah daerah						Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 unit	178.750.000	100.000.000	117.230.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	68.320.000	33.000.000	139.746.920	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	6.881.317.825	6.376.096.000	6.321.323.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	721.441.825	725.000.000	705.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.159.876.000	5.651.096.000	5.616.323.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	1.689.170.500	1.618.200.000	2.135.060.364		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 Unit	1.369.726.500	1.318.200.000	1.340.259.420	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	169.444.000	150.000.000	131.470.944	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	150.000.000	663.330.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			833.208.325	8.252.012.424	8.167.567.787				
4	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81,60 Nilai	8.724.836.960	7.899.350.874	7.833.922.254				
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	233.638.000	123.322.340	137.276.480		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	3.996.000	27.172.340	1.995.480	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	229.642.000	96.150.000	135.281.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5.030.281.080	4.791.600.496	4.545.189.839		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/ bulan	4.951.601.080	4.712.910.496	4.467.399.839	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	78.680.000	78.690.000	77.790.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	916.134.800	1.098.392.710	1.148.592.205		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	484.334.800	796.392.710	794.222.119	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	76.800.000	48.000.000	50.876.850	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	65.000.000	24.000.000	28.513.236	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	290.000.000	230.000.000	274.980.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	1.084.000.000	781.289.200	781.289.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	31 Unit	1.084.000.000	781.289.200	781.289.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	674.584.000	647.435.328	643.490.240		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674.584.000	647.435.328	643.490.240	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	564.887.080	457.310.800	578.084.290		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	76.000.000	34.600.000	39.086.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atau Kendaraan Dinas Jabatan								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	45.000.000	57.550.000	41.753.160	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	28.000.000	24.400.000	5.115.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	312.887.080	231.000.000	353.947.530	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	103.000.000	109.760.800	138.182.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	85 %	218.712.325	100.335.225	87.604.025				
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen kependudukan	100 %	183.900.000	100.335.225	87.604.025		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	106.900.000	85.799.225	73.068.025	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	02	2.01		0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6500 Dokumen	77.000.000	14.536.000	14.536.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	94,75 %	310.296.000	131.537.855	112.749.995				
	2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	100 %	184.296.000	131.537.855	112.749.995		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	03	2.01		0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4200 Dokumen	110.126.000	105.448.760	88.880.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01		0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	74.170.000	26.089.095	23.869.095	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan		304.200.000	120.788.470	133.291.513				
	2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	100 %	175.820.000	120.788.470	133.291.513		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	12	04	2.01		0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	102.200.000	101.716.470	97.345.845	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	17 Dokumen	73.620.000	19.072.000	35.945.668	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.5 nilai	11.280.000.000	10.228.601.895	10.048.675.055				
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	55.000.000	55.000.000	53.920.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	55.000.000	55.000.000	53.920.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	6.750.000.000	6.681.601.895	6.365.607.025		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	6.750.000.000	6.681.601.895	6.365.607.025	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yng Tercapai	100 %	200.000.000	100.000.000	100.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 Paket	200.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	400.000.000	250.000.000	300.202.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	400.000.000	250.000.000	300.202.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan Kantor	100 %	225.000.000	176.000.000	191.516.030		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	26.000.000	26.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	150.000.000	165.516.030	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkpan Kantor	100 %	2.300.000.000	1.900.000.000	1.885.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Laporan	2.300.000.000	1.900.000.000	1.885.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Baramg Milik Daerah Yang Layak Digunakan	100 %	1.350.000.000	1.066.000.000	1.152.430.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 Unit	900.000.000	630.000.000	695.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	300.000.000	320.880.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	150.000.000	136.000.000	136.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERHUBUNGAN
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			23.530.562.323	26.991.513.379	28.119.906.935				
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Nilai	8.180.709.137	7.873.615.108	7.998.661.563				
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran,	100 %	200.000.000	169.763.400	69.763.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							pengendalian dan evaluasi perangkat daerah						Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	200.000.000	169.763.400	69.763.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5.380.709.137	5.484.260.508	5.329.306.963		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	5.380.709.137	5.484.260.508	5.329.306.963	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	400.000.000	200.000.000	400.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	400.000.000	200.000.000	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 %	100.000.000	2.500.000	21.150.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	2.500.000	21.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	1.100.000.000	1.076.641.200	1.181.641.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.100.000.000	1.076.641.200	1.181.641.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	1.000.000.000	940.450.000	996.800.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	200.000.000	157.650.000	237.650.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600.000.000	600.000.000	610.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	200.000.000	182.800.000	149.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	82 %	3.830.562.323	2.718.502.997	3.421.850.097				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	3.830.562.323	2.718.502.997	3.421.850.097		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	1.555.562.323	1.255.000.000	1.255.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1.200.000.000	973.923.328	1.063.362.547	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen		0	703.347.100	DBHCHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	275.000.000	232.964.450	232.964.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	250.000.000	135.415.219	45.976.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya		250.000.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	300.000.000	121.200.000	121.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	19.700.000.000	16.399.395.274	16.699.395.275				
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	15.050.000.000	13.190.716.714	13.112.552.714		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	190.716.714	190.716.714	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3200 Unit	14.900.000.000	13.000.000.000	12.921.836.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100 %	4.650.000.000	3.208.678.560	3.586.842.561		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	500.000.000	273.700.000	321.564.001	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	750.000.000	350.000.000	680.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	250.000.000	180.778.560	180.778.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	65.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	335.000.000	269.200.000	269.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	750.000.000	35.000.000	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			500.000.000	100.000.000	100.000.000				
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	500.000.000	100.000.000	100.000.000				
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	500.000.000	100.000.000	100.000.000		Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	500.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			331.248.000	241.752.000	241.752.000				
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	331.248.000	241.752.000	241.752.000				
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	331.248.000	241.752.000	241.752.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	149.668.000	41.752.000	41.752.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	181.580.000	200.000.000	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.04 skor	5.905.883.300	5.116.437.246	5.087.324.175				
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,	100 persen	45.646.300	7.461.900	7.461.900		Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pengendalian dan evaluasi perangkat daerah						Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	45.646.300	7.461.900	7.461.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	4.009.723.000	3.957.404.185	3.928.291.114		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	4.009.723.000	3.957.404.185	3.928.291.114	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	274.234.000	204.234.000	204.234.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	274.234.000	204.234.000	204.234.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah	100 persen	200.000.000	20.000.000	20.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 unit	200.000.000	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	DINAS PENANAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	845.526.000	746.814.596	773.882.596		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 laporan	845.526.000	746.814.596	773.882.596	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	530.754.000	180.522.565	153.454.565		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	97.558.500	97.558.500	70.490.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	379.280.000	29.280.000	29.280.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	53.915.500	53.684.065	53.684.065	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi implementasi sakip perangkat daerah	A scor	7.120.980.000	7.062.772.010	6.928.772.010				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4.400.235.000	4.704.472.907	4.570.472.907		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.400.235.000	4.704.472.907	4.570.472.907	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	250.000.000	199.905.000	199.905.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	199.905.000	199.905.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100.000.000	20.000.000	20.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	2.025.745.000	1.965.317.103	1.965.317.103		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.025.745.000	1.965.317.103	1.965.317.103	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	255.000.000	143.077.000	143.077.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	75.000.000	53.077.000	53.077.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	80.000.000	40.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi					ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			996.680.000	763.100.000	773.386.636				
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	90 %	826.680.000	609.100.000	619.386.636				
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	475.000.000	388.000.000	369.052.936		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60000 Berkas	475.000.000	388.000.000,00	369.052.936	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100 %	351.680.000	221.100.000	250.333.700		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	270 Arsip	351.680.000	221.100.000,00	250.333.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan	8.8 Nilai	170.000.000	154.000.000	154.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Publik dan Kesejahteraan Rakyat								
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	170.000.000	154.000.000	154.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1100 Arsip	85.000.000	85.000.000,00	85.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1100 Berkas	85.000.000	69.000.000,00	69.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	A Skor	11.940.358.400	10.474.832.710	10.264.246.844				
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	190.036.000	129.036.500	129.036.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	190.036.000	129.036.500	129.036.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	8.941.595.764	8.846.923.930	8.652.173.876		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.941.595.764	8.846.923.930	8.652.173.876	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	159.382.400	124.614.200	125.824.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	159.382.400	124.614.200	125.824.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	398.929.600	249.696.266	249.696.266		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	398.929.600	249.696.266	249.696.266	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	885.880.930	58.461.550	65.986.550		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	807.838.600	40.661.550	40.661.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	78.042.330	17.800.000	25.325.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	812.889.300	766.468.958	726.468.958		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	3	30	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	812.889.300	766.468.958	726.468.958	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	551.644.406	299.631.306	315.060.494		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	261.208.606	227.780.606	227.780.606	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	205.916.500	11.616.500	27.045.688	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	122 Unit	84.519.300	60.234.200	60.234.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			60.258.596.683	95.392.478.874	102.352.756.223				
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			60.258.596.683	48.130.884.266	50.172.470.155				
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Setda	83 Skor	1.793.860.000	1.366.410.000	1.466.410.000				
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10.000.000	8.000.000	8.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10.000.000	8.000.000	8.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	946.860.000	898.410.000	898.410.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	946.860.000	898.410.000	898.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	200.000.000	150.000.000	250.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	24 Laporan	200.000.000	150.000.000	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	BAGIAN PEMERINTAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Koordinasi dan Konsultasi SKPD					ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	75.000.000	15.000.000	15.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	15.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	300.000.000	250.000.000	250.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	250.000.000	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	262.000.000	45.000.000	45.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	30.000.000	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BAGIAN PEMERINTAHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						atau Kendaraan Dinas Jabatan								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	220.000.000	15.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	12.000.000	10.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.118.000.000	2.245.966.220	2.145.966.220				
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Administrasi Pemerintahan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	1.650.000.000	1.901.566.220	1.801.566.220		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	1.200.000.000	1.143.424.012	1.007.424.012	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	450.000.000	758.142.208	794.142.208	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Difasilitasi	100 %	468.000.000	344.400.000	344.400.000		Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	02	2.04	0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	468.000.000	344.400.000	344.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEMERINTAHAN
3	4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 skor	3.186.980.500	2.659.850.387	2.659.800.387				
	4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	15.000.000	15.000.000	15.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	815.535.000	835.922.668	835.922.668		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	815.535.000	835.922.668	835.922.668	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BAGIAN ORGANISASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83.20 indeks	185.000.000	167.326.280	167.326.280		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	185.000.000	167.326.280	167.326.280	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	14.868.000	100.000.000	100.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.868.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	185.000.000	162.577.108	154.527.108		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185.000.000	162.577.108	154.527.108	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	51.372.000	38.873.000	46.873.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	27.315.000	23.963.000	31.963.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	2.500.000	2.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	19.057.000	12.410.000	12.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	46.12	1.920.205.500	1.340.151.331	1.340.151.331		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	500.000.000	339.871.000	339.871.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	855.367.500	662.366.630	662.366.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	564.838.000	337.913.701	337.913.701	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BAGIAN ORGANISASI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
4	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 Skor	2.009.005.470	1.616.387.808	1.640.892.467				
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	1.000.000	1.000.000	500.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1.000.000	1.000.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	945.125.000	904.221.390	904.221.390		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	945.125.000	904.221.390	904.221.390	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83,20 Skor	347.330.470	231.923.941	231.923.941		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	347.330.470	231.923.941	231.923.941	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BAGIAN HUKUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	141.500.000	0,00	49.332.836,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	125.000.000	0,00	4.572.090	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 Unit	16.500.000	0,00	44.760.746	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penujang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	492.300.000	395.851.677	369.523.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Laporan	492.300.000	395.851.677	369.523.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	81.750.000	83.390.800	85.390.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	43.000.000	44.640.800	44.640.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000	2.500.000	4.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	36.250.000	36.250.000	36.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
5	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	2.278.141.000	1.049.964.828	1.005.640.010				
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang tersusun	100 %	2.278.141.000	1.049.964.828	1.005.640.010		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	8 Dokumen	1.101.378.000	479.741.180	271.186.476	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus	647.431.000	228.632.778	244.187.334	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	529.332.000	341.590.870	490.266.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN HUKUM
6	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	83 skor	2.702.000.000	2.805.000.521	2.658.053.521				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	15.000.000	15.000.000	5.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	1.750.000.000	1.750.000.000	1.518.611.430		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.750.000.000	1.750.000.000	1.518.611.430	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100%	200.000.000	150.000.000	225.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	150.000.000	225.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200.000.000	100.000.000	272.463.091		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	100.000.000	100.000.000	96.406.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	100.000.000	0,00	176.057.091	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100%	350.000.000	300.000.000	240.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	300.000.000	240.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100%	187.000.000	490.000.521	396.979.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	30.000.000	25.000.000	27.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	137.000.000	445.000.521	349.979.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
7	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	648.365.000	316.421.000	463.368.000				
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Realisasi Fisik Keuangannya >79% dari Target	100%	151.421.000	111.421.000	105.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	31.421.000	31.421.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	120.000.000	80.000.000	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Realisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa >79% dari Target	100%	496.944.000	205.000.000	358.368.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	200.899.000	95.000.000	265.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	03	2.03		0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	296.045.000	110.000.000	93.368.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
8	4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi Implementasi Sakip Setda	83 skor	2.428.318.046	2.428.318.046	2.357.386.764				
	4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	6 dokumen	22.000.000	22.000.000	18.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.01		0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	22.000.000	22.000.000	18.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	1.081.294.810	1.081.294.810	1.081.294.810		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.02		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.081.294.810	1.081.294.810	1.081.294.810	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	250.000.000	250.000.000	250.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	220.000.000	220.000.000	123.726.250		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	120.000.000	120.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	100.000.000	123.726.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	613.219.636	613.219.636	484.719.636		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	613.219.636	613.219.636	484.719.636	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	241.803.600	241.803.600	399.646.068		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	9 Unit	25.000.000	25.000.000	30.842.468	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	BAGIAN PEREKONOMIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	200.000.000	350.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	16.803.600	16.803.600	18.803.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
9	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	9.607.846.707	2.871.042.344	1.989.287.654				
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan kebijakan rakyat	80,08 persen	9.607.846.707	2.871.042.344	1.989.287.654		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Dokumen	9.607.846.707	2.871.042.344	1.989.287.654	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
10	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	1.017.189.960	1.017.150.724	1.064.581.504				
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kepuasan masyarakat di bidang Perekonomian dan Pembangunan	80,98 %	617.189.960	617.150.724	622.150.724		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	335.984.960	335.984.960	300.984.960	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	281.205.000	281.165.764	321.165.764	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2022)Penguatan Ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi Sektor unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100 %	400.000.000	400.000.000	442.430.780		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000	442.430.780	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
11	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83 skor	34.262.750.000	29.754.372.388	32.721.083.628				
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	6 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen adminstrasi keuangan	100 %	13.273.500.000	13.829.515.864	12.472.827.103		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	13.273.500.000	13.829.515.864	12.472.827.103	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	6.210.000.000	2.638.000.000	2.327.960.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	6.210.000.000	2.638.000.000	2.327.960.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	1.750.000.000	1.260.000.000	3.564.908.569		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	60.000.000	92.736.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 laporan	1.700.000.000	1.200.000.000	3.472.171.669	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan pengadaan barang miik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	789.250.000	785.000.000	1.964.510.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	39.250.000	35.000.000	136.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	500.000.000	500.000.000	790.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	250.000.000	250.000.000	1.037.760.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	4.935.000.000	4.903.856.524	5.541.121.924		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.935.000.000	4.903.856.524	5.541.121.924	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	1.875.000.000	1.750.000.000	2.138.278.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	110 Unit	1.100.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	600.000.000	899.423.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	129 Unit	275.000.000	150.000.000	238.854.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 %	1.000.000.000	1.000.000.000	824.160.732		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400.000.000	320.000.000	194.160.732	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	600.000.000	680.000.000	630.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah dalam kondisi baik	100 %	2.075.000.000	1.633.000.000	1.796.442.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.125.000.000	1.070.600.000	1.234.042.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	BAGIAN UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Tangga Kepala Daerah						ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.12	0002		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	600.000.000	237.400.000	237.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.12	0003		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	350.000.000	325.000.000	325.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100 %	2.350.000.000	1.950.000.000	2.085.874.100		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	01	01	2.14	0001		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 Laporan	2.350.000.000	1.950.000.000	2.085.874.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BAGIAN UMUM
	4	02					SEKRETARIAT DPRD			#REF!	47.261.594.608	52.180.286.068				
2	4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81,50 (A) Skor	29.609.047.298	36.240.931.516	40.228.857.243				
	4	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	75.329.977	55.731.577	118.509.254		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	75.329.977	55.731.577	118.509.254	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	3.366.682.326	3.230.644.565	3.146.893.865		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18Orang/bulan	3.366.682.326	3.230.644.565	3.146.893.865	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	291.087.294	189.818.894	170.898.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	64.818.894	64.818.894	45.898.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	226.268.400	125.000.000	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	1.037.733.258	2.976.844.000	3.340.372.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	1.037.733.258	2.976.844.000	3.340.372.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	6.105.000	179.487.000	2.466.656.208		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6.105.000	179.487.000	2.466.656.208	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	2.602.797.882	2.675.254.682	2.526.715.082		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	2.602.797.882	2.675.254.682	2.526.715.082	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	1.021.153.590	1.046.421.321	1.119.039.590		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	308.841.290	334.109.871	397.126.790	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	238.673.550	238.673.550	248.274.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	473.638.750	473.637.900	473.637.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	15.980.942.237	16.000.124.327	16.277.591.077		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	15.621.963.217	15.620.733.467	15.896.772.217	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	253.979.020	274.390.860	275.818.860	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	5.227.215.734	9.886.605.150	11.062.181.667		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	37.957.150	37.957.150	37.895.345	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18 Laporan	5.189.258.584	9.848.648.000	11.024.286.322	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
1	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	86 Indeks	14.181.109.506	11.020.663.092	11.951.428.825				
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	6.133.494.696	3.819.600.000	3.819.600.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	3.697.366.740	2.629.600.000,00	2.675.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	2.436.127.956	1.190.000.000,00	1.144.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	1.637.690.360	1.336.308.000	1.255.434.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	1.637.690.360	1.336.308.000,00	1.255.434.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-program Pemerintah Daerah	100 %	640.644.170	1.192.040.647	791.429.919		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	338.765.050	573.933.900,00	271.986.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	301.879.120	618.106.747,00	519.443.019	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	4.956.857.280	4.210.614.307	5.289.860.059		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	2.704.590.000	1.496.088.000,00	2.488.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	892.910.480	1.406.738.836,00	1.406.738.836,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	120 Dokumen	1.359.356.800	1.307.787.471,00	1.394.171.223	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	SEKRETARIAT DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	100 %	812.423.000	462.100.138	795.104.847		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	58 Dokumen	812.423.000	462.100.138,00	795.104.847	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	SEKRETARIAT DPRD
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			#REF!	98.630.812.333	98.225.988.404				
	5	01				PERENCANAAN				11.424.253.010	11.567.342.492				
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	7.888.742.167	7.679.186.847	7.730.776.193				
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	193.215.400	173.725.400	173.725.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	161.979.200	142.489.200	142.489.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	12 Laporan	11.050.600	11.050.600	11.050.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.185.600	20.185.600	20.185.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	5.659.950.000	5.592.990.000	5.437.886.450		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	5.550.950.000	5.550.950.000	5.395.846.450	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	109.000.000	42.040.000	42.040.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 persen	337.138.312	245.427.692	196.427.692		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	154.098.312	154.098.312	105.098.312	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 Orang	183.040.000	91.329.380	91.329.380	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	455.934.000	455.934.000	455.934.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	455.934.000	455.934.000	455.934.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 persen	225.000.000	110.367.300	281.289.180		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	225.000.000	110.367.300	281.289.180	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	791.861.325	841.261.325	840.178.546		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	791.861.325	841.261.325	840.178.546	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	225.643.130	259.481.130	345.334.925		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	75.000.000	108.838.000	118.769.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.321.565	75.321.565	151.244.160	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.321.565	75.321.565	75.321.565	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	2.618.124.481	2.182.066.163	2.026.300.083				
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	100 persen	2.369.124.481	1.983.066.163	1.696.601.343		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	252.104.370	152.104.370	149.095.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	155.206.485	155.206.485	152.702.835	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	671.102.586	548.947.586	377.743.786	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.290.711.040	1.126.807.722	1.017.059.722	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi sesuai ketentuan	100 persen	249.000.000	199.000.000	329.698.740		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	99.000.000	99.000.000	109.800.240	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	150.000.000	100.000.000	219.898.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 persen	2.383.000.000	1.563.000.000	1.810.266.216				
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	728.000.000	528.000.000	1.030.913.400		Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	115.000.000	81.000.000	100.970.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	120.000.000	110.000.000	206.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	486.581.500	330.581.500	717.374.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26 Laporan	6.418.500	6.418.500	6.418.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	590.000.000	420.000.000	308.115.816		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang	1 Dokumen	405.000.000	235.000.000	201.750.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	185.000.000	185.000.000	106.365.816	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	100 persen	1.065.000.000	615.000.000	471.237.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	840.000.000	390.000.000	350.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	95.000.000	95.000.000	82.854.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	24.034.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	30.000.000	30.000.000	13.629.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.425.448.000	1.623.107.000	1.681.866.000				
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajia n yang dapat dimanfaatkan	100 persen	1.425.448.000	1.623.107.000	1.681.866.000				
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	100 persen	1.148.463.000	1.346.122.000	1.421.122.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	981.883.000	1.181.883.000	1.256.883.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	166.580.000	164.239.000	164.239.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	100 persen	276.985.000	276.985.000	260.744.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	276.985.000	276.985.000	260.744.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	02				KEUANGAN			6.310.571.000	74.940.345.952	73.569.290.258				
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	62.642.467.000	57.870.552.385	55.584.565.807				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	47.914.908.000	36.142.994.385	32.595.007.807		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2875 Orang/bulan	47.914.908.000	36.142.994.385	32.595.007.807	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	450.000.000	450.000.000	600.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	450.000.000	450.000.000	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan BMD Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	214.000.000	154.000.000	266.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	214.000.000	154.000.000	266.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13.768.559.000	20.828.558.000	21.828.558.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.768.559.000	20.828.558.000	21.828.558.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang Layak Digunakan	100 %	293.000.000	293.000.000	293.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	108.000.000	108.000.000	108.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	4.344.623.000	4.344.623.000	5.251.761.233				
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	100 %	1.126.814.000	1.126.814.000	1.126.814.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	83.421.000	83.421.000	83.421.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	56.819.000	56.819.000	56.819.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	16.876.000	16.876.000	16.876.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	23.640.000	23.640.000	23.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	154.679.000	113.677.400	113.677.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	154.679.000	195.680.600	195.680.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tentang Penjabaran Perubahan APBD								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	636.700.000	636.700.000	636.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	100 %	55.050.000	55.050.000	55.050.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	47 Dokumen	49.950.000	49.950.000	49.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3 Dokumen	5.100.000	5.100.000	5.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Permintaan Laporan Keuangan yang Terfasilitasi	100 %	1.162.759.000	1.162.759.000	1.162.759.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	66.000.000	66.000.000	66.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang	866.759.000	866.759.000	866.759.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan BTT yang tersusun	100 %	2.000.000.000	2.000.000.000	2.907.138.233		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.907.138.233	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100%	1.965.948.000	1.965.948.000	2.065.948.000				
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	22 Laporan	1.965.948.000	1.965.948.000	2.065.948.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	123.142.000	123.142.000	360.067.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.803.206.000	1.803.206.000	1.666.281.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan	39.600.000	39.600.000	39.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	9.654.959.835	9.628.736.967	9.536.529.618				
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bapenda	100 %	5.000.000	2.000.000	2.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	5.000.000	2.000.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	8.294.415.000	8.850.787.175	8.758.579.826		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	8.294.415.000	8.850.787.175	8.758.579.826	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	150.000.000	100.000.000	100.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Air Conditioner (AC) Kantor TV Touchsecrin dan Laptop yang disediakan	100 %	250.000.000	1.000.000	1.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	500.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	150.000.000	500.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	655.544.835	524.949.792	524.949.792		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	655.544.835	524.949.792	524.949.792	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100 %	300.000.000	150.000.000	150.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	75.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	1.987.637.504	1.130.485.600	1.130.485.600				
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	100 %	1.987.637.504	1.130.485.600	1.130.485.600		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	75.000.000	25.000.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	560.941.600	418.342.600	418.342.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	12.000.000	199.860.000	199.860.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	150.000.000	200.000.000	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4651 Obyek Pajak	7.500.000	107.583.500	107.583.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	58615 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18923 Layanan	15.000.000	12.487.500	12.487.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	646.550.000	86.000.000	86.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen	465.645.904	31.212.000	31.212.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	15.000.000	10.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	03				KEPEGAWAIAN			2.220.402.999	8.851.659.993	9.678.105.476				
3	5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	7.339.400.000	7.135.111.593	7.160.067.100				
	5	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	19.400.000	9.400.000	9.400.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	19.400.000	9.400.000	9.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	5.950.000.000	6.248.711.593	5.875.667.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.950.000.000	6.248.711.593	5.875.667.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	400.000.000	250.000.000	365.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	400.000.000	250.000.000	365.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD	100 %	150.000.000	32.000.000	165.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	150.000.000	32.000.000	165.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	495.000.000	440.000.000	455.000.100		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	495.000.000	440.000.000	455.000.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah	100 %	325.000.000	155.000.000	290.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	25.000.000	20.000.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	100.000.000	220.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50.000.000	35.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	87.7 Skor	2.220.402.999	1.716.548.400	2.518.038.376				
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100 %	1.202.560.000	1.113.590.200	1.056.657.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	1.003.200.000	919.230.200	862.297.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	160 Dokumen	89.360.000	89.360.000	89.360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Dokumen	110.000.000	105.000.000	105.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 %	470.064.200	245.176.200	322.759.176		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen	375.626.200	175.116.200	230.116.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen	94.438.000	70.060.000	92.642.976	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	100 %	390.000.000	70.000.000	850.840.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	110 Dokumen	390.000.000	70.000.000	850.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Realisasi Evaluasi Kinerja	100 %	157.778.799	287.782.000	287.782.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	28.806.799	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429 Orang	51.850.000	22.410.000	22.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	77.122.000	245.372.000	245.372.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.634.264.000	1.791.446.378	1.729.384.178				
2	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	13 %	2.634.264.000	1.791.446.378	1.729.384.178				
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi Teknis	85 %	1.620.000.000	941.446.378	941.446.378		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277 Orang	1.620.000.000	941.446.378	941.446.378	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Syarat Kompetensi Jabatannya	80 %	1.014.264.000	850.000.000	787.937.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	77 laporan	1.014.264.000	850.000.000	787.937.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			2.477.000.000	10.819.626.146	10.811.257.781				
1	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			2.477.000.000	10.819.626.146	10.811.257.781				
	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84.00 Nilai	10.398.000.000	9.241.226.146	9.251.101.781				
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal kategori baik	100 %	3.000.000	3.000.000	3.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	7.500.000.000	7.525.226.146	7.516.857.781		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.500.000.000	7.525.226.146	7.516.857.781	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90 Indeks	1.600.000.000	1.229.000.000	1.244.064.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	650.000.000	529.000.000	544.064.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	950.000.000	700.000.000	700.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	355.000.000	204.000.000	204.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	355.000.000	204.000.000	204.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	940.000.000	280.000.000	283.180.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	40.000.000	35.000.000	38.180.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	875.000.000	225.000.000	225.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25.000.000	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Maturitas SPInya Level 3	45 %	1.159.000.000	651.400.000	651.400.000				
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase realisasi pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Madiun	29 Dokumen	1.100.000.000	612.400.000	612.400.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	65.000.000	57.400.000	57.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	840.000.000	390.000.000	390.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	150.000.000	120.000.000	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	59.000.000	39.000.000	39.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	55.000.000	35.000.000	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	100 %	1.318.000.000	927.000.000	908.756.000				
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 Dokumen	8.000.000	7.000.000	7.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	8.000.000	7.000.000	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	6 Dokumen	1.310.000.000	920.000.000	901.756.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 perangkat daerah	450.000.000	250.000.000	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	860.000.000	670.000.000	651.756.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	INSPEKTORAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				57.731.658.966	57.287.931.239				
1	7	01				KECAMATAN MANGUHARJO			8.123.033.163	20.404.595.389	19.965.077.280				
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	83,35 Nilai	14.190.112.556	14.305.036.043	13.973.386.634				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	23.882.926	23.882.926	21.882.926		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	23.882.926	23.882.926	21.882.926	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	11.854.586.130	12.206.385.190	11.486.312.659		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11.852.586.130	12.204.385.190	11.484.380.659	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.932.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	56.828.000	94.714.014	40.450.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	19.876.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	36.952.000	94.714.014	40.450.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	127.835.000	117.091.000	126.206.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.835.000	117.091.000	126.206.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	624.851.629	389.554.800	688.389.720		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	101.250.000	96.055.000	373.720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	122.999.800	122.999.800	122.999.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	400.601.829	170.500.000	191.669.920	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	949.240.178	947.427.209	1.011.320.082		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	949.240.178	947.427.209	1.011.320.082	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persetase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	552.888.693	525.980.904	598.825.247		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	69.573.208	99.618.688	98.832.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	422.482.257	365.528.988	439.171.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	60.833.228	60.833.228	60.821.247	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	37.010.800	55.010.800	55.010.800				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi Sarpras pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100 %	37.010.800	55.010.800	55.010.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	37.010.800	55.010.800	55.010.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	774.931.500	625.685.400	513.293.700				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	651.977.500	141.645.400	106.534.600		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	651.977.500	141.645.400	106.534.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	122.954.000	484.040.000	406.759.100		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	122.954.000	484.040.000	406.759.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan	100 %	107.070.000	76.450.000	74.834.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	(tidak dilaksanakan OPD lain)								
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	107.070.000	76.450.000	74.834.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang	38.660.000	18.080.000	16.480.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	52.260.000	45.200.000	45.184.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	16.150.000	13.170.000	13.170.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN MANGUHARJO
						Kelurahan Manguharjo			877.936.811	597.048.800	595.487.800				
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	877.936.811	597.048.800	595.487.800				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	877.936.811	597.048.800	595.487.800		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	877.936.811	597.048.800	595.487.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN MANGUHARJO
						Kelurahan Sogaten			750.194.333	564.516.600	564.516.600				
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	750.194.333	564.516.600	564.516.600				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai	100 %	750.194.333	564.516.600	564.516.600		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	750.194.333	564.516.600	564.516.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN SOGATEN
						Kelurahan Patihan			651.714.774	530.914.552	530.914.552				
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	651.714.774	530.914.552	530.914.552				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	651.714.774	530.914.552	530.914.552		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	651.714.774	530.914.552	530.914.552	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN PATIHAN
						Kelurahan Ngegong			615.204.280	513.890.994	515.390.994				
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	615.204.280	513.890.994	515.390.994				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	615.204.280	513.890.994	515.390.994		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	615.204.280	513.890.994	515.390.994	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN NGEGONG
						Kelurahan Winongo			770.309.443	584.307.000	584.307.000				
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	770.309.443	584.307.000	584.307.000				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai	100 %	770.309.443	584.307.000	584.307.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	770.309.443	584.307.000	584.307.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN WINONGO
						Kelurahan Madiun Lor			839.684.776	592.510.300	593.210.300				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	839.684.776	592.510.300	593.210.300				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	839.684.776	592.510.300	593.210.300		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	839.684.776	592.510.300	593.210.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN MADIUN LOR
						Kelurahan Pangongangan			655.918.826	533.065.000	534.565.000				
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45	655.918.826	533.065.000	534.565.000				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	655.918.826	533.065.000	534.565.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	655.918.826	533.065.000	534.565.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN PANGONGANGAN
						Kelurahan Nambangan Lor			1.227.147.957	804.325.400	808.325.400				
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	1.227.147.957	804.325.400	808.325.400				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	1.227.147.957	804.325.400	808.325.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah yang Ada di Kecamatan								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.227.147.957	804.325.400	808.325.400	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
							Kelurahan Nambangan Kidul			815.909.663	621.834.500	621.834.500				
22	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	92,45 Nilai	815.909.663	621.834.500	621.834.500				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	815.909.663	621.834.500	621.834.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	815.909.663	621.834.500	621.834.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
	7	01					KECAMATAN KARTOHARJO			6.190.552.600	18.350.360.236	18.276.790.567				
1	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	82,77	13.429.000.000	12.884.213.934	12.902.489.765				
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100	4.000.000	4.000.000	4.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	11.502.000.000	11.276.540.934	10.981.927.331		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/per bulan	11.500.000.000	11.274.540.934	10.979.927.331	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100%	150.000.000	25.000.000	25.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	150.000.000	25.000.000	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	88,67	230.000.000	197.768.000	216.008.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	230.000.000	197.768.000	216.008.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100%	343.000.000	197.785.000	389.774.820		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	143.000.000	97.785.000	289.774.820	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	1.030.000.000	1.014.130.000	1.036.254.614		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.030.000.000	1.014.130.000	1.036.254.614	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	170.000.000	168.990.000	249.525.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	20.000.000	18.990.000	18.990.000	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000	55.000.000	135.535.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	40.000.000	102.639.000	62.876.500				
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100%	40.000.000	102.639.000	62.876.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 Dokumen	40.000.000	102.639.000	62.876.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	902.806.200	492.309.100	418.809.300				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	619.200.000	85.380.100	94.670.100		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi	16 Laporan	619.200.000	85.380.100	94.670.100	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	283.606.200	406.929.000	324.139.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11 Laporan	283.606.200	406.929.000	324.139.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	155.548.000	155.548.000	158.305.600				
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	155.548.000	155.548.000	158.305.600		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	125 Orang	66.120.000	66.120.000	66.120.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
	7	01	05	2.01	0005		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	76.400.000	76.400.000	79.157.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	05	2.01	0007		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	13.028.000	13.028.000	13.028.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN KARTOHARJO
							Kelurahan Oro-Oro Ombo			619.721.600	586.776.200	582.495.400				
6	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	619.721.600	586.776.200	582.495.400				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	619.721.600	586.776.200	582.495.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	619.721.600	586.776.200	582.495.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
							Kelurahan Sukosari			521.022.800	472.655.259	474.155.259				
8	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	521.022.800	472.655.259	474.155.259				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	521.022.800	472.655.259	474.155.259		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	521.022.800	472.655.259	474.155.259	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN SUKOSARI
						Kelurahan Klegen			641.579.200	574.514.443	586.354.443				
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	641.579.200	574.514.443	586.354.443				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	641.579.200	574.514.443	586.354.443		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	641.579.200	574.514.443	586.354.443	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN KLEGEN
						Kelurahan Rejomulyo			590.762.800	550.445.500	551.945.500				
12	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	590.762.800	550.445.500	551.945.500				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	590.762.800	550.445.500	551.945.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah yang Ada di Kecamatan								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02		0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	590.762.800	550.445.500	551.945.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN REJOMULYO
							Kelurahan Pilangbango			546.951.600	508.897.300	510.397.300				
14	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	546.951.600	508.897.300	510.397.300				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	546.951.600	508.897.300	510.397.300		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02		0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	546.951.600	508.897.300	510.397.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN PILANGBANGO
							Kelurahan Tawangrejo			484.880.400	459.414.000	460.914.000				
16	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	484.880.400	459.414.000	460.914.000				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	484.880.400	459.414.000	460.914.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02		0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	484.880.400	459.414.000	460.914.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	KELURAHAN TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan								Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
						Kelurahan Kanigoro			613.636.800	576.884.600	578.384.600				
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	613.636.800	576.884.600	578.384.600				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	613.636.800	576.884.600	578.384.600		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	613.636.800	576.884.600	578.384.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN KANIGORO
						Kelurahan Kartoharjo			548.143.600	505.739.000	507.239.000				
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	548.143.600	505.739.000	507.239.000				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	548.143.600	505.739.000	507.239.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	548.143.600	505.739.000	507.239.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN KARTOHARJO
						Kelurahan Kelun			525.499.600	480.323.900	482.423.900				
22	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	88,67	525.499.600	480.323.900	482.423.900				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	525.499.600	480.323.900	482.423.900		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02		0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	525.499.600	480.323.900	482.423.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN KELUN
	7	01					KECAMATAN TAMAN			6.517.561.174	18.976.703.341	19.046.063.392				
1	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	82,90 Nilai	14.236.609.154	13.373.808.841	13.209.964.992				
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokomen Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 %	1.530.000	1.530.000	720.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.01		0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.530.000	1.530.000	720.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	12.359.960.603	12.074.138.171	11.609.750.471		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.02		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	12.359.960.603	12.074.138.171	11.609.750.471	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administasi kepegawaian	100 %	141.306.000	47.633.400	47.633.400		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	141.306.000	47.633.400	47.633.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	108.000.000	98.000.000	98.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	108.000.000	98.000.000	98.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	333.812.551	109.358.533	411.976.680		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	90.000.000	10.000	215.980.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	243.812.551	109.348.533	195.996.680	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	901.000.000	752.365.687	766.759.391		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	901.000.000	752.365.687	766.759.391	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	391.000.000	290.783.050	275.125.050		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	53.000.000	104.559.550	88.901.550	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	150.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	38.000.000	36.223.500	36.223.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	18.766.000	18.766.000	18.766.000				
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarana dan	100 %	18.766.000	18.766.000	18.766.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sarana Pelayanan Umum	prasaranaPelayanan Umum yang ditindaklanjuti						Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	18.766.000	18.766.000	18.766.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase hasil pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	100 %	791.784.400	569.387.285	495.722.585				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	687.916.400	122.835.285	122.835.285		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	687.916.400	122.835.285	122.835.285	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	103.868.000	446.552.000	372.887.300		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	103.868.000	446.552.000	372.887.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan PD lain)	100 %	119.067.700	119.067.313	119.067.313				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	119.067.700	119.067.313	119.067.313		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang	36.448.000	36.447.613	36.447.613	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	61.652.000	61.652.000	61.652.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	20.967.700	20.967.700	20.967.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KECAMATAN TAMAN
						Kelurahan Mojorejo			595.231.200	522.431.200	541.859.200				
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	595.231.200	522.431.200	541.859.200				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	595.231.200	522.431.200	541.859.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	595.231.200	522.431.200	541.859.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN MOJOREJO
						Kelurahan Pandean			566.471.600	497.376.600	678.198.200				
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	566.471.600	497.376.600	678.198.200				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	566.471.600	497.376.600	678.198.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	566.471.600	497.376.600	678.198.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN PANDEAN
						Kelurahan Banjarejo			683.416.200	597.970.970	612.715.970				
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	683.416.200	597.970.970	612.715.970				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	683.416.200	597.970.970	612.715.970		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	683.416.200	597.970.970	612.715.970	DANA TRANSFER	Memperkuat Stabilitas	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan	KELURAHAN BANJAREJO

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
							Kelurahan Kuncen			360.528.170	315.955.204	331.714.804				
12	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	360.528.170	315.955.204	331.714.804				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	360.528.170	315.955.204	331.714.804		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	360.528.170	315.955.204	331.714.804	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN KUNCEN
							Kelurahan Manisrejo			753.523.600	659.923.600	677.425.600				
14	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	753.523.600	659.923.600	677.425.600				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	753.523.600	659.923.600	677.425.600		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	753.523.600	659.923.600	677.425.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN MANISREJO
							Kelurahan Kejuron			647.522.704	567.438.088	582.100.088				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	647.522.704	567.438.088	582.100.088				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	647.522.704	567.438.088	582.100.088		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	647.522.704	567.438.088	582.100.088	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN KEJURON
						Kelurahan Josenan			759.178.800	663.749.440	674.869.440				
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	759.178.800	663.749.440	674.869.440				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamata	100 %	759.178.800	663.749.440	674.869.440		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	759.178.800	663.749.440	674.869.440	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN JOSENAN
						Kelurahan Demangan			630.324.000	551.882.000	569.918.000				
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	630.324.000	551.882.000	569.918.000				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	630.324.000	551.882.000	569.918.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	630.324.000	551.882.000	569.918.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN DEMANGAN
							Kelurahan Taman			591.746.800	518.946.800	533.741.200				
2 2	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,15 Indeks	591.746.800	518.946.800	533.741.200				
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai ketentuan	100 %	591.746.800	518.946.800	533.741.200		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	591.746.800	518.946.800	533.741.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	KELURAHAN TAMAN
1	8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81,25 nilai	5.816.175.149	4.947.532.396	4.963.057.128				
	8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	59.904.000	45.600.000	45.600.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14.304.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perencanaan Perangkat Daerah						ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45.600.000	45.600.000	45.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen adminitrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.366.271.149	4.026.559.236	3.982.644.926		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	4.366.271.149	4.026.559.236	3.982.644.926	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen adminitrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	95.000.000	0,00	0,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	95.000.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen adminitrasi umum Perangkat Daerah	100 %	983.500.000	766.162.000	775.659.436		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	683.500.000	516.162.000	525.659.436	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	300.000.000	250.000.000	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	191.500.000	1.000.000	1.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	91.500.000	500.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	100.000.000	500.000	500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	120.000.000	108.211.160	158.152.766		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 mbl, 13 spd motor Unit	55.000.000	62.211.160	40.566.560	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	6.000.000	77.586.206	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	50.000.000	40.000.000	40.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

419.263.641.574 425.937.230.634

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas 2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD-P 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024		Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.864.064.679	6.046.155.990	6.516.417.130				
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	50 %	2.381.874.990	2.325.738.860	2.596.000.000				
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	112 Orang	2.329.738.860	2.301.638.860	2.571.900.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	112 Orang	2.329.738.860	2.301.638.860	2.571.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	50 %	22.700.000	10.480.000	10.480.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 Lembaga	22.700.000	10.480.000	10.480.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 Perusahaan	29.436.130	13.620.000	13.620.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	29.436.130	13.620.000	13.620.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	568.926.682	253.256.682	253.256.682				
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	235 orang	568.926.682	253.256.682	253.256.682		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 dokumen	107.530.900	116.306.600	123.645.220	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	150 orang	95.725.782	79.664.000	72.325.380	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 orang	365.670.000	57.286.082	57.286.082	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	3.913.263.007	3.467.160.448	3.667.160.448				
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 Perusahaan	338.178.707	154.223.800	154.223.800		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	112.744.100	123.973.800	123.973.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	225.434.607	30.250.000	30.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	3.575.084.300	3.312.936.648	3.512.936.648		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	75.931.500	75.931.500	75.931.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10000 Orang	3.499.152.800	3.237.005.148	3.437.005.148	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.209.265.959	855.447.782	855.447.782				
5	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	551.862.500	444.174.500	444.174.500				
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	40 koperasi	551.862.500	444.174.500	444.174.500		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	551.862.500	444.174.500	444.174.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2,5 %	135.918.800	150.586.523	150.586.523				
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	135.918.800	150.586.523	150.586.523		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 Unit Usaha	135.918.800	150.586.523	150.586.523	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	8 %	521.484.659	260.686.759	260.686.759				
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	12 Orang	521.484.659	260.686.759	260.686.759		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	521.484.659	260.686.759	260.686.759	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.213.007.564	2.877.630.860	1.772.787.748				
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	2.680.533.860	2.712.030.860	1.607.187.748	-			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	15 IKM	2.680.533.860	2.712.030.860	1.607.187.748	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	284.880.000	366.792.000	366.792.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	50.000.000	60.000.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	2.345.653.860	2.285.238.860	1.180.395.748	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10 %	532.473.704	165.600.000	165.600.000				
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	20 IKM	532.473.704	165.600.000	165.600.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	532.473.704	165.600.000	165.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			778.755.000	826.881.000	972.681.000				
5	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	290 Ton	415.805.000	430.805.000	436.605.000				
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	260 RTP	415.805.000	430.805.000	436.605.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	209.955.000	224.955.000	224.955.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	150.000.000	150.000.000	155.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	120 Orang	55.850.000	55.850.000	55.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	89 Ton	71.250.000	70.022.000	70.022.000				
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan / kemitraan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi / dan penguatan kelembagaan)	435 Orang	71.250.000	70.022.000	70.022.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	71.250.000	70.022.000	70.022.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi makan Ikan	16,5 Kg/Kapita/Tahun	291.700.000	326.054.000	466.054.000				
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	75.000.000	75.000.000	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	26 Ton	216.700.000	251.054.000	391.054.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	14 Pelaku Usaha	216.700.000	251.054.000	391.054.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			9.866.395.756	6.774.233.000	8.007.892.367				
8	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektifitas Sarana Pertanian	65 %	2.059.575.000	1.860.849.000	2.439.213.000				
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	80 %	1.988.175.000	1.789.449.000	2.333.639.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	21.000.000	66.000.000	410.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1.967.175.000	1.723.449.000	1.922.839.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	71.400.000	71.400.000	105.574.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	71.400.000	71.400.000	105.574.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	100 %	4.788.828.420	1.900.388.000	1.459.043.910				
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian	100 %	204.833.120	110.260.000	115.188.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	9.613.280	9.613.000	114.613.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	195.219.840	100.647.000	575.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitas /dipelihara	25 %	4.583.995.300	1.790.128.000	1.343.855.910		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	2.461.188.000	57.088.000	1.925.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	1.161.940.000	961.940.000	1.296.919.910	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	211.867.300	22.100.000	1.925.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	749.000.000	749.000.000	43.086.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	367.000.000	367.000.000	407.740.090				
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	259.000.000	259.000.000	316.000.090		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	259.000.000	259.000.000	316.000.090	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan jasa medik veteriner	1 Jenis	23.000.000	23.000.000	-		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	23.000.000	23.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	85.000.000	85.000.000	91.740.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan	85.000.000	85.000.000	91.740.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
11	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan Aman Bencana Pertanian	76 %	121.200.000	121.200.000	109.800.000				
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	2000 Ha / Tahun	121.200.000	121.200.000	109.800.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	121.200.000	121.200.000	109.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
12	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian	15 %	33.600.000	33.600.000	33.600.000				
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	1 Jenis	33.600.000	33.600.000	33.600.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	33.600.000	33.600.000	33.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
13	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	40 %	2.496.192.336	2.491.196.000	3.558.495.367				
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM petani terlatih	400 Orang	2.496.192.336	2.491.196.000	3.558.495.367		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	38 Unit	2.496.192.336	2.491.196.000	3.558.495.367	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			1.939.107.200	1.565.380.400	1.565.380.400				
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	109.550.000	109.550.000	109.550.000				
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 buah	109.550.000	109.550.000	109.550.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.550.000	109.550.000	109.550.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	40 persen	541.905.800	421.063.000	421.063.000				
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	46 investor	541.905.800	421.063.000	421.063.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	499.328.700	383.263.000	383.263.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	42.577.100	37.800.000	37.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	95 persen	599.495.000	409.495.000	409.495.000				
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemohon Izin	3000 izin	599.495.000	409.495.000	409.495.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha	218.534.000	152.455.000	152.455.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	20 Pelaku Usaha	177.000.000	137.000.000	137.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	240 Kegiatan Usaha	203.961.000	120.040.000	120.040.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	115 perusahaan	454.884.000	462.000.000	462.000.000				
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	370 perusahaan	454.884.000	462.000.000	462.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 Kegiatan Usaha.	16.123.500	29.491.000	29.491.000	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	370 Pelaku Usaha	396.359.000	390.107.500	390.107.500	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	42.401.500	42.401.500	42.401.500	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen	233.272.400	163.272.400	163.272.400				
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	52 jenis izin	233.272.400	163.272.400	163.272.400		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	233.272.400	163.272.400	163.272.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			1.495.670.000	941.500.000	1.131.500.000				
7	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	30 %	317.670.000	248.000.000	248.000.000				
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	25 lokasi	317.670.000	248.000.000	248.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	12 Lokasi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	267.670.000	198.000.000	198.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
8	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	20 %	900.000.000	415.500.000	605.500.000				
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	25 Lokasi	900.000.000	415.500.000	605.500.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	900.000.000	415.500.000	605.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
9	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	20 %	278.000.000	278.000.000	278.000.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	20 %	278.000.000	278.000.000	278.000.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	24 Orang	278.000.000	278.000.000	278.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			8.296.179.295	6.575.830.971	6.591.666.784				
2	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	138.312.400	85.350.400	86.160.400				
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	138.312.400	85.350.400	86.160.400		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75 Dokumen	138.312.400	85.350.400	86.160.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
3	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	6.953.329.800	5.632.192.878	5.643.298.691				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	1.847.532.600	1.174.433.278	1.307.139.091		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.012.146.000	362.146.000	492.513.313	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	835.386.600	812.287.278	814.625.778	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	100 %	5.105.797.200	4.457.759.600	4.336.159.600		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	605.000.000	243.722.000	258.922.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	4.500.797.200	4.214.037.600	4.077.237.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
4	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	413.111.000	297.844.200	300.254.200				
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	393.118.000	278.411.200	279.621.200		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pasar Kabupaten/Kota									
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	162.307.000	111.443.600	111.443.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	230.811.000	166.967.600	168.177.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	19.993.000	19.433.000	20.633.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 Laporan	19.993.000	19.433.000	20.633.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
5	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yang telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	241.426.095	224.674.843	224.674.843				
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	241.426.095	224.674.843	224.674.843		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8186 Unit	234.094.095	217.342.843	217.342.843	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	7.332.000	7.332.000	7.332.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	DINAS PERDAGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
6	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100 %	550.000.000	335.768.650	337.278.650				
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 Kali	550.000.000	335.768.650	337.278.650		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	8 UMKM	550.000.000	335.768.650	337.278.650	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS PERDAGANGAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				35.104.433.735	34.924.962.360				
	7	01				KECAMATAN MANGUHARJO			2.867.252.450	11.357.452.367	11.380.513.367				
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	127.352.450	127.352.450	127.352.450				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	65.715.050	65.715.050	65.715.050		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	65.715.050	65.715.050	65.715.050	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KECAMATAN MANGUHARJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemsyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Forum	61.637.400	61.637.400	61.637.400		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tingkat Kecamatan							Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	61.637.400	61.637.400	61.637.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KECAMATAN MANGUHARJO
						Kelurahan Manguharjo			303.750.000	2.076.316.032	2.077.877.032				
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	303.750.000	2.076.316.032	2.077.877.032				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	303.750.000	2.076.316.032	2.077.877.032		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	233.750.000	1.659.616.032	1.662.377.032	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN MANGUHARJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	416.700.000	415.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN MANGUHARJO
						Kelurahan Sogaten			260.700.000	898.500.000	898.500.000				
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	260.700.000	898.500.000	898.500.000				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	260.700.000	898.500.000	898.500.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	190.700.000	555.100.000	555.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN SOGATEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	343.400.000	343.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN SOGATEN
						Kelurahan Patihan			217.650.000	530.095.369	528.595.369				
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	217.650.000	530.095.369	528.595.369				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	217.650.000	530.095.369	528.595.369		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	147.650.000	259.203.000	257.703.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PATIHAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	270.892.369	270.892.369	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PATIHAN
						Kelurahan Ngegong			186.900.000	1.529.586.600	1.528.086.600				
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	186.900.000	1.529.586.600	1.528.086.600				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	186.900.000	1.529.586.600	1.528.086.600		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	116.900.000	1.319.639.000	1.318.139.000	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN NGEGONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	209.947.600	209.947.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN NGEGONG
						Kelurahan Winongo			309.900.000	1.668.229.542	1.668.229.542				
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	309.900.000	1.668.229.542	1.668.229.542				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat	100 %	309.900.000	1.668.229.542	1.668.229.542		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	239.900.000	1.233.131.542	1.233.131.542	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN WINONGO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	435.098.000	435.098.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN WINONGO
						Kelurahan Madiun Lor			334.500.000	969.164.838	969.164.838				
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	100 %	334.500.000	969.164.838	969.164.838				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan								
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	334.500.000	969.164.838	969.164.838		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	264.500.000	475.002.538	475.002.538	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN MADIUN LOR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	494.162.300	494.162.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN MADIUN LOR
						Kelurahan Pangongangan			242.250.000	822.523.146	821.023.146				
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	242.250.000	822.523.146	821.023.146				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	242.250.000	822.523.146	821.023.146		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	172.250.000	514.939.046	513.439.046	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PANGONGANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	307.584.100	307.584.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PANGONGANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kelurahan Nambangan Lor			519.000.000	1.507.878.000	1.533.878.000				
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	519.000.000	1.507.878.000	1.533.878.000				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat	100 %	519.000.000	1.507.878.000	1.533.878.000		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	449.000.000	679.350.000	705.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	828.528.000	828.528.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN NAMBANGAN LOR
						Kelurahan Nambangan Kidul			365.250.000	1.227.806.390	1.227.806.390				
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	365.250.000	1.227.806.390	1.227.806.390				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	365.250.000	1.227.806.390	1.227.806.390		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	295.250.000	680.917.390	680.917.390	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	70.000.000	546.889.000	546.889.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
	7	01				KECAMATAN KARTOHARJO			3.807.382.200	10.791.801.670	10.770.551.670				
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	88,67	153.382.200	116.743.000	116.743.000				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	69.647.400	72.831.600	72.831.600		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Laporan	69.647.400	72.831.600	72.831.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KECAMATAN KARTOHARJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 lembaga/forum	83.734.800	43.911.400	43.911.400		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	83.734.800	43.911.400	43.911.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KECAMATAN KARTOHARJO
						Kelurahan Oro-Oro Ombo			458.000.000	930.294.630	921.294.630				
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan	100%	458.000.000	930.294.630	921.294.630				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							masyarakat di wilayah kecamatan								
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	458.000.000	930.294.630	921.294.630		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	383.000.000	396.590.630	396.590.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	75.000.000	533.704.000	524.704.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN ORO-ORO OMBO
						Kelurahan Sukosari			308.000.000	865.990.230	864.490.230	-			
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	308.000.000	865.990.230	864.490.230	-			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	308.000.000	865.990.230	864.490.230	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	233.000.000	615.886.230	614.386.230	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN SUKOSARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	250.104.000	250.104.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN SUKOSARI
						Kelurahan Klegen			488.000.000	1.522.973.430	1.521.823.430				

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	488.000.000	1.522.973.430	1.521.823.430				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	488.000.000	1.522.973.430	1.521.823.430		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	413.000.000	931.769.430	930.619.430	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KLEGEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	591.204.000	591.204.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KLEGEN
						Kelurahan Rejomulyo			428.000.000	1.407.325.230	1.405.825.230				
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	428.000.000	1.407.325.230	1.405.825.230				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	428.000.000	1.407.325.230	1.405.825.230		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	353.000.000	926.921.230	925.421.230	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN REJOMULYO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	480.404.000	480.404.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN REJOMULYO
						Kelurahan Pilangbango			332.000.000	897.619.630	896.119.630				
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	332.000.000	897.619.630	896.119.630				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	332.000.000	897.619.630	896.119.630		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	257.000.000	603.915.630	602.415.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PILANGBANGO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	293.704.000	293.704.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PILANGBANGO
						Kelurahan Tangrejo			344.000.000	1.203.779.030	1.202.279.030				
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	344.000.000	1.203.779.030	1.202.279.030				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	344.000.000	1.203.779.030	1.202.279.030		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	269.000.000	886.175.030	884.675.030	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN TAWANGREJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	317.604.000	317.604.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN TAWANGREJO
						Kelurahan Kanigoro			512.000.000	1.662.902.230	1.661.402.230				
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	512.000.000	1.662.902.230	1.661.402.230				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	512.000.000	1.662.902.230	1.661.402.230		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	437.000.000	1.024.498.230	1.022.998.230	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KANIGORO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	638.404.000	638.404.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KANIGORO
						Kelurahan Kartoharjo			428.000.000	1.194.725.630	1.193.225.630				
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	428.000.000	1.194.725.630	1.193.225.630				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	428.000.000	1.194.725.630	1.193.225.630		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	353.000.000	716.721.630	715.221.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KARTOHARJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	478.004.000	478.004.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KARTOHARJO
						Kelurahan Kelun			356.000.000	989.448.630	987.348.630				
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	356.000.000	989.448.630	987.348.630				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%	356.000.000	989.448.630	987.348.630		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	281.000.000	649.744.630	647.894.630	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KELUN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 pokmas/ormas	75.000.000	339.704.000	339.454.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KELUN
	7	01				KECAMATAN TAMAN			4.447.441.275	12.955.179.698	12.773.897.323				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	205.891.275	205.891.275	227.622.300				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat	100 %	79.843.925	79.843.925	101.574.950		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	79.843.925	79.843.925	101.574.950	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 Lembaga	126.047.350	126.047.350	126.047.350		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	126.047.350	126.047.350	126.047.350	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KECAMATAN TAMAN
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	599.750.000	1.288.811.408	1.285.733.008				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	599.750.000	1.288.811.408	1.285.733.008		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	529.750.000	502.911.408	501.411.408	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	KELURAHAN MOJOREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	70.000.000	785.900.000	784.321.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN MOJOREJO
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	569.000.000	1.119.633.250	949.833.250				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	569.000.000	1.119.633.250	949.833.250		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	493.000.000	387.333.250	385.833.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PANDEAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	76.000.000	732.300.000	564.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN PANDEAN
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamata	100 %	415.250.000	1.815.404.860	1.809.779.860				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	415.250.000	1.815.404.860	1.809.779.860		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	365.250.000	1.373.904.860	1.368.279.860	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	KELURAHAN BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	441.500.000	441.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN BANJAREJO
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamata	100 %	255.350.000	341.455.600	330.135.600				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	255.350.000	341.455.600	330.135.600		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	205.350.000	196.155.600	193.905.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KUNCEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	145.300.000	136.230.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KUNCEN
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	569.000.000	2.890.633.104	2.889.133.104				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	569.000.000	2.890.633.104	2.889.133.104		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	496.000.000	2.165.533.104	2.164.033.104	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi	KELURAHAN MANISREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	73.000.000	725.100.000	725.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN MANISREJO
17	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	507.500.000	1.716.919.250	1.715.769.250				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	507.500.000	1.716.919.250	1.715.769.250		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	454.500.000	1.100.219.250	1.099.069.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KEJURON
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	53.000.000	616.700.000	616.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN KEJURON
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	390.650.000	731.476.900	729.976.900				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	390.650.000	731.476.900	729.976.900		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	340.650.000	332.955.500	331.455.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN JOSENAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	398.521.400	398.521.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN JOSENAN
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	421.400.000	1.834.051.671	1.826.511.671				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	421.400.000	1.834.051.671	1.826.511.671		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	346.400.000	1.378.951.671	1.376.751.671	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN DEMANGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	75.000.000	455.100.000	449.760.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN DEMANGAN
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	513.650.000	1.010.902.380	1.009.402.380				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	513.650.000	1.010.902.380	1.009.402.380		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	463.650.000	374.002.822	372.502.822	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	50.000.000	636.899.558	636.899.558	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	KELURAHAN TAMAN
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.256.000.000	2.337.465.000	2.687.252.610				
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	1.856.000.000	2.007.700.000	2.357.487.610				
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	44 Orang	1.856.000.000	2.007.700.000	2.357.487.610		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.586.000.000	1.737.700.000	1.935.652.610	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	270.000.000	270.000.000	421.835.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
5	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 %	100.000.000	50.000.000	50.000.000				
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	3 Jenis	100.000.000	50.000.000	50.000.000		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	44 Orang	100.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
6	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda/ bangunan cagar budaya yang dilestarikan	100 %	300.000.000	279.765.000	279.765.000				
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 Obyek	300.000.000	279.765.000	279.765.000		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 Objek	300.000.000	279.765.000	279.765.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

63.904.958.738 65.025.988.181

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Prioritas 3 Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Inklusivitas Sosial

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								RKPD-P 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024		Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			80.488.497.195	241.992.845.691	245.272.392.151				
2	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	186.638.035.800	183.467.572.500	174.988.572.500				
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	6 Dokumen	8.461.200.000	7.203.000.000	7.203.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.461.200.000	7.203.000.000	7.203.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	172.677.135.800	172.491.443.000	163.991.443.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1549 Orang/bulan	172.677.135.800	172.491.443.000	163.991.443.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi	100 %	4.396.850.000	3.141.415.000	3.141.415.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 1	0 1	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	3.915.900.000	2.841.415.000	2.841.415.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 1	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan	480.950.000	300.000.000	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	421.850.000	71.714.500	71.714.500		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 1	0 1	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48 Unit	421.850.000	71.714.500	71.714.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	681.000.000	560.000.000	581.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 1	0 1	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	237 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	382.000.000	270.000.000	270.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	220 Unit	149.000.000	140.000.000	161.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib belajar 9 Tahun	100 %	23.756.691.992	28.141.883.331	38.737.385.112				
	1	0 1	0 2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100 %	5.803.034.624	10.339.092.733	14.741.507.914		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	985.000.000	3.255.000.000	3.120.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	1.173.457.250	199.487.733	199.487.733	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	69 Satuan Pendidikan	708.000.000	283.200.000	283.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Swasta)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	18 Satuan Pendidikan		0,00	2.723.940.000	DAK Non FIsik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 2	2.01	0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	2.936.577.374	6.601.405.000	8.414.780.181	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Sekolah Yang Memenuhi SNP	100 %	9.041.641.368	12.293.218.428	13.966.035.868		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
3	1	0 1	0 2	2.02	0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	3.044.205.503	7.871.120.200	8.416.967.640	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.02	0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5488 Siswa Paket	4.397.111.150	3.975.043.026	3.975.043.026	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.02	0038		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Bid Kreatifitas Peserta Didik	1.286.924.715	393.777.202	413.777.202	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.02	0041		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	313.400.000	53.278.000	53.278.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	###	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Swasta)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	11 Satuan Pendidikan			1.106.970.000	DAK Non FIsik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD Yang Terakreditasi	100 %	7.843.586.000	4.246.492.170	8.627.820.330		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 2	2.03	0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 unit	375.065.000	-	502.508.160	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
4	1	0 1	0 2	2.03	0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Lembaga Peserta Didik	375.065.000	403.686.850	403.686.850	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.03	0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	987 Orang	5.940.000.000	3.564.000.000	3.564.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.03	0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	160 Satuan Pendidikan	1.053.796.000	179.145.320	179.145.320	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.03	0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	150 satuan pendidikan	99.660.000	99.660.000	3.978.480.000	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Lembaga Non Formal Yang Terakreditasi	100 %	1.068.430.000	1.263.080.000	1.402.021.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
5	1	0 1	0 2	2.04	0016		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	340.000.000	534.650.000	673.591.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	2.04	0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	728.430.000	728.430.000	728.430.000	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 3				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100 %	5.225.228.500	1.201.204.299	1.201.204.299				
	1	0 1	0 3	2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 standar pendidikan pada kualitas standard proses dan penilaian pendidikan	100 %	3.823.812.500	962.963.579	962.963.579		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 3	2.01	0002		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	100% Dokumen	1.222.636.500	207.848.205	207.848.205	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
6	1	0 1	0 3	2.01	0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	959.820.500	163.088.287	163.088.287	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 3	2.01	0007		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1.641.355.500	592.027.087	592.027.087	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 3	2.02			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase sekolah yang memenuhi SNP	100 %	1.401.416.000	238.240.720	238.240.720		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 3	2.02	0002		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1.401.416.000	238.240.720	238.240.720	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 4				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	67 %	3.113.475.000	1.003.705.561	1.053.205.561				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1	0 1	0 4	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	67 %	3.113.475.000	1.003.705.561	1.053.205.561		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 4	2.01		0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1.370.000.000	532.900.000	532.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
	1	0 1	0 4	2.01		0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1.743.475.000	470.805.561	520.305.561	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PENDIDIKAN
							SDN 01 Kartoharjo			654.864.545	428.190.000	428.190.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	654.864.545	428.190.000	428.190.000				
8	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	654.864.545	428.190.000	428.190.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	317.790.000	317.790.000	317.790.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 KARTOHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	337.074.545	110.400.000	110.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 KARTOHARJO
							SDN 02 Kartoharjo			410.563.072	174.150.000	181.350.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	410.563.072	174.150.000	181.350.000				
9	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	410.563.072	174.150.000	181.350.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	94.050.000	44.550.000	44.550.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 KARTOHARJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	316.513.072	129.600.000	136.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 KARTOHARJO
							SDN 01 Klegen			765.540.648	430.320.000	484.520.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	765.540.648	430.320.000	484.520.000				
10	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	765.540.648	430.320.000	484.520.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	324.720.000	324.720.000	359.720.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	440.820.648	105.600.000	124.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 KLEGEN
							SDN 02 Klegen			390.050.587	220.740.000	250.440.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	390.050.587	220.740.000	250.440.000				
11	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	390.050.587	220.740.000	250.440.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	124.740.000	124.740.000	147.240.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 KLEGEN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	265.310.587	96.000.000	103.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 KLEGEN
							SDN 03 Klegen			696.704.824	441.900.000	456.300.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	696.704.824	441.900.000	456.300.000				
12	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	696.704.824	441.900.000	456.300.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	326.700.000	326.700.000	326.700.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 KLEGEN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	370.004.824	115.200.000	129.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 KLEGEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 04 Klegen			229.808.326	151.200.000	151.200.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	229.808.326	151.200.000	151.200.000				
13	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	229.808.326	151.200.000	151.200.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	79.200.000	79.200.000	79.200.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 04 KLEGEN
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	150.608.326	72.000.000	72.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 04 KLEGEN
							SDN Oro Oro Ombo			687.144.270	295.470.000	307.470.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	687.144.270	295.470.000	307.470.000				
14	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	687.144.270	295.470.000	307.470.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	230.670.000	230.670.000	230.670.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN ORO ORO OMBO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	456.474.270	64.800.000	76.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN ORO ORO OMBO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Rejomulyo			645.957.740	219.690.000	249.390.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	645.957.740	219.690.000	249.390.000				
15	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	645.957.740	219.690.000	249.390.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	130.680.000	90.090.000	112.590.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 REJOMULYO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	515.277.740	129.600.000	136.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 REJOMULYO
							SDN 01 Kanigoro			313.060.835	122.100.000	185.500.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	313.060.835	122.100.000	185.500.000				
16	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	313.060.835	122.100.000	185.500.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	69.300.000	69.300.000	91.800.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 KANIGORO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	243.760.835	52.800.000	93.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 KANIGORO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 02 Kanigoro			451.538.504	233.220.000	255.720.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	451.538.504	233.220.000	255.720.000				
17	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	451.538.504	233.220.000	255.720.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	156.420.000	156.420.000	178.920.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 KANIGORO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	295.118.504	76.800.000	76.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 KANIGORO
							SDN 03 Kanigoro			449.720.576	251.430.000	251.430.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	449.720.576	251.430.000	251.430.000				
18	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	449.720.576	251.430.000	251.430.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	155.430.000	155.430.000	155.430.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 KANIGORO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	294.290.576	96.000.000	96.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 KANIGORO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN Sukosari			274.521.897	99.720.000	106.920.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	274.521.897	99.720.000	106.920.000				
19	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	274.521.897	99.720.000	106.920.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	27.720.000	27.720.000	27.720.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN SUKOSARI
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	246.801.897	72.000.000	79.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN SUKOSARI
							SDN Pilangbango			727.952.492	333.990.000	348.384.679				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	727.952.492	333.990.000	348.384.679				
20	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	727.952.492	333.990.000	348.384.679		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	218.790.000	218.790.000	218.790.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN PILANGBANGO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	509.162.492	115.200.000	129.594.679	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN PILANGBANGO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Tawangrejo			359.823.917	212.190.000	219.390.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	359.823.917	212.190.000	219.390.000				
21	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	359.823.917	212.190.000	219.390.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	159.390.000	159.390.000	159.390.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 TAWANGREJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	200.433.917	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 TAWANGREJO
							SDN 02 Tawangrejo			319.959.792	119.730.000	126.930.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	319.959.792	119.730.000	126.930.000				
22	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	319.959.792	119.730.000	126.930.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	86.130.000	86.130.000	86.130.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 TAWANGREJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	233.829.792	33.600.000	40.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN Kelun			463.736.367	269.100.000	291.600.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	463.736.367	269.100.000	291.600.000				
23	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	463.736.367	269.100.000	291.600.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	168.300.000	168.300.000	190.800.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN KELUN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	295.436.367	100.800.000	100.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN KELUN
							SDN 01 Manguharjo			678.883.209	385.860.000	380.910.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	678.883.209	385.860.000	380.910.000				
24	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	678.883.209	385.860.000	380.910.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	251.460.000	251.460.000	246.510.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MANGUHARJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	427.423.209	134.400.000	134.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Nambangan Lor			763.637.332	448.620.000	473.620.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	763.637.332	448.620.000	473.620.000				
25	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	763.637.332	448.620.000	473.620.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	295.020.000	295.020.000	320.020.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 NAMBANGAN LOR
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	468.617.332	153.600.000	153.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 NAMBANGAN LOR
							SDN 02 Nambangan Lor			411.324.952	231.480.000	273.780.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	411.324.952	231.480.000	273.780.000				
26	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	411.324.952	231.480.000	273.780.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	130.680.000	130.680.000	153.180.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 NAMBANGAN LOR
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	280.644.952	100.800.000	120.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 NAMBANGAN LOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Madiun Lor			319.112.966	163.080.000	170.280.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	319.112.966	163.080.000	170.280.000				
27	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	319.112.966	163.080.000	170.280.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	91.080.000	91.080.000	91.080.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MADIUN LOR
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	228.032.966	72.000.000	79.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MADIUN LOR
							SDN 02 Madiun Lor			285.277.700	144.870.000	152.070.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	285.277.700	144.870.000	152.070.000				
28	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	285.277.700	144.870.000	152.070.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	92.070.000	92.070.000	92.070.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 MADIUN LOR
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	193.207.700	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 MADIUN LOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 03 Madiun Lor			1.115.378.038	728.520.000	733.320.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.115.378.038	728.520.000	733.320.000				
29	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.115.378.038	728.520.000	733.320.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	502.920.000	502.920.000	502.920.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 MADIUN LOR
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	612.458.038	225.600.000	230.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 MADIUN LOR
							SDN 04 Madiun Lor			557.991.987	374.940.000	374.940.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	557.991.987	374.940.000	374.940.000				
30	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	557.991.987	374.940.000	374.940.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	302.940.000	302.940.000	302.940.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 04 MADIUN LOR
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	255.051.987	72.000.000	72.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 04 MADIUN LOR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 05 Madiun Lor			808.429.735	690.630.000	725.630.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	808.429.735	690.630.000	725.630.000				
31	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	808.429.735	690.630.000	725.630.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	472.230.000	472.230.000	507.230.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 05 MADIUN LOR
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	336.199.735	218.400.000	218.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 05 MADIUN LOR
							SDN 01 Nambangan Kidul			570.567.384	194.010.000	194.010.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	570.567.384	194.010.000	194.010.000				
32	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	570.567.384	194.010.000	194.010.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	161.370.000	98.010.000	98.010.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	409.197.384	96.000.000	96.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 NAMBANGAN KIDUL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 02 Nambangan Kidul			313.892.763	166.650.000	173.850.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	313.892.763	166.650.000	173.850.000				
33	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	313.892.763	166.650.000	173.850.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	113.850.000	113.850.000	113.850.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	200.042.763	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 NAMBANGAN KIDUL
							SDN 03 Nambangan Kidul			667.373.524	452.580.000	452.580.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	667.373.524	452.580.000	452.580.000				
34	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	667.373.524	452.580.000	452.580.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	298.980.000	298.980.000	298.980.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	368.393.524	153.600.000	153.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 NAMBANGAN KIDUL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Winongo			642.138.010	459.510.000	510.610.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	642.138.010	459.510.000	510.610.000				
35	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	642.138.010	459.510.000	510.610.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	305.910.000	305.910.000	305.910.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 WINONGO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	336.228.010	153.600.000	204.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 WINONGO
							SDN 02 Winongo			232.886.335	108.240.000	137.940.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	232.886.335	108.240.000	137.940.000				
36	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	232.886.335	108.240.000	137.940.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	55.440.000	55.440.000	77.940.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 WINONGO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	177.446.335	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 WINONGO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN Ngegong			646.859.821	219.120.000	226.320.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	646.859.821	219.120.000	226.320.000				
37	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	646.859.821	219.120.000	226.320.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	166.320.000	166.320.000	166.320.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN NGEGONG
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	480.539.821	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN NGEGONG
							SDN Patihan			561.475.292	355.920.000	355.920.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	561.475.292	355.920.000	355.920.000				
38	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	561.475.292	355.920.000	355.920.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	245.520.000	245.520.000	245.520.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN PATIHAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	315.955.292	110.400.000	110.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN PATIHAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Pangongangan			792.386.487	492.630.000	527.630.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	792.386.487	492.630.000	527.630.000				
39	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	792.386.487	492.630.000	527.630.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	324.720.000	274.230.000	309.230.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 PANGONGANGAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	467.666.487	218.400.000	218.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 PANGONGANGAN
							SDN Sogaten			401.047.037	222.090.000	229.290.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	401.047.037	222.090.000	229.290.000				
40	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	401.047.037	222.090.000	229.290.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	169.290.000	169.290.000	169.290.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN SOGATEN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	231.757.037	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN SOGATEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Taman			991.866.420	655.290.000	701.890.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	991.866.420	655.290.000	701.890.000				
41	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	991.866.420	655.290.000	701.890.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	446.490.000	446.490.000	471.490.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 TAMAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	545.376.420	208.800.000	230.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 TAMAN
							SDN 02 Taman			595.406.639	147.240.000	169.740.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	595.406.639	147.240.000	169.740.000				
42	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	595.406.639	147.240.000	169.740.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	75.240.000	75.240.000	97.740.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 TAMAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	520.166.639	72.000.000	72.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 TAMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 03 Taman			318.859.611	186.090.000	244.390.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	318.859.611	186.090.000	244.390.000				
43	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	318.859.611	186.090.000	244.390.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	90.090.000	90.090.000	90.090.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 TAMAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	228.769.611	96.000.000	154.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 TAMAN
							SDN 01 Pandean			647.048.303	442.740.000	447.540.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	647.048.303	442.740.000	447.540.000				
44	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	647.048.303	442.740.000	447.540.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	322.740.000	322.740.000	322.740.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 PANDEAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	324.308.303	120.000.000	124.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 PANDEAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 02 Pandean			656.469.154	421.410.000	435.810.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	656.469.154	421.410.000	435.810.000				
45	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	656.469.154	421.410.000	435.810.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	315.810.000	315.810.000	315.810.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 PANDEAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	340.659.154	105.600.000	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 PANDEAN
							SDN Banjarejo			749.216.821	533.250.000	564.350.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	749.216.821	533.250.000	564.350.000				
46	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	749.216.821	533.250.000	564.350.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	410.850.000	410.850.000	410.850.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN BANJAREJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	338.366.821	122.400.000	153.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Mojorejo			339.026.343	206.430.000	206.430.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	339.026.343	206.430.000	206.430.000				
47	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	339.026.343	206.430.000	206.430.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	96.030.000	96.030.000	96.030.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MOJOREJO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	242.996.343	110.400.000	110.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MOJOREJO
							SDN 02 Mojorejo			892.067.393	628.110.000	672.710.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	892.067.393	628.110.000	672.710.000				
48	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	892.067.393	628.110.000	672.710.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	484.110.000	484.110.000	519.110.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 MOJOREJO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	407.957.393	144.000.000	153.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 MOJOREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Manisrejo			690.376.900	414.930.000	451.030.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	690.376.900	414.930.000	451.030.000				
49	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	690.376.900	414.930.000	451.030.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	323.730.000	323.730.000	323.730.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MANISREJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	366.646.900	91.200.000	127.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 MANISREJO
							SDN 02 Manisrejo			590.553.291	391.320.000	405.720.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	590.553.291	391.320.000	405.720.000				
50	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	590.553.291	391.320.000	405.720.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	304.920.000	304.920.000	304.920.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 MANISREJO
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	285.633.291	86.400.000	100.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 MANISREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 03 Manisrejo			430.336.007	211.200.000	211.200.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	430.336.007	211.200.000	211.200.000				
51	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	430.336.007	211.200.000	211.200.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	158.400.000	158.400.000	158.400.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 MANISREJO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	271.936.007	52.800.000	52.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 MANISREJO
							SDN 04 Manisrejo			527.949.571	280.560.000	280.560.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	527.949.571	280.560.000	280.560.000				
52	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	527.949.571	280.560.000	280.560.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	182.160.000	182.160.000	182.160.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 04 MANISREJO
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	345.789.571	98.400.000	98.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 04 MANISREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Demangan			309.428.772	221.730.000	221.730.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	309.428.772	221.730.000	221.730.000				
53	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	309.428.772	221.730.000	221.730.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	125.730.000	125.730.000	125.730.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 DEMANGAN
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	183.698.772	96.000.000	96.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 DEMANGAN
							SDN 02 Demangan			400.251.965	202.290.000	231.990.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	400.251.965	202.290.000	231.990.000				
54	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	400.251.965	202.290.000	231.990.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	149.490.000	149.490.000	171.990.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 DEMANGAN
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	250.761.965	52.800.000	60.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 DEMANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 01 Josenan			457.198.219	264.150.000	268.950.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	457.198.219	264.150.000	268.950.000				
55	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	457.198.219	264.150.000	268.950.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	163.350.000	163.350.000	163.350.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 JOSENAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	293.848.219	100.800.000	105.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 01 JOSENAN
							SDN 02 Josenan			506.120.784	206.850.000	236.550.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	506.120.784	206.850.000	236.550.000				
56	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	506.120.784	206.850.000	236.550.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	173.250.000	173.250.000	195.750.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 JOSENAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	332.870.784	33.600.000	40.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 02 JOSENAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN 03 Josenan			430.710.728	143.280.000	150.480.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	430.710.728	143.280.000	150.480.000				
57	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	430.710.728	143.280.000	150.480.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	71.280.000	71.280.000	71.280.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 JOSENAN
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	359.430.728	72.000.000	79.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN 03 JOSENAN
							SDN Kejuron			203.147.306	129.240.000	129.240.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	203.147.306	129.240.000	129.240.000				
58	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	203.147.306	129.240.000	129.240.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01		0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	35.640.000	35.640.000	35.640.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN KEJURON
	1	0 1	0 2	2.01		0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	167.507.306	93.600.000	93.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN KEJURON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SDN Kuncen			271.696.692	178.020.000	178.020.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	271.696.692	178.020.000	178.020.000				
59	1	0 1	0 2	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	271.696.692	178.020.000	178.020.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.01	0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	77.220.000	77.220.000	77.220.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN KUNCEN
	1	0 1	0 2	2.01	0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	194.476.692	100.800.000	100.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SDN KUNCEN
							SMPN 1			2.171.835.519	1.127.210.000	1.127.210.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	2.171.835.519	1.127.210.000	1.127.210.000				
60	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	2.171.835.519	1.127.210.000	1.127.210.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	920.810.000	920.810.000	920.810.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 1
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1.251.025.519	206.400.000	206.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SMPN 2			1.558.708.997	1.229.060.000	1.254.060.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.558.708.997	1.229.060.000	1.254.060.000				
61	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.558.708.997	1.229.060.000	1.254.060.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02		0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	902.660.000	902.660.000	927.660.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 2
	1	0 1	0 2	2.02		0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	656.048.997	326.400.000	326.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 2
							SMPN 3			1.488.606.943	849.200.000	884.200.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.488.606.943	849.200.000	884.200.000				
62	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.488.606.943	849.200.000	884.200.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02		0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	677.600.000	677.600.000	712.600.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 3
	1	0 1	0 2	2.02		0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	811.006.943	171.600.000	171.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SMPN 4			1.734.121.614	1.174.170.000	1.174.170.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.734.121.614	1.174.170.000	1.174.170.000				
63	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.734.121.614	1.174.170.000	1.174.170.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1.012.770.000	1.012.770.000	1.012.770.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 4
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	721.351.614	161.400.000	161.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 4
							SMPN 5			1.337.158.016	658.730.000	682.730.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.337.158.016	658.730.000	682.730.000				
64	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.337.158.016	658.730.000	682.730.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	499.730.000	499.730.000	499.730.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 5
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	837.428.016	159.000.000	183.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SMPN 6			1.517.550.531	922.220.000	922.220.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.517.550.531	922.220.000	922.220.000				
65	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.517.550.531	922.220.000	922.220.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	728.420.000	728.420.000	728.420.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 6
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	789.130.531	193.800.000	193.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 6
							SMPN 7			1.670.655.890	1.156.660.000	1.156.660.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.670.655.890	1.156.660.000	1.156.660.000				
66	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.670.655.890	1.156.660.000	1.156.660.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	854.260.000	854.260.000	854.260.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 7
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	816.395.890	302.400.000	302.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SMPN 8			1.195.976.910	668.570.000	722.770.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.195.976.910	668.570.000	722.770.000				
67	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.195.976.910	668.570.000	722.770.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	601.370.000	601.370.000	636.370.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 8
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	594.606.910	67.200.000	86.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 8
							SMPN 9			1.340.446.710	668.370.000	738.370.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.340.446.710	668.370.000	738.370.000				
68	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.340.446.710	668.370.000	738.370.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	504.570.000	504.570.000	574.570.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 9
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	835.876.710	163.800.000	163.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 9

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SMPN 10			1.783.915.969	841.780.000	841.780.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.783.915.969	841.780.000	841.780.000				
69	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.783.915.969	841.780.000	841.780.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	578.380.000	578.380.000	578.380.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 10
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	1.205.535.969	263.400.000	263.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 10
							SMPN 11			1.572.365.908	987.360.000	987.360.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.572.365.908	987.360.000	987.360.000				
70	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.572.365.908	987.360.000	987.360.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	769.560.000	769.560.000	769.560.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 11
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	802.805.908	217.800.000	217.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							SMPN 12			1.212.805.580	816.610.000	821.410.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.212.805.580	816.610.000	821.410.000				
2	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.212.805.580	816.610.000	821.410.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	654.610.000	654.610.000	654.610.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 12
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	558.195.580	162.000.000	166.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 12
							SMPN 13			1.415.044.045	976.960.000	987.760.000				
	1	0 1	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	1.415.044.045	976.960.000	987.760.000				
	1	0 1	0 2	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	1.415.044.045	976.960.000	987.760.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	817.960.000	817.960.000	817.960.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 13
	1	0 1	0 2	2.02	0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	597.084.045	159.000.000	169.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SMPN 14			776.567.188	395.560.000	395.560.000				
	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	776.567.188	395.560.000	395.560.000				
	1	0 1	0 2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	776.567.188	395.560.000	395.560.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 1	0 2	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	309.760.000	309.760.000	309.760.000	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 14
	1	0 1	0 2	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	466.807.188	85.800.000	85.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SMPN 14
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				256.304.426.840	263.901.265.131				
	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,33 %	49.655.530.087	41.329.077.357	45.759.962.120				
	1	0 2	0 2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan mencapai Target	90,22 %	8.159.893.777	3.734.304.140	6.772.574.335		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2,01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	-	-	240.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,01	0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	-	-	220.326.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.01	0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0	668.847.000	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.01	0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	30 Unit	2.451.544.450	609.074.064	1.327.083.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.01	0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	0	132.697.200	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.01	0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	432 Unit	219.940.000	-	297.792.042	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.01	0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket	4.686.865.127	3.125.230.076	4.644.460.593	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,01	0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	-	-	42.912.700	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar mencapai Target	83,33 %	41.495.636.310	37.594.773.217	38.987.387.785		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2430 Orang	338.602.000	296.996.200	301.863.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2319 Orang	105.463.300	13.936.800	13.936.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2209 Orang	99.706.200	64.698.800	109.723.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9023 Orang	511.395.700	364.693.000	535.214.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	175.581.300	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88785 Orang	167.311.500	-	48.466.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02	0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	22.522.000	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	22.640.000	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10755 Orang	12.370.000	246.288.000	196.537.500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	383 orang	144.155.900	50.748.000	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4618 Orang	313.403.800	-	813.394.600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6240 Orang	307.413.000	61.200.000	105.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	5.348.943.400	1.416.196.900	194.174.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	343.884.000	48.158.500	139.609.068	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	168.989.100	24.473.500	210.075.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2,02	0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	154.252.800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	1	0 2	0 2	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	53.468.400	-	30.083.400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 orang	78.681.900	14.400.000	27.616.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	416.911.100	422.163.600	1.269.019.400	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02	0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen	28.862.596.000	32.429.342.000	32.495.324.800	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2,02	0028		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	18 Paket	-	-	29.686.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	1	0 2	0 2	2.02	0029		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	1.132.434.800	402.506.900	402.506.900	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02		0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen	2.031.618.000	1.088.891.017	1.117.659.017	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02		0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0	145.602.000	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2,02		0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	-	-	1.500.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02		0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	574.210.710	635.680.000	670.680.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	1	0 2	0 2	2.02		0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	43.266.000	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02		0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	500 Orang	31.896.200	14.400.000	14.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 2	2.02		0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	42.570.000	-	11.402.800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0046			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	-	-	80.161.600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 3					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang Sesuai Standar	92%	240.694.600	722.985.000	442.559.000				
1	1	0 2	0 3	2,02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	-	-	69.282.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 3	2,02	0003			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Dokumen	-	-	69.282.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 3	2.03				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	92%	240.694.600	722.985.000	373.277.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 3	2.03	0001			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	240.694.600	722.985.000	373.277.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 4					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	91 %	135.964.000	-	305.327.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 4	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	89 %	32.464.000	-	63.786.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 4	2.01	0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	32.464.000	-	63.786.000	DAK Non Fisik-BO KKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 4	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	89 %	103.500.000	-	241.541.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 4	2.04	0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen	103.500.000	-	241.541.000	DAK Non Fisik-BO KKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	4.758.151.173	3.726.513.000	3.888.168.800				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 5	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100 %	706.415.350	26.400.000	262.749.600		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 5	2.01	0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	706.415.350	26.400.000	262.749.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 5	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	4.051.735.823	3.700.113.000	3.625.419.200		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 5	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	4.051.735.823	3.700.113.000	3.625.419.200	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85	62.486.290.876	58.839.132.504	57.044.931.312				
	1	0 2	0 1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 %	381.431.000	275.390.950	275.390.950		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 2	0 1	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	185.864.600	74.362.600	74.362.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	131.618.400	184.565.600	184.565.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	1	0 2	0 1	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	63.948.000	16.462.750	16.462.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100%	57.143.207.296	55.890.086.969	53.903.223.077		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 2	0 1	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	486 Orang/bulan	57.143.207.296	55.890.086.969	53.903.223.077	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.983.807.300	1.830.080.285	1.830.080.285		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 2	0 1	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.037.547.300	1.280.080.285	1.280.080.285	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	946.260.000	550.000.000	550.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	1	0 2	0 1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.319.052.680	219.375.000	355.306.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 2	0 1	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	130.469.150	126.417.000	126.417.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.188.583.530	92.958.000	228.889.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	658.792.600	624.199.300	680.931.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 1	2.09		0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit	402.488.650	389.312.000	389.312.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.09		0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16.165.850	19.013.900	75.745.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	0 2	0 1	2.09		0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	280 Unit	240.138.100	215.873.400	215.873.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Rumah Sakit Umum Daerah			143.586.849.226	134.678.590.979	138.870.967.899				
	1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Mencapai Target	83,33 %	30.887.271.500	11.852.436.279	12.851.636.279				
	1	0 2	0 2	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target	90,22 %	30.887.271.500	11.852.436.279	12.851.636.279		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2.01		0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	362.532.000	621.878.000	621.878.000	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.01	0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	10.263.483.000	337.124.666	337.124.666	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0 2	0 2	2.01	0022		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	13.135.456.500	3.767.633.613	3.767.633.613	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0 2	0 2	2.01	0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	7.125.800.000	7.125.800.000	8.125.000.000	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0 2	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85	112.699.577.726	122.826.154.700	126.019.331.620				
	1	0 2	0 1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100%	40.257.177.726	37.383.754.700	32.716.129.752		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 2	0 1	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang/bulan	40.257.177.726	37.383.754.700	32.716.129.752	PENDAPATAN DARI BLUD, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang	100%	442.400.000	442.400.000	442.400.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	1	0 2	0 1	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	442.400.000	442.400.000	442.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
	1	0 2	0 1	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100%	72.000.000.000	85.000.000.000	92.860.801.868		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
8	1	0 2	0 1	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	72.000.000.000	85.000.000.000	92.860.801.868	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN
							Puskesmas Manguharjo			3.025.786.500	2.912.411.500	2.916.816.000				
	1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	3.025.786.500	2.912.411.500	2.790.584.000				
	1	0 2	0 2	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33%	3.025.786.500	2.912.411.500	2.790.553.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2,02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	-	-	10.680.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 Orang	-	-	51.752.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3298 Orang	-	-	20.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang	-	-	1.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	413.168.000	236.793.000	579.258.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	-	-	4.050.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	-	-	33.985.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
10	1	0 2	0 2	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	783.268.500	783.268.500	21.450.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.829.350.000	1.892.350.000	2.013.055.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	-	-	7.683.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	-	-	2.400.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30 Orang	-	-	1.550.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	-	-	250.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
9	1	0 2	0 2	2,02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	-	-	8.160.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	-	-	35.280.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
	1	0 2	0 2	2,03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	-	-	31.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2,03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	31.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	-	-	126.232.000				
	1	02	05	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	-	-	126.232.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	02	05	2,03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	-	-	126.232.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS MANGUHARJO
							Puskesmas Ngegong			2.625.295.500	2.556.469.500	2.525.521.000				
11	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33%	2.625.295.500	2.556.469.500	2.394.639.000				
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33%	2.625.295.500	2.556.469.500	2.394.629.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang	-	-	10.120.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	270 Orang	-	-	68.450.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7905 Orang	-	-	20.400.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	-	-	3.500.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2135 Orang	-	-	5.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	391.692.000	259.866.000	520.433.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	-	-	3.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	-	-	46.760.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	778.386.500	778.386.500	18.650.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.455.217.000	1.518.217.000	1.663.606.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	-	-	7.675.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	-	250.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32 Orang	-	-	800.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	-	-	50.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	-	-	3.360.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	-	-	22.575.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	-	-	10.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 2	2,03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	10.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	-	-	130.882.000				
	1	0 2	0 5	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	-	-	130.882.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG
	1	0 2	0 5	2,03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	-	-	130.882.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS NGEGONG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12							Puskesmas Sukosari			2.931.912.622	2.674.018.500	2.778.153.000				
	1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	2.931.912.622	2.674.018.500	2.647.201.000				
	1	0 2	0 2	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.931.912.622	2.674.018.500	2.647.189.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2,02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	412 orang	-	-	13.350.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	407 orang	-	-	66.945.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2656 orang	-	-	8.750.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 orang	-	-	1.200.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	455 orang	-	-	4.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	559.736.000	238.842.000	661.968.600	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	-	-	5.300.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 dokumen	-	-	53.436.200	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	832.176.622	832.176.500	17.900.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.540.000.000	1.603.000.000	1.783.593.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	-	-	7.677.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	-	-	250.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 orang	-	-	600.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 orang	-	-	1.200.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	-	-	8.219.200	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	-	-	12.800.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	-	-	12.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 2	2,03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	12.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	-	-	130.952.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 5	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	-	-	130.952.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
	1	0 2	0 5	2,03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	-	-	130.952.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS SUKOSARI
13							Puskesmas Tawangrejo			2.762.152.150	2.546.818.500	2.647.729.000				
	1	0 2	0 2				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	2.762.152.150	2.546.818.500	2.520.959.000				
	1	0 2	0 2	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	2.762.152.150	2.546.818.500	2.520.935.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2,02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang	0	-	35.046.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	0	-	36.638.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2049 Orang	0	-	13.200.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	0	-	400.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	342 Orang	0	-	2.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	431.520.000	158.004.000	504.863.600	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0	-	5.100.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	0	-	36.799.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	866.392.150	861.574.500	21.800.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.464.240.000	1.527.240.000	1.826.613.000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	0	-	200.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	0	-	400.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	0	-	400.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0	-	1.917.400	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0	-	35.558.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	-	-	24.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	0 2	0 2	2,03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	0	-	24.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	-	-	126.770.000				
	1	02	05	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	-	-	126.770.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
	1	02	05	2,03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0	-	126.770.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS TAWANGREJO
							Puskesmas Banjarejo			3.287.477.000	3.191.861.000	3.505.429.000				
14	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.287.477.000	3.191.861.000	3.375.450.000				
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	3.287.477.000	3.191.861.000	3.375.390.200		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	523 Orang	-	-	12.240.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang	-	-	29.584.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7678 Orang	-	-	16.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	266 Orang	-	-	5.750.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	662 Orang	-	-	2.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	672.959.000	451.343.000	900.673.200	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	-	-	2.050.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	-	-	70.603.800	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	886.518.000	886.518.000	32.100.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.728.000.000	1.854.000.000	2.265.412.200	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	-	-	8.147.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	-	600.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	37 Orang	-	-	250.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40 Orang	-	-	1.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	-	-	10.860.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	-	-	18.120.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	-	-	59.800		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 2	2,03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	59.800	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	-	-	129.979.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 5	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	-	-	129.979.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO
	1	0 2	0 5	2,03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	-	-	129.979.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS BANJAREJO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15						Puskesmas Demangan			3.246.163.000	3.126.549.000	3.215.701.000				
	1	0 2	0 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	83,33 %	3.246.163.000	3.126.549.000	3.090.216.000				
	1	0 2	0 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	83,33 %	3.246.163.000	3.126.549.000	3.090.152.600		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 2	0 2	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	483 Orang	-	-	11.440.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	451 Orang	-	-	18.208.500	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7880 Orang	-	-	8.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang	-	-	1.500.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	509 Orang	-	-	11.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	579.328.000	396.714.000	825.477.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2,02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	-	-	5.050.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2,02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	-	-	49.682.500	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2.02	0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	816.835.000	816.835.000	26.250.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	1.850.000.000	1.913.000.000	2.040.944.600	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2,02	0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	-	-	8.070.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	02	2,02	0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	-	-	300.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 2	0 2	2,02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22 orang	-	-	1.500.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0041		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 orang	-	-	200.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	-	-	8.590.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	-	-	73.940.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	-	-	63.400		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 2	2,03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	63.400	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	0 2	0 5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	86,43%	-	-	125.485.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	02	05	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri Persentase Posbindu PTM berstrata puri Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri Persentase Poskestren berstrata puri Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri Persentase Posyandu Balita berstrata puri Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	92,59% 63.04% 100% 73,33% 62,5% 100% 100%	-	-	125.485.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
	1	02	05	2,03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	-	-	125.485.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	PUSKESMAS DEMANGAN
16	1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			23.124.055.787	20.158.315.975	21.484.479.888				
	1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	66 %	4.351.382.713	3.273.253.494	3.265.196.184				
	1	06	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	66 %	4.351.382.713	3.273.253.494	3.265.196.184		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	06	02	2.03	0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang	682.439.273	410.744.800	386.354.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	02	2.03	0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	53.291.776	51.075.184	47.564.704	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0003		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga	370.112.196	124.056.110	119.188.280	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	3.245.539.468	2.687.377.400	2.712.088.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 %	4.534.633.481	4.546.240.061	4.480.889.674				
	1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	3.944.103.151	3.939.483.626	3.857.533.239		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	06	04	2.01	0001		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	170.896.000	982.072.100	942.717.903	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	04	2.01	0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	15.332.431	394.183.126	313.326.936	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	26.308.000	26.269.000	26.269.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0004		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	22.560.000	18.128.000	18.128.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.500.000	9.500.000	9.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	3.627.186.820	2.089.747.800	2.144.307.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	72.319.900	419.583.600	403.283.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %	590.530.330	606.756.435	623.356.435		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	06	04	2.02	0002		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	209.180.500	257.475.800	272.075.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0003		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	86.366.000	89.906.700	89.906.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0004		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Orang	42.790.000	7.284.800	9.284.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0005		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20.242.000	20.134.000	20.134.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0006		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	25.311.830	25.309.635	25.309.635	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0007		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	73.800.000	79.150.000	79.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	04	2.02		0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	121.560.000	118.431.500	118.431.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	1	06	04	2.02		0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	11.280.000	9.064.000	9.064.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91 %	13.234.529.873	11.721.059.720	13.120.631.330				
	1	06	05	2.01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	95 %	7.714.520	5.383.000	4.183.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	06	05	2.01		0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	3.524.400	3.300.000	2.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.01		0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	3.994.320	1.883.000	1.883.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.01		0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	195.800	200.000	200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			13.226.815.353	11.715.676.720	13.116.448.330		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	05	2.02	0001		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang	1.052.819.092	1.109.347.000	1.105.190.422	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	574.054.895	266.801.600	278.544.300	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Keluarga	11.294.425.192	10.122.963.760	10.747.233.693	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	305.516.174	216.564.360	985.479.915	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 %	841.306.615	447.562.100	447.562.100				
	1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100 %	71.085.159	52.095.100	52.095.100		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	06	06	2.01	0001		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	34.971.362	27.937.500	27.937.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 6	0 6	2.01	0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	13.507.797	15.157.600	15.157.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 6	2.01	0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	22.606.000	9.000.000	9.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 6	2.02			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100 %	770.221.456	395.467.000	395.467.000		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 6	0 6	2.02	0001		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	160.900.608	18.182.000	18.182.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 6	2.02	0002		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	609.320.848	377.285.000	377.285.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	0 6	0 7				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan AC dalam kondisi baik	100 %	162.203.105	170.200.600	170.200.600				
	1	0 6	0 7	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 %	162.203.105	170.200.600	170.200.600		Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	06	07	2.01		0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam	162.203.105	170.200.600	170.200.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya LokaL (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			534.981.000	534.065.000	535.065.000				
	2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	389.125.000	388.209.000	391.234.000				
4	2	09	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	100 %	224.125.000	223.209.000	226.234.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	09	03	2.01		0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	173.500.000	172.584.000	175.609.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01		0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	17.200.000	17.200.000	17.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.01		0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 Laporan	33.425.000	33.425.000	33.425.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan Energi	2000 kkal / kapita	165.000.000	165.000.000	165.000.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 9	0 3	2.04		0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	43.700.000	43.700.000	43.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0 9	0 3	2.04		0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	121.300.000	121.300.000	121.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0 9	0 4				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	22 %	58.200.000	58.200.000	58.200.000				
	2	0 9	0 4	2.01			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 Dokumen	58.200.000	58.200.000	58.200.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 9	0 4	2.01		0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	58.200.000	58.200.000	58.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	2	0 9	0 5				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	87.656.000	87.656.000	85.631.000				
	2	0 9	0 5	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 Lokasi	87.656.000	87.656.000	85.631.000		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 9	0 5	2.01		0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	60.656.000	60.656.000	60.656.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman	27.000.000	27.000.000	24.975.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	PP5 - Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.265.102.884	2.923.247.000				
	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	13 SSK 7 Kampung KB	363.357.000	267.010.000	213.907.000				
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	0	41.429.000	-	-		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0	41.429.000	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data keluarga yang diupdating	100 %	321.928.000	267.010.000	213.907.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	246.238.000	191.320.000	165.361.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 4	0 2	2.02		0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	27 Dokumen	75.690.000	75.690.000	48.546.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 3				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	6,74 %	4.586.488.098	2.603.332.884	1.355.866.000				
2	2	1 4	0 3	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	990.945.000	774.270.000	949.314.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1 4	0 3	2.01		0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	85.952.000	80.000.000	140.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 3	2.01		0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	49.688.000	49.688.000,00	-	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 3	2.01		0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	152.724.000	385.284.000	364.314.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 4	0 3	2.01		0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	105.900.000	39.000.000	45.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 3	2.01		0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	100.298.000	100.298.000	150.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 3	2.01		0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	476.135.000	120.000.000	250.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2	1 4	0 3	2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang melakukan updating data	100%	167.749.000	67.200.000	82.200.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1 4	0 3	2.02		0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang	76.867.000	67.200.000	82.200.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2	1	0	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka Drop Out	<17.5%	2.920.202.098	1.468.580.884	253.402.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1	0	2.03	0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 Laporan	55.200.000	13.000.000	15.300.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2.03	0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	661 Orang	510.058.300	284.898.884	221.452.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2.03	0006		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	2.343.003.798	1.158.982.000,00	-	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Penugasan-Penur unan Stunting (KB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1	0	2.03	0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	11.940.000	11.700.000	16.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2	1	0	2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang menerima pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	507.592.000	293.282.000	70.950.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 4	0 3	2,04	0002		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7 Dokumen	-	-	3.707.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 3	2.04	0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	7 Kampung	507.592.000	293.282.000	67.243.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	2	1 4	0 4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	86,16 %	2.058.422.000	1.394.760.000	1.353.474.000				
	2	1 4	0 4	2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase angka kepesertaan sasaran dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS	32%	2.058.422.000	1.394.760.000	408.474.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1 4	0 4	2,01	0016		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Laporan / Dokumen	-	-	28.800.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 4	2.01	0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	517.777.000	60.960.000	79.674.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 4	0 4	2,01	0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	32 Unit	-	-	300.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 4	2.01	0024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Orang	1.335.988.000	1.333.800.000,00	-	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 4	2,02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase TPK Kelurahan dalam Mendampingi Keluarga Beresiko Stunting	70%	-	-	945.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	1 4	0 4	2,02	0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	-	-	450.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 4	0 4	2,02	0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	-	-	495.000.000	DAK Non Fisik-BO KKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	2	1 9					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			7.885.585.000	5.616.085.000	5.865.938.521				
	2	1 9	0 2				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	15 %	200.000.000	100.000.000	100.000.000				
	2	1 9	0 2	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	200.000.000	100.000.000	100.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1 9	0 2	2.01	0008		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	100 Orang	200.000.000	100.000.000	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 9	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	30 %	7.685.585.000	5.516.085.000	5.765.938.521				
	2	1 9	0 3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kualitas sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	100 %	4.900.585.000	3.706.085.000	3.706.085.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1 9	0 3	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	4.900.585.000	3.706.085.000	3.706.085.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	3 Event	1.460.000.000	450.000.000	699.853.521		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
3	2	1 9	0 3	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.460.000.000	450.000.000	699.853.521	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	1 9	0 3	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	1 9	0 3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	31 Orang	325.000.000	360.000.000	360.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 9	0 3	2.05	0001		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	325.000.000	360.000.000	360.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	2 3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.585.000.000	5.836.014.603	5.793.531.519				
2	2	2 3	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	5.171.985.181	4.846.514.603	4.784.695.320				
	2	2 3	0 1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100.000.000	30.000.000	30.000.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	2 3	0 1	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	100.000.000	30.000.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	3.838.593.181	3.966.514.603	3.934.318.155		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	2 3	0 1	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	3.838.593.181	3.966.514.603	3.934.318.155	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	2 3	0 1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	238.292.000	50.000.000	72.121.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	2 3	0 1	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	238.292.000	50.000.000	72.121.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	705.000.000	600.000.000	570.340.165		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
	2	2 3	0 1	2.08	0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	705.000.000	600.000.000	570.340.165	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	270.000.000	200.000.000	177.916.000		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	
3	2	2 3	0 1	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	80.000.000	80.000.000	77.644.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 1	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	120.000.000	51.000.000	51.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	2 3	0 1	2.09		0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	78 unit	70.000.000	69.000.000	49.272.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 2				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.95 %	1.355.000.000	909.500.000	928.836.199				
	2	2 3	0 2	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.9 %	370.000.000	365.000.000	365.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	2 3	0 2	2.01		0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	74 Layanan	300.000.000	295.000.000	295.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 2	2.01		0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	650 Eksemplar	70.000.000	70.000.000	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	2 3	0 2	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	20 kali	985.000.000	544.500.000	563.836.199		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	2 3	0 2	2.02		0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	212 Lokus	650.000.000	455.000.000	474.463.699	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	2 3	0 2	2.02		0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	110.000.000	89.500.000	89.372.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 3				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	37 %	230.000.000	80.000.000	80.000.000				
	2	2 3	0 3	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	178 eksemplar	230.000.000	80.000.000	80.000.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	2 3	0 3	2.01		0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	120.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	2 3	0 3	2.01		0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	110.000.000	30.000.000	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1	0 5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12.386.514.300	10.339.208.912	8.923.211.425				
	1	0 5	0 2				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	10.412.141.300	7.549.053.912	6.161.805.425				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	02	2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97 %	7.078.310.000	4.571.011.600	4.426.395.113		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	05	02	2.01	0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen	152.772.000	138.672.000	102.716.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	4.200.000.000	2.945.224.500	3.030.068.913	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Orang	712.875.000	375.989.100	383.500.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	912.663.000	466.019.000	395.939.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 5	0 2	2.01	0016		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	1.100.000.000	645.107.000	514.171.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2	1	0 5	0 2	2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	3.010.519.300	2.815.824.700	1.665.758.700		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 5	0 2	2.02	0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	2.288.638.100	1.967.199.900	1.133.741.100	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0 5	0 2	2.02	0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	721.881.200	848.624.800	532.017.600	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0 5	0 2	2.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	80 %	323.312.000	162.217.612	69.651.612		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
3	1	0 5	0 2	2.03	0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	323.312.000	162.217.612	69.651.612	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	0 5	0 4				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	1.974.373.000	1.386.141.000	1.386.141.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	04	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.774.373.000	1.384.773.000	1.384.773.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen	1.434.995.000	1.084.545.000	1.084.545.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	339.378.000	300.228.000	300.228.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
4	1	05	04	2.02			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	200.000.000	1.368.000	1.368.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.02	0001		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	6 Dokumen	200.000.000	1.368.000	1.368.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
5	1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	1.846.098.000	1.404.014.000	1.375.265.000				
	1	05	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	73.985.000	29.216.000	26.948.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 5	0 3	2.01	0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) Tahun	300 orang	73.985.000	29.216.000	26.948.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 5	0 3	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.494.715.000	1.211.858.000	1.134.461.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	1	0 5	0 3	2.02	0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 kawasan	54.441.000	29.217.000	27.484.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.02	0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 Orang	1.066.200.000	977.400.000	889.410.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.02	0009		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	50.000.000	48.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.02	0010		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang	58.854.000	26.551.000	42.204.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 5	0 3	2.02	0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 unit	54.045.000	9.542.000	9.542.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.02	0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 kawasan	161.175.000	119.148.000	117.821.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
7	1	0 5	0 3	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	155.075.000	92.600.000	93.410.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.03	0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 orang	116.550.000	82.650.000	83.460.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.03	0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	38.525.000	9.950.000	9.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	1	0 5	0 3	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	122.323.000	70.340.000	120.446.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	05	03	2.04		0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) Tahun	1 Dokumen	122.323.000	70.340.000	120.446.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			23.704.566.970	30.669.204.885	30.847.079.635				
	8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			23.704.566.970	30.669.204.885	30.847.079.635				
	8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	1.014.049.297	778.190.000	956.064.750				
	8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	7 jenis	1.014.049.297	778.190.000	956.064.750		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	8	01	02	2.01		0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125 Orang	290.049.297	328.190.000	328.190.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01		0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	724.000.000	450.000.000	627.874.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik kepada partai politik pemenang pemilu	100 %	18.800.062.030	18.375.563.500	18.375.563.500				
8	8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	80 %	18.800.062.030	18.375.563.500	18.375.563.500		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	8	01	03	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33 Orang	980.581.030	955.563.500	955.563.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	03	2.01		0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	125 Orang	34.353.000	10.000.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01		0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	17.785.128.000	17.410.000.000	17.410.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase status kelembagaan Orkemas	68 %	585.337.000	2.809.600.000	2.809.600.000				
	8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat keaktifan orkemas	75 %	585.337.000	2.809.600.000	2.809.600.000		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	01	04	2.01		0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	585.337.000	2.809.600.000	2.809.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	1.121.581.250	2.568.798.595	2.568.798.595				
	8	01	05	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	4 kali	1.121.581.250	2.568.798.595	2.568.798.595		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
9	8	01	05	2.01		0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	60.000.000	45.294.400	45.294.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01		0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	1.061.581.250	2.523.504.195	2.523.504.195	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	0 1	0 6				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	2.183.537.393	6.137.052.790	6.137.052.790				
	8	0 1	0 6	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	2.183.537.393	6.137.052.790	6.137.052.790		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	8	0 1	0 6	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	1.683.537.393	5.687.052.790	5.687.052.790	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0 1	0 6	2.01	0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000.000	450.000.000	450.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4 - Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2	0 8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3.113.440.803	1.828.226.128	1.667.896.715				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 2				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 %	1.636.275.500	894.439.599	690.003.099				
	2	0 8	0 2	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program yang di ARG	100 %	121.013.500	96.570.955	121.083.555		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
11	2	0 8	0 2	2.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	55.940.500	30.705.900	29.500.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 2	2.01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen	46.525.000	31.451.155	49.018.755	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 2	2.01	0003		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	9.635.000	24.497.405	32.647.405	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 2	2.01	0004		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	8.913.000	9.916.495	9.916.495	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 2	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	32,5 %	91.476.000	9.445.955	9.445.955		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 2	2.02	0001		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.946.000	9.445.955	9.445.955	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 2	2.02	0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	56.530.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 2	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	60 %	1.423.786.000	788.422.689	559.473.589		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2	08	02	2.03	0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang	1.266.944.900	767.340.103	538.961.003	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0003		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	156.841.100	21.082.586	20.512.586	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %	402.159.225	249.676.813	299.929.753				
	2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	100 %	205.868.335	55.528.500	83.789.640		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	08	03	2.01	0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	56.777.490	21.319.700	49.710.060	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0002		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	149.090.845	34.208.800	34.079.580	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 3	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	95 %	174.426.250	173.707.399	196.956.199		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 3	2.02	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	174.426.250	173.707.399	196.956.199	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 %	21.864.640	20.440.914	19.183.914		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 3	2.03	0003		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang	12.421.995	13.645.114	12.388.114	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 3	2.03	0004		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.442.645	6.795.800	6.795.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 4				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	30 %	370.890.700	211.671.527	210.271.527				
	2	0 8	0 4	2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	100 %	242.621.200	150.202.727	148.802.727		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 4	2.01	0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	101.415.200	59.305.727	57.905.727	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 4	2.01	0002		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	141.206.000	90.897.000	90.897.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 4	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100 %	128.269.500	61.468.800	61.468.800		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	08	04	2.02		0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	128.269.500	61.468.800	61.468.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 Dokumen	172.929.700	73.386.154	67.627.961				
	2	08	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 %	172.929.700	73.386.154	67.627.961		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	08	05	2.01		0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	96.059.000	0,00	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01		0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	76.870.700	73.386.154	67.627.961	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	42,20 %	438.450.000	326.795.688	326.795.688				
	2	08	06	2.01			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	38 %	64.200.000	59.474.369	59.474.369		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 6	2.01		0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	64.200.000	59.474.369	59.474.369	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 6	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	27 %	374.250.000	267.321.319	267.321.319		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 6	2.02		0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	24.250.000	16.983.948	16.983.948	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 6	2.02		0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	130.000.000	138.169.750	138.169.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 6	2.02		0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175.000.000	71.964.700	71.964.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 6	2.02		0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.000.000	40.202.921	40.202.921	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 7				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 %	92.735.678	72.256.347	73.268.687				
	2	0 8	0 7	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	69,50 %	28.235.700	21.183.822	21.183.822		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 7	2.01	0003		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	28.235.700	21.183.822	21.183.822	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 %	41.749.118	23.204.485	28.754.485		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 7	2.02	0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	10.350.000	9.466.000	15.016.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0 8	0 7	2.02	0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	31.399.118	13.738.485	13.738.485	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	0 8	0 7	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100 %	22.750.860	27.868.040	23.330.380		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	
	2	0 8	0 7	2.03	0005		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	22.750.860	27.868.040	23.330.380	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan (2024) Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusivitas Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

577.543.495.918 587.214.106.985

Prioritas 4 Penguatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	PAGU INDIKATIF			Sumber Dana	Prioritas		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				RKPD-P 2024	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD-P 2024		Nasional	Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	0 3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			146.872.266.000	119.798.671.672	113.870.485.932	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
2	1	0 3	0 2				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rawan banjir/genangan	17,34 %	13.464.112.400	12.272.930.000	12.580.676.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			
	1	0 3	0 2	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rawan Banjir/Genangan	17.34 %	13.464.112.400	12.272.930.000	12.580.676.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 2	2.01	0028		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	235.100.000	234.100.000	463.562.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 2	2.01	0085		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.080.880.000	1.080.880.000	1.390.980.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 2	2.01	0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.5 KM	9.022.332.400	7.832.150.000	7.600.334.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 2	2.01	0098		Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	2 Unit	3.125.800.000	3.125.800.000	3.125.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
3	1	0 3	0 3				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100 %	123.019.490	1.679.768.000	1.905.323.500				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 3	0 3	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	123.019.490	1.679.768.000	1.905.323.500		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 3	2.01	0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	123.019.490	620.088.000	786.635.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	0 3	0 3	2.01	0032		Peluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	-	1.059.680.000	1.118.688.500		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
4	1	0 3	0 6				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	80,12 %	19.399.879.400	11.155.429.400	12.352.748.400				
	1	0 3	0 6	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.12 %	19.399.879.400	11.155.429.400	12.352.748.400		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 6	2.01	0029		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	18 Sistem Drainase Perkotaan	16.210.400.000	7.965.950.000	8.443.117.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 6	2.01	0030		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	8 Dokumen	934.750.000	934.750.000	937.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 6	2.01	0031		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	12 Sistem Drainase Perkotaan	2.254.729.400	2.254.729.400	2.971.681.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	0 3	0 8				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung sesuai Ketentuan	100 %	20.055.958.000	22.076.333.314	23.584.359.814				
	1	0 3	0 8	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100 %	20.055.958.000	22.076.333.314	23.584.359.814		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 8	2.01	0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	8 Bangunan Gedung	200.000.000	200.000.000	352.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 8	2.01	0021		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	19.613.058.000	21.571.292.000	22.927.318.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 8	2.01	0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	50 Dokumen	242.900.000	305.041.314	305.041.314	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
6	1	0 3	0 9				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	21.846.810.878	24.585.636.000	22.045.832.500				
	1	0 3	0 9	2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan rawan banjir/genangan	17.34 %	21.846.810.878	24.585.636.000	22.045.832.500		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	0 9	2.01	0008		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	27 Kawasan	21.846.810.878	24.585.636.000	22.045.832.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
7	1	0 3	1 0				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	95.70%	69.379.016.832	45.212.224.958	38.554.253.532				
	1	0 3	1 0	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	95.70%	69.379.016.832	45.212.224.958	38.554.253.532		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0029		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	10 Dokumen	270.566.832	558.852.832	585.752.832	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun								
	1	0 3	1 0	2.01	0032		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	13.489.550.000	3.946.200.000	1.617.050.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0034		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	17 KM	18.511.100.000	18.995.600.000	17.157.476.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0038		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	120 Jembatan	226.750.000	219.750.000	279.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0040		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	31.784.750.000	14.715.062.126	10.225.020.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0041		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	2 KM	872.000.000	2.552.460.000	3.005.795.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	15 KM	408.600.000	408.600.000	406.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 0	2.01	0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	17 KM	3.815.700.000	3.815.700.000	5.277.909.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
8	1	0 3	1 1				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi	94,95 %	453.469.000	1.219.870.000	1.251.039.058				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Standart Kompetensi								
	1	0 3	1 1	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Kontruksi yang Memenuhi Standart Kompetensi	94,95 %	207.669.000	335.118.000	380.352.058		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 1	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	80 Orang	207.669.000	335.118.000	380.352.058	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	0 3	1 1	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	94.95 %	245.800.000	884.752.000	870.687.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 1	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	245.800.000	884.752.000	870.687.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
9	1	0 3	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100 %	2.150.000.000	1.596.480.000	1.596.253.128				
	1	0 3	1 2	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	1.350.000.000	800.000.000	800.000.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 2	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	800.000.000	800.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 2	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	400.000.000	396.480.000	396.480.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	0 3	1 2	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi	1 Dokumen	400.000.000	396.480.000	396.480.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							penyelenggaraan penataan ruang						Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	400.000.000	400.000.000	399.773.128		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	120 Dokumen	400.000.000	400.000.000	399.773.128	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			34.150.529.900	36.415.901.527	36.103.005.527				
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100%	2.422.750.000	1.922.750.000	1.922.750.000				
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dihasilkan	1 dokumen	118.950.000	118.950.000	118.950.000		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	118.950.000	118.950.000	118.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 lokasi	2.157.900.000	1.657.900.000	1.657.900.000		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 4	0 2	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 Unit Rumah	2.157.900.000	1.657.900.000	1.657.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	0 4	0 2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	145.900.000	145.900.000	145.900.000		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 4	0 2	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	145.900.000	145.900.000	145.900.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
3	1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	6%	6.441.590.000	17.746.222.000	17.433.326.000				
	1	0 4	0 3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0,50%	220.000.000	220.000.000	220.000.000		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 4	0 3	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	220.000.000	220.000.000	220.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	1	0 4	0 3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.50 %	6.221.590.000	17.526.222.000	17.213.326.000		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 4	0 3	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	192 Unit Rumah	2.686.200.000	2.708.700.000	2.708.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0 4	0 3	2.03		0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	12 Ha	3.535.390.000	14.817.522.000	14.504.626.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
4	1	0 4	0 5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	25.286.189.900	16.746.929.527	16.746.929.527				
	1	0 4	0 5	2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100%	25.286.189.900	16.746.929.527	16.746.929.527		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	0 4	0 5	2.01		0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	25.286.189.900	16.746.929.527	16.746.929.527	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1 0					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			205.792.250	805.792.250	805.792.250				
5	2	1 0	0 4				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	32.413.750	32.413.750	32.413.750				
	2	1 0	0 4	2.01			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	100%	32.413.750	32.413.750	32.413.750		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	1 0	0 4	2.01		0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.413.750	32.413.750	32.413.750	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
6	2	1 0	1 0				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase penatagunaan tanah	100%	173.378.500	773.378.500	773.378.500				
	2	1 0	1 0	2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalan satu daerah	100%	173.378.500	773.378.500	773.378.500		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
													Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		
	2	1 0	1 0	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	173.378.500	773.378.500	773.378.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.426.943.396	8.484.880.630	8.370.367.086				
2	2	1 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Data Perencanaan LH yang Tersedia	79,50 %	337.000.000	290.115.000	279.440.000				
	2	1 1	0 2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 0	148.000.000	126.310.000	119.440.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 2	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	148.000.000	126.310.000	119.440.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1 1	0 2	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi kajian Lingkungan Hidup yang tersedia	1 Dokumen	189.000.000	163.805.000	160.000.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 2	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	189.000.000	163.805.000	160.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
3	2	1 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50,10 %	1.721.003.971	1.198.230.630	1.246.691.086				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 1	0 3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	79 kegiatan / usaha	1.168.183.375	859.230.630	907.691.086		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 3	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	399.863.375	299.230.630	279.860.708	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 3	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	768.320.000	560.000.000	627.830.378	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1 1	0 3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	18 Usaha / Kegiatan	552.820.596	339.000.000	339.000.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 3	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	283.587.796	245.000.000	245.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	0 3	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik	269.232.800	94.000.000	94.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2	1	1	0	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 %	50.000.000	25.776.000	10.000.000				
	2	1	1	0	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	352 Spesies	50.000.000	25.776.000	10.000.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	0	4	2.01	0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	25.776.000	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
5	2	1	1	0	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	78 %	59.000.000	50.000.000	50.000.000				
	2	1	1	0	5	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	59.000.000	50.000.000	50.000.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	0	5	2.01	0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	59.000.000	50.000.000	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
6	2	1	1	0	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan	88,20 %	350.150.000	285.150.000	264.150.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)								
	2	1	1	0	6	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	18 perusahaan	350.150.000	285.150.000	264.150.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	0	6	2.01	0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	220.150.000	180.150.000	159.150.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	0	6	2.01	0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	130.000.000	105.000.000	105.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
7	2	1	1	0	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidiakan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat	100 %	756.416.000	695.209.000	715.786.000				
	2	1	1	0	8	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	10 kegiatan	756.416.000	695.209.000	715.786.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota								
	2	1 1	0 8	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	756.416.000	695.209.000	715.786.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
8	2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	309.000.000	249.000.000	247.000.000				
	2	1 1	1 0	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/Kota yang di selesaikan	5 kasus	309.000.000	249.000.000	247.000.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	1 0	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	159.000.000	129.000.000	127.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1 1	1 0	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara	150.000.000	120.000.000	120.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
9	2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah	71,5 %	7.844.373.425	5.691.400.000	5.557.300.000				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							sejenis sampah rumah tangga								
	2	1	1	1	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Dikelola	43.790 ton	7.639.373.425	5.586.600.000	5.452.500.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	41 Kelompok	199.000.000	99.000.000	99.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	2.423.973.425	2.081.200.000	2.547.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	5 Ton	750.000.000	560.000.000	468.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	32.280 Ton	4.266.400.000	2.846.400.000	2.338.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1	1	1	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang di bina dan diawasi	50 Kelompok	205.000.000	104.800.000	104.800.000		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lemba	3 Unit	205.000.000	104.800.000	104.800.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja						Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			8.880.210.971	6.749.689.691	6.817.887.490				
1	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	100 %	8.880.210.971	6.749.689.691	6.817.887.490				
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan	100 %	3.785.000.000	2.600.000.000	2.618.264.263		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	350.000.000	150.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	1.500.000.000	1.000.000.000	969.662.263	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1.935.000.000	1.450.000.000	1.498.602.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal berfungsi baik	100 %	200.000.000	150.000.000	150.000.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	200.000.000	150.000.000	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	1 5	0 2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Terselenggaranya Pelayanan Parkir	100 %	1.200.000.000	1.026.700.000	1.026.700.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2023) Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.200.000.000	1.026.700.000	1.026.700.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2023) Pembangunan Kualitas Infrastruktur Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan	
	2	1 5	0 2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus ijin	100 %	540.000.000	610.150.000	615.830.000		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	200.000.000	106.510.000	106.510.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	340.000.000	503.640.000	509.320.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1 5	0 2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah MRLL	160 MRLL	568.210.971	374.839.691	333.214.800		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk	6 Laporan	568.210.971	374.839.691	333.214.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi								
	2	1 5	0 2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kegiatan keselamatan	100 %	987.000.000	890.000.000	913.360.628		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4 Laporan	987.000.000	890.000.000	913.360.628	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	
	2	1 5	0 2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja angkutan	70 %	1.600.000.000	1.098.000.000	1.160.517.799		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1 5	0 2	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	1.600.000.000	1.098.000.000	1.160.517.799	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PP2 - Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berskualitas dan Berwawasan Lingkungan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tujuan, Sasaran dan Program Terhadap Capaian Kinerja Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan

NO			INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET 2024			Label
					2023	RPJMD 2019-2024	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
1			2	3	4	5			6
I			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
a			Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
	1		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	3,11-5,95	5,75	5,85	Indikator makro
	2		PDRB Per Kapita	juta	74,65*	70,15	80,43	80,43	Indikator makro
	3		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87*	6,44	6,89	6,89	Indikator Tujuan Kota
	4		Indeks Gini	Indeks	0,416	0,35	0,35	0,394	Indikator Tujuan Kota
	5		Angka Kemiskinan	%	4,74	4,55	4,45	4,45	Indikator sasaran kota
b			Fokus Kesejahteraan Sosial						
	1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83,71	82,35	82,35	83,71	Indikator Tujuan Kota
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
		1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	97,01%	94%	94%	94%	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87%	95%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	91,60%	92%	92%	92%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	21%	21%	21%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	58,33%	66%	66%	66%	Indikator Program PD
		6	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,87%	91%	91%	91%	Indikator Program PD
		7	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		8	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		9	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,57	94,51	94,51	94,51	Indikator tujuan kota
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	78,94	77,22	77,22	77,22	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD
		3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	13%	13,50%	13,50 %	13,50%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase anggaran sub kegiatan Tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	persentase keluarga yang berkualitas	%	89,90%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Prevalensi kekerasan terhadap anak	nilai	0,00036	0,002 nilai	0,002 nilai	0,002 nilai	Indikator Sasaran PD
		9	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		10	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	39,60%	30%	30%	30%	Indikator Program PD
		11	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokum en	1 dokume n	Indikator Program PD
		12	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		13	Prevalesi kasus kekerasan terhadap anak		0,00036	0,002	0,002	0,002	Indikator Program PD
		14	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,20%	42,20%	42,20 %	42,20%	Indikator Program PD
		15	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0126	0,04%	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
		1	Jumlah prestasi pemuda	Presta si	205	18 prestasi	18 presta si	18 prestasi	Indikator Tujuan PD
		2	Jumlah pemuda/ group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Pemud a/ group	80	32 pemuda/ group	32 pemud a/ group	32 pemuda / group	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Kualitas Sarpras	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		4	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	111%	30%	30%	30%	Indikator Program PD
		5	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	63%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
		1	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang terlestarikan	objek	65	67	67	67	Indikator Tujuan PD
		2	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang / group	231 orang / group	46 orang/ group	46 orang/ group	46 orang/ group	Indikator Sasaran PD
		3	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	objek	6	7	7	7	Indikator Sasaran PD
		4	persentase seni budaya yang dilestarikan	%	200%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		5	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		6	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
II			ASPEK PELAYANAN UMUM						
a			Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib						
	1		Terkait Pelayanan Dasar						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
		1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,16	11,67	11,67	Indikator sasaran kota
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,44	14,43	14,43	14,43	Indikator sasaran kota
		3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	68%	67%	67%	67%	Indikator Tujuan PD
		4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
		5	APM Paud, SD, dan SMP	%	105,48%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompetensi	%	68%	67%	67%	67%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Wajib belajar 9 Tahun	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	68%	25%	25%	25%	Indikator Program PD
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
		1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,44	72,83	73,13	73,13	Indikator sasaran kota
		2	Persentase Keluarga Sehat	%	57%	56%	57%	57%	Indikator tujuan PD
		3	Persentase rumah tangga sehat	%	71%	72,00%	65,50 %	65,50%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase rumah sehat	%	89,7%	90,00%	90,00 %	90,00%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	86,43%	63,00%	80,67 %	80,67%	Indikator Sasaran PD
		6	Indeks Keluarga Sehat	%	0,57	0,56	0,57	0,57	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	95,50%	92,00%	92,00 %	92,00%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	86,13%	85,00%	85,78 %	85,78%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	78%	78,00%	78,00 %	78,00%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	100,30%	100,00%	99,00 %	99,00%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase rata-rata IKM puskesmas se-Kota Madiun	%	87,66%	86,60%	86,6	86,6	Indikator Sasaran PD
		12	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	96,71%	88,11%	97,72 %	97,72%	Indikator Sasaran PD
		13	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	91,67%	75,00%	73,32 %	73,32%	Indikator Program PD
		14	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	95,5%	92%	92%	92%	Indikator Program PD
		15	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	88,5%	89%	91,00 %	91,00%	Indikator Program PD
		16	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	86,43%	63,00%	80,67 %	80,67%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		1	Indeks Ketentraman	Indeks	81,88	77,2	77,2	77,2	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
		2	Indeks Rasa Aman	Indeks	82,47	76,35	82,18	82,18	Lanjutan Indikator sasaran kota
		3	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	79,25	76,3	76,3	76,3	Indikator Tujuan PD
		4	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	98,95%	98%	98%	98%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	97%	97%	97%	97%	Indikator Program PD
		7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	108.85 indeks	112 indeks	112 indeks	112 indeks	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Jumlah Destana yang terbentuk	%	6 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	7 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase kesiapsiagaan masyarakat guna menurunkan korban dan kerugian material akibat bencana	%	0%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		10	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	0%	0%	0%	0%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
		1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	5,85	5	5	5	Lanjutan Indikator sasaran kota
		2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	407	30%	30%	30%	Indikator Tujuan PD
		3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
		4	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	48,90%	50%	50%	50%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	469	25%	25%	25%	Indikator Sasaran PD
		6	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	18,85%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	78,10%	35%	35%	35%	Indikator Program PD
		9	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	214	15%	15%	15%	Indikator Program PD
		10	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahan	%	30%	16%	16%	16%	Indikator Program PD
	II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	91,5	A-87	91,5	91,5	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,11	92,98%	92,98	92,98	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	100%	80,00%	100	100	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	100%	85%	100	100	Indikator Program PD
		5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	100%	94,75%	100	100	Indikator Program PD
		6	Akurasi database kependudukan	%	100%	99,20%	99,2	99,2	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
		1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,32	81,04	81,04	81,04	Indikator Tujuan PD
		2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	96,4	95,8	95,8	95,8	Indikator Sasaran PD
		3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	97	100	100	100	Indikator Program PD
		4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	80	80	80	80	Indikator Program PD
		5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	22	22%	22%	22%	Indikator Program PD
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		1	*Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional*	%	75,51%	64,00%	73,32 %	73,32%	Indikator Sasaran PD
		2	Menurunnya Unmet Need	%	4,73%	7,00%	6,74%	6,74%	Indikator Program PD
		3	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87,51%	83,00%	86,16 %	86,16%	Indikator Program PD
		4	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	13 SSK	9 SSK	11 SSK	11 SSK	Indikator Program PD
		5	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7 KAMPUNG KB	6 KAMPUNG KB	7 Kampung KB	7 Kampung KB	Indikator Program PD
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,45	2,90 (BAIK)	2,9	2,9	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
		2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	3,37	3,1	3,1	3,1	Indikator Tujuan PD
		3	Indeks Domain Manajemen SPBE		2,18	2,01	2,01	2,01	Indikator Tujuan PD
		4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	99,25	93	93	93	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	89%	82%	82%	82%	Indikator Program PD
		7	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
		1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	20	1	1	1	Indikator Program PD
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
		1	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		2	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	VIII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
		1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	3,095	2,46	2,46	2,46	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	18,47	9,1	9,1	9,1	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	35,84%	5,95%	5,95%	5,95%	Indikator Program PD
		4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	115%	38%	38%	38%	Indikator Program PD
	IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
		1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	87,6	59	59	59	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	15%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
		3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Skor	88,75 skor	90%	90%	90%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	98,3 skor	8,8	8,8	8,8	Indikator Program PD
	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
	I		Sekretariat Daerah						
		1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	A- (87.95)	(BB) 70,01	(BB) 70,01	(BB) 70,01	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
		2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Skor	A (80.08)	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	Lanjutan indikator sasaran kota
		3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komperehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
		4	Nilai Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi / Sangat Tinggi	2,98 (Sedang)	Sangat Tinggi	3,41 (Tinggi)	3,01 (sedang)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
		5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	88,028	86 (baik)	86,964	86,964	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
		6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	34.73 Istimewa	B	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
		7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	A	A	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD
		8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	78,57%	76%	76%	76%	Indikator Tujuan PD
		9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	II		Sekretariat DPRD						
		2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90.299	86	86	86	Indikator Tujuan PD
		4	Persentase Tertib Administrasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	90.299	82	85	85	Indikator Program PD
	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
	III		Perencanaan						
		1	Indeks Perencanaan	Indeks	34	36	36	36	Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	34	35	35	35	Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	33	35	35	35	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	94%	94%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	24	25,5	25,5	25,5	Indikator Sasaran PD
		6	persentase program penangan Covid-19 yang dilaksanakan	%	0	0	0	0	Indikator Sasaran PD
		7	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%	100%	94%	94%	94%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		9	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	IV		Keuangan						
		1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
		2	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	99%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengangggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	%	92%	80%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
		8	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		9	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		1	Capaian Target Pajak Daerah	%	114.143.313.127,67	100%	100% (Rp. 110.000.000.000)	100% (Rp. 110.000.000.000)	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	13%	5%	5%	5%	Indikator Tujuan PD
		3	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	%	10%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
		4	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	%	52%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	11%	10%	10%	10%	Indikator Program PD
		7	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	45%	43%	43%	43%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	IV		Kepegawaian						
		1	Indeks Sistem Merit	Indeks	285	250	250	250	Indikator Tujuan PD
		2	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ	%	63,22%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	%	100%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,12%	0,25%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,86	87,7	87,7	87,7	Indikator Program PD
	V		Pendidikan dan Pelatihan						
		1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan komptenesi sesuai PP 11 Thn 2017	%	36,26%	37%	37%	37%	Indikator Sasaran PD
		2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	16,10%	14%	14%	14%	Indikator Program PD
	VI		Penelitian dan Pengembangan						
		1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,62	1950	53,96	53,96	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
		2	Indeks kualitas penelitian/kajian	Indeks	36,6	36	36	36	Indikator Sasaran PD
		3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	%	85%	95%	95%	95%	Indikator Sasaran PD
		4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	%	95%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	VII		Inspektorat Daerah						
		1	Penilaian Mandiri SPIP	Skor	85,35	84	84	84	Indikator Tujuan PD
		2	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		3	Nilai IKM Inspektorat	Indeks	89,4	91 indeks	91 indeks	91 indeks	Indikator Sasaran PD
		4	Nilai Survey Kepuasan atas KInerja Inspektorat	Nilai	4,36	4.25	4.25	4.25	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Laporan BMD yang tersampikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		11	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	100%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
		12	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	100%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	100%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
		14	Persentase rekomendasi hasil	%	100%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
			reviu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah						
		15	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	83,1	81 nilai	81 nilai	81 nilai	Indikator Sasaran PD
		16	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	84,22	80,01	80,01	80,01	Indikator Sasaran PD
		17	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai		3.00	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
		18	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Indeks	3	3.00	3.00	3.00	Indikator Sasaran PD
		19	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
		20	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	94,36%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
		21	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	100%	70%	70%	70%	Indikator Sasaran PD
		22	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	3,51	4.00	4.00	4.00	Indikator Sasaran PD
		23	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	74%	80%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
		24	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	%	100%	80%	80%	80%	Indikator Sasaran PD
		25	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	%	100%	45%	45%	45%	Indikator Program PD
		26	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7		Unsur Kewilayahan						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	VIII		Kecamatan						
		1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	100%	66%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
		2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	66%	66%	66%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	100%	55%	55%	55%	Indikator Sasaran PD
		4	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks	4,91	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD
		5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks	4,55	2,99	2,99	2,99	Indikator Sasaran PD
		6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	4,78	3,7	3,52	3,52	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		11	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		13	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	92,45	90,03	90,03	90,03	Indikator Program

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	88,65	87,85	87,85	87,85	Indikator Program
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	92,	88,94	88,94	88,94	Indikator Program
		16	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		17	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		19	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		20	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
		21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program
	8		Unsur Pemerintahan Umum						
	IX		Kesatuan Bangsa dan Politik						
		1	Indeks Kerukunan	Indeks	B (77,80) (Harmoni)	B (75,00) (Harmonis)	75,68	75,68	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	persentase konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		4	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum	organi sasi	2 Organisas i	1 organisasi	1 organi sasi	1 organisa si	Indikator Sasaran PD
		5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	Kejadi an/ konflik	1	-10	-10	-10	Indikator Sasaran PD
		6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	70%	70%	70%	70%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		13	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	A		Kemampuan Ekonomi						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
		1	persentase Usaha Mikro yang beromset naik	%	20,00%	0,12%	0,12%	0,12%	Indikator Tujuan PD
		2	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	85%	87%	87%	87%	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	5%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	3,60%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	%	25%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	%	20%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	20,18%	8%	8%	8%	Indikator Program PD
		8	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertfikat NIK	%	98,59%	75,00%	75,00 %	75,00%	Indikator Program PD
		9	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	4,00%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Program PD
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
		1	ICOR	Poin		4,37			Indikator Tujuan PD
		2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	236 M	195 M	195 M	195 M	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	100%	85%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan Wali Kota yang terkait dengan investasi	rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	40%	39%	39%	39%	Indikator Program PD
		8	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	99.87%	95%	95%	95%	Indikator Program PD
		9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	126	100 perusahaan	115 perusahaan	115 perusahaan	Indikator Program PD
		10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						
		1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,31	1,35	1,35	1,35	Indikator Sasaran PD
		2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	285	290	290	290	Indikator Program PD
		3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/Tahun)	kg/ kapita /Tahun	17,8	15,9	15,9	15,9	Indikator Program PD
		4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	94,5	89	89	89	Indikator Program PD
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
		1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	543.207	450.000	450.000	450.000	Indikator Tujuan PD
		2	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Destinasi	35	30 destinaai	30 destinaai	30 destinaai	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	%	111,80%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah	%	175%	30%	30%	30%	Indikator Program PD
		5	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	%	111,80%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
		6	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	11,29%	20%	20%	20%	Indikator Program PD
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
		1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,4	1,221	1,221	1,221	Indikator Sasaran PD
		2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,14	1,16	1,16	1,16	Indikator Sasaran PD
		3	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	55	65	65	65	Indikator Program PD
		4	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	50	100	100	100	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		5	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	10	10	10	10	Indikator Program PD
		6	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	72	76	76	76	Indikator Program PD
		7	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	10	15	15	15	Indikator Program PD
		8	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	20	20	20	20	Indikator Program PD
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
		1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,60	3,16	7,98	7,98	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
		2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	24,7	1,02	21,57	21,57	Indikator Sasaran Kota
		5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	26,71	24,05	24,05	24,05	Indikator Tujuan PD
		6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	%	4,23	0,8	0,8	0,8	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase Layanan UTTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi	%	101,6%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	%	23,69%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
		9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
		1	persentase IKM yang berstandarisasi	%	82%	45%	45%	45%	Indikator Tujuan PD
		2	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	%	81,61%	85%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
		3	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	%	100,00%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		4	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi	%	100,00%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	persentase peningkatan IKM terpublikasikan	%	16,67%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	15,14%	10,00%	10,00 %	10,00%	Indikator Program PD
		7	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	9,38%	5%	5%	5%	Indikator Program PD
	B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur						
		1	Livable City (Indeks Kenyamanaan Kota)	Indeks	90,33	89,01	89,01	89,01	Indikator Tujuan Kota
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		1	Indeks Infrastruktur	Indeks	92,54	98,59	98,59	98,59	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	%	82,09%	82,82%	82,82 %	82,82%	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
		4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
		6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	95,52%	96%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
		7	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	95,52%	96%	96%	96%	Indikator Program PD
		8	Persentase rawan banjir/genangan	%	17,91	17,34	17,34	17,34	Indikator Program PD
		9	Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	81,01%	94,95%	94,95 %	94,95%	Indikator Program PD
		10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,10%	80,12%	80,12 %	80,12%	Indikator Program PD
		12	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
		1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	94,05	92,19	92,19	92,19	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,86	99,9	99,9	99,9	Lanjutan Indikator Sasaran PD
		3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Indeks	86,94	82,76	82,76	82,76	Lanjutan Indikator Sasaran PD
		4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	6,81%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan						
		1	persentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		3	persentase Penatagunaan Tanah	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
		1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,24	57,93	57,93	57,93	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,43	51,32	50	50	Indikator sasaran PD
		3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,43	83,26	84,17	84,17	Indikator sasaran PD
		4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	99,26%	99,00%	99,00 %	99,00%	Indikator sasaran PD
		5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	79,49%	79,50%	87,18 %	87,18%	Indikator Program PD
		6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	52,67%	50,10%	50%	50%	Indikator Program PD
		7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	Indikator Program PD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5			6
		8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	76%	78%	78%	78%	Indikator Program PD
		9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	76,76%	88,20%	88,20 %	88,20%	Indikator Program PD
		10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		11	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	160%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
		12	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	72,41%	71%	71%	71%	Indikator Program PD
		13	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	24,16	23	23	23	Indikator sasaran PD
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
		1	Kinerja ruas jalan	%	0,33	0,4	0,4	0,4	Indikator Tujuan PD
		2	Kecepatan lalu lintas	Km/ jam	41 km/jam	41 km/jam	41 km/jam	41 km/jam	Indikator Sasaran PD
		3	Kinerja Angkutan Umum	%	70%	43%	71%	71%	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	100%	96%	96%	96%	Indikator Program PD

Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 5. 5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah LPPD dan SPM
Terhadap Capaian Kinerja Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan

NO			INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	TARGET			Label
						RPJMD 2019-2024	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	
1			2	3	4	5	6	7	8
I			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
		1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		3	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	layanan	3	3	3	3	Lppd
		4	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1205	840	840	840	Lppd
		5	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	4 (PPT PPPA, SLRT, PKSAI dan LK3)	1 (PPT, SLRT)	1 (PPT, SLRT)	1 (PPT, SLRT)	Lppd
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1205	840	840	840	Lppd
		7	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	5	4	4	4	Lppd
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	1205	170	170	170	Lppd
		9	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2	2	2	2	Lppd
		10	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	195	60	60	60	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	29	20	20	20	Lppd
		12	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18	11	11	11	Lppd
		13	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1	1	1	1	Lppd
		14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	195	175	175	175	Lppd
		15	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	3	1	1	1	Lppd
		16	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	orang	421	70	70	70	Lppd
		18	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	4	2	2	2	Lppd
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	12	5	5	5	Lppd
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	195	111	111	111	Lppd
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	195	226	226	226	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	195	20	20	20	Lppd
		23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	43	66	66	66	Lppd
		24	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	58	3.300	3.300	3.300	Lppd
		25	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	58	1.000	1.000	1.000	Lppd
		26	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	0	0	0	Lppd
		27	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	58	0	0	0	Lppd
		28	Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	orang	58	300	300	300	Lppd
		29	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	255 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	175 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	Lppd
		30	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	117	100	100	100	Spm
		31	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	anak	613	470	470	470	Spm
		32	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	251	140	140	140	Spm
		33	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	orang	105	96	96	96	Spm
		34	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	orang	58	36	36	36	Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	32,88	30%	30%	30%	Lppd
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,0326	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	14,53	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
		4	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga	34	70	70	70	Lppd
		5	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	program	34	129	129	129	Lppd
		6	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2 media massa (Madiun Today, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	15	15	15	15	Lppd
		8	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		9	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	15	15	15	15	Lppd
		10	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	13	15	15	15	Lppd
		11	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	lembaga	1	30	30	30	Lppd
		12	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	45	45	45	45	Lppd
		13	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	lembaga	1	20	20	20	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		14	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	20	20	20	20	Lppd
		15	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan / Program	3	2	2	2	Lppd
		16	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Lembaga	1	1	1	1	Lppd
		17	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100%	100%	100%	Lppd
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
		1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	44,54	40,81%	40,81%	40,81%	Lppd
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,45	45,49%	45,49%	45,49%	Lppd
		3	Peningkatan prestasi olahraga	medali	6	36	36	36	Lppd
		4	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	78	100	100	100	Lppd
		5	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	0	100	100	100	Lppd
		6	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	78	100	100	100	Lppd
		7	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
		8	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158	158	158	158	Lppd
		9	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	6	4	4	4	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
		1	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	Lppd
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32	366	366	366	Lppd
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yangdikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32	366	366	366	Lppd
		4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32	366	366	366	Lppd
		5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	100	100	100	100	Lppd
		6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148	148	148	148	Lppd
		7	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20	20	20	20	Lppd
		8	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data	layanan	0	0	0	0	Lppd
		9	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2	2	2	2	Lppd
		10	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek	20	20	20	20	Lppd
		11	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	0	Lppd
		13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	0	Lppd
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	6	6	6	6	Lppd
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	orang	0	11	11	11	Lppd
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	orang	0	0	0	0	Lppd
		17	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	orang	0	0	0	0	Lppd
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	Lppd
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	Lppd
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	Lppd
II			ASPEK PELAYANAN UMUM						
a			Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib						
	1		Terkait Pelayanan Dasar						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						
		1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Peserta didik	5.395	3.750	3.750	3.750	Lppd
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Peserta didik	18.943	16.000	16.000	16.000	Lppd
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Peserta didik	9.489	7.250	7.250	7.250	Lppd
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Peserta didik	320	170	170	170	Lppd
		5	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	99	16	16	16	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		6	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	137	50	50	50	Lppd
		7	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	137	90	90	90	Lppd
		8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	01:12	01.13	01.13	01.13	Lppd
		9	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	429	460	460	460	Lppd
		10	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	401	455	455	455	Lppd
		11	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	99	12	12	12	Lppd
		12	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	66	70	70	70	Lppd
		13	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2750	2.658	2.658	2.658	Lppd
		14	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	3200	3.284	3.284	3.284	Lppd
		15	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	10766	11.000	11.000	11.000	Lppd
		16	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	8201	10.000	10.000	10.000	Lppd
		17	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:17	01.20	01.20	01.20	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		18	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:14	01.27	01.27	01.27	Lppd
		19	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1210	674	674	674	Lppd
		20	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	739	513	513	513	Lppd
		21	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:64	01.04	01.04	01.04	Lppd
		22	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:63	01.05	01.05	01.05	Lppd
		23	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	196	161	161	161	Lppd
		24	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	129	68	68	68	Lppd
		25	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1207	668	668	668	Lppd
		26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	735	696	696	696	Lppd
		27	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	85	73	73	73	Lppd
		28	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	27	23	23	23	Lppd
		29	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	orang	77	165	165	165	Lppd
		30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	orang	33	70	70	70	Lppd
		31	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	1	1	1	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		32	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	580	0	0	0	Lppd
		33	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	580	0	0	0	Lppd
		34	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01:15	01.30	01.30	01.30	Lppd
		35	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	40	30	30	30	Lppd
		36	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	39	30	30	30	Lppd
		37	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7	6	6	6	Lppd
		38	jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	28.432	26.301	26.301	26.301	spm
		39	jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	320	230	230	230	spm
		40	jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	5.395	3.750	3.750	3.750	spm
		41	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	89,06	1	1	1	spm
		42	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,29				spm
		43	Iklim Keamanan SD	Nilai	74,97				spm
		44	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	72,73				spm
		45	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58,94				spm
		46	Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	92,37				spm
		47	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,74				spm
		48	Iklim Keamanan SMP	Nilai	73,31				spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		49	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	70,88				spm
		50	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58,26				spm
		51	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Nilai	-				spm
		52	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Nilai	94,71				spm
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
		1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.450	2.450 Orang	2.450 Orang	2.450 Orang	Lppd/ Spm
		2	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.338	2.338 Orang	2.338 Orang	2.338 Orang	Lppd/ Spm
		3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2.227	2.227 Orang	2.227 Orang	2.227 Orang	Lppd/ Spm
		4	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9.081	9.081 orang	9.081 orang	9.081 orang	Lppd/ Spm
		5	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31.582	31.855 Orang	31.855 Orang	31.855 Orang	Lppd/ Spm
		6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	114.664	114.664 Orang	114.664 Orang	114.664 Orang	Lppd/ Spm
		7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	30.573	30.573 Orang	30.573 Orang	30.573 Orang	Lppd/ Spm
		8	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	42.970	68.973 Orang	68.973 Orang	68.973 Orang	Lppd/ Spm
		9	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	7.741	8.143 Orang	8.143 Orang	8.143 Orang	Lppd/ Spm
		10	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	339	339 Orang	339 Orang	339 Orang	Lppd/ Spm
		11	Jumlah warga negara terduga tuberculusis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	1.032	5.044 Orang	5.044 Orang	5.044 Orang	Lppd/ Spm
		12	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodefiviency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5.828	5.780 Orang	5.780 Orang	5.780 Orang	Lppd/ Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		13	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	5,81	0.48%	0.48%	0.48%	Lppd
		14	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	9	8	8	8	Lppd
		15	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		16	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	9	8	8	8	Lppd
		17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		18	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
		19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	497	330	330	330	Lppd
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	459	291	291	291	Lppd
		23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		24	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
		25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	458	289	289	289	Lppd
		26	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
		28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1.315	571	571	571	Lppd
		29	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		30	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
		31	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	3.240	371	371	371	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		32	Persentase orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		33	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		34	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	617	578	578	578	Lppd
		35	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		36	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		37	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1.201	1286	1286	1286	Lppd
		38	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	204	156	156	156	Lppd
		41	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		42	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
		43	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	218	169	169	169	Lppd
		44	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
		46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	64	30	30	30	Lppd
		47	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		48	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
		49	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	665	748	748	748	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		50	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
		52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	375	376	376	376	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	97%	97	97	Lppd
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	11	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
		5	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggar	2.102	2.000	2.000	2.000	Lppd
		6	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.300	1.300 orang	1.300 orang	1.300 orang	Lppd
		7	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	peraturan	79	76	76	76	Lppd
		8	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	3	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
		9	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	35	35 SOP	35 SOP	35 SOP	Lppd
		10	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jenis	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd
		11	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		12	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	1	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd
		13	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Shift	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	Lppd
		14	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	Lppd
		15	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	jenis	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	Lppd
		16	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	9	9 orang	9 orang	9 orang	Lppd
		17	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	22	22 orang	22 orang	22 orang	Lppd
		18	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	4	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
		19	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100	100%	100%	100%	Spm
		20	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100%	100%	100%	Spm
		21	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	141.874	845 orang	153,367 orang	153,367 orang	Lppd
		22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	905	50 orang	2,395 orang	2,395 orang	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		23	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	42	400 orang	156 orang	156 orang	Lppd
		24	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		25	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		26	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		27	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		28	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	34,3	5%	67,34%	67,34%	Lppd
		29	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	30,84	5%	58,67%	58,67%	Lppd
		30	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		31	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	Lppd
		32	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	Lppd
		33	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100%	0%	0%	Lppd
		34	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		35	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		36	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100%	100%	100%	Spm
		37	Jumlah Warga Negara yang memperolah Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100%	100%	100%	Spm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		38	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100%	100%	100%	Spm
	2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
		1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	69,23	76,92%	76,92%	76,92%	Lppd
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,03	68%	68%	68%	Lppd
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		10,748,101,00	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	Lppd
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	75,00%	75,00%	75,00%	Lppd
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	91,76	53%	53%	53%	Lppd
		6	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	1	1	1	Lppd
		7	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	%	0	0	0	0	Lppd
		8	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Perusahaan	0	15	15	15	Lppd
		9	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	70	30%	30%	30%	Lppd
		10	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	59	30%	30%	30%	Lppd
		11	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	10	50%	50%	50%	Lppd
		12	Persentase LPK yang terakreditasi	%	34	40%	40%	40%	Lppd
		13	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	41	100%	100%	100%	Lppd
		14	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang	237	230	230	230	Lppd
		15	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		16	Persentase penyerapan lulusan	%	73	20%	20%	20%	Lppd
		17	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	99	20%	20%	20%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		18	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0	25%	25%	25%	Lppd
		19	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0	25%	25%	25%	Lppd
		20	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0%	2%	2%	2%	Lppd
		21	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	65,00%	65,00%	65,00%	Lppd
		22	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	28,8	30%	30%	30%	Lppd
		23	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	62	30%	30%	30%	Lppd
		24	Rekapitulasi Tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tercatat	21 SP/SB	23	23	23	Lppd
		25	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	13	100%	100%	100%	Lppd
		26	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	75%	75%	75%	Lppd
		27	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2	3%	3%	3%	Lppd
		28	Jumlah mogok kerja	Pekerja	0	4	4	4	Lppd
		29	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	0	9	9	9	Lppd
		30	Jumlah perselisihan kepentingan	kasus	0	13	13	13	Lppd
		31	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Kasus	0	1	1	1	Lppd
		32	Jumlah perselisihan PHK	Kasus	13	13	13	13	Lppd
		33	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	98	40	40	40	Lppd
		34	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Kasus	15	50	50	50	Lppd
		35	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga	tidak ada	1	1	1	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		36	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100	70%	70%	70%	Lppd
		37	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	469	125	125	125	Lppd
		38	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	727	375	375	375	Lppd
		39	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	22	19	19	19	Lppd
		40	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	Lppd
		41	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	orang	2	1	1	1	Lppd
		42	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	0	0	0	0	Lppd
		43	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Perjanjian kerja	183	50	50	50	Lppd
		44	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	penempatan	0	0	0	0	Lppd
		45	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	0	10%	10%	10%	Lppd
		46	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	183	50	50	50	Lppd
		47	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Orang	0	0	0	0	Lppd
		48	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Orang	0	0	0	0	Lppd
		49	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	data	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		50	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	layanan	0	0	0	0	Lppd
	II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		1	Perekaman KTP elektronik	%	93,1	99,00%	99,00%	99,00%	Lppd
		2	Persentase anak usia 01-7 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	88,33	94,00%	94,00%	94,00%	Lppd
		3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,14	99,20%	99,20%	99,20%	Lppd
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	47,06	90,90%	90,90%	90,90%	Lppd
		5	Penerbitan akta perkawinan	%	100	99,30%	99,30%	99,30%	Lppd
		6	Penerbitan akta perceraian	%	100	99,30%	99,30%	99,30%	Lppd
		7	Penerbitan akta kematian	%	100	99,25%	99,25%	99,25%	Lppd
		8	Penyajian data kependudukan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	Lppd
		2	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		3	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		4	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		5	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
		6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	1	1	1	1	Lppd
		7	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
		8	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
		9	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,74	<7.7%	6,74%	6,74%	Lppd
		2	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,85				Lppd
		3	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Ada/ tidak	Ada	-	-	-	Lppd
		4	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 Tahun	Tahun	28	Wanita >21 Tahun	Wanita >21 Tahun	Wanita >21 Tahun	Lppd
		5	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	7,23	0,51	0,51	0,51	Lppd
		6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100,00%	100%	100%	Lppd
		7	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	27	16	16	16	Lppd
		8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	76,27	72,80%	73,32%	73,32%	Lppd
		9	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	97,78%	97,78%	97,78%	Lppd
		10	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,02	53,00%	53%	53%	Lppd
		11	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok Kerja	243	56	56	56	Lppd
		12	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	78,8	45,03%	45,03%	45,03%	Lppd
		13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,74				
		14	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	3,7	64,96%	64,96%	64,96%	Lppd
		15	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100	100%	100%	100%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
		1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	75%	75%	75%	Lppd
		2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	81,95%	80,00%	80,00%	Lppd
		3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	93,35	100%	100%	100%	Lppd
		4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		5	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		7	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		8	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		9	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100%	100%	100%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		10	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		11	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		12	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	85,7	25%	25%	25%	Lppd
		13	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		14	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	85	86%	86%	86%	Lppd
		15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		16	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		17	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		18	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		20	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		21	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		22	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		23	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		24	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
		1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		2	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		3	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	5	1	1	1	Lppd
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	5	1	1	1	Lppd
		5	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	20	1	1	1	Lppd
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	100	100%	100%	100%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	96	70%	70%	70%	Lppd
		2	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	0	0	0	0	Lppd
		3	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		4	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	85%	85%	85%	Lppd
		5	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	89,50%	89,50%	89,50%	Lppd
	VIII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	4,49	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,6	4,90%	4,90%	4,90%	Lppd
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,37	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	5 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
		4	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	orang	74.268	59%	59%	59%	Lppd
		5	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	83	10 eksemplar	10 eksemplar	10 eksemplar	Lppd
		6	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd
		7	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	koleksi	199	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	IX		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
		1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	9%	9%	9%	Lppd
		2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	9%	9%	9%	Lppd
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	6%	6%	6%	Lppd
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	55	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	5	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	29	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	34 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	19	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	30 arsip hasil alih media	Lppd
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	4	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Aturan	1	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
	I		Sekretariat Daerah						
		1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LPPD
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	34,51%	14,00%	14,00%	14,00%	LPPD
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	36,95%	30,00%	30,00%	30,00%	LPPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
	IV		Keuangan						
		1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	16,09	21,30%	15,00%	15,00%	Lppd
		2	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	2,17	2,50%	1,50%	1,50%	Lppd
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	76,29	63%	83,83%	83,83%	Lppd
		4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-6,65	80%	-23,70%	-23,70%	Lppd
		5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-2,39	103%	-73,96%	-73,96%	Lppd
		6	Manajemen Aset	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Lppd
		7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%	9	18%	10%	10%	Lppd
	V		Kepegawaian						
		1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,02	339%	223%	223%	LPPD
		2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,86	18%	18%	18%	LPPD
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	87%	87%	87%	LPPD
	6		Inspektorat Daerah						
		1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	Lppd
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	Lppd
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	A		Kemampuan Ekonomi						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
		1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	88	80,65%	80,65%	80,65%	Lppd
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	34	0,45%	0,45%	0,45%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		3	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	80%	80%	80%	Lppd
		4	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	Lppd
		5	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	33,97	16,13%	16,13%	16,13%	Lppd
		6	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	33,97	19,35%	19,35%	19,35%	Lppd
		7	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	42,95	96,77%	96,77%	96,77%	Lppd
		8	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	1,68	2,35%	2,35%	2,35%	Lppd
		9	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerahkabupaten/kota	%	1,29	22,58%	22,58%	22,58%	Lppd
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
		11	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	85,26	81,29%	81,29%	81,29%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	56	80,65%	80,65%	80,65%	Lppd
		13	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,29	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
		14	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	74,36	78,71%	78,71%	78,71%	Lppd
		15	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,29	1,29%	1,29%	1,29%	Lppd
		16	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,59	0,42%	0,42%	0,42%	Lppd
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,15	0,14%	0,14%	0,14%	Lppd
		19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,09	0,07%	0,07%	0,07%	Lppd
		20	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	2,15	0,28%	0,28%	0,28%	Lppd
		21	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,47	0,84%	0,84%	0,84%	Lppd
		22	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,47	0,12%	0,12%	0,12%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
		1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	2	0,52%	113,00%	113,00%	Lppd
		2	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
		3	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Do kumen	1	0	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
		4	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Do kumen	1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
		5	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		6	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	1	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		7	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	1	1 kali	1 kali	1 kali	Lppd
		8	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	30	285	285 konsultasi	285 konsultasi	Lppd
		9	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin	4.000	1800	4000	4000	Lppd
		10	Laporan realisasi penanaman modal	Milyar	236	195 M	195 M	195 M	Lppd
		11	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	4	15 orang	15 orang	15 orang	Lppd
		12	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Per usahaan	350	100 perusahaan	115 perusahaan	115 perusahaan	Lppd
		13	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1 buah	1 buah	1 buah	Lppd
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	379,5	381	381	381	Lppd
		2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	437	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
		3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		4	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		5	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	254	260	260	260	Lppd
		6	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	340	537.406 ekor	537.406 ekor	537.406 ekor	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
		1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	31,1	3%	3%	3%	Lppd
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	75,68	10%	10%	10%	Lppd
		3	Tingkat hunian akomodasi	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,7	5,20%	5,20%	5,20%	Lppd
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	55	266,10%	266,10%	266,10%	Lppd
		6	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		0	0	0	0	Lppd
		7	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Orang	704	704	704	704	Lppd
		8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	4556	950	950	950	Lppd
		9	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	5	5	5	5	Lppd
		10	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	0	Lppd
		11	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	kali	Belum ada	2 kali	2 kali	2 kali	Lppd
		12	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	%	18,68	20%	20%	20%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		13	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	0	3	3	3	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
		1	Produktivitas pertanian per hektar per Tahun	Ton/ ha	6,95	-	-	-	Lppd
		2	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	6	2	2	2	Lppd
		3	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	3	3 jenis	3 jenis	3 jenis	Lppd
		4	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	2	2	2	2	Lppd
		5	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	75	75	75	Lppd
		6	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	100	50	50	50	Lppd
		7	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	50	50	50	50	Lppd
	VI		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
		1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	52	100%	30%	30%	Lppd
		2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	98,34	100%	50%	50%	Lppd
		3	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		4	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :						
			a. Pusat perbelanjaan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
			b. Toko swalayan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		5	Persentase penerbitan TDG	%	100	100%	60%	60%	Lppd
		6	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	61,17	100%	60%	60%	Lppd
		7	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		8	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		9	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		10	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100	50%	100%	100%	Lppd
		11	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/ tidak	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
		12	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam Tahun berjalan	%	98,34	100%	50%	50%	Lppd
		13	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100	100%	100%	100%	Lppd
	VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
		1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	279,25	0,03%	0,03%	0,03%	Lppd
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	0,02%	0,02%	0,02%	Lppd
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	25%	25%	25%	Lppd
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0%	0%	0%	Lppd
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0	0%	0%	0%	Lppd
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah	4240	45%	45%	45%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		7	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0	0%	0%	0%	Lppd
		8	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	75	100%	100%	100%	Lppd
		9	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	96	50%	50%	50%	Lppd
		10	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	0%	0%	0%	Lppd
		11	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	3,56	1,20%	1,20%	1,20%	Lppd
	B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,78	79.47%	100%	100%	Lppd
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	1	0	0	0	Lppd
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	1	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	46,201	100%	100%	100%	Lppd
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	46,141	99%	99%	99%	Lppd
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	306	72,7	72,7	72,7	Lppd
		7	Tingkat kemantaban Jalan Kabupaten/ Kota	%	426,018	94,08%	94,08%	94,08%	Lppd
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	104	59%	59%	59%	Lppd
		9	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	612 ha	3,2 Km	3,2 Km	3,2 Km	Lppd
		10	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72,776	19.334 M	72,776	72,776	Lppd
		11	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Ha	0	0	0	0	Lppd
		12	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Ha	0	0	0	0	Lppd
		13	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada (1 dokumen)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		14	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada (18 dokumen)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		15	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	jumlah	77 (23 pintu air BBWS, 39 pintu air Kota, 15 pompa)	0	0	0	Lppd
		16	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
		17	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		18	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
		19	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		20	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		21	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Unit	1	1	1	1	Lppd
		22	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Izin	0	0	0	0	Lppd
		23	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Kerja sama	0	0	0	0	Lppd
		24	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	rumah	0	0	0	0	Lppd
		25	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	rumah	0	0	0	0	Lppd
		26	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	rumah	0	0	0	0	Lppd
		27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	Lppd
		28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	Lppd
		29	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	rumah	0	0	0	0	Lppd
		30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	0	100	100	100	Lppd
		31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%	0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		32	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%	0	0	0	0	Lppd
		33	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	0	0	0	0	Lppd
		34	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
		35	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
		36	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	%	0	0	0	0	Lppd
		37	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
		38	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		39	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun eksisting	Buah	255	425	250	250	Lppd
		40	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		41	Penetapan Keputusan Bupati/ Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
		43	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
		44	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	Lppd
		45	Jumlah bangunan gedung negara milik peerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	13	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Lppd
		46	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485	433,095 Km	433,095 Km	433,095 Km	Lppd
		47	Panjang jalan yang dibangun	km	2	0,4 km	0,4 km	0,4 km	Lppd
		48	Panjang jembatan yang dibangun	m	-	10 m	10 m	10 m	Lppd
		49	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	-	3,5 km	3,5 km	3,5 km	Lppd
		50	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	5	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		51	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	14,9	5 km	5 km	5 km	Lppd
		52	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0	0	0	0	Lppd
		53	Panjang jalan yang dipelihara	km	53	40 km	40 km	40 km	Lppd
		54	Panjang jembatan yang dipelihara	km	4,05	3,8 km	3,8 km	3,8 km	Lppd
		55	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	kali	0	3	3	3	Lppd
		56	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	264	130	80	80	Lppd
		57	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	264	30	80	80	Lppd
		58	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		59	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk Tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/ tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		60	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk Tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		61	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk Tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/ tidak	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		62	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		63	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		64	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		66	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Ada/ tidak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
		67	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
		68	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Lppd
		69	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Lppd
		70	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		71	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Lppd
		72	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Badan usaha	100	115	100	100	Lppd
		73	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota	usaha	0	0	0	0	Lppd
		74	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	70	50	50	50	Lppd
		75	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	100	100	100	100	Lppd
		76	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Komit men	0	30	30	30	Lppd
		77	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	pengawasan	0	50	50	50	Lppd
		78	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Kejadi an	0	0	0	0	Lppd
		79	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	0	100	100	100	Lppd
		80	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	SPM
		81	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,87	90	90	90	SPM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
	II		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
		1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	rumah	0	0	0	0	lppd
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	KK	105	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	6,81	100%	100%	100%	lppd
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	110	100 unit	100 unit	100 unit	lppd
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	50	50	50	lppd
		6	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	rumah	0	0	0	0	lppd
		7	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	rumah	0	0	0	0	lppd
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	lppd
		9	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
		10	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
		11	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
		12	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	unit	0	0	0	0	lppd
		13	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	orang	0	0	0	0	lppd
		14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		15	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		16	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		17	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	105	105 KK	105 KK	105 KK	lppd
		18	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
		19	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Ha	0	0	0	0	lppd
		20	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	199,81	0 ha	0 ha	0 ha	lppd
		21	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	110	100 unit	100 unit	100 unit	lppd
		22	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	14,62	0 ha	0 ha	0 ha	lppd
		23	Jumlah rumah di kab/kota	unit	46.201	42.479	42.479	42.479	lppd
		24	Jumlah unit PK RTLH	unit	110	100 unit	100 unit	100 unit	lppd
		25	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	130	40 unit	40 unit	40 unit	lppd
		26	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	lppd
		27	Rasio rumah dan KK	%	116,03	170%	170%	170%	lppd
		28	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	158	50	50	50	lppd
		29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit perumahan	41	50	50	50	lppd
		30	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6.821	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
		31	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6.821	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
		32	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6.821	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
		33	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit perumahan	41	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd
		34	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6.821	5948 unit	5948 unit	5948 unit	lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		35	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	pengembang	41	50	50	50	lppd
		36	Jumlah pengembang yang terregistrasi	pengembang	41	50	50	50	lppd
		37	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	pengembang	41	50	50	50	lppd
		38	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	0	Spm
		39	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	spm
	III		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan						
		1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	4.196,02	30,52 ha	30,52 ha	30,52 ha	Lppd
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	lokasi	0	0	0	0	Lppd
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	Lppd
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	Lppd
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	5	2	2	2	Lppd
		7	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Do kumen	0	1	1	1	Lppd
		8	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		0	0	0	0	Lppd
		9	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		0	0	0	0	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		10	Dokumen Izin membuka tanah		0	0	0	0	Lppd
		11	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	Lppd
	IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
		1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99	99,00%	99,00%	99,00%	Lppd
		2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		3	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
		4	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,603	1,602	1,603	1,603	Lppd
		5	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	6,25	5,98	5,98	5,98	Lppd
		6	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	Ada/ tidak ada	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd
		7	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	88,20%	88,20%	88,20%	Lppd
		8	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	ada	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
		9	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Ada/ tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		10	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Ada/ tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
		11	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100	100%	100%	100%	Lppd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1			2	3	4	5	6	7	8
		12	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	100	100%	100%	100%	Lppd
	V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
		1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	1	-	-	-	Lppd
		2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,33	0,4	0,4	0,4	Lppd
		3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		4	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		5	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100	100%	100%	100%	Lppd
		6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100%	100%	100%	Lppd

Sumber : Bapppeda Kota Madiun, data diolah, 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kota Madiun disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 memuat perubahan pendapatan dan belanja pada masing-masing urusan, yang terangkum dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Sehingga diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan dan kebutuhan daerah akan sinkronisasi serta harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka Rancangan Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 yang telah tersusun ini digunakan sebagai pedoman untuk:

1. Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2024 agar tercapai keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Madiun Tahun 2024;
3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun 2024; dan
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun Tahun 2024 secara berkala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk Tahun-Tahun berikutnya. Dengan ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN